



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024-2026



**BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 84 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

✓

- Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian;
2. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Pembangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
6. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tujuan dari RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengetahui kondisi kemiskinan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

h

- b. Merumuskan konsep pemahaman kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan menentukan intervensi kebijakan yang tepat dalam penanggulangannya.
- c. Menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah yang ada di daerah.
- d. Mendorong sinergi dan penyelarasan serta memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat dan pihak yang peduli terhadap kemiskinan.
- e. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- f. Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan
- g. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana Kelurahan/dana kelurahan.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPKD

Pasal 3

- (1) RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penaggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggaranya.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah
 - c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
 - d. BAB IV : Prioritas Program
 - e. BAB V : Lokasi Prioritas
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

h

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal, 23 Agustus 2024



Diundangkan di Kefamenanu
Pada tanggal 23 Agustus 2024

W SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, P

W FRANSISKUS B. FAY, S.Pt, M.Si



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Capaian indikator tersebut masih lebih rendah dari capaian nasional. Secara kewilayahan kantong kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara tersebar di 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk itu salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrim. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara harus dilaksanakan secara holistik, komprehensif serta berdasarkan data by name by address yang valid dan update. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur baik itu pemerintah, masyarakat, swasta, dan lain lain. RPKD ini memuat analisis masalah baik kemiskinan konsumsi maupun non konsumsi, analisis intervensi (akar masalah), prioritas program dan prioritas wilayah. Selanjutnya RPKD ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan RPKD Kabupaten Timor Tengah Utara 2024-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Kefamenanu, 23 Agustus 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA



Drs. JUANDI DAVID



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GRAFIK.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR TABEL	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum dan kebijakan operasional	I.2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I.3
1.4. Peran TKPK dalam Penyusunan RPKD	I.3
1.5. Sistematika Penulisan	I.4
BAB II KONDISI UMUM DAERAH	II.1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II.1
2.1.1. Geografis dan Wilayah Administrasi	II.1
2.1.2. Kependudukan-Demografi.....	II.5
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II.6
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.13
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.14
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II.20
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II.24
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II.24
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....	III.1
3.1. Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara	III.1
3.1.1. Kondisi Kemiskinan Makro	III.1
3.1.2. Kondisi Kemiskinan Mikro Kabupaten Timor Tengah Utara.....	III.6
3.2. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi	III.13
3.2.1. Persentase Penduduk Miskin (P0).....	III.13
3.2.2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	III.16
3.2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	III.18
3.2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	III.21
3.2.5. Garis Kemiskinan	III.23
3.3. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Non-Konsumsi	III.26
3.3.1. Bidang Pendidikan	III.26
3.3.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	III.26
3.3.1.2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	III.29
3.3.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.....	III.31
3.3.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	III.34
3.3.1.5. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	III.36
3.3.1.6. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	III.38
3.3.1.7. Rerata Kemampuan Literasi SD/MI.....	III.41
3.3.1.8. Rerata Kemampuan Numerasi SD/MI	III.43
3.3.1.9. Rerata Kemampuan Literasi SMP/MTs	III.45
3.3.1.10. Rerata Kemampuan Numerasi SMP/MTs.....	III.46
3.3.2. Bidang Kesehatan.....	III.50
3.3.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB).....	III.50



3.3.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI).....	III.52
3.3.2.4. Prevalensi Stunting.....	III.55
3.3.2.5. Umur Harapan Hidup (UHH).....	III.57
3.3.3. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan.....	III.60
3.3.3.1. Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	III.60
3.3.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	III.63
3.3.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Ketahanan Pangan	III.66
3.3.4.1. Indeks Ketahanan Pangan	III.66
3.3.4.2. Produktifitas Produksi Padi (Ton)	III.69
3.3.4.3. Produktifitas Produksi Jagung (Ton)	III.71
3.3.4.4. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	III.71
3.3.4.5. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	III.73
3.3.5. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar	III.74
3.3.5.1. Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sanitasi Layak.....	III.74
3.3.5.2. Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak.....	III.76
3.3.5.3. Cakupan Rumah Layak Huni	III.79
BAB IV PRIORITAS PROGRAM.....	IV.1
4.1. Analisis Akar Masalah Determinan Kemiskinan.....	IV.1
4.1.1. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Konsumsi	IV.1
4.1.2. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan	IV.4
4.1.3. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan	IV.6
4.1.4. Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	IV.8
4.1.5. Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan	IV.9
4.1.6. Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar	IV.11
4.2. Analisis Kondisi Fiskal	IV.13
4.2.1. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	IV.13
4.2.2. Pendapatan Daerah	IV.15
4.2.3. Belanja Daerah	IV.15
4.2.4. Pembiayaan Daerah	IV.16
4.2.5. Kemandirian Fiskal	IV.17
4.3. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi	IV.19
4.4. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	IV.20
4.5. Program Penanggulangan Kemiskinan	IV.22
BAB V LOKASI PROGRAM	V.1
5.1. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan	V.1
5.2. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan	V.4
5.3. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan	V.5
5.4. Prioritas Wilayah Bidang Ketahanan Pangan	V.7
5.5. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur	V.8



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018–2022	II.14
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018- 2022	II.15
Grafik 2.3	PDRB Per Kapita di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018 -2022	II.15
Grafik 2.4	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Kelautan terhadap PDRB Tahun 2022	II.16
Grafik 2.5	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2022	II.16
Grafik 2.6	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2022.....	II.17
Grafik 2.7	Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2022..	II.19
Grafik 2.8	Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2022	II.19
Grafik 2.9	Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2022	II.20
Grafik 2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 – 2022	II.22
Grafik 2.11	Realisasi Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022	II.22
Grafik 2.12	Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Timor Tengah Utara..	II.23
Grafik 2.13	Capaian ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Tahun 2018 – 2022	III.24
Grafik 3.1	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.2
Grafik 3.2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.3
Grafik 3.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.3
Grafik 3.4	Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.4
Grafik 3.5	Garis Kemiskinan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Utara Tahun 2019-2023	III.5
Grafik 3.6	Persentase Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2023	III.7
Grafik 3.7	Individu berdasarkan kelompok usia Kabupaten Timor Utara.....	III.10
Grafik 3.8	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.14
Grafik 3.9	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.14
Grafik 3.10	Analisis Efektifitas Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.15
Tabel 3.11	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahun 2019-2023.....	III.16
Grafik 3.12	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.....	III.16



Grafik 3.12. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.17
Grafik 3.14 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.18
Grafik 3.15 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.19
Grafik 3.16 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.19
Grafik 3.17 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.20
Grafik 3.18 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.21
Grafik 3.19 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.21
Grafik 3.20 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.22
Grafik 3.21 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.22
Grafik 3.22 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.23
Grafik 3.23 Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.24
Grafik 3.24 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.24
Grafik 3.25 Analisis Efektivitas Garis Kemiskinan (Rp) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.25
Grafik 3.26 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.25
Grafik 3.27 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.27
Grafik 3.28 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.27
Grafik 3.29 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.28
Grafik 3.30 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.28
Grafik 3.31 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Tenggara Timur Tahun 2023	III.29
Grafik 3.32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.30
Grafik 3.33 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.30
Grafik 3.34 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.32
Grafik 3.35 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.32
Grafik 3.36 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) di	



	Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.33
Grafik 3.37	Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.33
Grafik 3.38	Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.34
Grafik 3.39	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.34
Grafik 3.40	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.33
Grafik 3.41	Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, 2019-2023	III.33
Grafik 3.42	Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.36
Grafik 3.43	Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.37
Grafik 3.44	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.37
Grafik 3.45	Analisis Efektivitas Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.38
Grafik 3.46	Analisis Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.39
Grafik 3.47	Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.41
Grafik 3.48	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.40
Grafik 3.49	Analisis Efektivitas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.40
Grafik 3.50	Relevansi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.41
Grafik 3.51	Posisi Relatif Rerata Kemampuan Literasi SD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.42
Grafik 3.52	Perkembangan Antar Waktu Rerata Kemampuan Literasi SD, di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023.....	III.43
Grafik 3.53	Analisis Efektifitas Rerata Kemampuan Literasi SD di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023	III.43
Grafik 3.54	Posisi Relatif Kemampuan Nuerasi SD/Mi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.44
Grafik 3.55	Perkembangan Rerata Kemampuan Numerasi SD/Mi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023.....	III.44
Grafik 3.56	Analisis Efektifitas Rerata Kemampuan Numerasi SD/Mi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023.....	III.45
Grafik 3.57	Posisi Relatif Rerata Kemampuan Leterasi SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.45
Grafik 3.58	Perkembangan Antar Waktu Rerata Kemampuan Leterasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023.....	III.46
Grafik 3.59	Efektifitas Rerata Kemampuan Leterasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023	III.46



Grafik 3.60 Posisi Relatif Numerasi SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.....	III.47
Grafik 3.61 Perkembangan Antar Waktu Numerasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023	III.47
Grafik 3.62 Analisis Efektifitas Numerasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023	III.48
Grafik 3.63 Posisi Relatif Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.50
Grafik 3.64 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	III.51
Grafik 3.65 Analisis Efektivitas Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	III.52
Grafik 3.66 Analisis Relevansi Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	III.52
Grafik 3.67 Posisi Relatif Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.....	III.53
Grafik 3.68 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.54
Grafik 3.69 Analisis Efektivitas Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.54
Grafik 3.70 Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.56
Grafik 3.71 Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.56
Grafik 3.72 Analisis Efektivitas Balita Stunting (%) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.57
Grafik 3.73 Relevansi Perkembangan Balita Stunting (%) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.57
Grafik 3.74 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2023.....	III.58
Grafik 3.75 Perkembangan Antar Waktu Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.58
Grafik 3.76 Analisis Efektivitas Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.59
Grafik 3.77 Analisis Relevansi Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.59
Grafik 3.78 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.61
Grafik 3.79 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.62
Grafik 3.80 Analisis Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.62
Grafik 3.81 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.63
Grafik 3.82 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Timor Tengah Utara 2023.....	III.64
Grafik 3.83 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Timor	



Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.64
Grafik 3.84 Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.65
Grafik 3.85 Relevansi Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.65
Grafik 3.86 Posisi Relatif Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2023.....	III.67
Grafik 3.87 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.68
Grafik 3.88 Efektivitas Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.68
Grafik 3.89 Analisis Relevansi Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.69
Grafik 3.90 Posisi Relatif Produktivitas Produksi Padi (Ton) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.69
Grafik 3.91 Perkembangan Produktivitas Produksi Padi (Ton) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.70
Grafik 3.92 Efektivitas Produktivitas Produksi Padi (Ton) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023	III.70
Grafik 3.93 Perkembangan Antar Waktu Produksi Jagung (Ton) di Tengah Kabupaten Timor Utara, Tahun 2019-2023	III.71
Grafik 3.94 Analisis Efektivitas Produksi Jagung (Ton) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.71
Grafik 3.95 Perkembangan Antar Waktu Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	III.72
Grafik 3.96 Analisis Efektifitas Produkasi Perikanan Tangkap Kabupaten di Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.72
Grafik 3.97 Perkembangan Antar Waktu Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	III.73
Grafik 3.98 Analisis Efektifitas Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	III.73
Grafik 3.99 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	III.74
Grafik 3.100 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.75
Grafik 3.101 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	III.75
Grafik 3.102 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	III.76
Grafik 3.103 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.....	III.77
Grafik 3.104 Analisis Perkembangan Antar Waktu Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2018-2022	III.77
Grafik 3.105 Analisis Efektivitas Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2018-2022	III.78
Grafik 3.106 Analisis Relevansi Perkembangan Rumah Tangga dengan Air Minum	



Layak Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2018-2022.....	III.78
Grafik 3.107 Perkembangan Antar Waktu Cakupan Rumah Layak Huni Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	III.79
Grafik 3.108 Analisis Efektifitas Waktu Cakupan Rumah Layak Huni Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	III.79
Grafik 4.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	IV.15
Grafik 4.2. Perbandingan Komposisi Pendapatan Terhadap APBD Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.....	IV.18
Grafik 4.3. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara.....	IV.19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Timor Tengah Utara	II.3
Gambar 4.1	Teori Perubahan (ToC) Kemiskinan Konsumsi.....	VI.3
Gambar 4.2	Analisis Preoritas Intervensi Kemiskinan Konsumsi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	VI.4
Gambar 4.3	Teori Perubahan (ToC) untuk Bidang Pendidikan.....	VI.5
Gambar 4.4	Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	VI.6
Gambar 4.5	Teori Perubahan (ToC) untuk Bidang Kesehatan	VI.7
Gambar 4.6	Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	VI.8
Gambar 4.7	Teori Perubahan (TOC) Bidang Ketenagkerjaan.....	VI.9
Gambar 4.8	Analisis Prioritas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	VI.10
Gambar 4.9	Teori Perubahan (TOC) Bidang Ketahanan Pangan.....	VI.10
Gambar 4.10	Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara 2019-2023.....	VI.11
Gambar 4.11	Teori Perubahan (TOC) Bidang Infrastruktur Dasar	VI.12
Gambar 4.12	Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Timor Tengah Utara 2019-2023.....	VI.12
Gambar 5.1	Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun Terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang bersekolah SD dan SMP.....	V.1
Gambar 5.2	Analisis Kuadran Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang tidak/belum bersekolah SD dan SMP	V.3
Gambar 5.3	Analisis Kuadran Jumlah Keluarga Desil 1 terhadap Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting	V.4
Gambar 5.4	Analisis Kuadran Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun yang tidak bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun	V.7
Gambar 5.5	Analisis Kuadran Jumlah Keluarga Desil 1 yang tidak memiliki Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Keluarga Desil 1	V.9
Gambar 5.6	Analisis Kuadran Jumlah Keluarga Desil 1 Terhadap Jumlah Keluarga Desil yang tidak memiliki tempat Buang Air Besar.	V.10



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara	11.1
Tabel 2.2.	Nama dan Panjang Sungai Utama Menurut Kecamatan.....	II.4
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022	II.6
Tabel 2.4	Capain Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022	II.13
Tabel 2.5	Patokan Nilai Koefisien Gini	II.18
Tabel 2.6	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2019-2022	II.20
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Miskin Kategori Miskin Ekstrem Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023, Desil 1-3	III.6
Tabel 3.2	Jumlah Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Desil 1 s/d Desil 4	III.8
Tabel 3.3	Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia Desil 1- 4 (Data Tahun 2022) Desil 1 sampai Dengan Desil 4.....	III.11
Tabel 3.4	Jumlah Individu yang Bekerja dan Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Timor Tengah Utara	III.13
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten, Provinsi dan Nasional	III.18
Tabel 3.6	Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi	III.26
Tabel 3.7	Enam Kategori Pengukuran Kemampuan Literasi dan Numerasi	III.41
Tabel 3.8	Masalah Bidang Pendidikan	III.48
Tabel 3.9	Masalah Bidang Kesehatan.....	III.60
Tabel 3.10	Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Ketenagakerjaan	III.66
Tabel 3.11	Masalah Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	III.74
Tabel 3.12	Masalah Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar	III.80
Tabel 4.1	APBD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018 – 2022.....	IV.14
Tabel 4.2	Tabel Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2022	IV.15
Tabel 4.3	Tabel Belanja APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018 – 2022.....	IV.16
Tabel 4.4.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2022	IV.17
Tabel 4.5	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2022	IV.18
Tabel 4.6	Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara,	



Tahun 2018-2022.....	IV.19
Tabel 4.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara.....	IV.19
Matriks 4.1 Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026.....	IV.23
Tabel 5.1 Lokasi Prioritas Jumlah Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun Terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang Bersekolah SD dan SMP.....	V.2
Tabel 5.2 Lokasi Prioritas Jumlah Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun Terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang tidak/belum Bersekolah SD dan SMP.....	V.3
Tabel 5.3. Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 terhadap Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting	V.5
Tabel 5.4. Lokasi Prioritas Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun yang Tidak Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun	V.7
Tabel 5.5. Lokasi Prioritas Jumlah Keluarga Desil 1 yang Tidak Memiliki Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Keluarga Desil 1	V.9
Tabel 5.6. Lokasi Prioritas Jumlah Keluarga Desil 1 yang Tidak Memiliki Tempat Buang Air Besar terhadap Jumlah Keluarga Desil 1	V.10



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan selalu menjadi isu yang mendapat perhatian serius baik dalam skala global, nasional hingga lokal. Isu kemiskinan selalu dikaitkan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan miskin bila pengeluaran perkapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Sebagai salah satu aspek penilaian kualitas pembangunan dan peningkatan ekonomi suatu wilayah, permasalahan kemiskinan menjadi sebuah isu prioritas yang harus ditanggulangi. Banyaknya penduduk miskin menunjukkan suatu konsep perencanaan dan pembangunan belum menyentuh perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan semua masyarakat. Untuk itu, strategi perencanaan dan pembangunan yang tepat sasaran dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Urgensitas permasalahan kemiskinan menginisiasi Pemerintah dalam menetapkan Kebijakan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dalam Pembangunan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025, di mana pelaksanaannya dijabarkan dalam RPJMD 2014 – 2019 dan dilanjutkan pada RPJMN 2020 – 2024 yaitu penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit. Dalam agenda pembangunan nasional, masalah kemiskinan merupakan bagian dari dua konsekuensi penting adanya pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan provinsi NTT harus masuk dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian indikator sasaran dari tujuh (7) prioritas pembangunan daerah provinsi NTT dengan mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dari 21,35 % pada tahun 2018 menjadi pada level 12 % pada tahun 2023.

Menanggapi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara, telah dikeluarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 73/KEP/HK/I/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023. Akan tetapi, kehadiran TKPKD belum memberikan dampak yang signifikan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin, yaitu jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki persentase penduduk miskin sebesar 21,85%. Persentase ini mengindikasikan proporsi penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini cukup tinggi, menunjukkan bahwa sekitar 21,85% dari penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara berada dalam kondisi kemiskinan. Dalam konteks perbandingan, data



persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan adalah 19,96%. Artinya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bila disandingkan dengan persentase penduduk miskin dalam skala nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara jauh lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin secara nasional (9,36%).

Tantangan pengentasan kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara dimulai dari sektor pendidikan. Mayoritas masyarakat Timor Tengah Utara berijazah terakhir SD/Sederajat. Latar belakang kualifikasi pendidikan ini tentunya berpotensi menciptakan pengangguran. Hal ini relevan dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Timor Tengah Utara yang tinggi.

Berdasarkan data yang diakses dari p3ke.kemenko.go.id, jumlah individu yang tidak berkerja yaitu 356.963 orang. Kelompok masyarakat ini menjadi yang paling rentan untuk masuk dalam kategori miskin. Sehingga, penciptaan lapangan kerja menjadi kebutuhan yang urgen di Timor Tengah Utara untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dari segi pekerjaan.

Mayoritas masyarakat miskin Timor Tengah Utara bekerja pada sektor pertanian yaitu 50.782 orang (data P3KE, Kemenko, 2023). Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang lambat dengan daya saing yang rendah berdampak pada banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan petani dan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi potensial (RPJMD Timor Tengah Utara, 2021-2026).

Dari semua uraian diatas diperlukan kehadiran sebuah dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang menjadi basis rujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Signifikansi kehadiran dokumen ini yaitu memberikan informasi dan pemahaman tentang kemiskinan di khususnya terkait tingkat kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, serta karakteristik dan kebutuhan kelompok-kelompok yang berisiko menjadi miskin. Selain itu juga menetapkan tujuan dan sasaran dalam mengurangi kemiskinan, menetapkan strategi dan kegiatan untuk mengatasi kemiskinan, dan mengukur kinerja dalam mengurangi kemiskinan. RPKD juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kerja sama antara berbagai pihak dalam mengatasi kemiskinan di Timor Tengah Utara. Mengingat kemiskinan memiliki karakteristik multidimensi dengan karakteristik lokal yang sangat kuat maka kehadiran RPKD menjadi dokumen strategis dalam menggambarkan persoalan kemiskinan, ketimpangan dan kerentanan secara komprehensif.

1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;



4. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian;
7. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026;
11. Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 73/KEP/HK/I/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya dokumen RPKD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi kemiskinan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Merumuskan konsep pemahaman kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan menentukan intervensi kebijakan yang tepat dalam penanggulangannya.
3. Menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah yang ada di daerah.
4. Mendorong sinergi dan penyelarasan serta memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat dan pihak yang peduli terhadap kemiskinan.
5. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
6. Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan
7. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana Kelurahan/dana kelurahan.

1.4. Peran TKPK Dalam Penyusunan RPKD

Peran TKPK di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis sebagai coordination-hub penanggulangan kemiskinan di daerah sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Untuk itu maka TKPK Kabupaten Timor Tengah Utara



mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan fungsi TKPK Kabupaten Timor Tengah Utara adalah:

- a) Penyusunan RPKD, LP2KD dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara; 24
- b) Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- c) Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- d) Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang isu kemiskinan, maksud dan tujuan penanggulangan kemiskinan 2023-2026, Landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Kemiskinan masalah multidimensi dan arti penting daerah memiliki RPKD, Peran TKPK dalam menyusun RPKD serta sistematika penulisan RPKD

B. Bab II : Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisi hasil identifikasi kondisi : Perekonomian, Geografis, Demografis, Akses kepada pelayanan publik (pemerintah, pendidikan, kesehatan, akses permodalan dll), informasi sosial budaya yang berkaitan isu kemiskinan dan isu-isu terkait lainnya. Hasil identifikasi perencanaan di atas berpengaruh dan membentuk isu kemiskinan / kesejahteraan di suatu daerah.

C. Bab III : Profil Kemiskinan Daerah

Bab ini berisi tentang profil kemiskinan konsumsi meliputi : presentase penduduk miskin (P0), jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), garis kemiskinan (GK), profil kemiskinan non konsumsi meliputi : bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketahanan pangan, bidang ekonomi, bidang fiskal daerah, bidang pendapatan daerah, bidang belanja daerah, bidang indikator daerah. Masing-masing indikator di analisis dengan satu paket analisis; posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan relevansi perkembangan untuk dijadikan bahan dalam merumuskan masalah pada indikator tertentu pada masing-masing bidang.

D. Bab IV : Prioritas Program

Bab ini berisi tentang prioritas intervensi : Berisi Theory of Change (ToC) Program semua bidang (sebagai cara untuk mencari akar masalah dari masalah yang sudah diidentifikasi), Analisis Keterkaitan semua bidang (sebagai cara untuk menguji ketepatan prioritas intervensi antara data capaian dengan harapan/rencana), analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan : Komposisi



APBD berdasarkan pendapatan dan belanja, Sumber pendapatan daerah (belanja langsung dan tidak langsung), Perkembangan derajat otonomi fiskal dan ruang fiskal, Penjelasan relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah. Prioritas program penanggulangan kemiskinan merupakan program yang diarahkan untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penguatan ekonomi, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Informasi prioritas program terhadap kondisi kemiskinan daerah didahului dengan melakukan analisis logika program atau teori perubahan (Theory of Change) dan analisis keterkaitan serta rencana analisis anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

E. Bab V : Lokasi Program

Bab ini berisi tentang Lokasi prioritas program berdasarkan Theory of Change (ToC), Matrik Tujuan Penanggulangan Kemiskinan, Matriks Prioritas I-16 Program Penanggulangan Kemiskinan (2023-2026). Lokasi prioritas adalah lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program- program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan. Penentuan lokasi prioritas merupakan hasil analisis prioritas intervensi dan analisis keterkaitan. Lokasi prioritas ditentukan dengan melihat permasalahan pada indikator tujuan atau indikator utama dan indikator antara atau indikator pendukungnya. Wilayah yang memiliki capaian yang relatif buruk pada kedua indikator tersebut, harus menjadi wilayah yang harus diprioritaskan.



BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.2. ASPEK KESEJAHTRAAN MASYARAKAT

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografis dan Wilayah Administrasi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Timor Provinsi NTT. Secara astronomis Kabupaten Timor Tengah Utara terletak antara 90 02' 48" LS - 90 37' 36" LS dan antara 1240 04' 02" BT- 1240 46' 00" BT. Batasbatas wilayah administratif adalah :

- Sebelah Selatan : Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Utara : Ambenu (Timor Leste) dan Laut Sawu
- Sebelah Barat : Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Luas wilayah daratan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah seluas 2.615,90 km². Wilayah administrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi atas 24 kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 11 kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Biboki Anleu dengan luas 289,68 km² atau 11,07% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Wilayah terkecil adalah Kecamatan Musi dengan luas 40,44 km² atau 1,55% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel luas wilayah menurut kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara, peta orientasi Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap provinsi NTT dan peta batas administrasi Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Biboki Anleu	289,68
2	Biboki Feotleu	114,86
3	Biboki Moenleu	148,03
4	Biboki Selatan	140,65
5	Biboki Tanpah	60,55
6	Biboki Utara	63,97
7	Bikomi Nilulat	40,45
8	Bikomi Selatan	135,36
9	Bikomi Tengah	44,81
10	Bikomi Utara	49,43
11	Insana	252,83
12	Insana Barat	91,78
13	Insana Fafinesu	75,77
14	Insana Tengah	119,61
15	Insana Utara	136,74
16	Miomaffo Barat	118,67
17	Miomaffo Tengah	59,38
18	Miomaffo Timur	83,25
19	Musi	40,44
20	Mutis	188,10
21	Naibenu	99,75



No	Kecamatan	Luas (Km2)
22	Noemuti	134,31
23	Noemuti Timur	53,03
24	Kota Kefamenanu	74,45
Jumlah		2.615,90

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2022

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten TTU terletak diantara 9° 02' 48" dan 9° 37' 36" Lintang Selatan (LS) serta antara 124° 04' 02" dan 124° 46' 00" Bujur Timur (BT). Sedangkan secara geografis pada umumnya merupakan tipologi desa daratan (183 Desa) dan hanya 11 desa yang termasuk tipologi desa kawasan pantai yaitu: Desa Oepuah dan Oepuah Utara di Kecamatan Biboki Moenleu; Desa Humusu C, Humusu Oekolo dan Desa Oesoko di Kecamatan Insana Utara; Desa Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik dan Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu.

Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% meliputi areal seluas 2.065,19 km² atau 77,36 % dari luas wilayah TTU; sedangkan sisanya 604,51 km² atau 22,64 % mempunyai kemiringan lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40 % sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut yakni seluas 1.676,51 km² atau 62,80 %. Berdasarkan data Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor (1974) memperlihatkan bahwa di Kabupaten TTU ditemukan 3 (tiga) jenis tanah yaitu : Tanah Litosol seluas 1.666,96 km² atau 62,44 %, Tanah Kompleks seluas 479,48 km² atau 17,96 % dan Tanah Glumosal 523,26 km² atau 19,60 %.

Hasil survei penyusunan rencana umum tata ruang wilayah memperlihatkan bahwa dari aspek kedalaman efektif tanah komposisi arealnya sebagai berikut: tanah dengan kedalaman efektif kurang dari 30 cm seluas 35.316 ha (13,2%); kedalaman 30-60 cm seluas 73.201 ha (27,4%); 60-90 cm seluas 16.354 ha (6,1%) dan kedalaman efektif diatas 90 cm dengan luas 142.099 ha (53,2 %). Kemampuan dan daya tahan tanah yang rawan erosi seluas 105.226 hektar (39,4%), dan sisanya 161.744 hektar (60,6%) merupakan tanah dengan struktur yang relatif stabil. Secara parsial tanah labil yang rawan erosi terdapat pada tiga wilayah kecamatan yakni Miomaffo Barat 37.921 hektar, Biboki Selatan 28.538 hektar, dan Biboki Utara 28.538 hektar.

Ditinjau dari aspek letak wilayah, Kabupaten TTU termasuk salah satu kabupaten wilayah perbatasan karena berbatasan langsung dengan negara RDTL dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi NTT, oleh karena itu perlu mendapat perhatian terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Timor Tengah Utara



Sumber : Dokumen RPJMD Kab. TTU Tahun 2021-2026

C. Topografi

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten TTU pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian yang bervariasi yaitu: 177,06 km² (6,63 %) memiliki ketinggian < 100 m dpl; 1.499,45 km² (56,17 %) memiliki ketinggian 100-500 m dpl dan 993,19 km² (37,20 %) memiliki ketinggian > 500 m dpl. Secara detail kondisi topografi dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

- | | | | |
|---|---|-------------|----|
| a. Daerah dengan ketinggian 0-25 m dpl | : | 6.519,69 | Ha |
| b. Daerah dengan ketinggian 26-100 m dpl | : | 11.186,000 | Ha |
| c. Daerah dengan ketinggian 101–500 m dpl | : | 149.944,935 | Ha |
| d. Daerah dengan ketinggian 501-1000 m dpl | : | 88.908,875 | Ha |
| e. Daerah dengan ketinggian diatas 1000 m dpl | : | 10.410,500 | Ha |

D. Geologi

Secara umum pulau Timor dan kepulauan Nusa Tenggara lainnya terletak pada wilayah *Ring Api Pasifik Seismik* yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia, tepatnya pada busur Sunda-Banda bagian luar atau busur *geantiklin* yang dimulai dari Timur ke Barat sebelah Selatan yang tidak bergunung api atau merupakan rona gempa dangkal. Pulau Timor termasuk kedalam tipe pegunungan kelopak dimana intensitas tektoniknya cukup aktif dengan sesar sungkup yang cukup banyak ditemukan di bagian selatan, hal ini menyebabkan litologi yang menyusun daerah ini cukup rumit dan sering mengalami perulangan (Rosidi, Suwitodirdjo dan Tjokrosapoetro, 1974/1975).

Berdasarkan peta geologi Lembar Kupang-Atambua, Timor skala 1:250.000, (Suwitodirdjo dan Tjokrosapoetro, 1996), Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi, pergerakan tektonik di pulau Timor yang berlangsung sejak Kapur hingga akhir Eosen akibat pergerakan benua Australia ke utara dengan zona penunjaman condong ke utara. Akibat pergerakan tersebut terjadi benturan busur kepulauan “Paleo Timor” dengan kerak samudera Hindia. Pada waktu proses perbenturan inilah, sehingga terjadi pembentukan batuan campuran aduk, pengendapan



formasi Noni, Haulasi dan formasi Ofu, penempatan batuan-batuan basa dan ultrabasa serta peralihan pada formasi Maubisse, Ailieu dan kompleks Mutis.

Secara umum stratigrafi geologi di daerah ini diklasifikasikan kedalam empat unit yaitu unit batu karang, liat, batu gamping dan aluvial. Di daerah batu karang umumnya mempunyai bentuk lahan yang relatif datar sampai berombak, tetapi dominan ditutupi oleh batuan induk dan batuan lepas dalam luasan yang cukup besar. Unit liat umumnya dicirikan dengan topografi yang sangat curam dengan erosi parit yang hebat serta potensi longsor yang besar. Unit batu gamping mempunyai bentuk permukaan yang relatif lebih landai akibat peresapan (*infiltrasi*) air yang lebih baik dari liat. Sedangkan unit aluvial umumnya mempunyai bentuk permukaan yang datar yang terbentuk di pinggiran sungai atau endapan pada muara sungai.

E. Hidrologi

Secara umum Kabupaten TTU memiliki kondisi hidrologi yang cukup baik karena ketersediaan air tanah dan air permukaan hampir tersebar diseluruh wilayah baik sungai, mata air maupun sumur gali. Sungai-sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 30-50 km sebagaimana termuat dalam Tabel 2.1. Terdapat 8 (delapan) sungai utama yang mengalir sepanjang tahun yaitu: Noetoko, Noebesi, Taisola, Noemuti-Haekto, Naen, Maubesi, Mena-Kaubele dan Ponu serta 97 anak sungai dengan membentuk orde yang bersifat *horton* dan *shreve*.

Tabel 2.2 Nama dan Panjang Sungai Utama Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Miomaffo Barat	Noetoko	40
		Noebesi	50
2	Miomaffo Timur	Taisona	40
3	Noemuti	Noemuti	30
4	Noemuti Timur	Haekto	30
5	Kota Kefamenanu	Naen	30
6	Insana Tengah	Maubesi	40
7	Biboki Moenleu	Mena-Kaubele	40
8	Biboki Anleu	Ponu	40

Sumber : Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU Tahun 2021-2026

Sumber mata air di Kabupaten TTU termasuk tipe air tanah yang diremajakan yaitu air yang untuk sementara waktu telah dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan maupun oleh sebab-sebab lain dan kembali ke daur lagi dengan proses-proses metamorfis. Jumlah ketersediaan sumber mata air sebanyak 1.704. Dari jumlah tersebut terdapat 635 sumber mata air dapat mengeluarkan air sepanjang tahun dan tidak dipengaruhi oleh curah hujan (*perennial springs*) dengan kondisi ketersediaan air cukup baik; sebanyak 826 sumber mata air bersifat musiman karena mengeluarkan air hanya pada musim tertentu dan tergantung pada curah hujan (*intermitent springs*) dengan kondisi ketersediaan air sedikit serta 243 sumber mata air yang kering di musim kemarau serta dapat mengeluarkan air pada periode tertentu saja (*periodic springs*).

Ketersediaan mata air hampir tersebar di seluruh desa dengan rata-rata 3-5 sumber mata air yang tidak kering pada musim kemarau. Dari kondisi hidrologi ini



sebagian besar (78%) telah digunakan untuk kebutuhan penyediaan air bersih bagi masyarakat dengan debit rata-rata 5-300 liter/detik. Potensi sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk energi alternatif adalah Oelfaub-Desa Kuluhan, Kecamatan Biboki Feotleu (100 liter/detik); Oel Ainiut, Kecamatan Insana (200 liter/detik); Oel Nianin, Kecamatan Miomaffo Barat (250 liter/detik); Oeaijao, Kecamatan Miomaffo Barat (300 liter/detik); dan Oel Ainiut Jak, Kecamatan Miomaffo Timur (100 liter/detik).

Kondisi hidrologi ini menggambarkan pola Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten TTU dan sesuai Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP-DAS) di pulau Timor, maka wilayah Kabupaten TTU termasuk DAS Benenain (wilayah tengah) dengan luas 150,080 ha dan memiliki Sub DAS Maubesi dan Bikomi. Pola aliran DAS tersebut bersifat *dendritik* dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang. Selain DAS Benenain, terdapat DAS lintas negara yakni DAS Noebesi, DAS Banain dan DAS Ekat sesuai Peraturan Presiden Nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

F. Hidrologi

Sesuai dengan klasifikasi iklim oleh Schmidt dan Ferguson, Kabupaten TTU termasuk wilayah iklim tipe D (iklim semi arid) dengan beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan. Curah hujan rata-rata selama tahun 2022 sebesar 154,33 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 18,3° - 35,6° C dan kelembaban udara 28 – 100 %.

Seperti halnya di tempat lain di Provinsi NTT, pada bulan Juni – September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Walaupun demikian, mengingat letak Pulau Timor lebih dekat dengan Benua Australia, maka pertemuan arus angin dari Asia yang banyak mengandung uap air dan arus angin dari Samudera Pasifik yang sedikit kandungan uap airnya mengakibatkan hari hujan lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan TTU sebagai wilayah dengan curah hujan yang stabil di mana terdapat 6 (enam) bulan yang keadaannya relatif basah yaitu bulan Januari, Februari, Maret, Oktober, November dan Desember dan 6 (enam) bulan sisanya relatif kering.

2.1.2. Kependudukan-Demografi

Jumlah penduduk keadaan Tahun 2022 berjumlah 268.716 jiwa dengan tingkat kepadatan rumah tangga 4 orang dan kepadatan penduduk 118 orang per km². Dari sebaran penduduk, Kecamatan Kota adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi sebanyak 48.195 jiwa (17,94%) dengan tingkat kepadatan penduduk 651 jiwa/km², sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Biboki Feotleu sebanyak 4.470 jiwa (1,66%) dengan tingkat kepadatan penduduk 36 jiwa/km². Secara rinci sebaran penduduk ditiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2.



Table 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten TTU Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Rata-rata Rumah Tangga per penduduk
1	Kota Kefamenanu	49.095	74	12.394	651	4
2	Insana	21.771	333,08	6.735	65	3
3	Biboki Anleu	17.738	206,4	4.398	85	4
4	Miomaffo Barat	15.634	199,63	4.626	80	3
5	Noemuti	13.224	155,6	3.660	85	4
6	Miomaffo Timur	12.906	101,45	3.608	127	4
7	Biboki Utara	11.561	138,7	2.979	85	4
8	Insana Tengah	10.847	124	3.160	91	4
9	Insana Barat	11.125	102	3.146	110	4
10	Bikomi Selatan	11.566	48,68	2.958	229	4
11	Insana Utara	10.555	53,84	2.742	202	4
12	Biboki Selatan	9.610	164,17	2.520	57	4
13	Biboki Moenleu	8.288	85,78	2.097	98	4
14	Bikomi Tengah	7.850	61,5	2.277	131	4
15	Mutis	7.320	90,5	1.951	83	4
16	Miomaffo Tengah	6.302	75	1.800	86	4
17	Bikomi Utara	6.442	70,7	1.793	91	4
18	Biboki Tanpah	5.719	99,15	1.680	62	4
19	Insana Fafunesu	6.142	52,88	1.664	114	4
20	Naibenu	5.746	88	1.496	64	4
21	Musi	4.918	82,17	1.433	60	3
22	Bikomi Nilulat	4.940	82	1.349	59	4
23	Noemuti Timur	4.420	55,77	1.249	81	4
24	Biboki Feotleu	4.348	124,7	1.131	36	4
Jumlah		268.067	2.670	72.846	118	4

Sumber : BPS, TTU dalam angka tahun 2023

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Lindung

Penentuan kawasan lindung didasarkan atas data dan berbagai referensi peraturan seperti Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan dipertegas dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu wilayah yang karena keadaan dan sifat fisiknya mempunyai fungsi lindung terhadap tanah, air, flora dan fauna yang didalamnya tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan budidaya. Dalam hubungan ini konsepsi dasar pengembangan, aspek konservasi dan rehabilitasi pada dasarnya ditujukan untuk:

- Melestarikan lingkungan dengan mempertahankan kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, hutan suaka alam, kawasan jalur pengaman aliran sungai/aliran air dan sumber mata air dan areal lindung lainnya di luar kawasan hutan yang di dalamnya tidak diperkenankan adanya budi daya. Kawasan lindung perlu dipertahankan sebagai areal bervegetasi tetap;
- Melestarikan hutan suaka alam/hutan wisata dengan memperhatikan keanekaragaman fauna, flora, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi



kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan bagi pembangunan pada umumnya;

- c. Membina kawasan lindung yang masih merupakan areal perkebunan dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan air.

Jenis kawasan lindung berupa Hutan dan Non Hutan terdiri dari:

- a. Kawasan lindung berupa Hutan Lindung dominan berada di Kecamatan Mutis, Musi, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Noemuti, Insana Tengah, Insana Utara, Insana Barat, Biboki Selatan. Untuk mendukung fungsi hutan lindung maka kawasan diarahkan dengan menanam jenis tanaman tahunan.
- b. Kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan pantai berada di Kecamatan Insana Utara, Biboki Moenleu, Biboki Anleu di bagian pantai utara. Untuk mendukung fungsi kawasan sempadan pantai maka diarahkan dengan menanam jenis tanaman mangrove.
- c. Kawasan sekitar mata air tersebar di kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, Noemuti dan Insana dengan debit air bervariasi antara 5-300 liter/detik. Untuk mendukung fungsi kawasan sekitar mata air maka kawasan diarahkan dengan menanam jenis tanaman tahunan, kawasan hutan mangrove untuk pengamanan pantai yang terletak di kawasan Pantura. Untuk sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi kiri-kanan sungai besar dan 50 m kiri-kanan anak sungai dan kawasan danau berupa daratan sekeliling tepian yang letaknya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- d. Kawasan cagar alam dan cagar budaya yaitu air terjun Pahkoto di kawasan utara pegunungan Mutis; Gua Suti (Desa Bijaepasu, Miomaffo Tengah); Kawasan Tumbaba Raya dengan panorama alam, Gua Popnam (Noemuti), Danau Tunoe (Miomaffo Timur); Pantai Tanjung Bastian (Insana Utara) dan Pantai Batu Putih (Biboki Anleu). Untuk mendukung fungsi Suaka Alam maka kawasan diarahkan dengan menanam jenis tanaman tahunan.
- e. Kegiatan konservasi untuk mendukung kondisi kawasan lindung dengan mengembangkan tanaman perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat yang dialokasikan di Kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Miomaffo Tengah dan Naebenu. Fungsi konservasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap wilayah disekitar suaka alam.

2. Kawasan Budidaya

A. Kawasan Budidaya Pertanian

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya pertanian dialokasikan pada kawasan-kawasan berikut:

- A. Kegiatan Hutan Produksi Terbatas merupakan kegiatan budidaya di Kawasan Hutan. Dalam rencana tata ruang wilayah, alokasi untuk Hutan Produksi terbatas berada di Kecamatan Miomaffo Tengah, Miomaffo Barat, Bikomi Utara, Insana Tengah, Insana, Biboki Selatan, Biboki Tanpah, Biboki Utara, Biboki Foetleu, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Insana Utara dan Naibenu.
- B. Untuk kegiatan Hutan Produksi dialokasikan sebagai kawasan penyangga antara fungsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang berfungsi perlindungan. Alokasi



- Lahan Hutan Produksi di Kecamatan Kota Kefamenanu, Bikomi Selatan, Noemuti dan Noemuti Timur. Untuk mendukung fungsi Hutan Produksi maka kawasan diarahkan dengan menanam jenis tanaman tahunan.
- C. Kegiatan budidaya lahan basah direncanakan sebagai sentra produksi tanaman Pangan. Untuk lahan basah tersebar di Kecamatan Naibenu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Utara, Biboki Tanpah, Insana, Insana Barat, Bikomi Selatan, Noemuti Timur, Noemuti, Biboki Anleu, dan Biboki Moenleu.
 - D. Kegiatan budidaya lahan kering dominan berada di Kecamatan Insana, Biboki Tanpah, Biboki Anleu dan Biboki Selatan.
 - E. Kegiatan budidaya tanaman tahunan dominan berada di kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Nilulat, Musi, Kota Kefamenanu, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Naibenu, Insana Fafinesu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Selatan, dan Biboki Tanpah.
 - F. Kegiatan Budidaya Padang Rumput/Pengembalaan: Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Musi, Miomaffo Tengah, Noemuti, Noemuti Timur, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan dan Insana.
 - G. Kegiatan budidaya perikanan air tawar mengikuti keberadaan air yang dikembangkan di kawasan yang disiapkan untuk pertanian lahan basah tersebar di Kecamatan Naibenu, Insana Utara, Biboki Utara, Biboki Tanpah, Insana, Insana Barat, Bikomi Selatan, Noemuti Timur, Noemuti, Biboki Anleu, dan Biboki Moenleu.
 - H. Pengembangan kegiatan budidaya usaha pertanian laut dan perikanan laut dengan hasil usaha kegiatan berupa budidaya rumput laut, keramba jaring apung, usaha tambak ikan bandeng dan udang windu serta tambak garam. Kegiatan ini dikembangkan di Kecamatan Insana Utara, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu. Potensi lahan usaha di perairan Kabupaten Timor Tengah Utara seluas ± 200 ha sedangkan untuk perikanan tambak seluas ± 3.500 ha. Untuk kegiatan Perikanan laut yang disiapkan berupa kegiatan perikanan tangkap.
 - I. Pengembangan Kawasan Buffer di wilayah sekitar perbatasan Distrik Oecuse, rencana pengembangan buffer dengan memberikan batasan wilayah dengan menggunakan tanaman tahunan sebagai buffer negara dengan lebar kawasan yang disesuaikan dengan ketentuan negara.
 - J. Penyiapan pengembangan kecamatan-kecamatan di sekitar perbatasan untuk mengoptimalkan perkembangan wilayah sekitar perbatasan dengan memberikan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung sebagai serambi depan Negara Indonesia yaitu di Kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Naibenu, Insana Utara, Biboki Moenleu, Biboki Anleu dan Kota Kefamenanu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - K. Penyiapan pengembangan kegiatan pertanian di Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Biboki Anleu dengan pusat di Ponu. Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Insana Tengah, Insana Utara, Insana dan



Naibenu merupakan penyangga bagi pengembangan agropolitan di Kota Terpadu Mandiri.

L. Penyiapan dan pengembangan kawasan-kawasan agropolitan dengan prioritas kegiatan adalah :

- Miomaffo Barat (Kecamatan Mutis, Miomaffo Tengah, Musi, Bikomi Nilulat menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Hortikultura dan Peternakan.
- Miomaffo Timur (Kecamatan Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Naibenu menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Insana (Kecamatan Insana Tengah, Insana Barat dan Insana Fafinesu menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Insana Utara, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu untuk Kawasan Pengembangan Perikanan Laut dan Peternakan.
- Noemuti (Kecamatan Noemuti Timur menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan

B. Kawasan Budidaya Non Pertanian

1. Kawasan Pertambangan

Berdasarkan hasil eksplorasi/penelitian dari Dinas Pertambangan Provinsi NTT, potensi kandungan mineral yang teridentifikasi di wilayah Kabupaten TTU terdiri dari:

- Potensi bahan galian golongan A dengan jenis bahan tambang nikel, wilayah yang memiliki potensi nikel adalah Desa Benus di Kecamatan Naibenu, Desa Nonotbatan dan Motadik di Kecamatan Biboki Anleu, Desa Naku di Kecamatan Biboki Feotleu, Desa Humusu Sainiup di Kecamatan Insana Utara dan Desa Fafinesu C di Kecamatan Insana Fafinesu, Desa Tautpah di Kecamatan Biboki Selatan, Desa Tapenpah di Kecamatan Insana dan Desa Fatuneno, Saenam, Fatunisan di Kecamatan Miomaffo Barat dan Desa Tasinifu di Kecamatan Mutis.
- Potensi bahan galian golongan B dengan jenis bahan galian mangan, emas, Tembaga, Perak dan Besi.
 - Wilayah yang berpotensi mangan ditemukan di setiap kecamatan.
 - Wilayah yang berpotensi emas, ditemukan di daerah zona Benus, Noetoko, Noemeto, Bakitolas, Nono Tabun dan Bitefa.
- Potensi Bahan galian golongan C dengan jenis sirtu sungai, sirtu gunung, batu gamping, rijang, napal, marmer, batuan beku, breksi vulkanik, sekis, oker, perlit, batu lempung dan batu semi permata.
 - Lokasi Sirtu sungai di Noemuti, Maurisu, Noe Manufono, Manamas, Motasokon, Noel Siman, Tublopo dan Noe Meto.
 - Lokasi batu gamping di Tubu Kuaken, Tubu Palak, Tubu Kabuta, Tubu Kuanteum, Tubu Naenim, di wilayah Maurisu, Nunpene Kecamatan Miomaffo Timur, Bakitolas dan Wini
 - Lokasi Batu Rijang di Desa Napan, Sainoni, Haumeni, Amol, Oesena, Taekas, Inbate, Nainaban, Nimasi, Sasi, Oelami, Naiola Bitefa, dan Sunsea.



- Lokasi Batu Marmer di Desa Bakitolas, Oinbit, Fatunisuan, Banain, Napan, Sainoni, Kaenbaun, Jak, Amol, Oesena, Haumeni, Buk, Taekas, Inbate, Nainaban, Nimasi, Oelami, Sasi, Naiola, Benus, Bitefa dan Nilulat.
- Penyiapan kawasan potensial pertambangan untuk mengoptimalkan hasil pertambangan, kegiatan ini disiapkan dalam bentuk tambang rakyat dengan jenis barang tambang yaitu Mangan. Luas kegiatan rencana penambangan mengikuti sebaran yang ada dan disesuaikan dengan kegiatan yang berkembang seluas 994 Ha atau 0,37% dari luas wilayah. Daerah tambang mangan yang disiapkan untuk pengembangan yaitu di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Bikomi Selatan, Insana, Insana Barat, Biboki Tanah, Biboki Moenleu, Biboki Anleu dan Biboki Selatan.

C. Kawasan Pesisir Laut

Potensi pesisir laut cukup besar dimiliki Kabupaten Timor Tengah Utara karena memiliki panjang garis pantai sepanjang ± 50 km, dengan luas wilayah lautan adalah ± 950 km². Dari kondisi perkembangan pesisir, masih dapat dikembangkan kegiatan masyarakat terkait untuk pengembangan kegiatan kelautan berupa kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Dengan luas ± 950 km² jenis sumberdaya perikanan yang dimiliki berupa ikan demersal maupun ikan pelagis dengan jumlah potensi lestari sebesar 1.800 ton per tahun. Jumlah produksi Perikanan tahun 2022 sebesar 802,635 ton dengan rincian Produksi Perikanan tangkap sebanyak 646,065 ton dan Produksi Perikanan Budidaya sebanyak 156,57 ton. Sementara untuk pengembangan kegiatan budidaya luas lahan perairan yang dapat diusahakan adalah ± 200 Ha dengan kegiatan usaha berupa budidaya rumput laut dan budidaya keramba jaring apung. Untuk pengembangan budidaya di wilayah daratan memiliki potensi budidaya air payau seluas 3.500 Ha dengan jenis pengembangan tambak ikan bandeng dan udang windu.

D. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata didasarkan pada hasil Studi Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dari sekian banyak objek wisata di setiap kecamatan, ada beberapa objek prioritas yang akan dikembangkan antara lain meliputi Wisata pantai, Wisata budaya, Wisata hutan, Wisata alam dan Wisata religi. Sebaran obyek wisata yang perlu terus dikembangkan antara lain :

- Wilayah Kefamenanu dengan lokasi wisata Kampung Adat Maslete dan wisata religi Taman Doa Sta. Maria Imaculata Sasi;
- Wisata Pegunungan Mutis, Gua Suti di Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomaffo Tengah dan Sonaf Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat;
- Wilayah Miomaffo Timur dengan lokasi wisata Kawasan Tunbaba Raya, Danau Tunoe, Oebikase;
- Wisata Bahari di wilayah Pantai Utara;
- Wilayah Biboki Anleu dengan lokasi wisata Pantai Batu Putih;
- Biboki Selatan dengan lokasi wisata Sonaf Tamkesi, Gua Naijalu`u dan Pantai Oebubun di Biboki Moenleu;



- Insana dengan lokasi wisata Sonaf Oelolok, Sonaf Maubesi, Wisata religi Gua Bitauuni, Bendungan Benkoko;
- Noemuti dengan lokasi wisata Kuburan Sonbai, Prosesi Kure, Oeluan/Hutan Wisata.

Untuk kegiatan pariwisata yang perlu disiapkan adalah pengembangan kawasan dan pemasaran pariwisata. Bentuk pengembangan kawasan wisata dengan memberikan peningkatan fasilitas pendukung serta peningkatan aksesibilitas menuju kawasan wisata tersebut. Sedangkan bentuk pemasaran pariwisata dibuat untuk memberikan informasi tentang sebaran kawasan wisata juga disiapkan dalam bentuk-bentuk paket wisata.

E. Kawasan Perkotaan dan Permukiman

Kawasan Pengembangan Perkotaan dan Permukiman merupakan bagian kedua dari proses penataan ruang wilayah. Yang dimaksud dengan kawasan tersebut adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk berkembang menjadi daerah perkotaan dengan daerah permukiman berkonsentrasi tinggi yang ditunjang oleh kegiatan pembangunan perkotaan yang pesat.

Secara keseluruhan, kawasan pusat pengembangan perkotaan yang direncanakan sampai dengan tahun 2028 adalah Kota Kefamenanu, Wini dan Ponu di Wilayah Pantai Utara. Kedua lokasi tersebut disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Kefamenanu yang saat ini sebagai Pusat Koleksi dan Distribusi dan juga sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN).

Dilihat dalam lingkup wilayah kabupaten, selain Kecamatan Kota Kefamenanu yang akan menjadi tujuan permukiman perkotaan, beberapa kota kecamatan yang diperkirakan akan mengalami perkembangan pesat pada masa mendatang adalah Wini, Eban, Ponu dan Kaubele. Untuk pengembangan permukiman lainnya disiapkan di tiap kecamatan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu akan dikembangkan permukiman perkotaan yang terpusat pada lokasi yang tidak potensial untuk pengembangan pertanian. *Design* pengembangan KTM Ponu akan disesuaikan dengan hasil revisi RTRW dan dengan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian.

F. Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas adalah kawasan-kawasan dengan spesifikasi khusus yang penanganannya perlu diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Kawasan tersebut merupakan kawasan tempat pemusatan sumber daya alam ataupun kegiatan budidaya yang strategis, yang jika dikembangkan akan memberikan *multiplier effect* pada kawasan lain disekitarnya baik secara fisik maupun ekonomis. Selain itu yang masuk dalam kategori kawasan prioritas adalah kawasan dengan permasalahan khusus yang membutuhkan penanganan mendesak. Penetapan kawasan prioritas ditentukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Kegiatan di kawasan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki perkembangan yang cepat dan dinamis sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kawasan sekitarnya.



- Kegiatan di kawasan tersebut memiliki dampak penting terhadap kegiatan sejenis maupun kegiatan lainnya. Dampak penting yang tercipta itu harus tetap diwaspadai karena bisa berupa dampak positif maupun negatif.
- Kegiatan di kawasan tersebut merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan dan pertahanan keamanan wilayah.
- Kegiatan di kawasan tersebut memiliki permasalahan khusus yang perlu diprioritaskan penanganannya.
- Arah kebijakan pembangunan daerah pada kawasan yang bersangkutan.

G. Wilayah Rawan Bencana

1. Banjir

Wilayah rawan banjir setiap tahunnya terjadi di 17 kecamatan dari 24 Kecamatan di Kabupaten TTU yakni Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Mutis, Insana, Insana Tengah, Bikomi Selatan, Kota Kefamenanu, Noemuti, Noemuti Timur, Biboki Selatan, Biboki Utara, Biboki Tanpah, Insana Utara, Biboki Anleu dan Biboki Moenleu. Bencana alam ini disebabkan oleh ulah manusia yang tidak memperhatikan fungsi ekologis/lingkungan hidup yang berdampak tingginya aliran air. Musibah ini terjadi dari tahun ke tahun yang telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat dengan rusaknya rumah pemukiman penduduk ataupun gagal panen

2. Tanah Longsor

Wilayah rawan longsor terjadi hampir di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten TTU. Terdapat 22 kecamatan yang berpotensi longsor. Potensi longsor terutama terjadi akibat banjir yang mengancam pemukiman penduduk dan areal persawahan. Penanganan longsor dilakukan setiap tahun dengan pemasangan tembok penahan maupun bronjong bantaran kali/sungai.

3. Angin Taufan

Wilayah yang sering terkena bencana angin topan (puting beliung) dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Selatan, Insana Tengah, Insana, Kota Kefamenanu, Bikomi Tengah. Wilayah rawan angin topan tersebut umumnya berada pada daerah punggung bukit/tertinggi dari elevasi sekitar maupun hamparan luas.

4. Kekeringan, Kebakaran dan Hama Belalang

Wilayah Kabupaten TTU pada dasarnya beriklim *semi arid* artinya tingkat kekeringan pasti akan lebih besar sebagai akibat dari kondisi iklim yang ada. Masalah kekeringan ini melanda seluruh wilayah Kabupaten TTU dengan tingkat keparahan tertinggi di daerah pantai utara (pantura) yang kadang-kadang juga membawa faktor ikutannya berupa kebakaran dan serangan hama belalang kumbara seperti terjadi di Kecamatan Biboki Utara (Boronubaen dan Hauteas), Kecamatan Miomaffo Timur (Jak, Tuntun dan Taekas) dan Kecamatan Bikomi Utara (Sainoni, Banain A, Banain B dan Banain C) yang telah menyebabkan rawan pangan.



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Reformasi Birokrasi yang di dalamnya terdapat 27 Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2.4
Capain Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten TTU Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	4	5	6	7	8
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan PDRB (%)	-0,55	6.33-6.90	3,00	<	7.81-8.38
2	Laju Inflasi	0,83	3.0-3.2	2,59	>	2.8-3.0
3	PDRB Perkapita	4,087	4,088	11.510,760	>	4,092
4	Nilai Investasi (Milyard Rupiah)	37,9	50	98,31	>	90
5	Indeks Gini	0,36	0,35-0,34	N/A	<	0,33-0,30
6	Persentase kemiskinan (%)	22,28	22,03	21,85	<	21,03
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	63,3	64	65,16	<	66,8
8	Indeks Pembangunan Gender	95,55	96,44	N/A	<	100
9	Angka melek huruf (%)	94,37	95,5	98,22	<	100
10	Angka Rata-Rata lama sekolah (%)	7,5	9	8,30	<	15
11	Angka usia harapan hidup (%)	66,9	67,32	67,61	<	69
12	Persentase balita gizi buruk (%)	0,15	0,14	0,26	>	0,1
13	Prevalensi balita gizi kurang (%)	5,29	5	9,35	<	4,6
14	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	75	80	N/A	>	100
15	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	78,13	78,17	75,74	<	78,31
16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,33	3,3	3,03	>	3,19
17	Rasio penduduk yang bekerja (%)	95,74	95,77	96,97	>	95,92
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	78,73 (B)	79,87	65,16	<	82,15
19	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	4,48	5,04	5,75	<	8,39
20	Rasio PAD	0,06	0,07	0,06	<	0,1



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	4	5	6	7	8
21	Opini BPK (Opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	89	91,2	75	<	100
23	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	39,82	40,12	N/A	>	41,32
24	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	39,82	40,12	N/A	>	41,32
25	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	5,51	5,52	N/A	>	5,56
26	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	1,13	1,15	N/A	<	1,23
27	Prevelensi Balita Stunting (%)	28,9	23	22,61	>	8

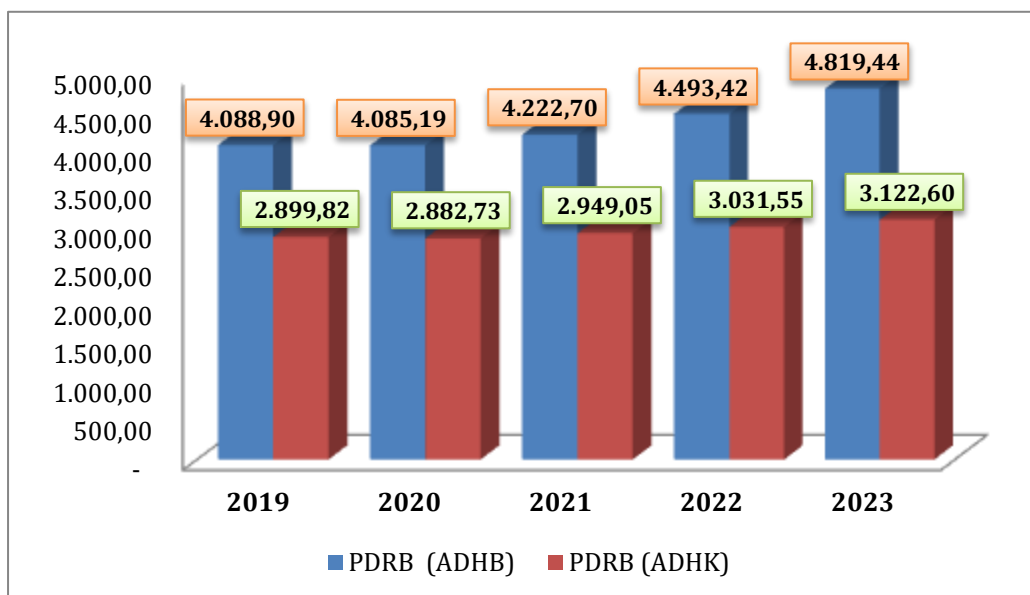
Sumber: Olahan Tim penyusun RKP, tahun 2023

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Tingkat pertumbuhan perkonomian Kabupaten TTU dalam periode Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan 2.3 dibawah ini

Grafik. 2.1. Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



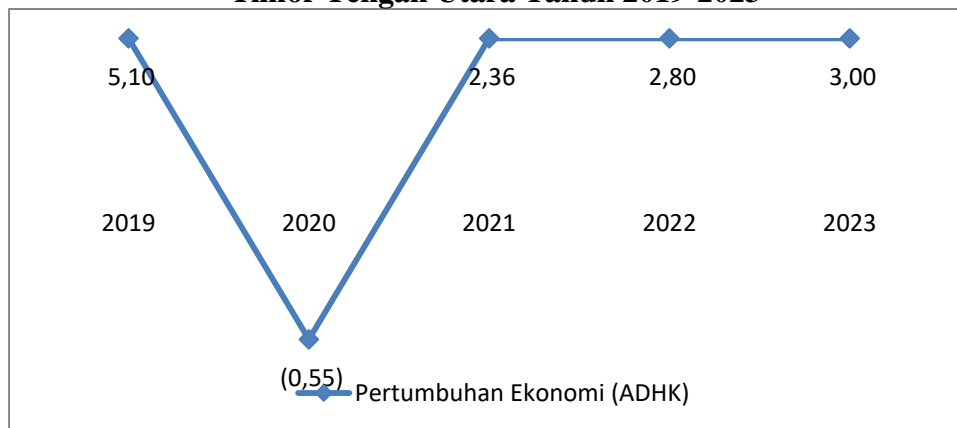
Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2024



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 PDRB Kab.TTU Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 4.088,90 Miliar, mengalami penurunan menjadi 4.085,19 Miliar, sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan terakhir pada tahun 2023 PDRB Kab.TTU mencapai 4.819,44.

Sedangkan PDRB Kab.TTU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2019 sebesar 2.899,82, menurun menjadi 2.882,73 di tahun 2020, sedangkan dari tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan terakhir pada tahun 2023 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 3.122,60 Miliar.

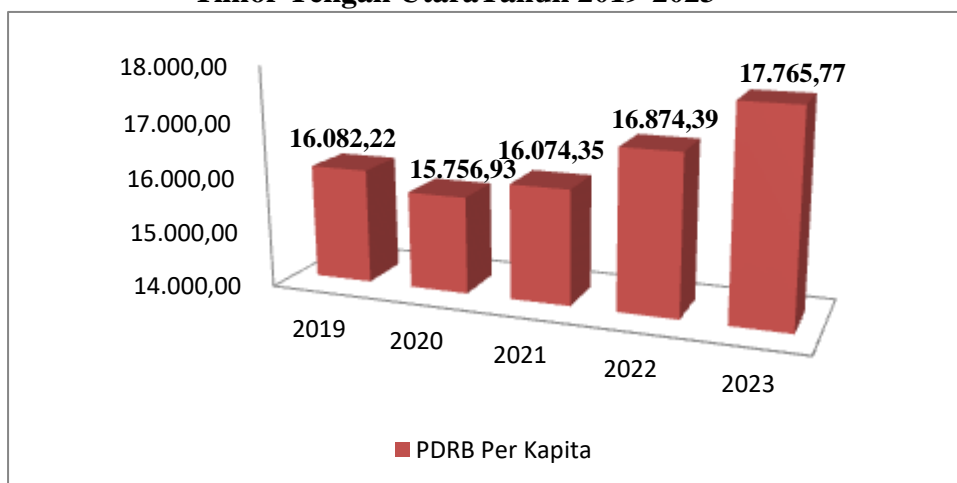
Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber data: Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten di Timor Tengah Utara pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,10%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi -0,55%, hal ini disebabkan oleh adanya Pandemic Covid-19 yang sedang melanda Dunia. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tingkat pertumbuhan ekonomi di Kab.TTU mulai membaik dan meningkat menjadi 3% di tahun 2023

Grafik 2.3. PDRB Per Kapita di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber : Dok. LPPD Kab.TTU Tahun 2023

PDRB Perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan per kapita masyarakat, dari data di atas menggambarkan bahwa

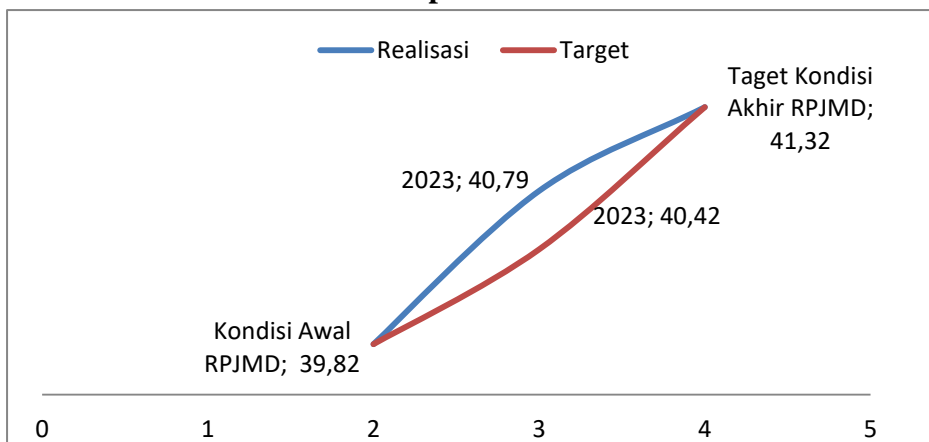


PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp. 16.082.220, pada tahun 2020 PDRB Per Kapita mengalami penurunan menjadi Rp.15.756.930 hal ini sebagai akibat dari adanya Virus Covid-19. Sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, terakhir tahun 2023 sebesar RP.17.675,77.

B. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Perikanan, Perdagangan dan Industri terhadap PDRB Tahun 2022

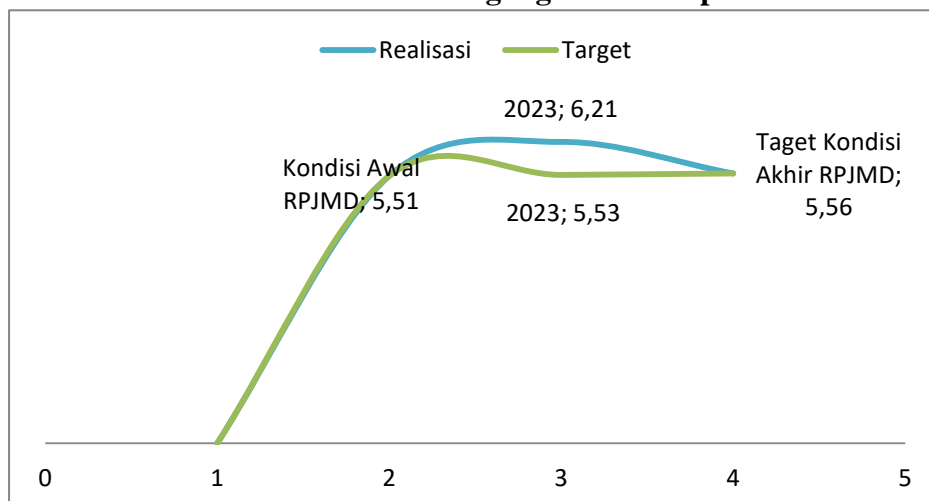
Pertanian/Perkebunan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusi PDRB tahun 2022 disusul oleh sektor lainnya, dikarenakan sebagian besar masyarakat bermatapencarian pada sektor ini. Pemerintah Kabupaten TTU dalam Dokumen RPJMD 2021-2026 menargetkan kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 40,19%. Sedangkan untuk sektor perdagangan dan Industri pemerintah menargetkan masing-masing 5,52% dan 1,15%. Realisasi atas kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Perikanan, Perdagangan dan Industri terhadap PDRB Tahun 2022 terhadap Target RPJMD digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.4. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan kelautan terhadap PDRB Tahun 2023



Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2023

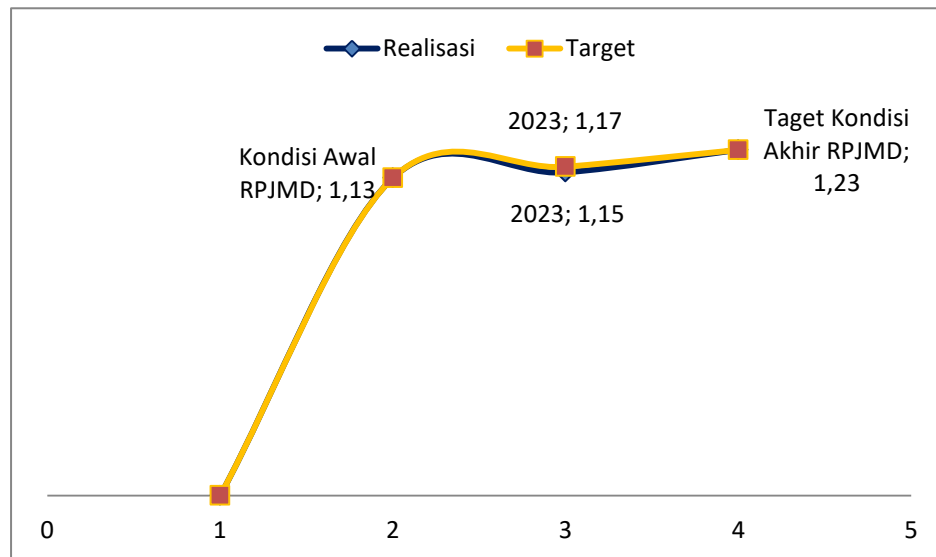
Grafik 2.5. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2022



Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2023



Grafik 2.6. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2022



Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2023

C. Laju Inflasi

Meningkatnya harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu yang disebabkan oleh penurunan nilai uang dikenal dengan istilah *inflasi*. Ada banyak faktor yang menyebabkan inflasi antara lain karena kapasitas permintaan terhadap suatu barang dan jasa melebihi volume persediaannya, naiknya harga struktur input barang import yang sangat rentan terhadap kurs mata uang asing, struktur ekonomi yang kurang seimbang dan tingginya jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Karena itu upaya pencegahan inflasi harus berawal dari pengamatan yang cermat terhadap faktor penyebab utama inflasi di suatu wilayah.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 3 (tiga) wilayah yakni Kota Kupang, Maumere dan Waingapu. Kabupaten TTU tidak masuk dalam wilayah perhitungan inflasi, sehingga untuk menentukan besaran angka inflasi maupun deflasi menggunakan pendekatan *city sister* yakni melihat nilai inflasi wilayah yang satu daratan dengan Kabupaten TTU, sehingga besaran nilai inflasi Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada besaran inflasi Kota Kupang.

Laju inflasi umum yang terjadi berdasarkan akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Timor Tengah Utara 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai berikut tahun 2018 adalah 3,23%, tahun 2019 adalah 0,50%, tahun 2020 adalah 0,61%, tahun 2021 adalah 1,86% dan tahun 2022 sebesar 7,07%. Penyebab meningkatnya inflasi pada tahun 2022 disebabkan oleh naiknya harga BBM yang berdampak pada naiknya harga barang dan ketersediaan bahan pokok yang terbatas.



D. Rasio Gini

Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva *Lorenz* dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva *Lorenz* itu berada.

Tabel 2.5. Patokan Nilai Koefisien Gini

o	Nilai	Distribusi Pendapatan
	2	3
	$G = 0$	Pembagian pendapatan merata secara sempurna
	$0 < G < 0,3$	Pembagian pendapatan relatif merata
	$0,3 < G < 0,5$	Ketidakmerataan pembagian pendapatan rendah
	$0,5 < G < 1$	Ketidakmerataan pembagian pendapatan tinggi
	$G = 1$	Ketidakmerataan pembagian pendapatan sempurna

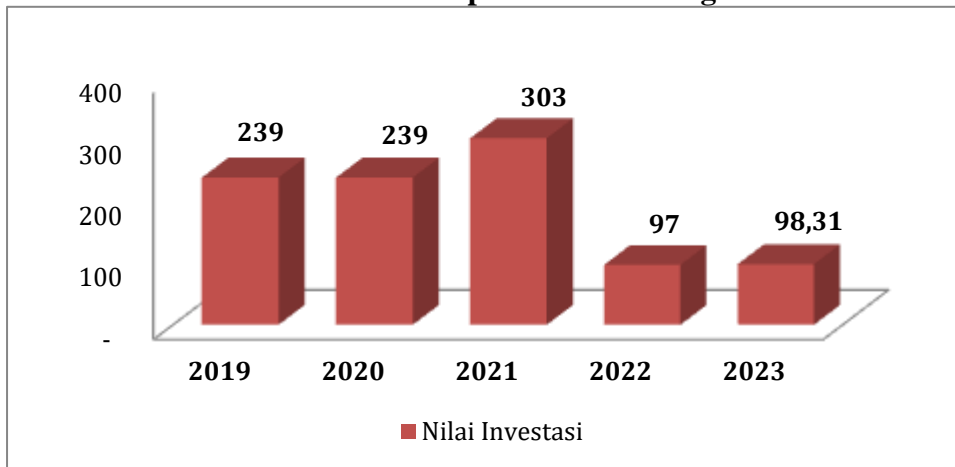
Rilis BPS TTU menunjukkan bahwa Rasio Gini Kabupaten TTU tahun 2020 sebesar 0,301 dan menurun pada tahun 2021 sebesar 0,007 menjadi 0,294 dan tahun 2022 meningkat menjadi 0,316. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten TTU masuk dalam kategori Pembagian pendapatan relatif merata.

E. Nilai Investasi

Nilai Investasi pada tahun 2019 sebesar 293 Miliar jumlah investor berkurang sebanyak 4 investor menjadi 33 investor, pada tahun 2020 nilai investasi masih sama seperti tahun 2019 yakni 293 Miliar hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 303 Miliar, sedangkan jumlah investor pada tahun 2022 berkurang sebanyak 13 orang dan hal itu berpengaruh kepada nilai investasi yang ikut berkurang menjadi 97,5 Miliar dan meningkat menjadi 98,31 Miliar di tahun 2023. Adapun jenis perijinan secara online melalui *online single submission* (OSS) sudah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan jumlah jenis perijinan sebanyak 32 jenis. Data Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 2.7. Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023

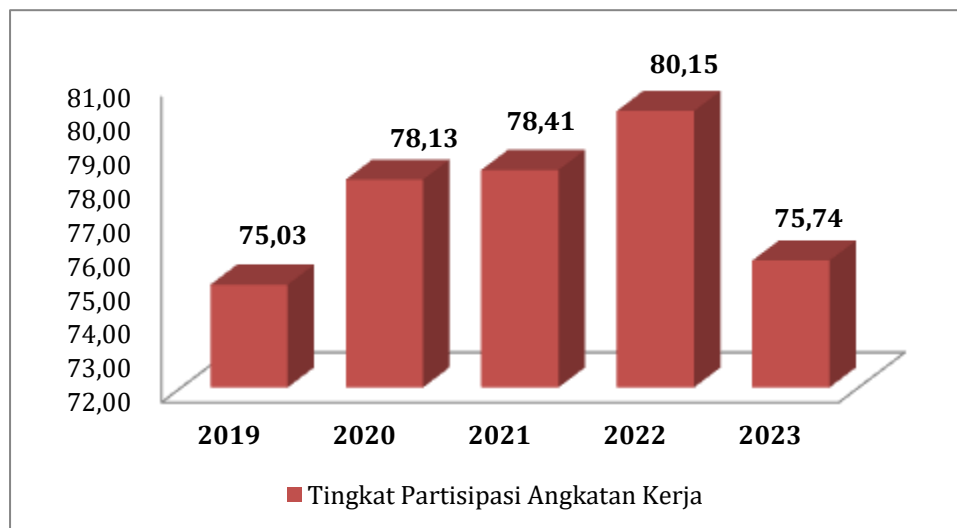


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. TTU, 2023

F. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara pada kurun waktu 2019 s/d 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 75,03% dan meningkat 5,15% menjadi 80,15% pada tahun 2022, sedangkan [ada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 75,74%. Realisasi Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten TTU Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2.8. Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. TTU, 2023

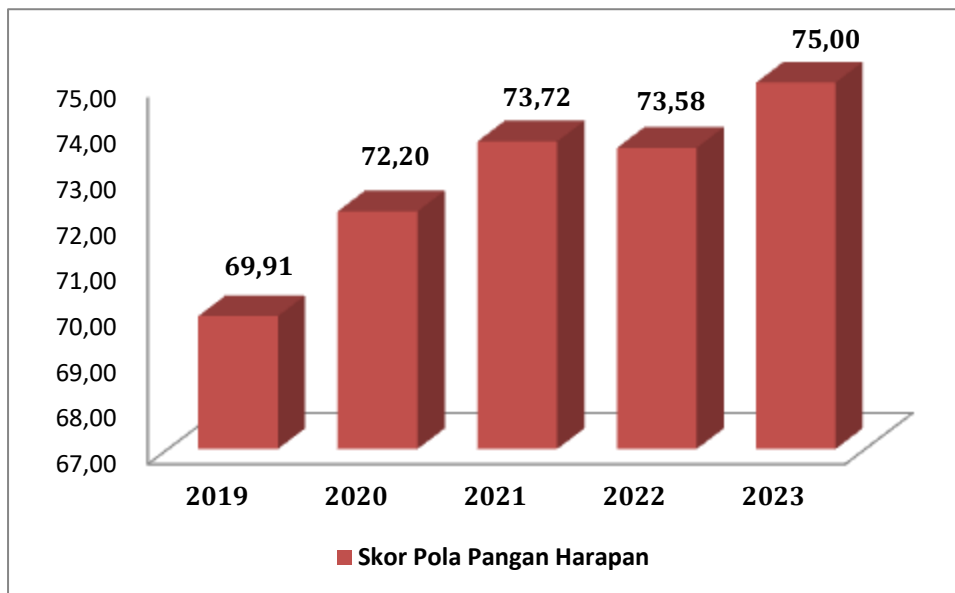
G. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi



pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten TTU tahun 2019 sebesar 69,91% dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi 75,00%. Capaian Skor Pola Pangan Harapan dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik. 2.9 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten TTU Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Komponen pembentuk IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 menempati peringkat ke-13 dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih perlu ditingkatkan. IPM TTU tahun 2022 sebesar 64,26% meningkat sebesar 0,9 menjadi 65.16 pada tahun 2023. Perbandingan IPM kabupaten Timor Tengah Utara dengan kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Wilayah NTT	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
Sumba Barat	64,43	12	65,22	12
Sumba Timur	66,17	5	67,05	5
Kupang	65,04	9	65,82	9

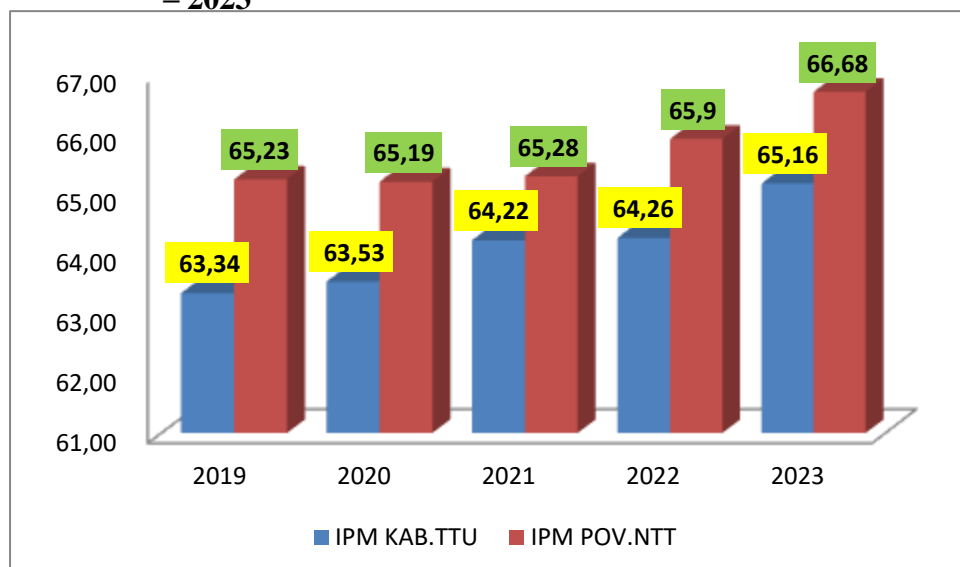


Timor Tengah Selatan	62,73	17	63,58	17
Timor Tengah Utara	64,26	13	65,16	13
Belu	63,22	14	63,83	15
Alor	62,26	20	62,99	20
Lembata	65,47	8	66,12	8
Flores Timur	64,93	10	65,79	11
Sikka	66,06	6	66,89	6
Ende	67,97	3	68,63	3
Ngada	68,26	2	69,14	2
Manggarai	65,83	7	66,42	7
Rote Ndao	63,21	15	64	14
Manggarai Barat	64,92	11	65,81	10
Sumba Barat Daya	63,15	16	63,74	16
Sumba Tengah	62,71	18	63,48	18
Nagekeo	66,22	4	67,07	4
Manggarai Timur	62,3	19	63,24	19
Sabu Raijua	57,9	22	58,89	22
Malaka	61,34	21	62,06	21
Kota Kupang	80,2	1	80,62	1
Nusa Tenggara Timur	65,9		66,68	

Sumber : BPS, TTU Dalam Angka tahun 2023

Secara umum, dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023, Indeks pembangunan manusia di Kabupaten TTU terus mengalami peningkatan. Jika dilihat pada Gambar di bawah ini IPM Kabupaten TTU mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun berada di bawah IPM Provinsi NTT. IPM Kabupaten TTU meningkat dari 63,34 pada tahun 2019 menjadi 66,68% pada tahun 2023.

Grafik 2.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. TTU Tahun 2019 – 2023



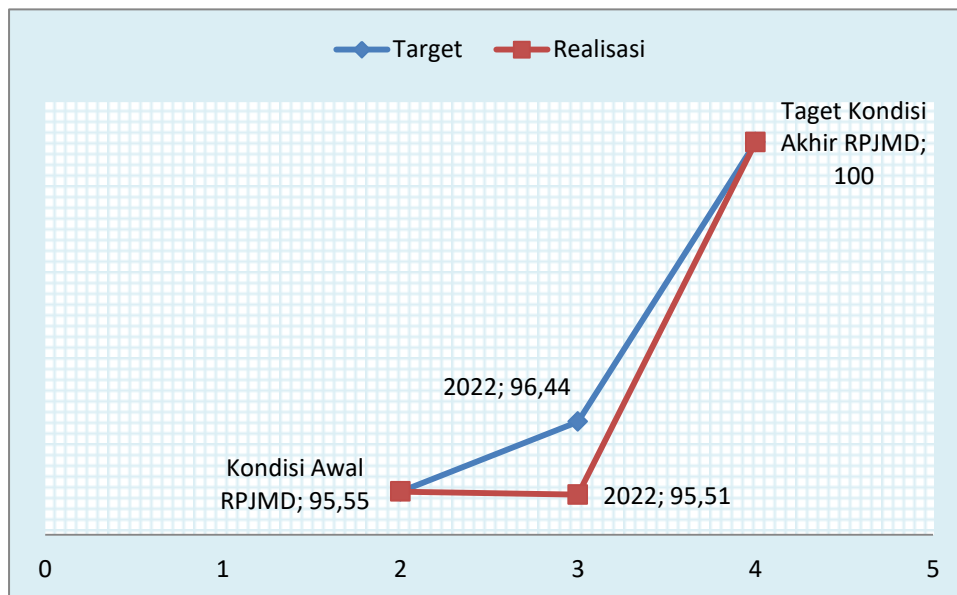
Sumber: BPS, TTU Dalam Angka tahun 2023

Indeks Pembangunan Gender merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antara Perempuan dan



Laki-Laki. Pada tahun 2022 target Indeks Pembangunan Gender (IPG) seperti yang tercantum dalam RPJMD yakni 96,44 namun realisasi pada tahun 2022 sebesar 95,51 dan mengalami penurunan dari kondisi awal sebesar 95,55. Terkait grafik IPG dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.11. Realisasi Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender yang harusnya meningkat pada tahun 2022 mengalami penurunan dari kondisi awal RPJMD. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan kesetaraan IPM Perempuan dan Laki-Laki mengingat target yang hendak dicapai pada akhir tahun RPJMD yakni 100.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Salah satu alasan keberadaan pemerintah daerah adalah untuk memberikan pelayanan publik secara berkualitas baik berupa barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten guna memenuhi kebutuhan dan menjawab tuntutan masyarakat. Sehubungan dengan konteks pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik dipilah kedalam dua jenis urusan pemerintahan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Capaian Indikator Aspek Pelayanan Umum dapat digambarkan sebagai berikut berikut:

2.3.1. Layanan Urusan Wajib non Dasar

A. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu system yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas



dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

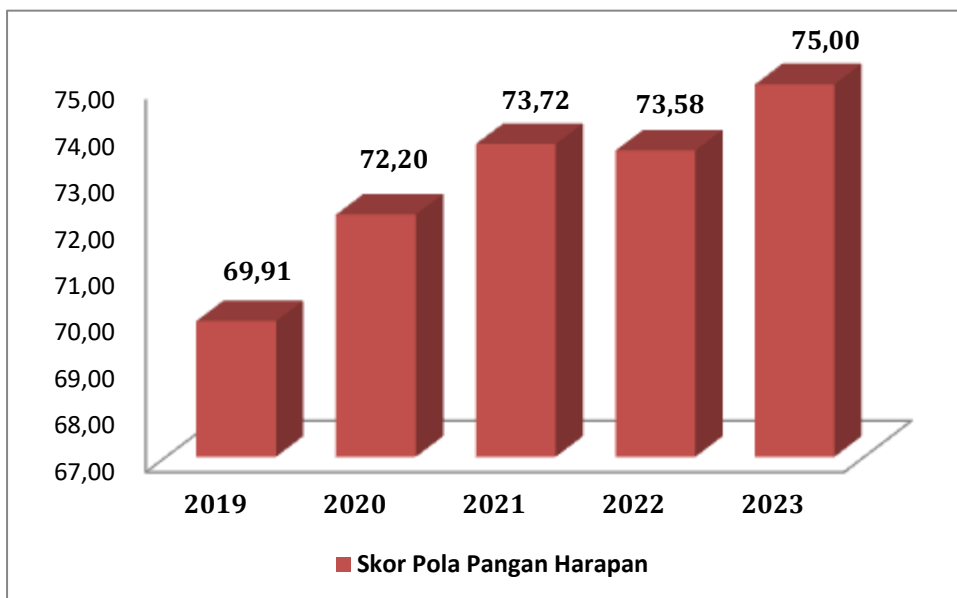
Ketahanan pangan yang memadai menjadi kebutuhan paling pokok dari setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini menjadi kebutuhan mendasar yang harus diutamakan karena berkenaan dengan keberlangsungan hidup sehari-hari dan bersinggungan pula dengan aspek pendidikan dan kesehatan.

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, diantara kebutuhan yang lain, pangan harus terpenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Ketersediaan pangan disuatu wilayah dipengaruhi oleh produksi, distribusi, akses, stabilitas harga dan konsumsi. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan padaurusan pangan dapat diketahui sebagai berikut:

B. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten TTU tahun 2019 sebesar 69,91% dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi 75,00%. Capaian Skor Pola Pangan Harapan dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2.12. Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten TTU Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023

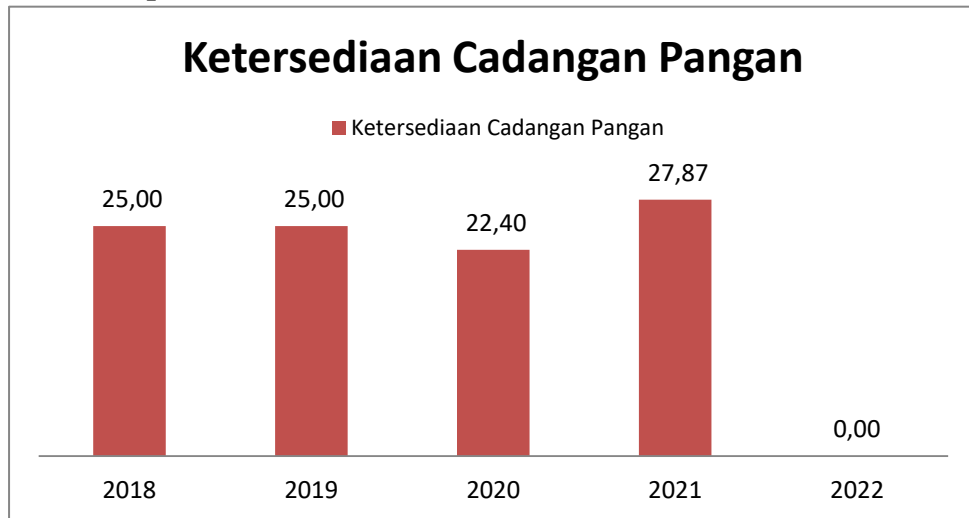
C. Ketersediaan Cadangan Pangan

Ketersediaan Cadangan Pangan Utama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berfluktuatif. Pada tahun 2019 ketersediaan pangan utama mencapai 25%, tahun 2020 cadangan pangan utama mengalami penurunan sebesar 22,40% menjadi 27,87% dan pada tahun 2022-2023 cadangan pangan sebesar 0% dikarenakan



kekurangan fiskal. Capaian ketersediaan pangan di Kabupaten TTU pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Grafik 2.13. Capaian ketersediaan Cadangan pangan di Kabupaten TTU pada tahun 2018 – 2022



Sumber : Dinas Pangan Kab. TTU, 2022

Pemerintah daerah berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (dalam arti luas) dan terobosan-terobosan lain yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan. Karenanya penting untuk dideskripsikan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten TTU, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa regulasi daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten TTU.



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. KONDISI UMUM KEMISKINAN KAB.TTU

3.2. ANALISIS MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI

3.3. ANALISIS MASALAH KEMISKINAN NON-KONSUMSI

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyaknya pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin, maka banyak defenisi tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya defenisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah “kekurangan” dalam “kesejahteraan”. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefenisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dimana suatu standar kehidupan yang “layak” tidak tercapai. Dalam menentukan standar kehidupan yang “layak” BPS melakukan pengukuran kemiskinan melalui pendekatan kebutuhan dasar, dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan pendekatan ini kemudian ditentukan garis kemiskinan yang merupakan gabungan (Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan), Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin.

3.1.1. Kondisi Kemiskinan Makro

A. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 persentase kemiskinan sebesar 22,45%, tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,17% menjadi 22,28%. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,34% menjadi 22,62%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,12% menjadi 21,50% dan kembali mengalami peningkatan dari 21,50% di tahun 2022 menjadi 21,85% di tahun 2023. Naik turunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai akibat dari adanya Pandemi Covid-19, cuaca tidak menentu yang menyebabkan produktifitas pertanian menurun, meningkatnya harga pangan dan meningkatnya pertumbuhan penduduk.



Apabila di bandingkan dengan 17 Tujuan yang termuat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan pertama yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun atau *end poverty in all its forms everywhere* dengan beberapa target sebagai berikut :

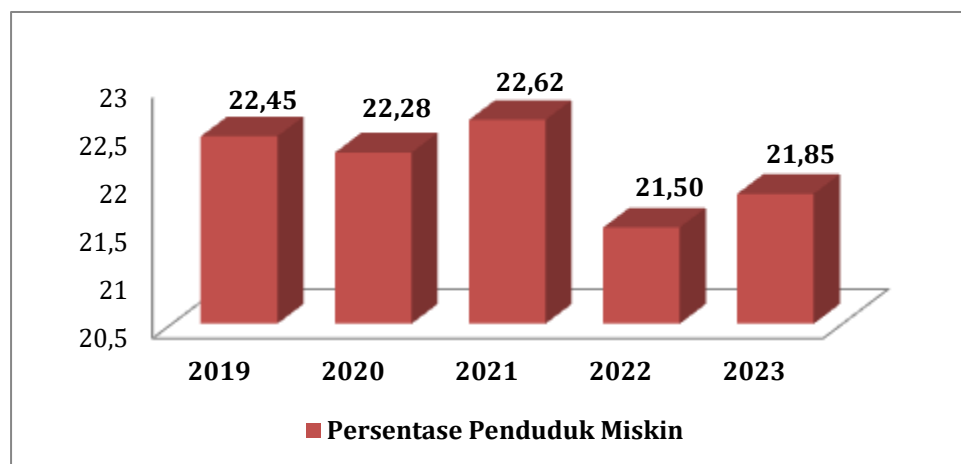
1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dollar AS per hari.
2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional



3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
6. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
7. Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Maka pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu berupaya lebih keras untuk dapat mewujudkan tujuan dari SDGs dan target RPJMD Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditargetkan turun sampai dengan 21,03 % di tahun 2026.

Grafik 3.1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



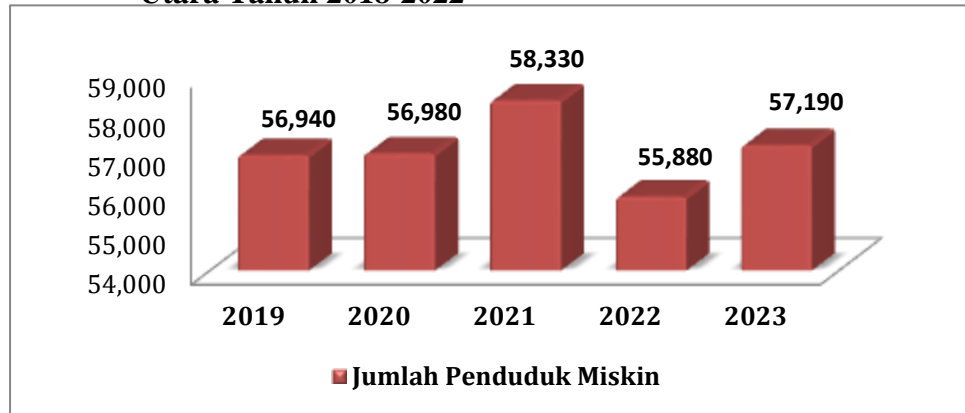
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

A. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Jumlah penduduk miskin (jiwa) Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 sebanyak 56.940 jiwa dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 menjadi 58.330 jiwa. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 2.450 jiwa menjadi 55.880 jiwa dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 57.190 jiwa.



Grafik 3.2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2022



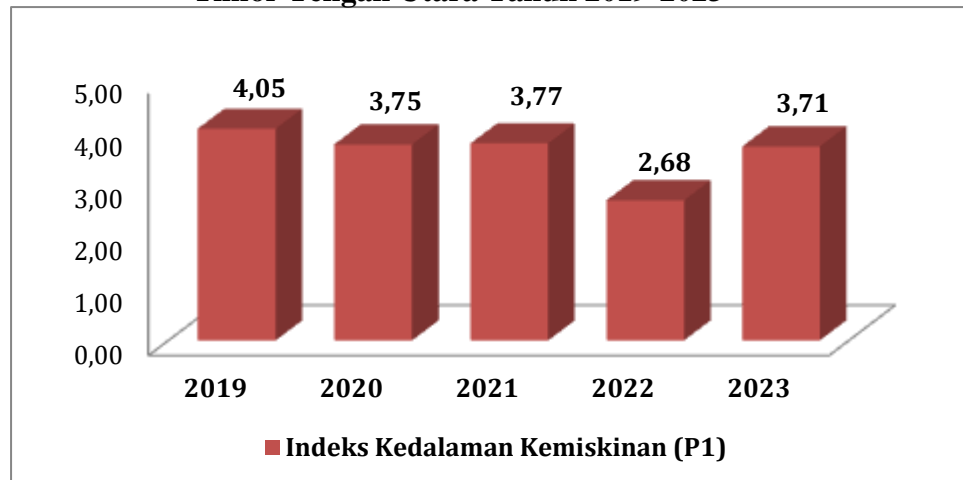
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,05 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 3,75. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 3,77, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup baik menjadi 2,68. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok miskin semakin dekat dengan garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa di tahun 2023 rata-rata pengeluaran kelompok miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Grafik 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

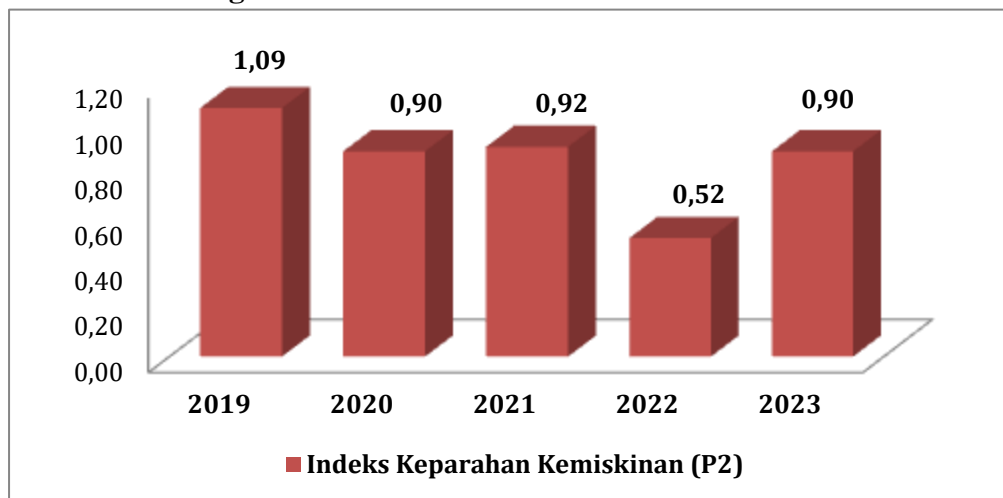


C. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Indeks-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend yang positif dimana dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, sementara pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan.

Grafik 3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



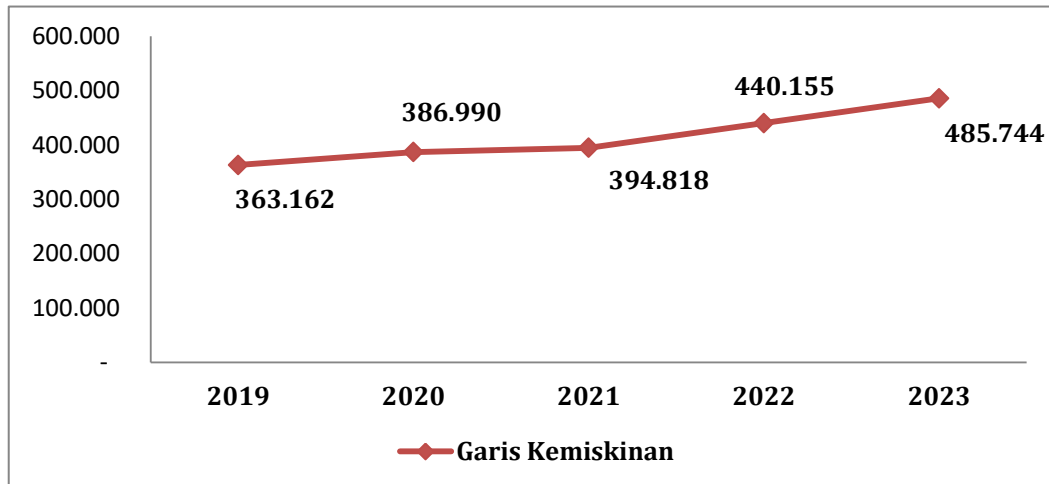
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti tempat tinggal dan makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi makanan (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di pedesaan. GK pada tahun 2023 sebesar Rp. 485.744, hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita dalam sebulan sebesar Rp. 485.744. Penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara dikatakan miskin jika rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Kondisi GK Kabupaten Timor Tengah Utara dapat tergambar pada grafik 3.5 dibawah ini:



Grafik 3.5. Garis Kemiskinan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

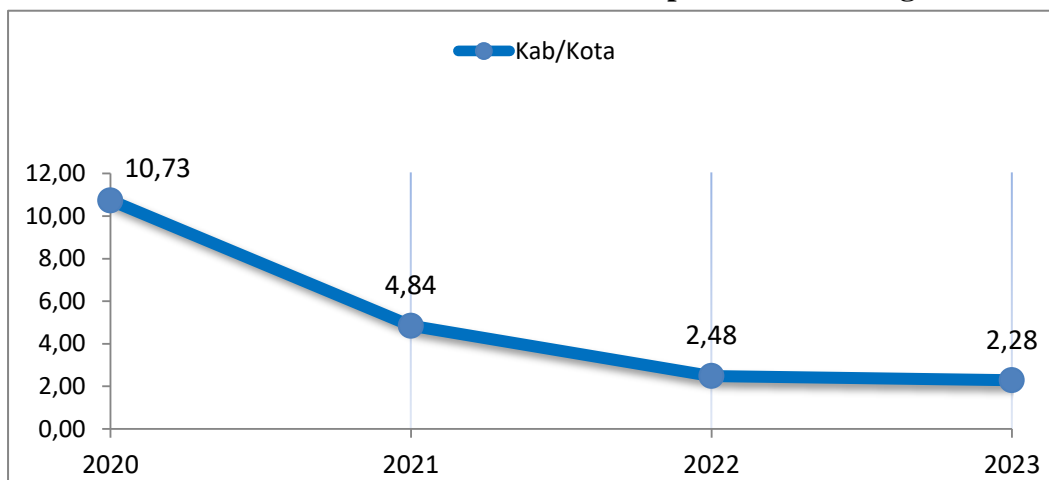
E. Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB,1996).

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp 1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem terhitung dari tahun 2020-2023 mengalami Trend penurunan pada tahun 2020 sebesar 10,73 % dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2023 menjadi 2,28 %. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6. Grafik Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Timor Tengah Utara



Sumber Data : Badan Pusat Statistik



3.1.2. Kondisi Kemiskinan Mikro Kabupaten Timor Tengah Utara

Kemiskinan mikro adalah bentuk kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang stabil. Kemiskinan mikro dapat terjadi pada individu atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan mikro dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses ke sumber daya ekonomi dan sosial, seperti lahan pertanian atau pekerjaan yang layak, ketidakmampuan untuk mengakses modal atau kredit yang diperlukan untuk memulai usaha, dan keterbatasan dalam pendidikan dan keterampilan.

Kemiskinan mikro dapat memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Individu yang hidup dalam kemiskinan mikro seringkali mengalami masalah kesehatan, nutrisi yang buruk, pendidikan yang terbatas dan pengangguran yang tinggi. Kemiskinan mikro juga dapat memperburuk masalah sosial, seperti kekerasan dan kejahatan.

Upaya untuk mengatasi kemiskinan mikro biasanya melibatkan program-program pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal dan akses ke pasar yang lebih luas. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk memungkinkan masyarakat miskin keluar dari kemiskinan mikro dan membangun masa depan yang lebih baik.

3.1.2.1. Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 – 3

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) penduduk miskin ekstrem di bagi dalam Desil 1-3. Jumlah penduduk miskin desil 1- 3 mengacu pada jumlah penduduk yang tinggal di keluarga dengan pendapatan per-kapita di antara 10% terbawah dari seluruh keluarga di suatu negara atau wilayah. Biasanya desil 1- 3 dihitung berdasarkan urutan pendapatan rumah tangga dari yang terendah hingga yang tertinggi, lalu dibagi menjadi sepuluh (10) kelompok yang sama besar (desil), di mana desil 1- 3 mencakup kelompok dengan pendapatan terendah hingga 40%. Dalam konteks ini, penduduk yang termasuk dalam kategori desil 1- 3 dianggap memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin biasanya difokuskan pada kelompok ini.

Gambaran tentang kondisi penduduk miskin desil 1- 3 di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Miskin kategori miskin ekstrem di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023, Desil 1-3

No.	Kecamatan	Keluarga				Individu			
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3
Total (24)		31.200	13.488	7.260	10.452	145.070	73.517	32.223	39.330
1.	Miomaffo Timur	1.409	470	368	571	6.837	2.689	1.804	2.344
2.	Miomaffo Barat	1.867	630	470	767	8.622	3.337	2.197	3.088



No.	Kecamatan	Keluarga				Individu			
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3
3.	Biboki Selatan	1.312	617	286	409	5.618	3.146	1.116	1.356
4.	Noemuti	1.049	340	242	467	4.743	1.853	1.104	1.786
5.	Kota Kefamenanu	2.029	698	425	906	10.041	3.941	2.050	4.050
6.	Biboki Utara	1.622	784	389	449	7.848	4.450	1.720	1.678
7.	Biboki Anleu	2.726	1.520	499	707	12.468	8.215	1.949	2.304
8.	Insana	2.939	1.328	663	948	13.708	7.313	2.937	3.458
9.	Insana Utara	1.292	548	308	436	6.537	3.163	1.517	1.857
10.	Noemuti Timur	547	235	135	177	2.488	1.261	585	642
11.	Miomaffo Tengah	970	393	260	317	4.338	2.101	1.134	1.103
12.	Musi	548	194	145	209	2.596	1.104	686	806
13.	Mutis	1.091	518	276	297	4.988	2.780	1.164	1.044
14.	Bikomi Selatan	1.479	668	344	467	6.700	3.573	1.472	1.655
15.	Bikomi Tengah	1.148	539	292	317	5.080	2.771	1.204	1.105
16.	Bikomi Nilulat	719	268	193	258	3.112	1.384	811	917
17.	Bikomi Utara	863	334	211	318	3.980	1.783	974	1.223
18.	Naibenu	724	311	178	235	3.756	1.877	898	981
19.	Insana Fafinesu	875	374	192	309	3.992	1.948	867	1.177
20.	Insana Barat	1.643	720	362	561	7.491	3.944	1.577	1.970
21.	Insana Tengah	1.686	746	402	538	7.529	3.903	1.729	1.897
22.	Biboki Tan Pah	888	410	214	264	3.970	2.160	902	908
23.	Biboki Moenleu	1.157	516	271	370	5.628	2.967	1.245	1.416
24.	Biboki Feotleu	617	327	135	155	3.000	1.854	581	565

Sumber Data : Kemenko PMK

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Timor Tengah Utara, total jumlah keluarga dikategorikan miskin yang masuk desil 1-3 sebanyak 31.200 kepala keluarga. Lalu individu miskin yang masuk kategori desil 1-3 sebanyak 145,070 orang. Jumlah tersebut terdapat di 24 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan jumlah penduduk miskin yang masuk dalam kategori Desil 1-3 terbanyak terdapat di Kecamatan Insana dengan Jumlah Keluarga sebanyak 2.939 keluarga, diikuti oleh Kecamatan Biboki Anleu yang menempati posisi ke dua dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 2.726 keluarga dan Kecamatan Kota Kefamenanu dengan jumlah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 – 3 sebanyak 2.029 keluarga.

Jika di lihat dari jumlah individu, yang masuk dalam kategori Desil 1 – 3 yakni kecamatan Insana dengan jumlah 13.708 orang, diikuti oleh Kecamatan Biboki Anleu dengan 12.468 orang dan Kecamatan Kota Kefamenanu menempati posisi ke tiga dengan jumlah individu yang masuk kategori desil 1 – 3 sebanyak 10.041 orang.



3.1.2.2. Jumlah Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Desil 1 s/d Desil 4

Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi dimana perempuan memegang peran sebagai kepala keluarga, atau dalam arti lain, sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengurusan keuangan di dalam rumah tangga. Di banyak negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang, KRTP sering terkait dengan kemiskinan.

KRTP identik dengan kemiskinan karena dalam banyak kasus, KRTP menghadapi berbagai hambatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat memperburuk situasi kemiskinan mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan KRTP lebih rentan mengalami kemiskinan antara lain:

1. Diskriminasi Gender: Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, perempuan sering mengalami diskriminasi gender dalam hal pendidikan, keterampilan, akses terhadap pekerjaan, serta hak atas properti dan warisan. Hal ini dapat menyebabkan KRTP kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, penghasilan yang memadai, dan kepemilikan aset.
2. Beban Ganda: KRTP seringkali memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak sekaligus. Hal ini dapat menyebabkan KRTP harus bekerja keras dalam waktu yang lama dan mengorbankan waktu dan tenaga untuk merawat keluarga, yang dapat membatasi kesempatan mereka untuk bekerja dan menghasilkan uang.
3. Keterbatasan Akses: KRTP seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti kredit, pelatihan, dan jaringan sosial. Hal ini dapat membuat KRTP kesulitan dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
4. Tidak Adanya Hak Pemilikan Aset: KRTP seringkali tidak memiliki hak atas properti dan warisan, sehingga sulit untuk memperoleh aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang, seperti lahan atau rumah.

Semua faktor ini dan faktor-faktor lainnya dapat membuat KRTP lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan gender bagi perempuan, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu KRTP keluar dari kemiskinan.

Jumlah Rumah Tangga dengan Kepala Keluarga Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara desil 1- 4 diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok usia. Pertama, KRTP yang berusia kurang dari 45 tahun, kedua, KRTP yang berusia 45-59 tahun, ketiga, KRTP berusia 60 tahun ke atas. Dari ketiga klasifikasi tersebut, jumlah KRTP terbanyak di usia 60 tahun ke atas, dengan jumlah 2.080. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.2. Jumlah Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Desil 1 s/d Desil 4

No.	Kecamatan	Jumlah	Usia < 45	Usia 45-59	Usia ≥ 60
Total (24)		4.190	727	1.383	2.080
1	Miomaffo Timur	230	29	60	141
2	Miomaffo Barat	348	50	110	188
3	Biboki Selatan	199	44	50	105
4	Noemuti	168	24	54	90
5	Kota Kefamenanu	316	65	126	125
6	Biboki Utara	153	26	45	82
7	Biboki Anleu	359	70	113	176
8	Insana	411	76	126	209
9	Insana Utara	132	25	64	43
10	Noemuti Timur	82	19	28	35
11	Miomaffo Tengah	183	22	68	93
12	Musi	56	5	22	29
13	Mutis	129	27	47	55
14	Bikomi Selatan	151	29	45	77
15	Bikomi Tengah	167	31	52	84
16	Bikomi Nilulat	94	15	23	56
17	Bikomi Utara	128	14	48	66
18	Naibenu	92	14	33	45
19	Insana Fafinesu	89	13	38	38
20	Insana Barat	251	44	88	119
21	Insana Tengah	183	37	49	97
22	Biboki Tan Pah	101	19	31	51
23	Biboki Moenleu	128	22	49	57
24	Biboki Feotleu	40	7	14	19

Sumber Data : Kemenko PMK

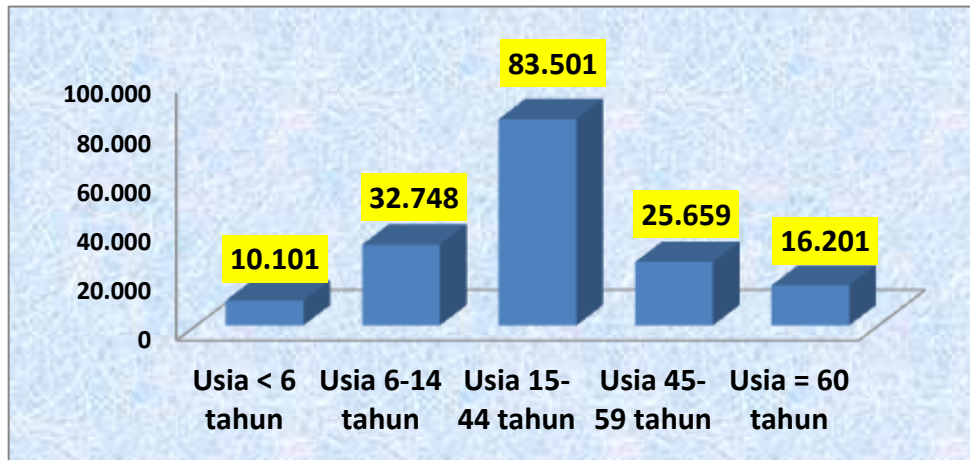
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total 4.190 rumah tangga yang kepala keluarganya perempuan paling banyak terdapat di Kecamatan Insana dengan jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 411 keluarga, di ikuti oleh kecamatan Biboki Anleu yang menempati posisi ke dua dengan jumlah 359 keluarga, dan kecamatan Miomaffo Barat berada pada posisi ke tiga dengan jumlah 348 keluarga yang kepala keluarganya perempuan.

3.1.2.3. Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Desil 1 s/d Desil 4

Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Desil 1 s/d Desil 4 memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Desil 1 hingga Desil 4 adalah kelompok penduduk dengan pendapatan rendah hingga menengah bawah yang sering kali berada dalam kondisi rawan kemiskinan. Jumlah individu dalam kelompok ini dapat menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Data Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Desil 1 s/d 4 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.7 Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Timor Tengah Utara



Sumber Data :Badan Pusat Statistik (BPS)

Pertama-tama, tingkat kemiskinan akan semakin tinggi jika jumlah individu dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 4 semakin besar. Hal ini disebabkan karena kelompok ini memiliki pendapatan yang relatif rendah sehingga mereka lebih rentan terhadap kemiskinan.

Kedua, tingkat kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh distribusi jumlah individu berdasarkan jenis kelamin dan usia. Misalnya, jika jumlah individu wanita dan anak-anak di kelompok Desil 1 hingga Desil 4 lebih besar daripada jumlah individu laki-laki, maka tingkat kemiskinan akan cenderung lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena wanita dan anak-anak seringkali memiliki kesempatan kerja yang lebih terbatas dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.



Tabel 3.3. Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia Desil 1- 4 (Data Tahun 2022) Desil 1 sampai Dengan Desil 4

No	Kecamatan	Usia < 6 tahun			Usia 6-14 tahun			Usia 15-44 tahun			Usia 45-59 tahun			Usia ≥ 60 tahun		
		Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki
Total (24)		6.769	3.359	3.410	30.807	14.973	15.834	81.345	40.390	40.955	25.232	12.813	12.419	17.119	8.001	9.118
1	Miomaffo Timur	393	204	189	1.544	776	768	3.879	1.943	1.936	1.214	618	596	980	491	489
2	Miomaffo Barat	440	216	224	1.779	862	917	4.918	2.440	2.478	1.757	941	816	1.243	605	638
3	Biboki Selatan	325	156	169	1.158	548	610	2.971	1.469	1.502	973	511	462	814	389	425
4	Noemuti	258	127	131	1.087	544	543	2.826	1.413	1.413	855	412	443	682	341	341
5	Kota Kefamenanu	677	348	329	2.728	1.311	1.417	6.186	3.070	3.116	1.762	876	886	806	367	439
6	Biboki Utara	330	157	173	1.717	801	916	4.287	2.132	2.155	1.291	650	641	792	355	437
7	Biboki Anleu	505	240	265	2.696	1.302	1.394	6.802	3.336	3.466	1.985	983	1.002	1.282	609	673
8	Insana	588	317	271	2.725	1.313	1.412	7.592	3.760	3.832	2.328	1.196	1.132	1.710	809	901
9	Insana Utara	301	151	150	1.561	753	808	3.787	1.889	1.898	1.056	517	539	507	210	297
10	Noemuti Timur	99	41	58	563	285	278	1.351	684	667	424	218	206	319	139	180
11	Miomaffo Tengah	202	102	100	861	437	424	2.440	1.211	1.229	844	428	416	586	299	287
12	Musi	111	62	49	581	280	301	1.454	682	772	505	248	257	332	151	181
13	Mutis	214	94	120	987	476	511	2.724	1.375	1.349	843	412	431	540	245	295
14	Bikomi Selatan	273	151	122	1.368	675	693	3.742	1.852	1.890	1.130	572	558	733	333	400
15	Bikomi Tengah	219	119	100	973	480	493	2.829	1.362	1.467	989	523	466	539	258	281
16	Bikomi Nilulat	109	47	62	556	262	294	1.685	858	827	558	283	275	489	223	266
17	Bikomi Utara	174	78	96	739	349	390	2.198	1.108	1.090	755	409	346	580	264	316
18	Naibenu	147	80	67	755	370	385	2.086	1.049	1.037	661	345	316	452	212	240
19	Insana Fafinesu	165	72	93	819	392	427	2.185	1.063	1.122	741	379	362	498	222	276
20	Insana Barat	383	182	201	1.503	711	792	4.147	2.062	2.085	1.323	674	649	923	444	479
21	Insana Tengah	345	172	173	1.487	748	739	4.115	2.085	2.030	1.289	636	653	878	393	485
22	Biboki Tan Pah	153	69	84	853	414	439	2.215	1.073	1.142	599	312	287	469	211	258
23	Biboki Moenleu	231	105	126	1.175	595	580	3.366	1.704	1.662	857	426	431	579	262	317
24	Biboki Feotleu	127	69	58	592	289	303	1.560	770	790	493	244	249	386	169	217

Sumber Data : Kemenko PMK



Dari Tabel 3.3. di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Usia Desil 1-4 Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022, jumlah individu dengan usia kurang dari 6 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 6.769 orang, dengan klasifikasi perempuan berjumlah 3.359 orang dan laki-laki berjumlah 3.410 orang. Lalu total jumlah individu berusia 6-14 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 30.807 orang, dengan klasifikasi perempuan berjumlah 14.973 orang dan laki-laki berjumlah 15.834 orang. Selanjutnya, total jumlah individu dengan usia 15-44 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 81.345 orang, dengan klasifikasi perempuan berjumlah 40.390 orang dan laki-laki berjumlah 40.955 orang. Lalu total jumlah individu berusia 45-59 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 25.232 orang, dengan klasifikasi perempuan berjumlah 12.813 orang dan laki-laki berjumlah 12.419 orang. Dan total jumlah individu berusia lebih dari 60 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 17.119 orang, dengan klasifikasi perempuan berjumlah 8.001 orang dan laki-laki berjumlah 9.118 orang.

3.1.2.4. Jumlah Individu yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia 15 – 60 Tahun Desil 1 s/d Desil 4

Jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok usia 15-60 tahun dalam kategori desil 1 hingga desil 4 dapat berdampak pada peningkatan atau penurunan kemiskinan di suatu wilayah atau negara.

Pada umumnya, semakin tinggi persentase jumlah individu yang bekerja di kelompok usia 15-60 tahun dalam kategori desil 1-4, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh oleh keluarga atau individu tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Namun, jika terdapat penurunan jumlah individu yang bekerja di kelompok usia 15-60 tahun dalam kategori desil 1-4, maka dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin sedikit orang yang bekerja, maka semakin sedikit pula penghasilan yang diperoleh, sehingga dapat mengurangi kesejahteraan dan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Selain itu, jumlah individu yang tidak bekerja juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Jika terdapat peningkatan jumlah individu yang tidak bekerja, terutama di kelompok usia 15-60 tahun dalam kategori desil 1-4, maka dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin banyak individu yang tidak bekerja, maka semakin sedikit pula penghasilan yang diperoleh oleh keluarga atau individu tersebut, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan dan meningkatkan kemiskinan.

Untuk itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki kondisi perekonomian, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat 55.075 orang yang tidak bekerja pada usia angkatan kerja (15-59 tahun). Sementara jumlah penduduk yang bekerja yaitu 51.502 orang. Hal ini berarti, jumlah orang yang



tidak bekerja hampir sama dengan jumlah individu yang bekerja. Hal menarik yaitu pada rentang usia 5-14 tahun, terdapat 226 anak yang bekerja. Hal ini mengindikasikan ada anak-anak di bawah usia angkatan kerja yang bekerja. Fakta-fakta ini tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah melalui dinas terkait . Informasi terkait data tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4. Jumlah Individu yang Bekerja dan Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Usia di Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan	5-14 tahun			15-59 tahun			≥ 60 tahun		
		Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja
Total (24)		33.684	33.458	226	106.577	55.075	51.502	17.119	2.766	14.353
1	Miomaffo Timur	1.667	1.656	11	5.093	2.161	2.932	980	101	879
2	Miomaffo Barat	1.951	1.944	7	6.675	2.590	4.085	1.243	60	1.183
3	Biboki Selatan	1.297	1.281	16	3.944	2.002	1.942	814	137	677
4	Noemuti	1.191	1.191	0	3.681	1.840	1.841	682	82	600
5	Kota Kefamenanu	3.013	3.002	11	7.948	4.453	3.495	806	153	653
6	Biboki Utara	1.872	1.864	8	5.578	3.519	2.059	792	193	599
7	Biboki Anleu	2.912	2.890	22	8.787	4.050	4.737	1.282	120	1.162
8	Insana	2.978	2.954	24	9.920	5.360	4.560	1.710	313	1.397
9	Insana Utara	1.689	1.683	6	4.843	2.910	1.933	507	137	370
10	Noemuti Timur	605	599	6	1.775	782	993	319	15	304
11	Miomaffo Tengah	950	944	6	3.284	1.673	1.611	586	121	465
12	Musi	630	626	4	1.959	1.227	732	332	128	204
13	Mutis	1.092	1.075	17	3.567	1.842	1.725	540	74	466
14	Bikomi Selatan	1.492	1.469	23	4.872	2.496	2.376	733	108	625
15	Bikomi Tengah	1.074	1.073	1	3.818	2.031	1.787	539	106	433
16	Bikomi Nilulat	617	613	4	2.243	1.473	770	489	168	321
17	Bikomi Utara	803	800	3	2.953	1.376	1.577	580	41	539
18	Naibenu	833	830	3	2.747	1.253	1.494	452	12	440
19	Insana Fafinesu	883	879	4	2.926	1.375	1.551	498	80	418
20	Insana Barat	1.658	1.656	2	5.470	2.975	2.495	923	189	734
21	Insana Tengah	1.620	1.616	4	5.404	3.706	1.698	878	302	576
22	Biboki Tan Pah	940	914	26	2.814	1.377	1.437	469	60	409
23	Biboki Moenleu	1.271	1.254	17	4.223	1.614	2.609	579	25	554
24	Biboki Feotleu	646	645	1	2.053	990	1.063	386	41	345

Sumber : Kemenko PMK

3.2. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi

3.2.1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

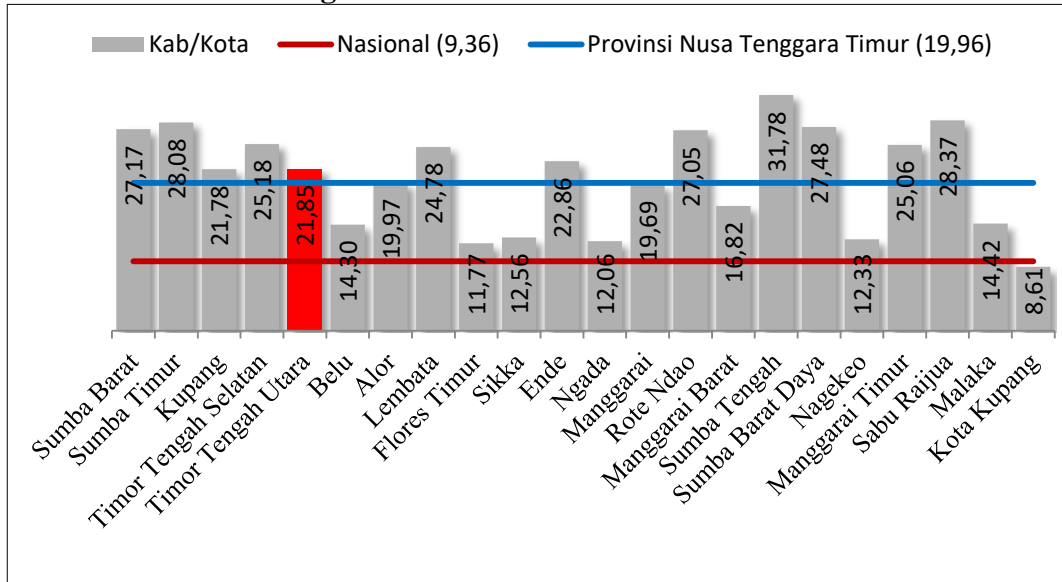
A. Posisi Relatif

Berdasarkan Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2023, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten TTU berada pada posisi 21,85%, yang mana Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada peringkat ke 11 dari Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan prosentase penduduk miskin berada di Kabupaten Sumba Tengah dengan persentasenya 31,78% dan terendah pada Kota Kupang dengan persentase 8,61%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional maka persentase kemiskinan



Kabupaten Timor Tengah Utara masih berada di atas capaian Nasional dengan persentase 9,36% dan Provinsi NTT sebesar 19,96%.

Grafik 3.8 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023

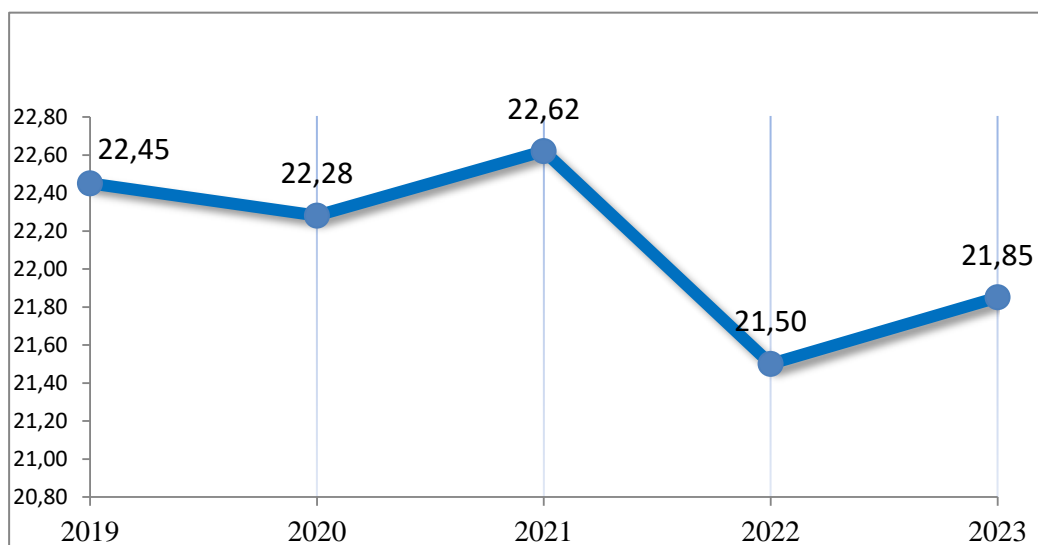


Sumber Data :Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan analisis Perkembangan Antar Waktu penurunan kemiskinan Kabupaten TTU pada periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 22,45%, mengalami penurunan sebesar 0,17% menjadi 22,28% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 22,62% sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,12% menjadi 21,50% dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 21,85%.

Grafik 3.9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



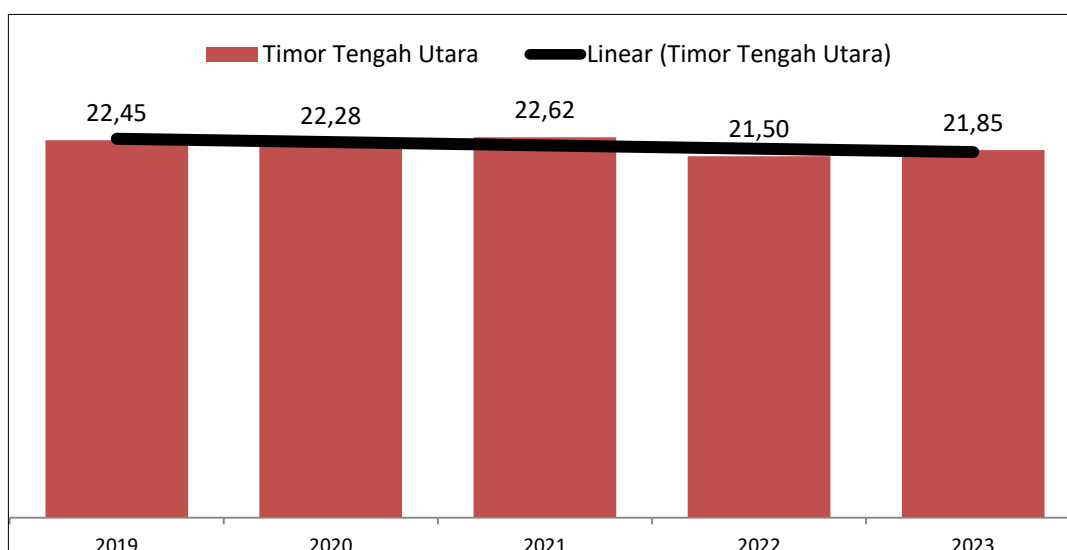
Sumber Data :Badan Pusat Statistik (BPS)



C. Efektifitas

Berdasarkan Grafik 3.10 Persentase penduduk miskin Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 menunjukkan Trend yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program unggulan yang dijalankan oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir berkontribusi positif terhadap penurunan persentase kemiskinan. Program-program yang dimaksud antara lain Program Peningkatan Rumah Layak Huni, program bantuan langsung kepada masyarakat seperti Program Keluarga Harapan dan lain sebagainya. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin karena terjadi Pandemi Covid 19 dan Badai Seroja.

Grafik 3.10 Analisis Efektifitas Persentase Penduduk Miskin (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2018-2022



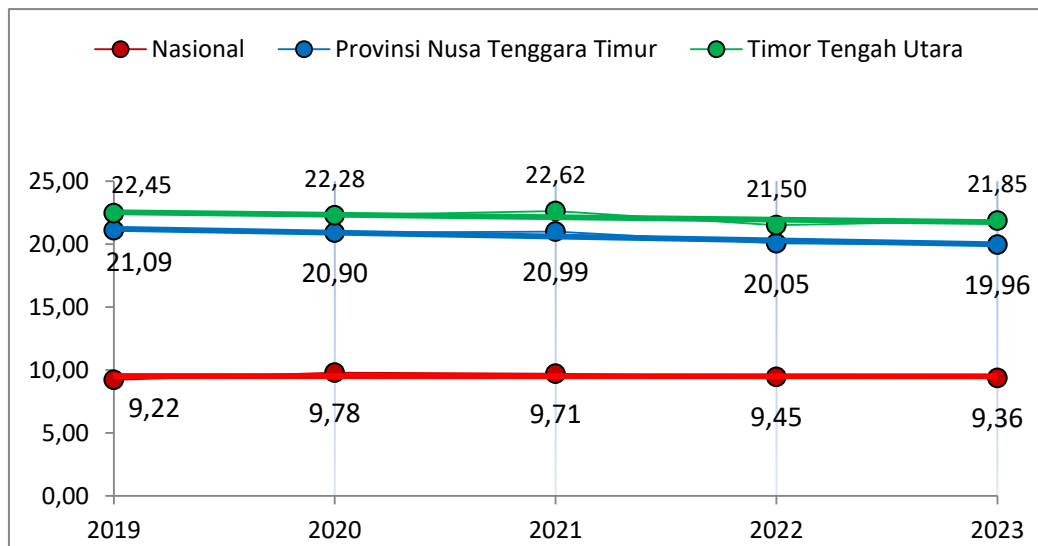
Sumber Data :Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi

Capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi terakhir pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini tidak sejalan dengan persentase penduduk miskin Provinsi NTT dan Nasional yang selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah tidak berkontribusi dalam penurunan Persentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional. Relevansi dapat dilihat pada grafik berikut:



Tabel 3.11 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Timor Tengah Utara. Tahun 2018-2022



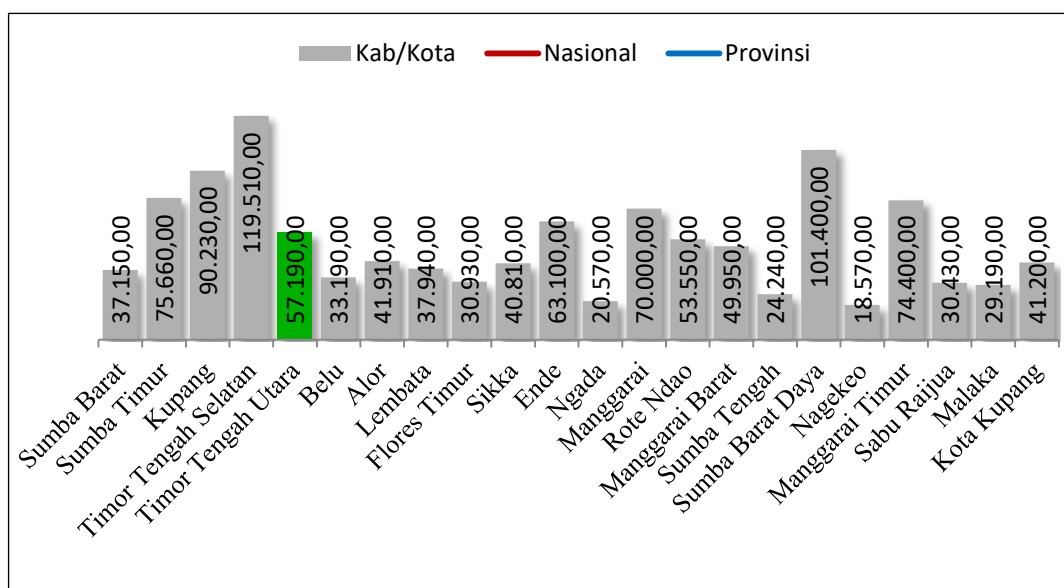
Sumber Data :Badan Pusat Statistik (BPS)

3.2.2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

A. Posisi Relatif

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 sebanyak 57.190 jiwa atau 21,85 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten TTU. Jika dibandingkan dengan 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah penduduk miskin di Kabupaten TTU menduduki posisi ke delapan. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 119.510 jiwa lalu, sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Nagakeo dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 18.570 jiwa.

Grafik 3.12 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



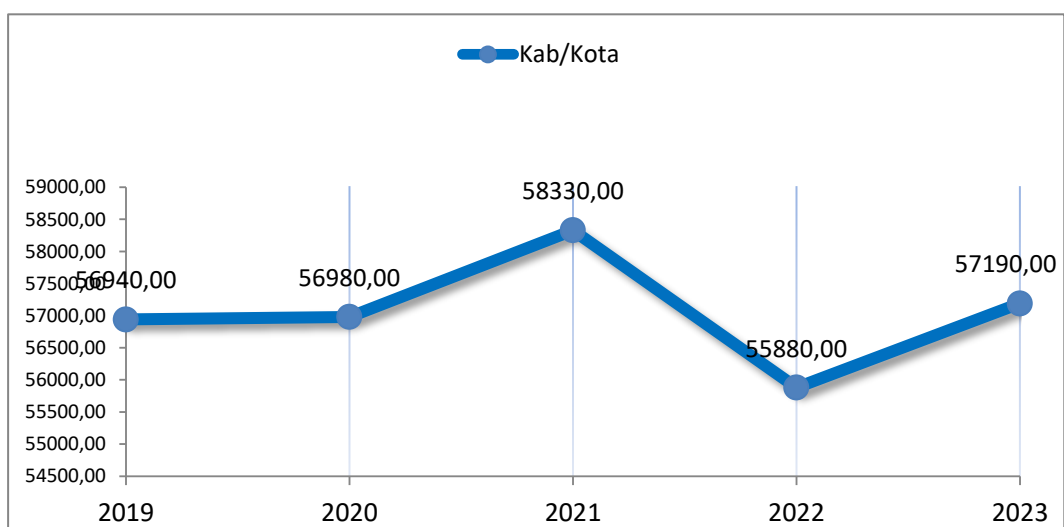
Sumber Data :Badan Pusat Statistik (BPS)



B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara pada periode 2019-2021 mengalami peningkatan, terakhir tahun 2021 sebesar 58.330 jiwa. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat dari adanya Badai Seroja dan Pandemi Virus Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2.450 jiwa menjadi 55.880 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut merupakan hasil dari adanya upaya pemerintah dalam menjalankan program unggulan daerah seperti Program Rumah Layak Huni, Program Bantuan Ternak Sapi serta bantuan lainnya dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai serta Bantuan Sosial Lainnya. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebanyak 1.310 jiwa menjadi 57.190 di tahun 2023.

Grafik 3.13. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



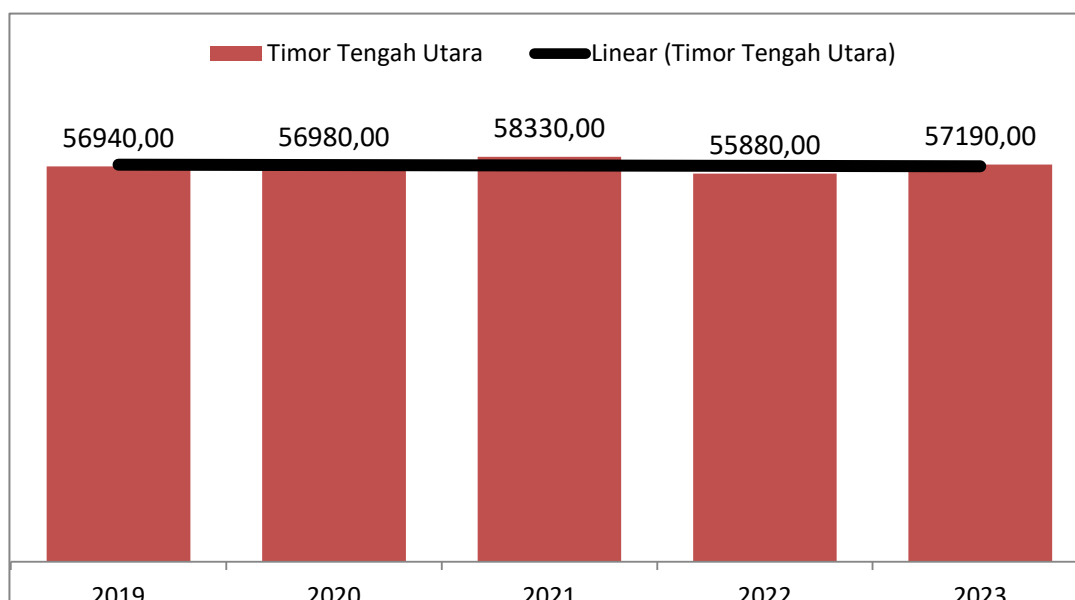
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektifitas

Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten TTU mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021 sebagai akibat dari terjadinya perubahan iklim seperti musim panas yang berkepanjangan dan terjadinya Badai Seroja, serta adanya Pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan Trend kemiskinan terus mengalami peningkatan, akan tetapi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan melalui program-program yang dapat menurunkan angka kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial lainnya, Bantuan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Ternak Sapi, sehingga pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 58.330 jiwa pada tahun 2021 menjadi 55.880. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan menjadi 57.190 Jiwa. Salah satu penyebab dari kenaikan jumlah penduduk miskin tahun 2023 adalah adanya peningkatan harga kebutuhan pokok. Analisis efektifitas dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 3.14 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten TTU selama tahun 2019-2023 relevan dengan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi NTT dan Nasional karena dalam kurun waktu tahun 2019-2023 baik Kabupaten TTU maupun Provinsi NTT dan Nasional sama-sama mengalami peningkatan.

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin		
	Kabupaten Timor Tengah Utara	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nasional
2019	56,940	1.146,320	24.780.000
2020	56,980	1.153,760	27.550.000
2021	58,330	1.169,310	26.500.000
2022	55,880	1.131,620	26.363.270
2023	57,190	1.141,110	25.898.550

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

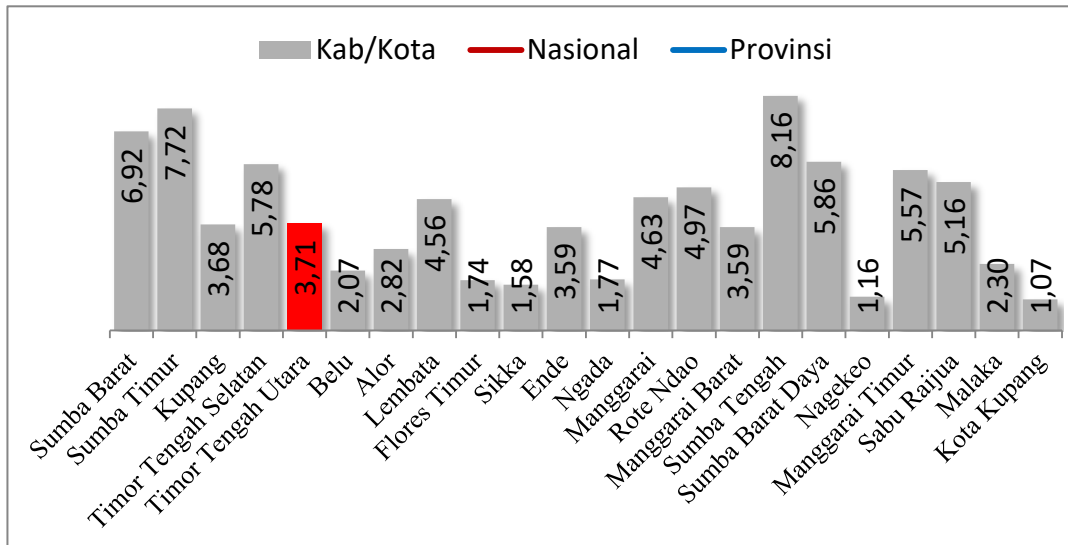
A. Posisi Relatif

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa dalam kemiskinan yang dirasakan penduduk. Semakin besar P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar (Makanan dan Non Makanan) semakin jauh dari batas garis kemiskinan, sebaliknya jika P1 semakin mengecil menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan. Pada tahun 2023 tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten TTU sebesar 3,71. Jika dibandingkan dengan 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Kabupaten TTU menempati posisi ke 11. Sementara itu kabupaten dengan tingkat kedalaman



kemiskinan terendah yakni Kota Kupang dengan indeks 1,07 dan tertinggi berada di Kabupaten Sumba Tengah dengan indeks 8,16.

Grafik 3.15 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

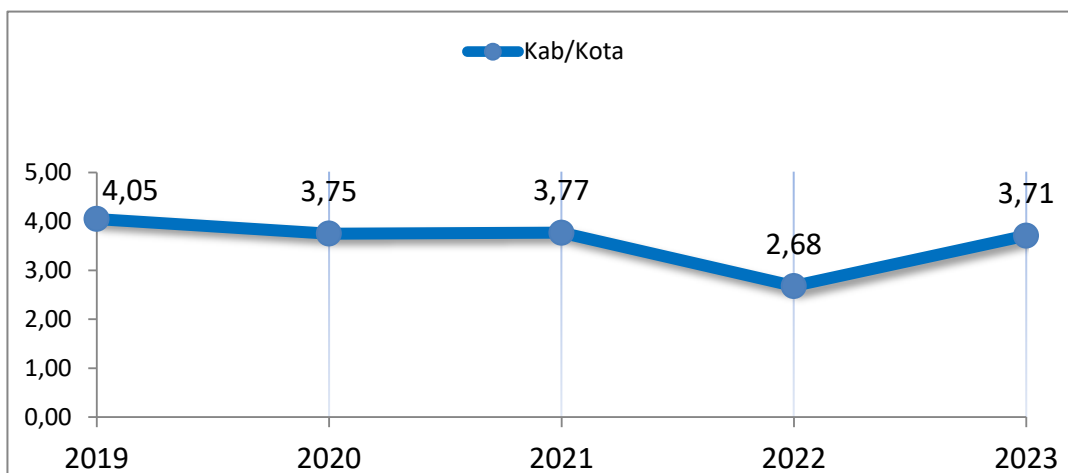


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan data BPS, perkembangan antar waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2019-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 P1 Kabupaten TTU sebesar 4.05 dan turun menjadi 3.75 di tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,02 menjadi 3,77 sementara pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 2,68 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 3,71 di tahun 2023. Adanya peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Grafik 3.16 Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



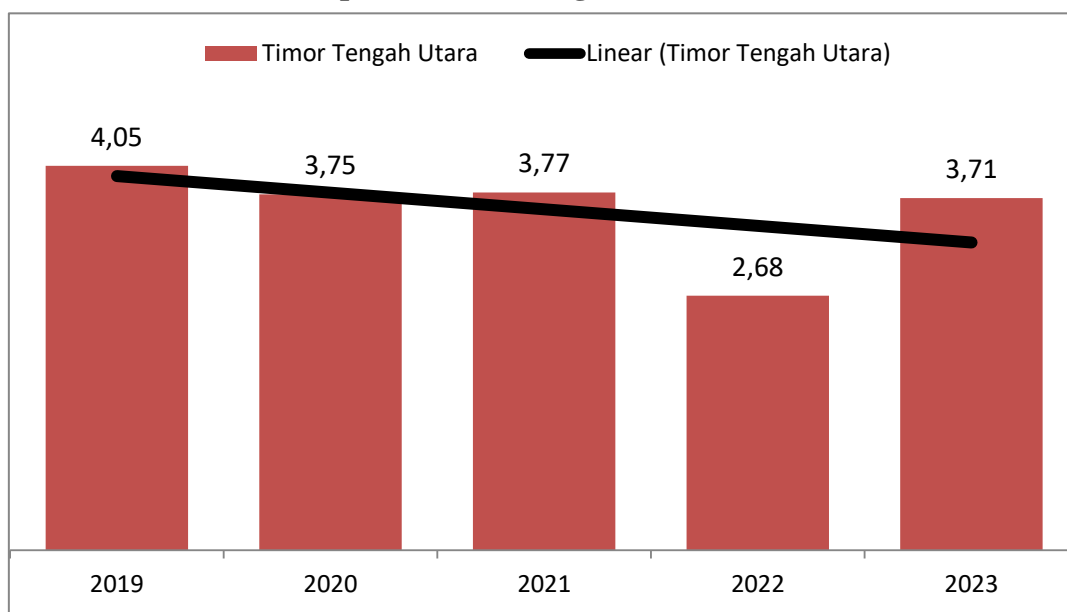
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



C. Efektivitas

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 menunjukkan kecenderungan kenaikan yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten TTU masih jauh dari garis kemiskinan. Secara umum dalam periode 2019-2023, perkembangan P1 tidak mengalami perubahan yang signifikan, baru pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Peningkatan kedalaman kemiskinan pada tahun 2023 salah satu penyebabnya adalah terjadinya refofusing anggaran pada program-program pengentasan kemiskinan. Efektivitas indeks kedalaman kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.17 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



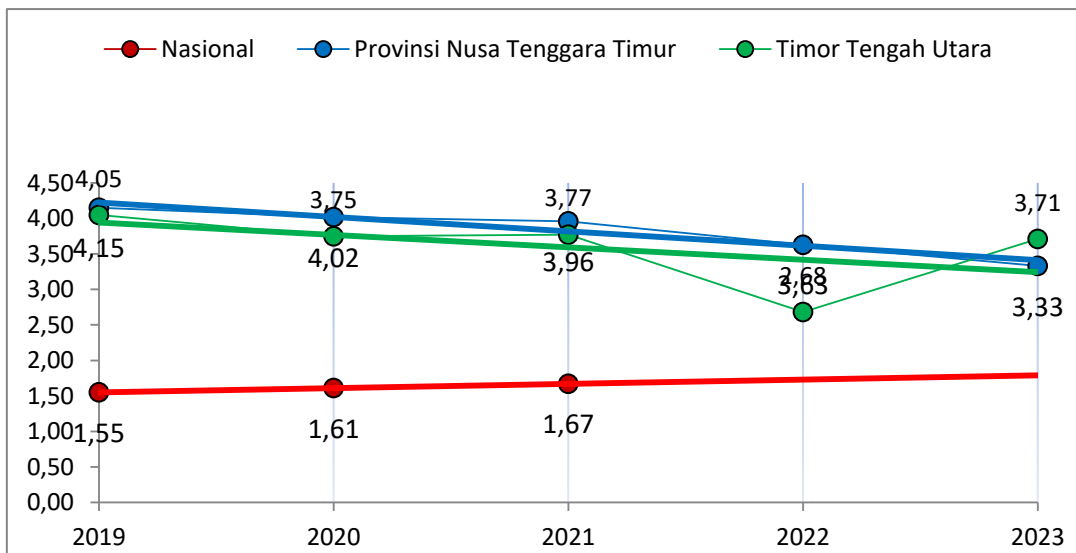
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Capaian tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023 dapat disimpulkan tidak relevan dengan capaian P1 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Berdasarkan hasil survei BPS dapat disimpulkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode tahun 2019-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif sedangkan capaian P1 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada grafik 3.18 dibawah ini :



Grafik 3.18 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indek) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



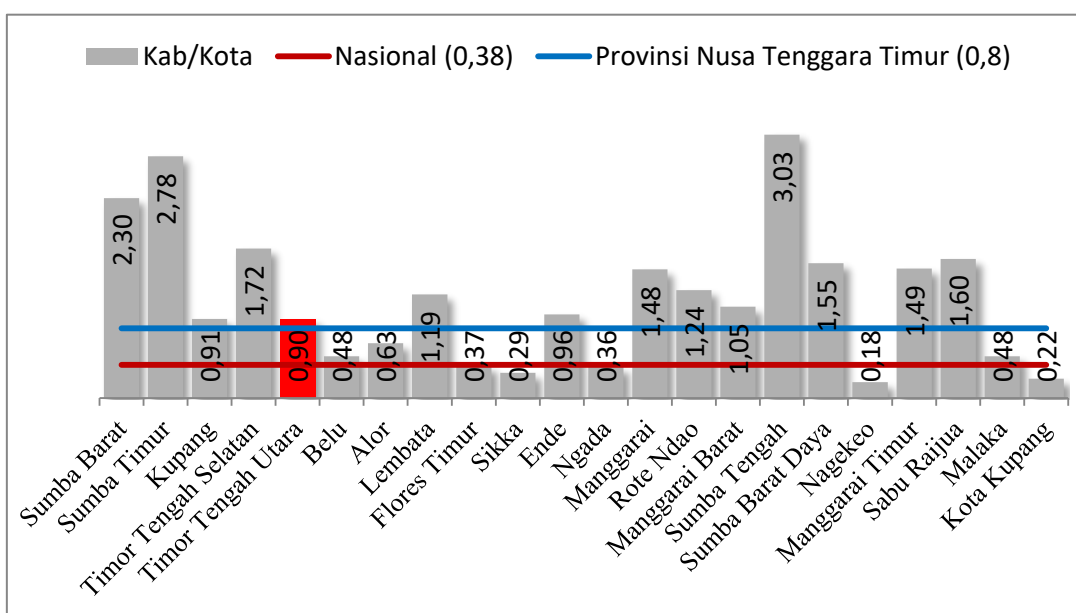
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

A. Posisi Relatif

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan BPS pada tahun 2023, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 0,90 dimana capaian ini lebih tinggi dari capaian Provinsi NTT dan Nasional. Tetapi capaian ini masih lebih baik dari Kabupaten Sumba Tengah dengan capaian 3,03. Sementara kabupaten dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berada di bawah capaian Provinsi NTT dan Nasional yakni Kabupaten Nagakeo dengan capaian sebesar 0,18. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.19 dibawah ini:

Grafik 3.19 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



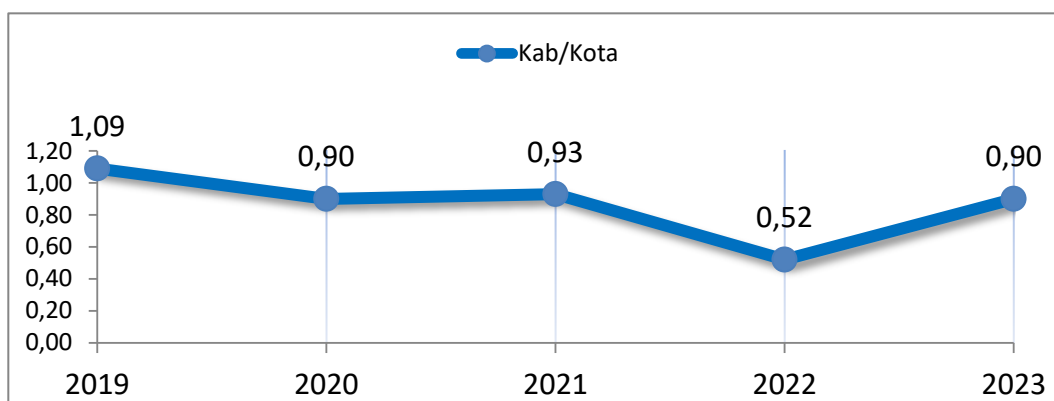
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam periode tahun 2019-2023 menunjukkan Trend yang fluktuatif, pada tahun 2019 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 1,09 mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 0,90. Sementara pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,93 dan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022 menjadi 0,52 sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 0,52 menjadi 0,90. Trend perkembangan antar waktu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.20 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

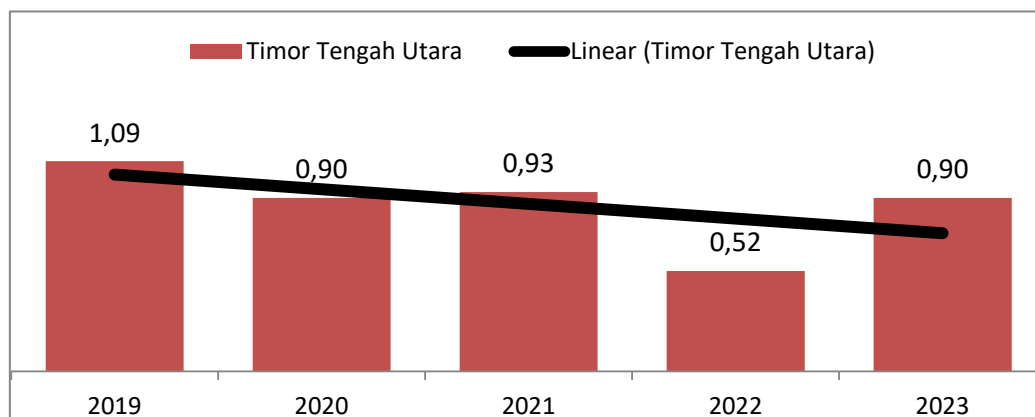


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas.

Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023 menunjukkan kecenderungan penurunan walaupun bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan cukup efektif dalam menurunkan tingkat keparahan kemiskinan. Terjadinya kenaikan inflasi di tahun 2023 yang disumbangkan paling besar dari sektor transportasi, makanan, minuman dan tembakau yang mempengaruhi meningkatnya indeks keparahan kemiskinan. Efektifitas keparahan kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.21 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



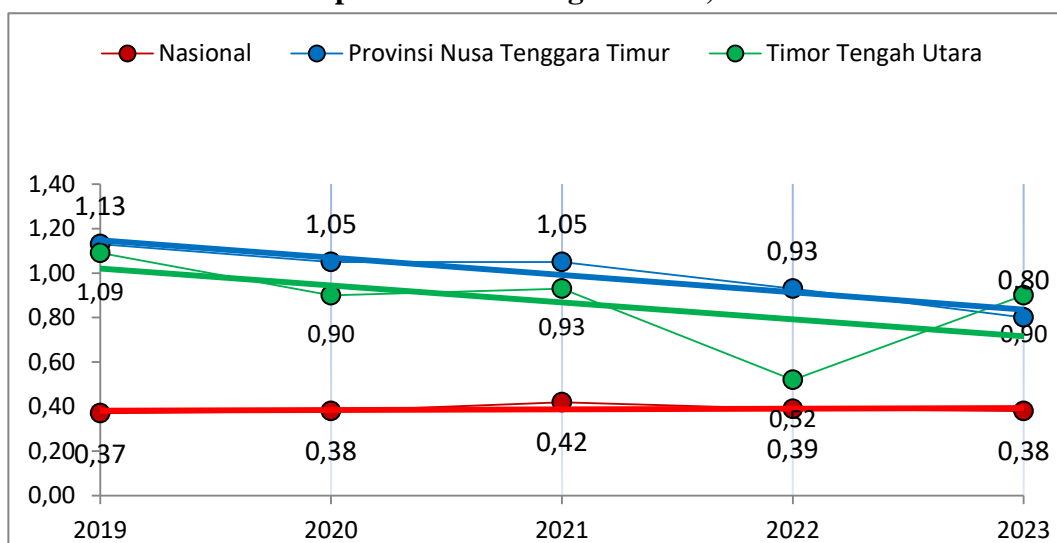
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



D. Relevansi Perkembangan

Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten TTU relevan dengan Indeks Keparahan Nasional yang perkembangannya sama-sama mengalami fluktuatif, tetapi tidak relevan dengan Provinsi NTT yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.22 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

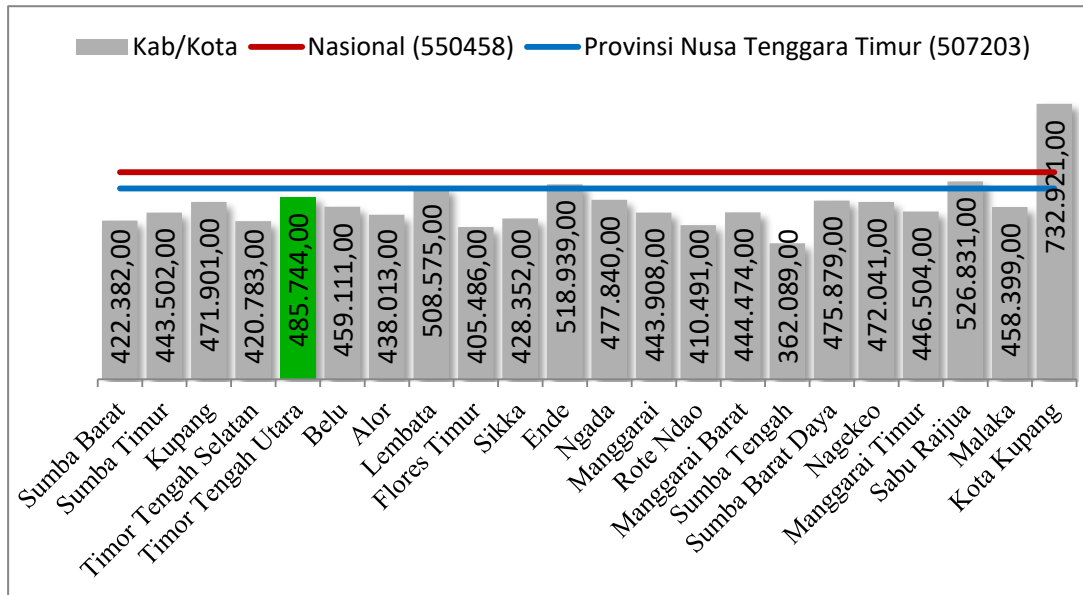
3.2.5. Garis Kemiskinan (GK)

A. Posisi Relatif

Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Pada tahun 2023 Garis Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara tercatat sebesar Rp. 485.744/kapita/bulan dimana angka ini berada di bawa Garis Kemiskinan Nasional sebesar 550.458/kapita/bulan dan Provinsi NTT sebesar 507.203/kapita/bulan dimana Kota Kupang berada pada posisi pertama dengan nilai sebesar Rp.732.921,00/kapita/bulan sedangkan kabupaten dengan garis kemiskinan terendah yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan Rp. 362.089,00/kapita/bulan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.23 dibawah ini:



Grafik 3.23 Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

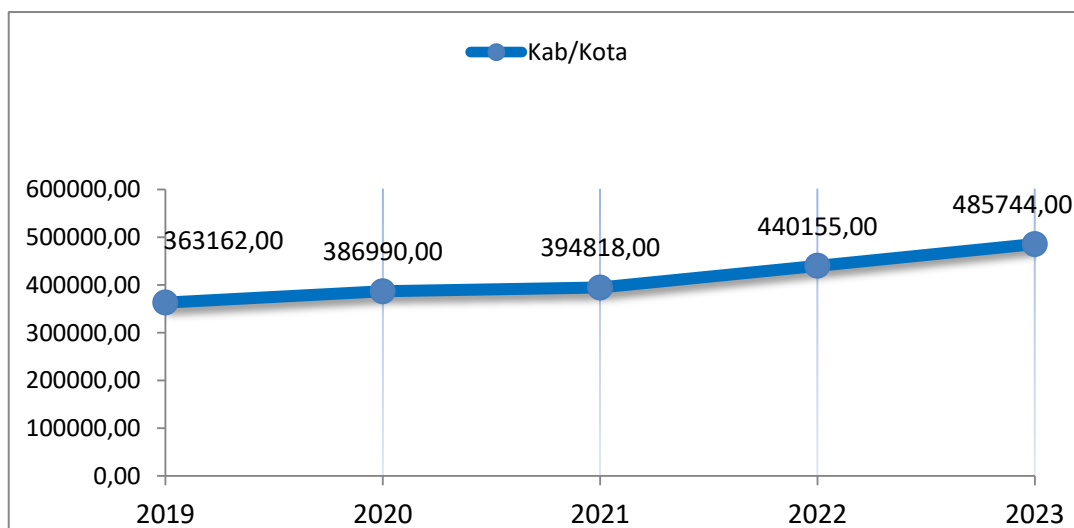


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu

Dalam periode tahun 2019-2023 perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 garis kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp. 363.162,00 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi Rp. 485.744,00. Trend perkembangan antar waktu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Graffik 3.24 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

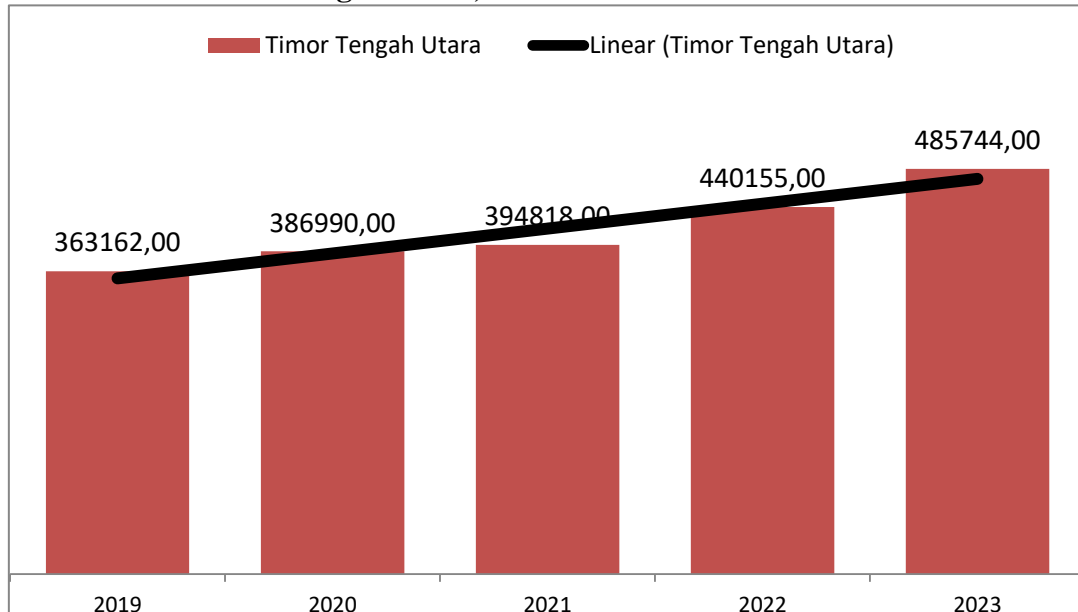
C. Efektifitas

Efektifitas Garis Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa agar masyarakat tidak di kategorikan sebagai masyarakat miskin maka



pendapatannya harus mencapai garis kemiskinan/melampaui garis kemiskinan. Efektifitas garis kemiskinan dapat dilihat pada grafik 3.25 dibawah ini:

Grafik 3.25 Analisis Efektifitas Garis Kemiskinan (Rp) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023.

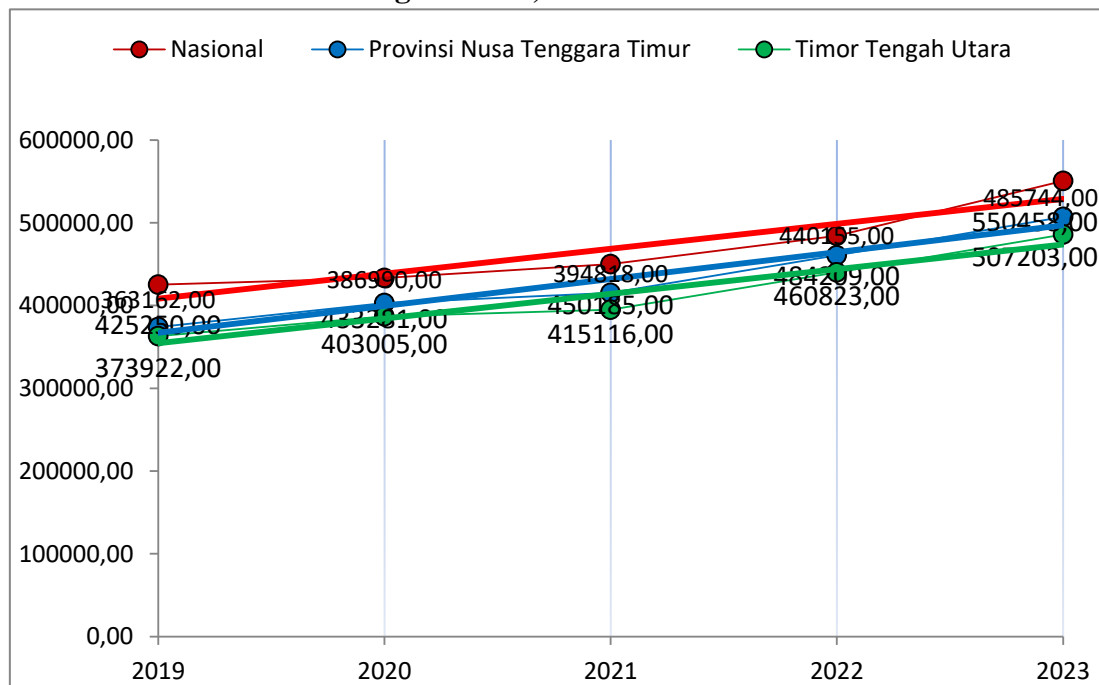


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Capaian Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023 relevan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Garis Kemiskinan Nasional dimana dalam periode yang sama, baik GK Provinsi NTT dan Nasional mengalami kenaikan bertahap walaupun GK Kabupaten TTU berada di bawah GK Provinsi maupun GK Nasional.

Grafik 3.26 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



Tabel 3.6. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
1	Persentase Penduduk Miskin	Lebih Tinggi dari Provinsi dan Nasional	Fluktuatif	Efektif	Tidak Relevan
2	Jumlah Penduduk Miskin	Lebih Rendah dari Provinsi dan Nasional	Fluktuatif	Efektif	Tidak Relevan
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Lebih Tinggi dari Nasional dan lebih Rendah dari Provinsi	Fluktuatif	Efektif	Tidak Relevan
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan	Lebih Tinggi dari Nasional dan lebih Rendah dari Provinsi	Cenderung Menurun	Efektif	Tidak Relevan
4	Garis Kemiskinan	Lebih Rendah dari Provinsi dan Nasional	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan

3.3. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Non-Konsumsi

3.3.1. Bidang Pendidikan

3.3.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)

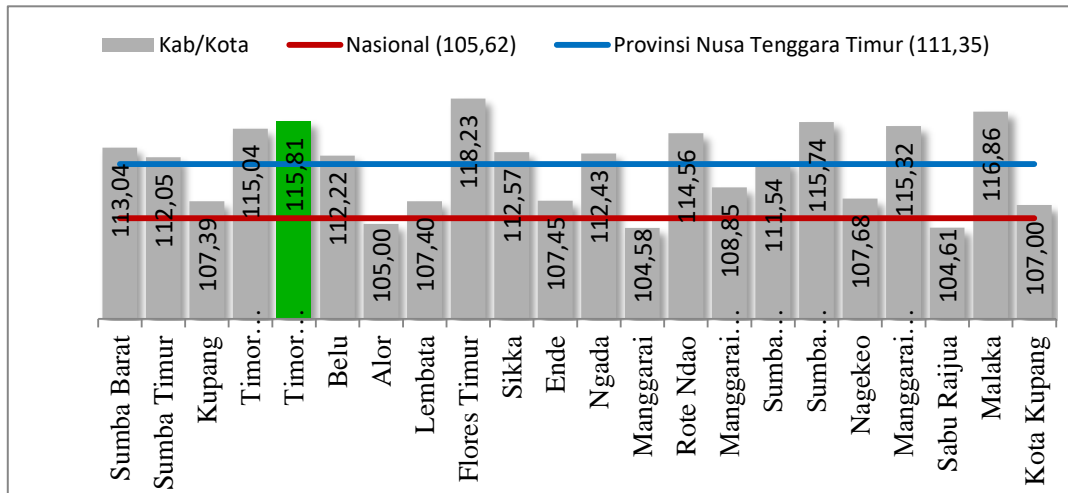
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD) adalah perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan pada suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi APK, maka semakin banyak anak-anak yang berpartisipasi dalam pendidikan karena APK Sekolah Dasar (SD) menghitung persentase siswa Sekolah Dasar (SD) yang berumur diluar 7-12 tahun. Tujuan mengetahui APK adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

A. Posisi Relatif

Pada grafik 3.27 dibawah ini menggambarkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/MI Kabupaten Timor Tengah Utara telah melampaui capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan capaian Nasional dengan 115,81%, sementara kabupaten dengan Angka Partisipasi Kasar tertinggi di tempati oleh Kabupaten Flores Timur dengan Persentase 118,23.



Grafik 3.27 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/MI (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

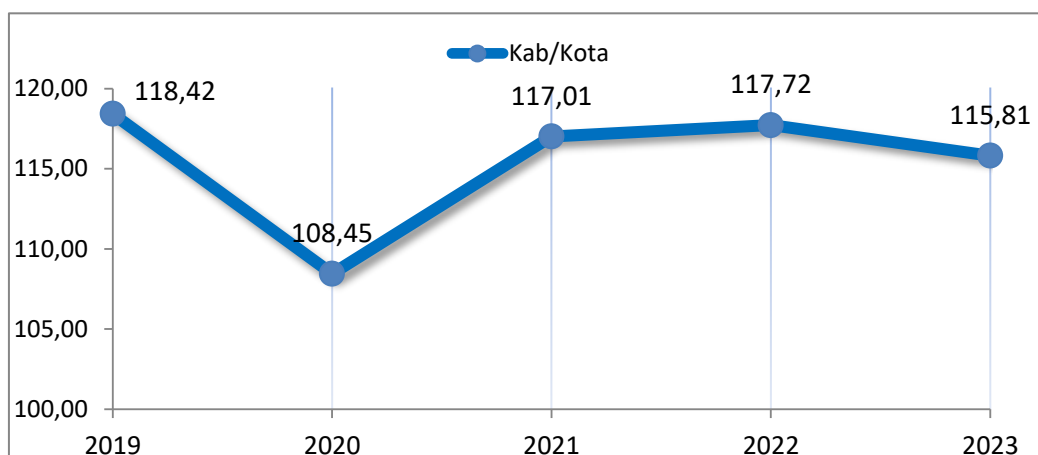


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu.

Dalam periode tahun 2019-2023 perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/MI menunjukkan Trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019 APK Sekolah Dasar (SD)/MI Kabupaten TTU sebesar 118,42%, menurun menjadi 108,48% di tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan menjadi 117,72 di tahun 2022 dan pada tahun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 115,81%. Meskipun kenaikan dan penurunan APK tersebut dapat memberikan beberapa wawasan terkait partisipasi siswa, perlu dicatat bahwa fenomena ini tidak selalu mengindikasikan situasi yang positif atau negatif secara mutlak. Penurunan APK dapat mengindikasikan semakin banyak siswa yang bersekolah sesuai usianya, sementara peningkatan APK mengindikasikan semakin banyak siswa Sekolah Dasar (SD) yang bersekolah diluar usia 7-12 tahun. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks lebih lanjut dan melibatkan indikator tambahan seperti angka putus sekolah, tingkat kelulusan, hasil ujian, dan faktor-faktor sosial ekonomi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Grafik 3.28 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



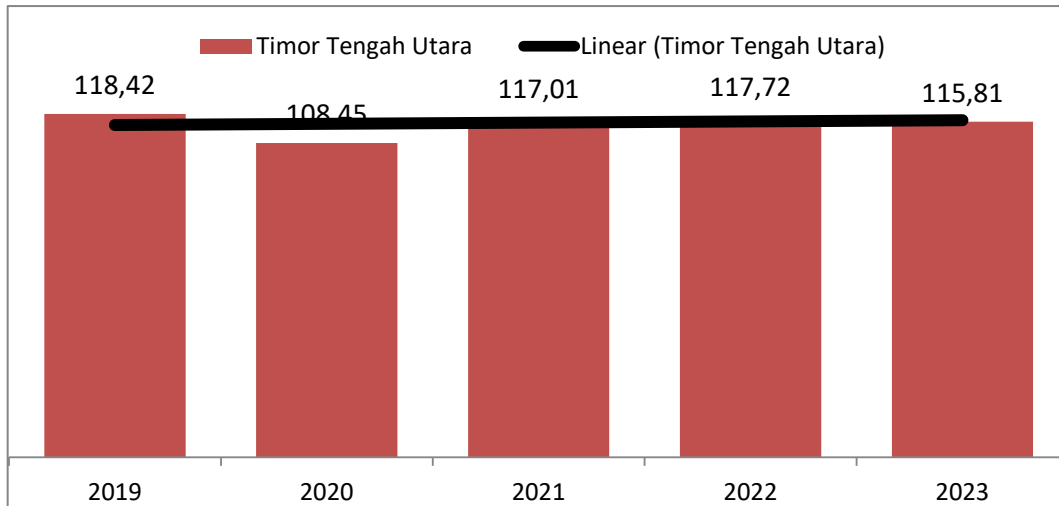
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



C. Efektivitas.

Pada periode Tahun 2019-2023 APK Sekolah Dasar (SD)/MI Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend yang fluktuatif, namun menunjukkan Trend penurunan di akhir tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan dapat disebabkan oleh program pembangunan pendidikan yang belum efektif dan belum memadainya aksesibilitas layanan pendidikan.

Grafik 3.29 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

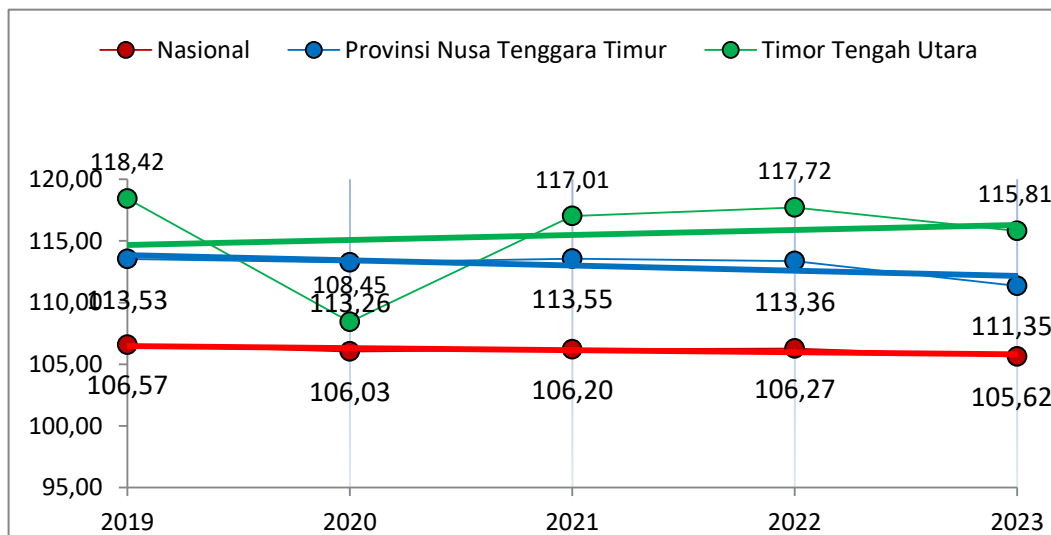


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa APK Sekolah Dasar (SD)/MI Kabupaten Timor Tengah Utara berkontribusi positif terhadap menurunnya APK Sekolah Dasar (SD)/MI Provinsi NTT dan Nasional. Pada periode tahun 2019-2023 APK Sekolah Dasar (SD)/MI di Kabupaten Timor Tengah Utara menurun sebesar 2,61% dan Nasional mengalami penurunan sebesar 0,95%

Grafik 3.30 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

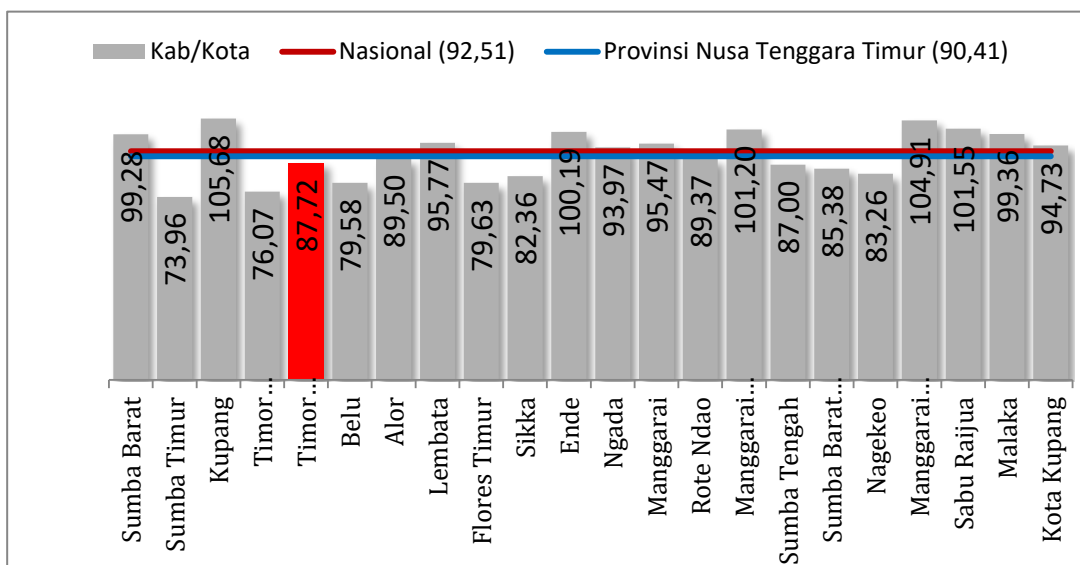


3.3.1.2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

A. Posisi Relatif

Grafik 3.31 dibawah ini menunjukkan bahwa APK SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara masih berada di bawah capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dengan persentase sebesar 87,72, selisih 2,69 dari Provinsi NTT dan 4,79 dari Nasional. Sedangkan kabupaten dengan APK SMP/MTs tertinggi yakni Kabupaten Kupang dengan Persentase 105,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah Partisipasi Kasar SMP/MTs harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Grafik 3.31 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



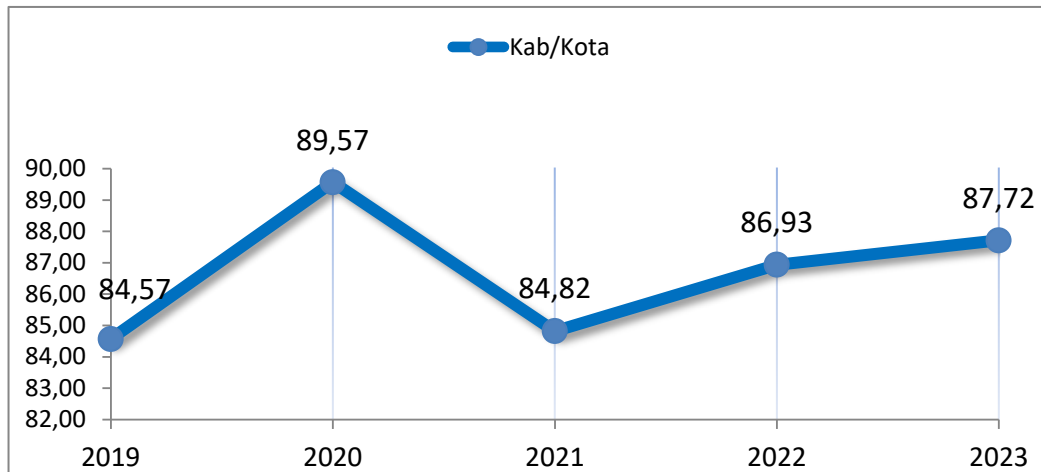
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu

Pada periode tahun 2019-2023 perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019 APK SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 84,57%, meningkat sebesar 5% menjadi 89,57% di tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,75% menjadi 84,82%. Sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,9% menjadi 87,72 di tahun 2023. Meskipun APK SMP/MTs mengalami peningkatan di tahun 2023 tapi masih perlu menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara karena capaian ini menggambarkan masih adanya anak berusia sekolah SMP/MTs yang belum menduduki bangku sekolah SMP/MTs. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.32 dibawah ini:



Grafik 3.32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

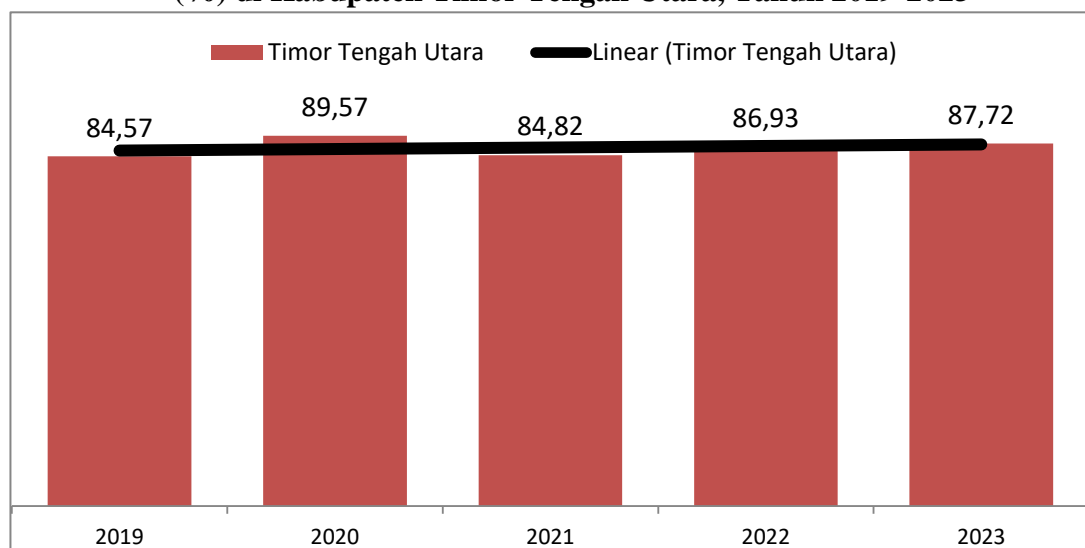


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas

Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 APK SMP/MTs menunjukkan Trend yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program pengelolaan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah daerah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar anak-anak usia sekolah umur 13-15 tahun dapat menduduki bangku SMP/MTs.

Grafik 3.33 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMT/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

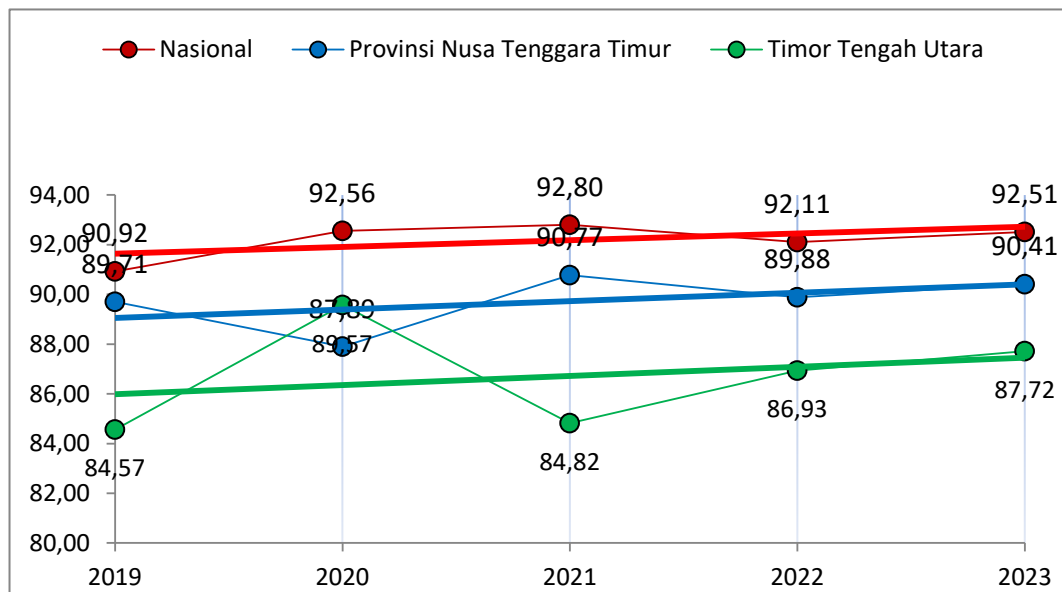
D. Relevansi Perkembangan

Pada periode tahun 2019-2023 capaian APK SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum menunjukkan relevansinya dengan Capaian APK SMP/MTs Provinsi NTT dan Nasional karena berkontribusi positif terhadap peningkatan APK SMP/MTs Provinsi NTT dan Nasional. Kecuali pada tahun 2021, capaian APK SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak relevan dengan kenaikan APK SMP/MTs Provinsi NTT dan Nasional karena capaian



APK SMP/MTs terjadi penurunan sebesar 3%. Tetapi secara keseluruhan APK SMP/MTs Timor Tengah Utara relevan dengan capaian APK SMP/MTs Provinsi NTT dan Nasional.

Grafik 3.34 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/MI

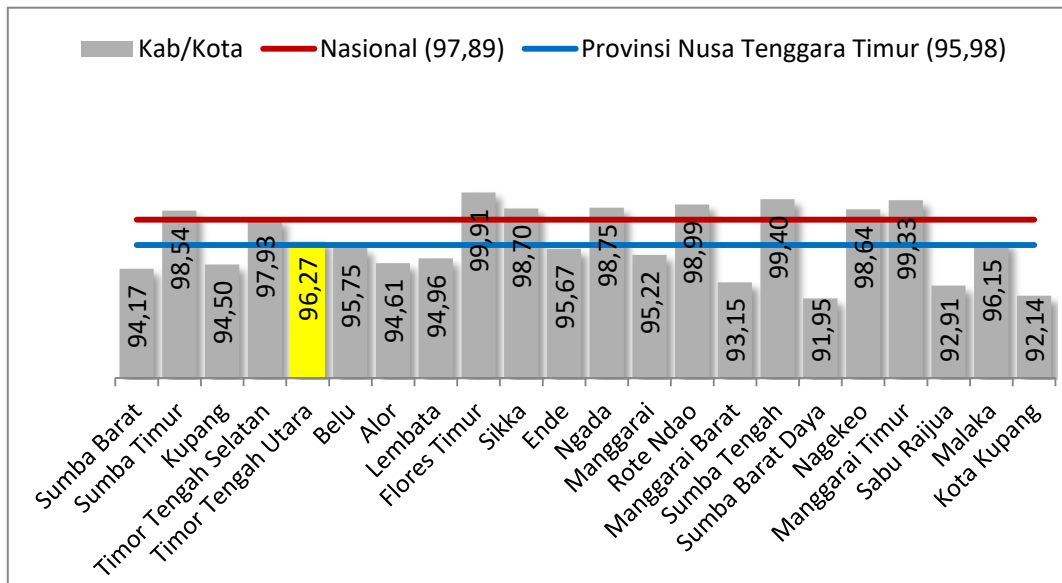
APM Sekolah Dasar (SD)/MI adalah perbandingan antara siswa usia sekolah pada usia 7-12 tahun terhadap penduduk usia 7-12 tahun. Sehingga semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah tersebut bersekolah sesuai dengan usia resmi di jenjang tersebut dengan nilai idealnya 100%. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Berikut analisis APM Sekolah Dasar (SD)/MI kedalam empat paket analisis yaitu posisi relative, perkembangan antar waktu, efektifitas dan relevansi.

A. Posisi Relatif

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/Mi di Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai angka 96,27%. Capaian ini berada di bawah Provinsi NTT dan Nasional. Kabupaten dengan capaian APM Sekolah Dasar (SD)/Mi tertinggi yakni Kabupaten Flores Timur dengan capaian 99,91%, sedangkan Kota Kupang menempati posisi terakhir yang capaian APM Sekolah Dasar (SD)/Mi nya menempati posisi terendah dengan persentase 92,14%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.35 di bawah ini:



Grafik 3.35 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/MI (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

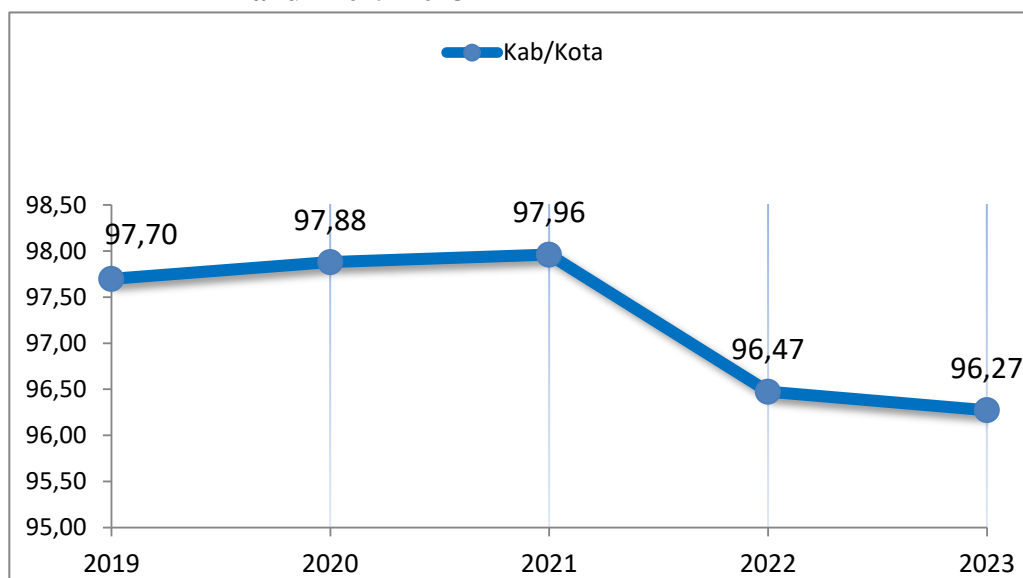


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan grafik di bawah ini dapat diketahui bahwa APM Sekolah Dasar (SD)/Mi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan terakhir tahun 2021 sebesar 97,96%. Sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 96,27% di tahun 2023.

Grafik 3.36 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



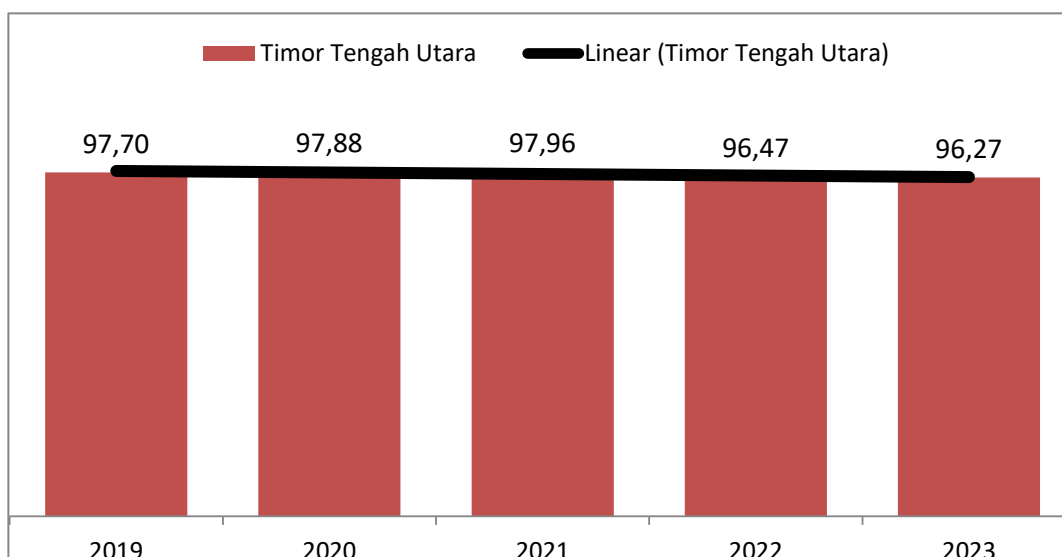
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



C. Efektivitas

Pada Periode tahun 2019–2023, APM Sekolah Dasar (SD)/MI mengalami Trend penurunan. Secara umum menggambarkan program pengelolaan pendidikan dasar untuk meningkatkan APM Sekolah Dasar (SD)/MI seperti peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan antar wilayah belum berjalan efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya di tahun-tahun mendatang.

Grafik 3.37 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/Mi (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



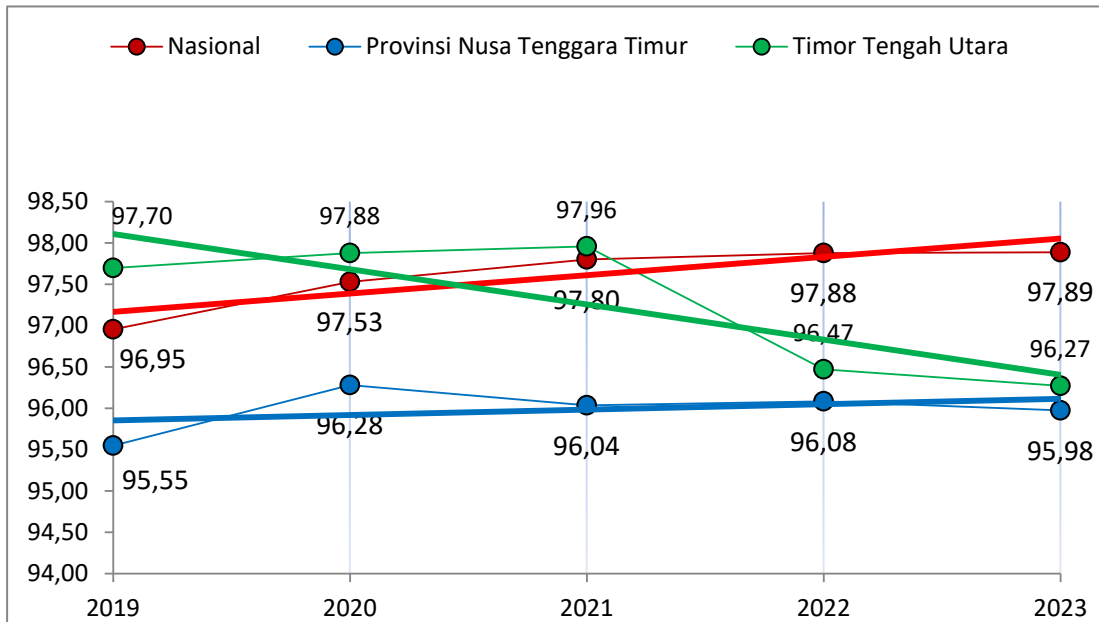
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Trend dan capaian APM Sekolah Dasar (SD)/Mi Kabupaten Timor Tengah Utara dan Provinsi NTT tidak sejalan dengan capaian Nasional. Hal ini karena capaian APM Kabupaten Timor Tengah Utara dan Provinsi NTT mengalami penurunan di akhir tahun 2023 sedangkan Nasional mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian APM Sekolah Dasar (SD)/Mi tidak berkontribusi terhadap capaian APM Sekolah Dasar (SD)/Mi Provinsi NTT dan Nasional.



Grafik 3.38 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/MI (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



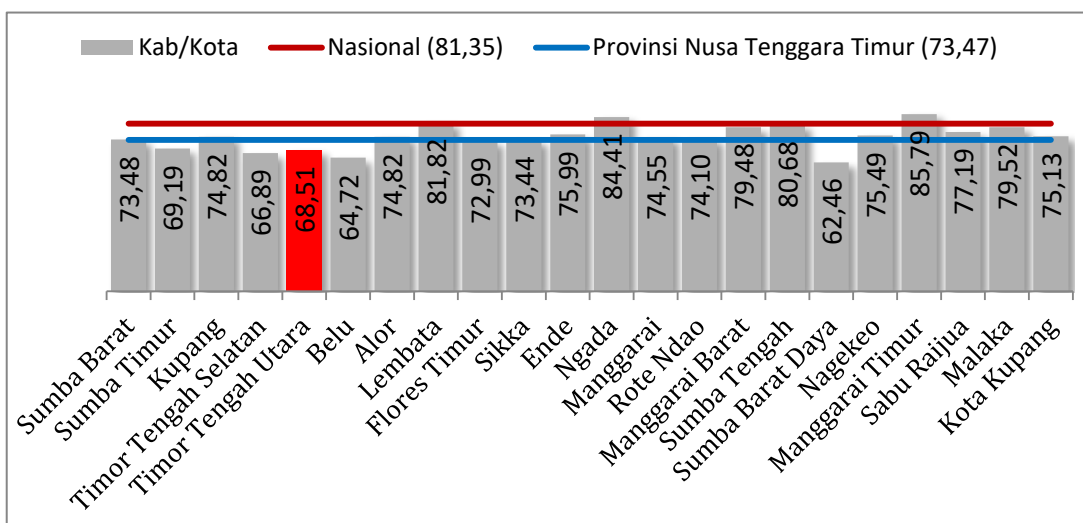
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%).

A. Posisi Relatif

Pada tahun 2023 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 65,51% berada di bawah capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Dari 22 Kabupaten/Kota hanya 3 Kabupaten yang melampaui capaian Nasional yakni Kabupaten Ngada dengan capaian 84,41%, Kabupaten Manggarai Timur dengan capaian 85,79% dan Kabupaten Lembata sebesar 81,82%. Sedangkan Kabupaten Sumba Barat Daya menempati posisi terendah dengan capaian sebesar 62,46%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.39 dibawah ini.

Grafik 3.39 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



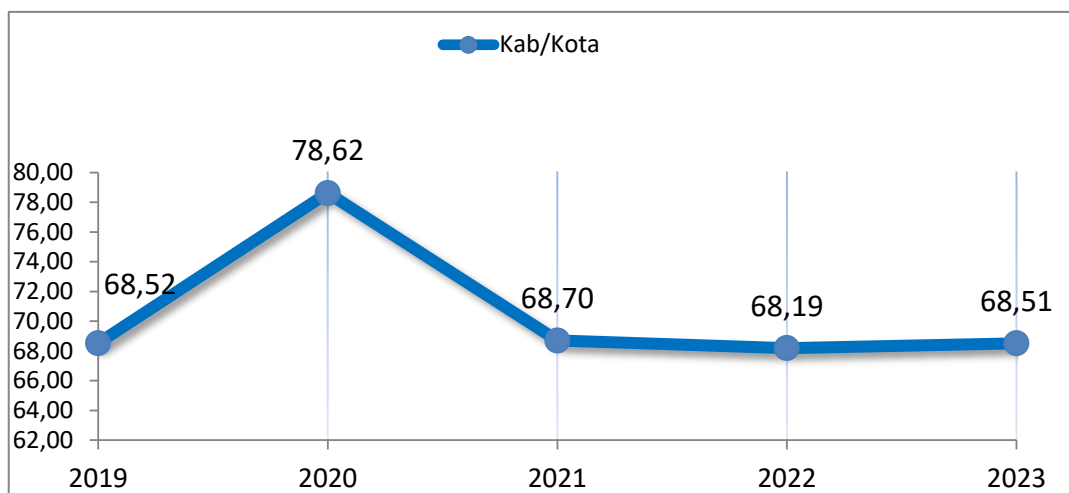
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



B. Perkembangan Antar Waktu

APM SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara meningkat signifikan di tahun 2019-2020 dari 68.52% di tahun 2019 menjadi 78,62% di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program pendidikan di tahun 2020 berjalan dengan efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 APM SMP/MTs menurun sampai dengan 68.51% di tahun 2023. Sehingga diperlukan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan angka partisipasi anak bersekolah pada tingkat SMP/MTs.

Grafik 3.40 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

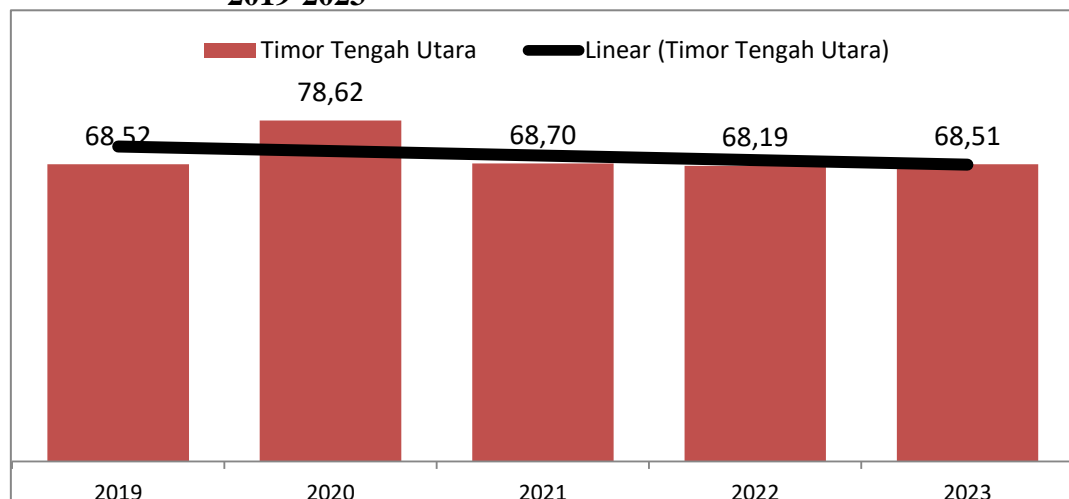


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas

Pada periode tahun 2019-2023 APM SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan sebesar 0,1%. Trend penurunan ini menggambarkan belum efektifnya program pendidikan khususnya pada Pendidikan anak yang berusia SMP/MTs dan juga belum efektifnya ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Grafik 3.41 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



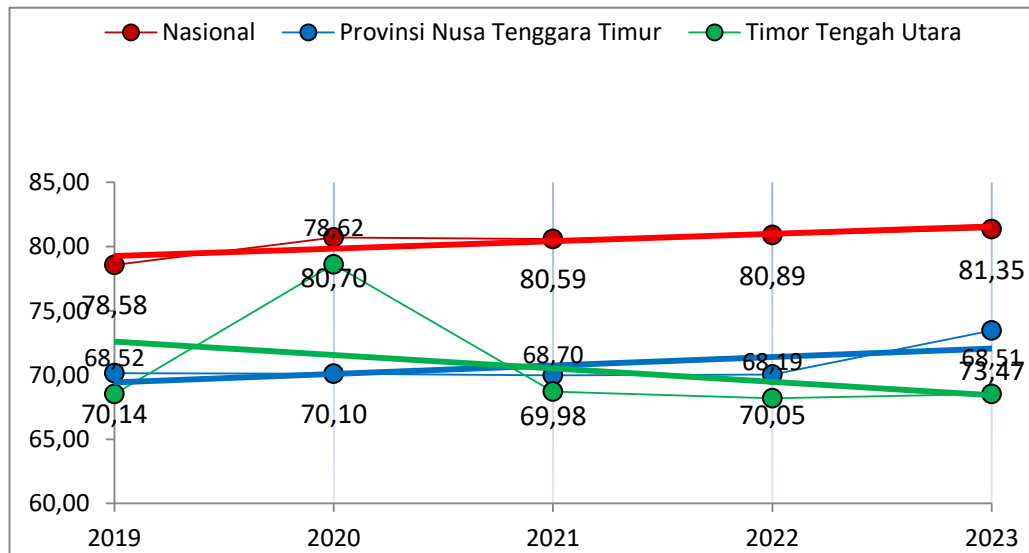
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



D. Relevansi Perkembangan

Pada periode tahun 2019-2023 APM SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend penurunan kecuali pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa APM SMP/MTs tidak berkontribusi terhadap peningkatan APM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional.

Grafik 3.42 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3.1.5. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

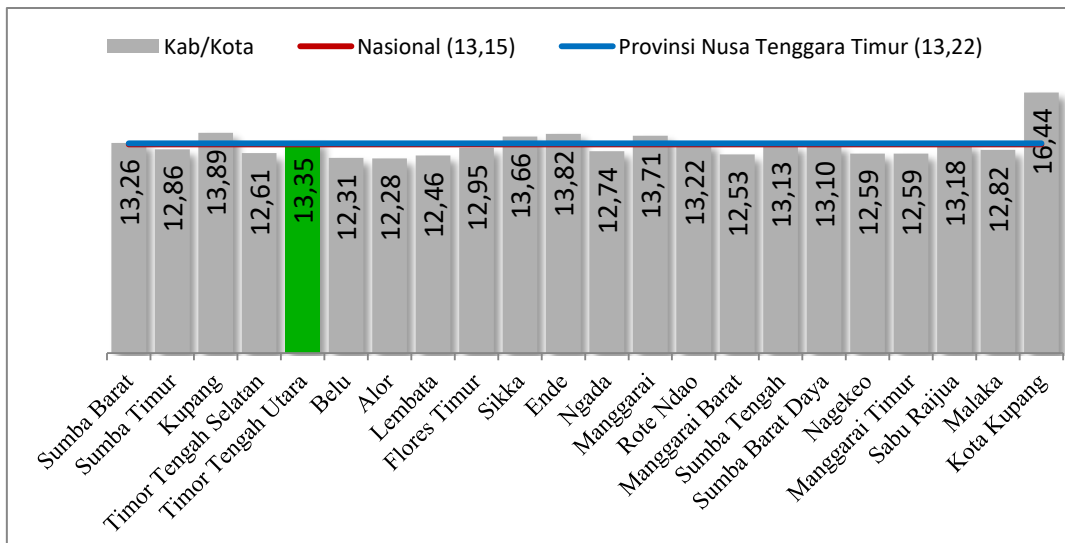
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2023 sebesar 13,10 tahun, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,15 tahun atau setara sampai Diploma I. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

A. Posisi Relatif

Pada Tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 13,35 Tahun. Capaian ini melampaui capaian Provinsi NTT dengan capaian 13,22 Tahun dan Nasional dengan capaian 13,15 Tahun. Sedangkan Kota Kupang menempati posisi tertinggi dengan capaian HLS nya sebesar 16,44 Tahun.



Grafik 3.43 Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

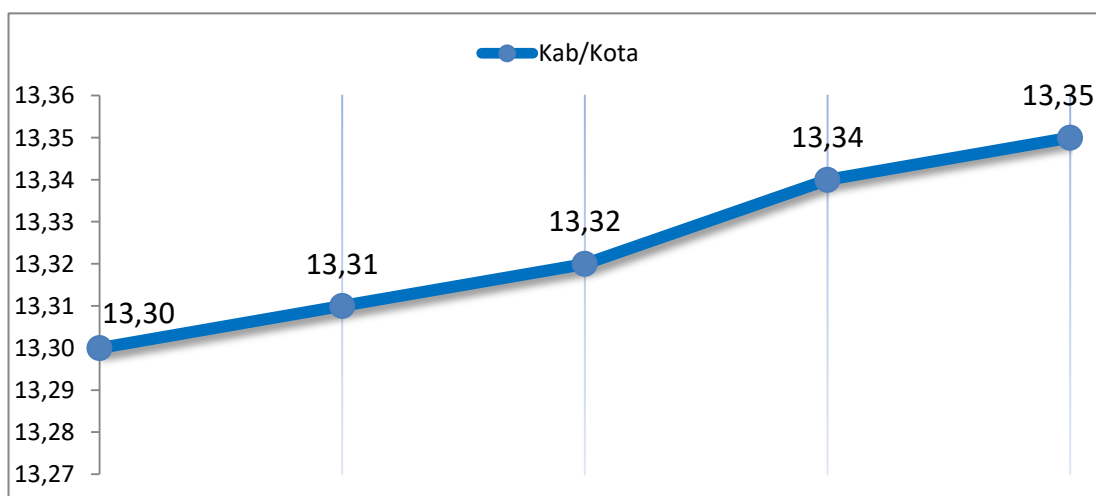


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu

Angka harapan lama sekolah (HL pada tahun 2019-2023 menunjukkan Trend yang meningkat. Pada tahun 2019 HLS Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 13,30 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi 13,35. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.44 dibawah ini :

Grafik 3.44 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



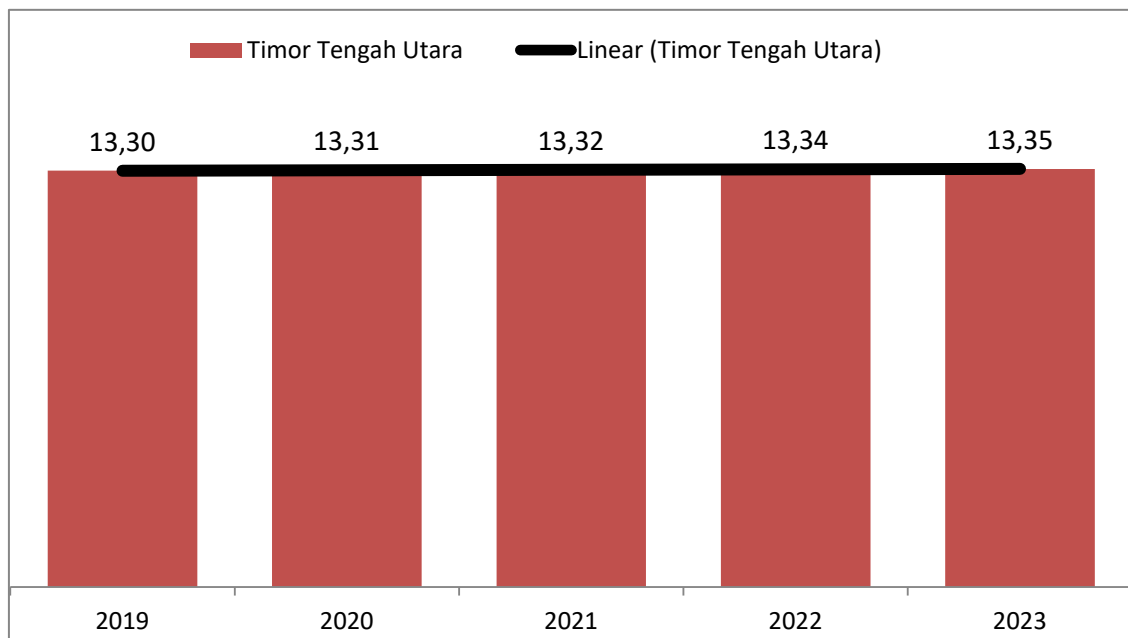
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas

Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019-2023 menunjukkan Trend yang meningkat. Hal ini mengandung makna bahwa sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah dapat di akses oleh masyarakat.



**Garfik 3.45 Analisis Efektivitas Angka Harapan Lama Sekolah (HKS)
Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023**

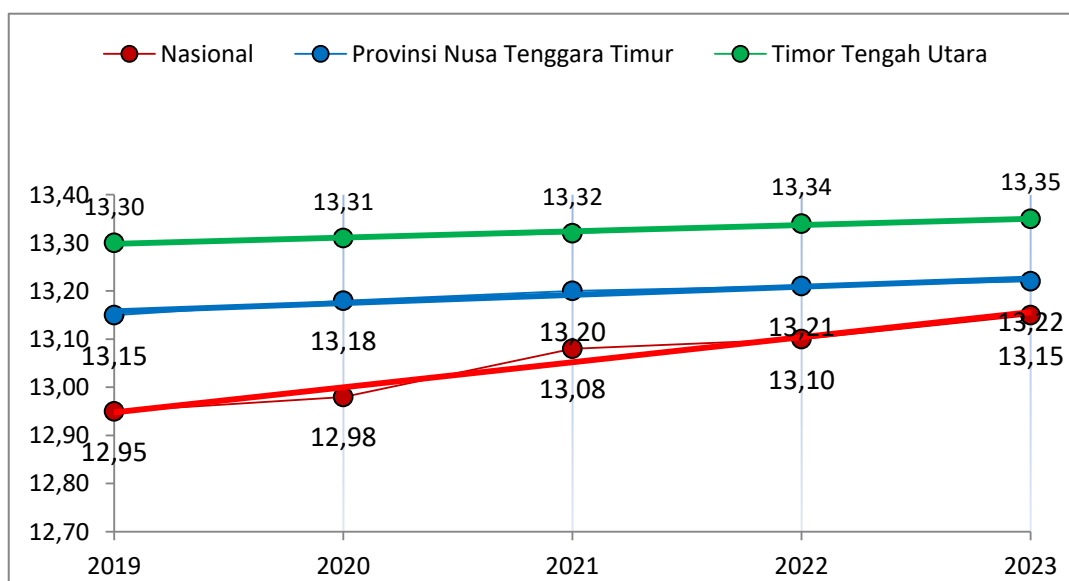


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Dalam periode tahun 2019-2023 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini berkontribusi positif dengan capaian provinsi NTT dan Nasional yang mengalami hal yang sama dengan capaian Kabupaten TTU.

**Grafik 3.46 Analisis Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Timor Tengah Utara, Tahun 2018-2022**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3.1.6. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Salah satu indikator kualitas penduduk dari dimensi pendidikan, dapat dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang telah dihabiskan



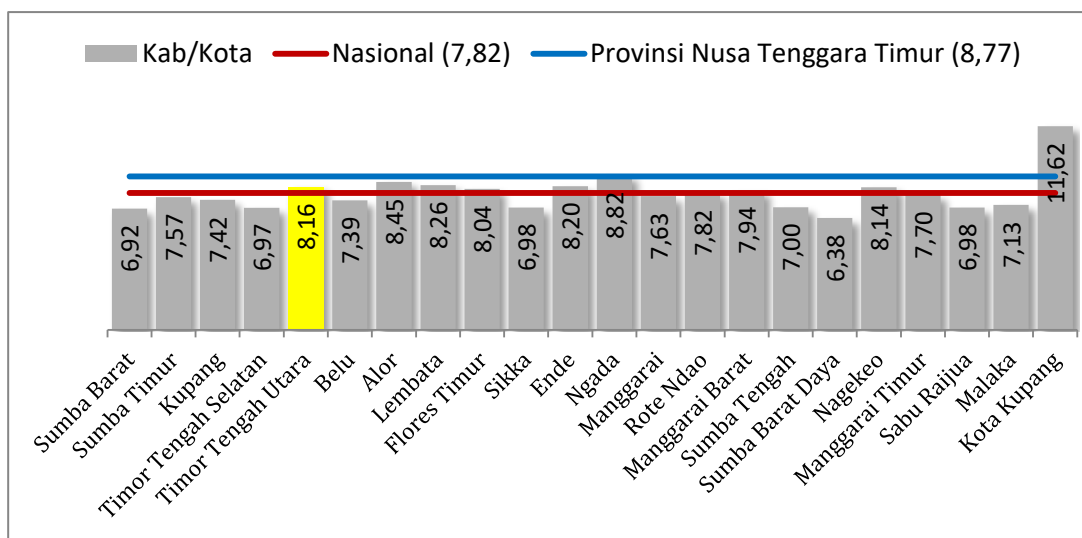
seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau years of schooling, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun demikian, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

A. Posisi Relatif

Capaian rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2023 sebesar 8,16 tahun. Capaian ini lebih baik dari capaian Nasional sebesar 7,82 Tahun tetapi tidak lebih baik dari capaian Provinsi NTT sebesar 8,77 tahun. Sedangkan Kota Kupang menempati posisi pertama dengan capaian RLS nya sebesar 11,62 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara hanya setingkat Sekolah Dasar (SD)/Mi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.47 di bawah ini:

Grafik 3.47 Posisi Relatif Rata-rata Lama-lama sekolah (RLS) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



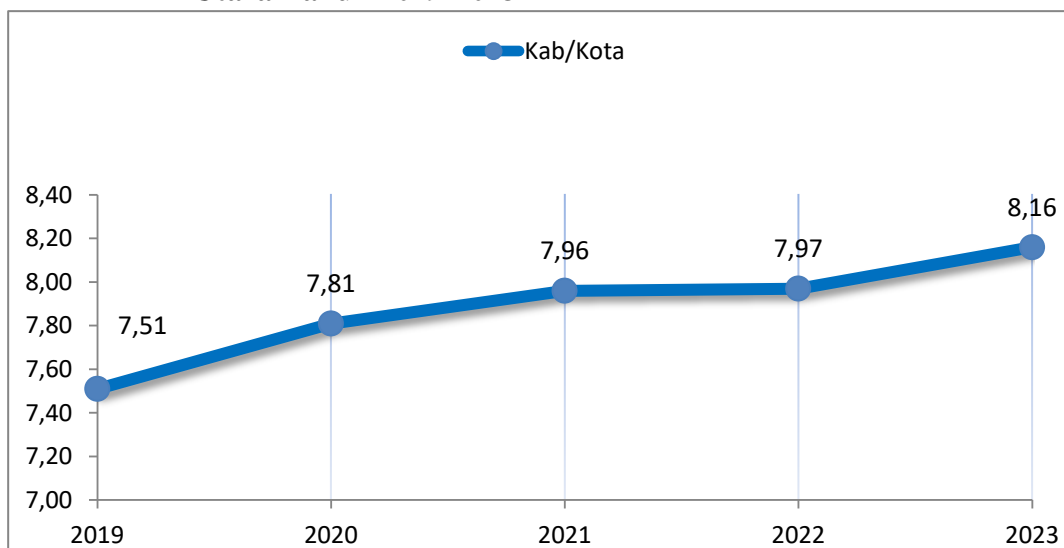
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan antar waktu rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 angka RLS sebesar 7,51 tahun dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 sebesar 8,16 tahun. Meskipun rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih perlu menjadi perhatian dari pemerintah, karena rata-rata lama sekolah sampai dengan tahun 2023 masih berada pada posisi 8,16 tahun artinya penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara masih mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD).



Grafik. 3.48 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023

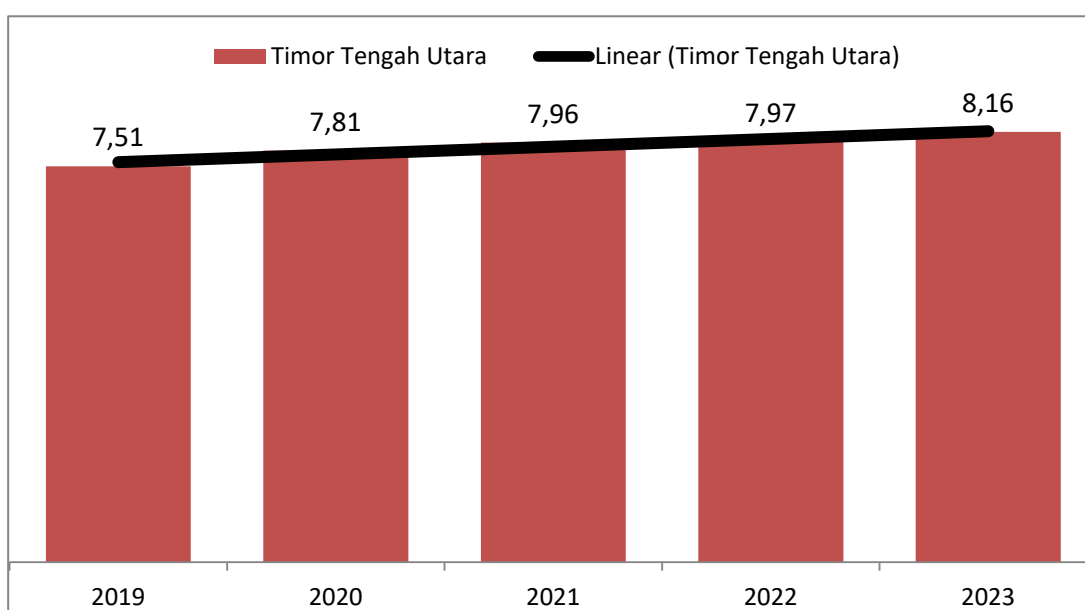


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas

Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2018-2022 menunjukkan Trend yang meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah efektif dalam upaya meningkatkan RLS, tetapi pemerintah perlu menjalankan sistem pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Grafik 3.49 Analisis Efektivitas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



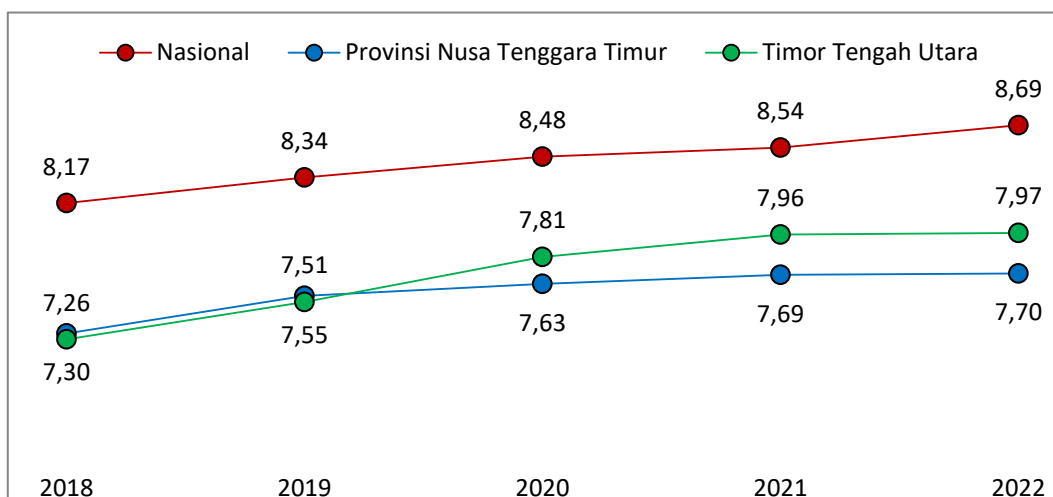
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Dalam periode tahun 2019-2023 RLS Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami peningkatan, hal ini di gambarkan dengan capain tersebut berada di bawah capaian nasional tetapi diatas capaian Provinsi NTT. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.50 dibawah ini:



Grafik 3.50 Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3.1.7. Rerata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD)/MI

Literasi merupakan kemampuan seseorang mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara.

Berikut ini merupakan 6 (Enam) kategori yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Literasi dan Numerasi pada Suatu Daerah.

Tabel 3.7. 6 (Enam) Kategori Pengukuran Kemampuan Literasi dan Numerasi

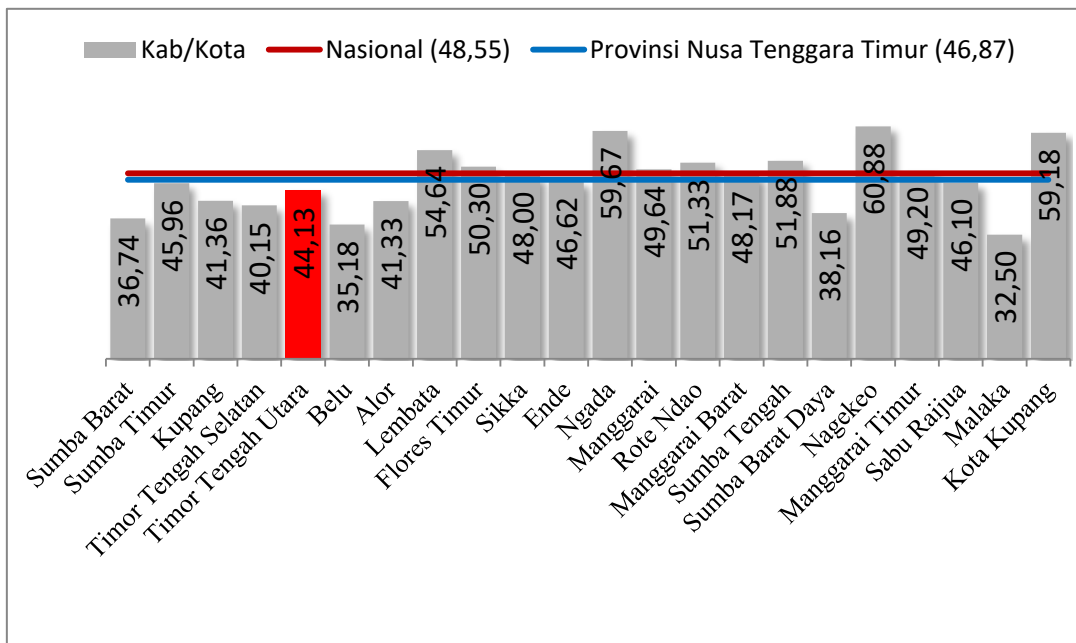
No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 90
4	70-79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69

A. Posisi Relatif

Pada tahun 2023 capaian Literasi Sekolah Dasar (SD)/MI di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 44,13%. Capaian ini berada di bawah capaian Provinsi NTT sebesar 46,87% dan capaian Nasional sebesar 48,55%. Kabupaten dengan capaian Literasi tertinggi yakni Kabupaten Nagakeo dengan capaian 60,88%, capaian kabupaten Nagakeo masuk dalam kategori tuntas muda, selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3.51. Posisi Relatif Rerata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



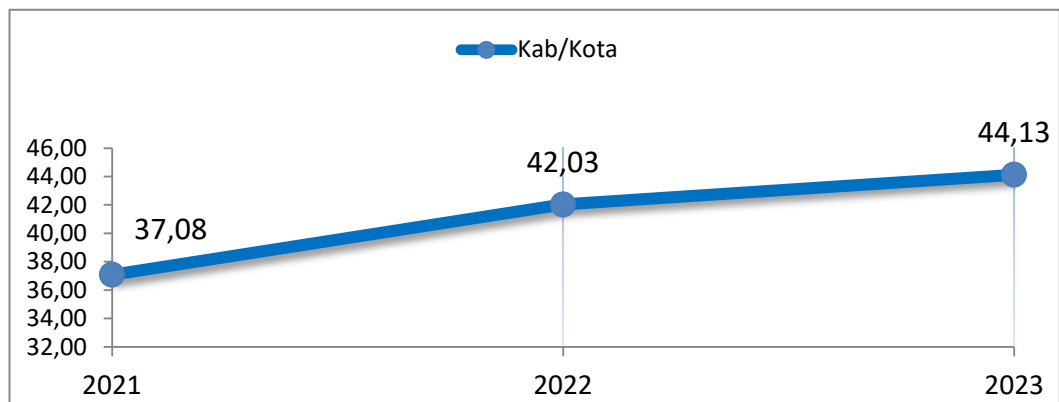
Sumber Data: Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2023, Kepada Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 37,08% di tahun 2021 meningkat menjadi 44,13% di tahun 2023. Meskipun kemampuan Literasi mengalami peningkatan, namun peningkatan yang di alami belum mencapai 6 (enam) kategori pengukuran kemampuan literasi yakni tuntas muda, Tuntas Pratama, Tuntas Madya, Tuntas Utama dan Tuntas Paripurna. Karena capaian masih berada di bawah 60%, untuk mencapai kategori tuntas muda. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menerapkan program-program pembelajaran yang baik guna mendukung kemampuan literasi pada anak.



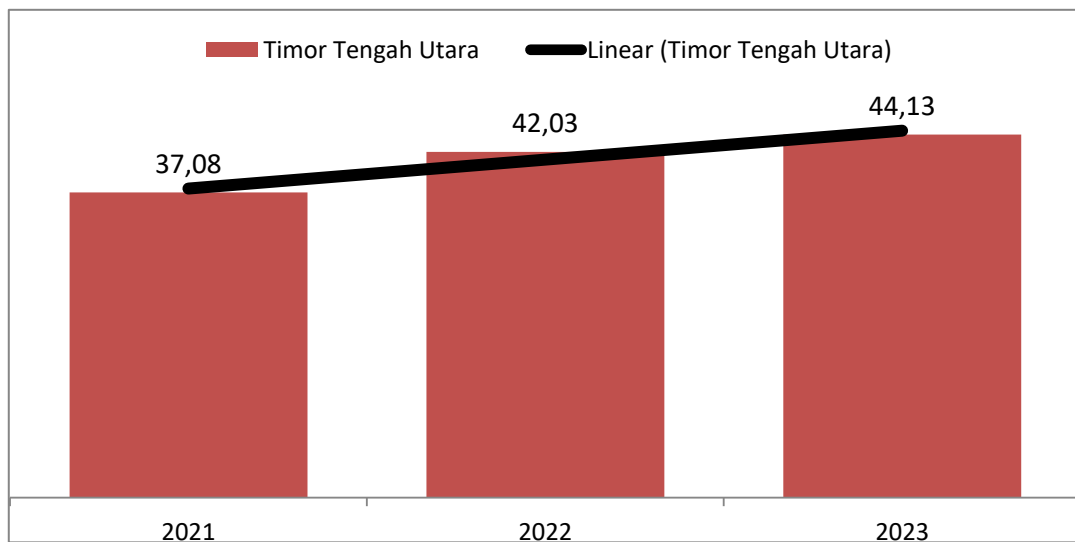
Grafik 3.52. Perkembangan Antar Waktu Rerata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD), di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023



Sumber Data : Olahan Tim Penyusun RPKD

C. Efektifitas

Grafik 3.53. Analisis Efektifitas Rerata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023



Sumber Data : Olahan Tim Penyusun RPKD

3.3.1.8. Rerata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD)/MI

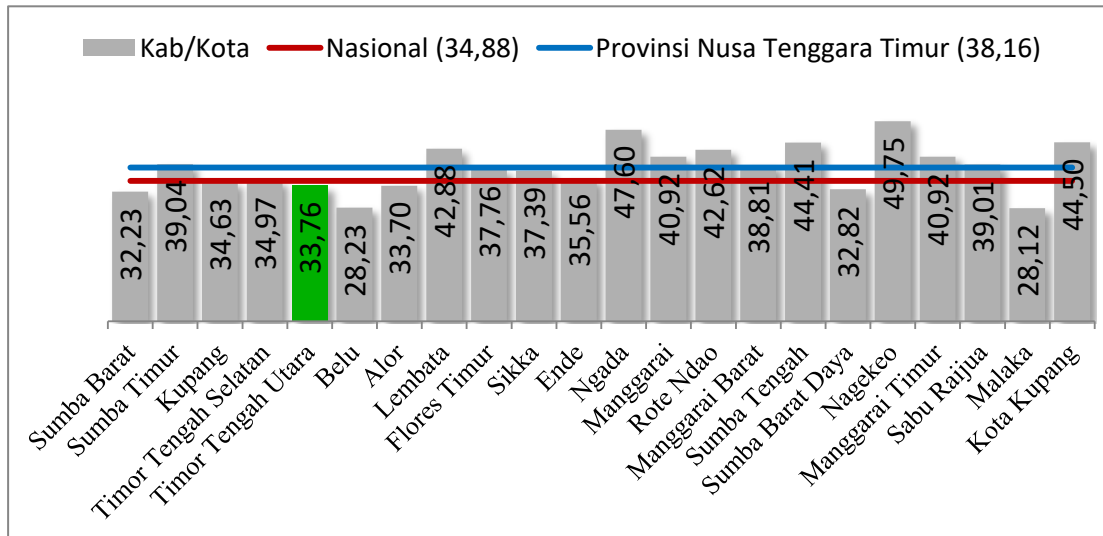
Numerasi merupakan kemampuan dalam memahami angka, operasi hitung dan bilangan melalui berbagai konteks dalam permasalahan sehari-hari, baik menggunakan bahasa lisan maupun tulisan.

A. Posisi Relatif

Dari grafik 3.54 di bawah ini dapat di lihat bahwa posisi kemampuan Numerasi tingkat Sekolah Dasar (SD) Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada persentase 33,76%. Capaian ini berada di bawah capaian Provinsi NTT dan capaian Nasional. Berdasarkan 6 (Enam) kategori pengukuran kemampuan Literasi dan Numerasi. Sebagaimana termuat dalam tabel 3.7 di atas maka dapat di ketahui bahwa capaian Literasi seluruh kabupaten termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara belum mencapai tuntas muda atau kurang dari 60% untuk mencapai tuntas muda.



Grafik 3.54. Posisi Relatif Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

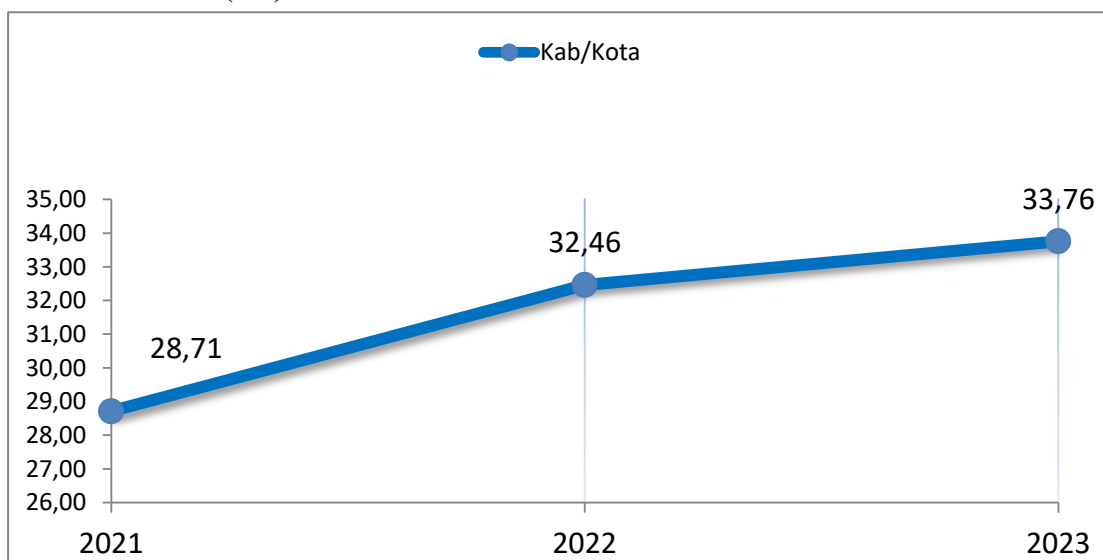


Sumber Data : Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2023, Kepada Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

B. Perkembangan Antar Waktu

Dalam periode tahun 2021-2023 capaian Numerasi Sekolah Dasar (SD)/Mi di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend peningkatan dari 28,71% di tahun 2021 meningkat menjadi 33,76% di tahun 2023.

Grafik 3.55. Perkembangan Rerata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD)/MI

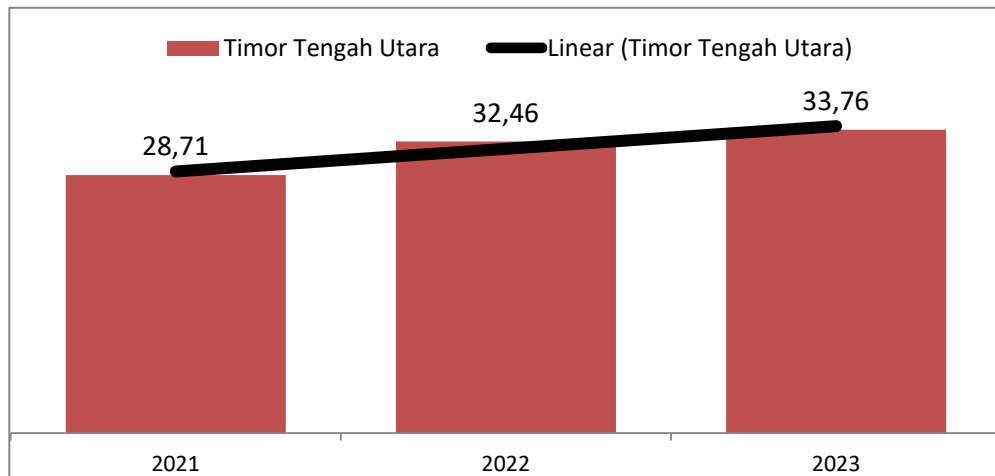


Sumber Data : Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2024



C. Efektifitas

Grafik 3.56. Analisis Efektifitas Rerata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD)



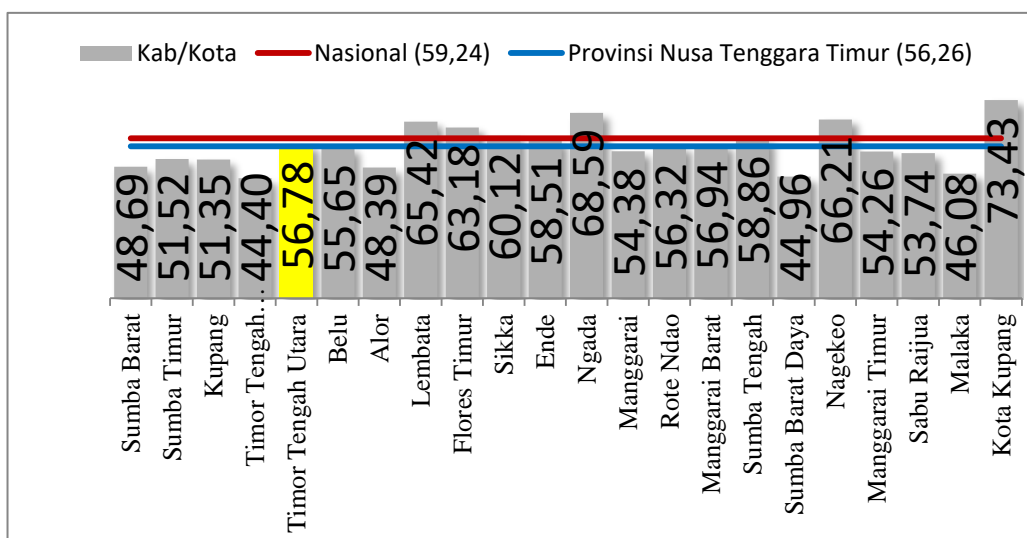
Sumber Data : Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2024

3.3.1.9. Kemampuan Literasi SMP/MTs

A. Posisi Relatif

Pada grafik 3.59 di bawah ini menunjukkan bahwa capaian Kemampuan Literasi SMP/MTs tahun 2023 mencapai 56,78%. Capaian ini lebih rendah dari capaian Nasional dan lebih tinggi dari capaian Provinsi NTT. Sedangkan kabupaten dengan capaian Kemampuan Literasi SMP/MTs sudah mencapai kategori tuntas muda yakni Kota Kupang, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata.

Grafik. 3.57. Posisi Relatif Rerata Kemampuan Literasi SMP /MTs Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



Sumber Data: Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2023, Kepada Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

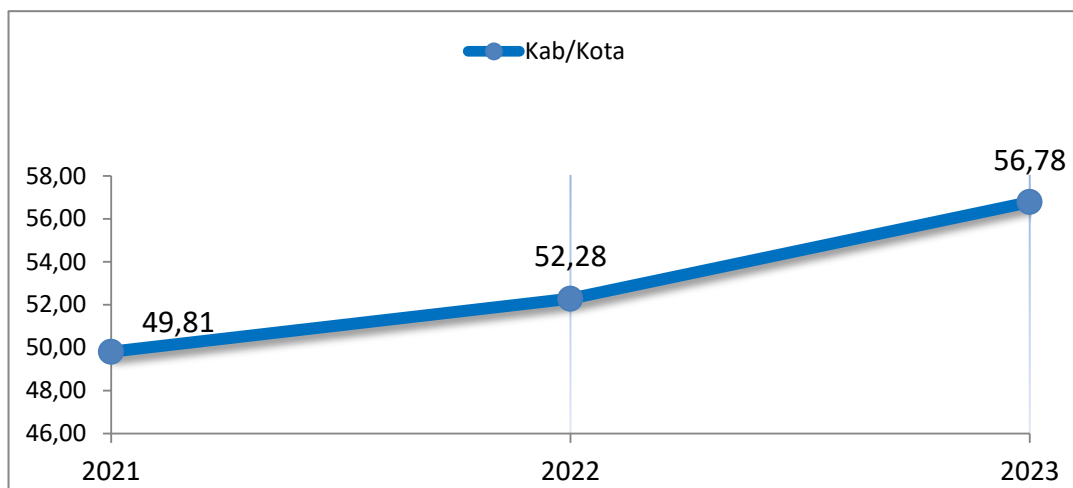
B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan kemampuan Literasi SMP/MTs dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 49,81% di tahun 2021 meningkat



menjadi 56,78% di tahun 2023. Meskipun kemampuan Literasi mengalami peningkatan, namun peningkatannya belum mencapai 6 (enam) kategori pengukuran sebagaimana termuat dalam tabel 3.7. kemampuan Literasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara belum mencapai 60% untuk masuk dalam kategori tuntas muda. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menerapkan program-program pembelajaran yang baik guna mendukung kemampuan Literasi pada anak.

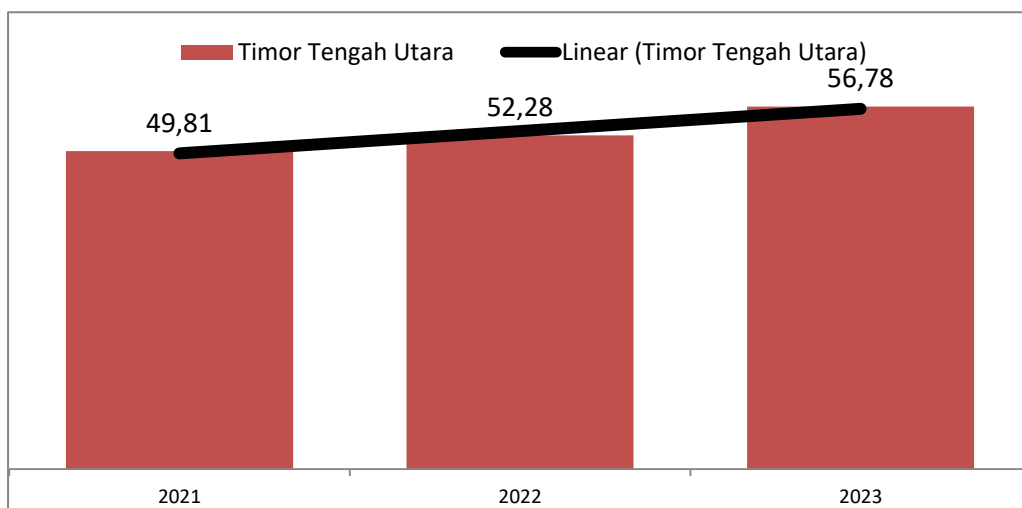
Grafik. 3.58. Perkembangan Antar Waktu Rerata Kemampuan Leterasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023



Sumber Data : Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2024

C. Efektifitas

Grafik. 3.59. Efektifitas Rerata Kemampuan Leterasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023



Sumber Data : Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2024

3.3.10 Kemampuan Numerasi SMP/MTs

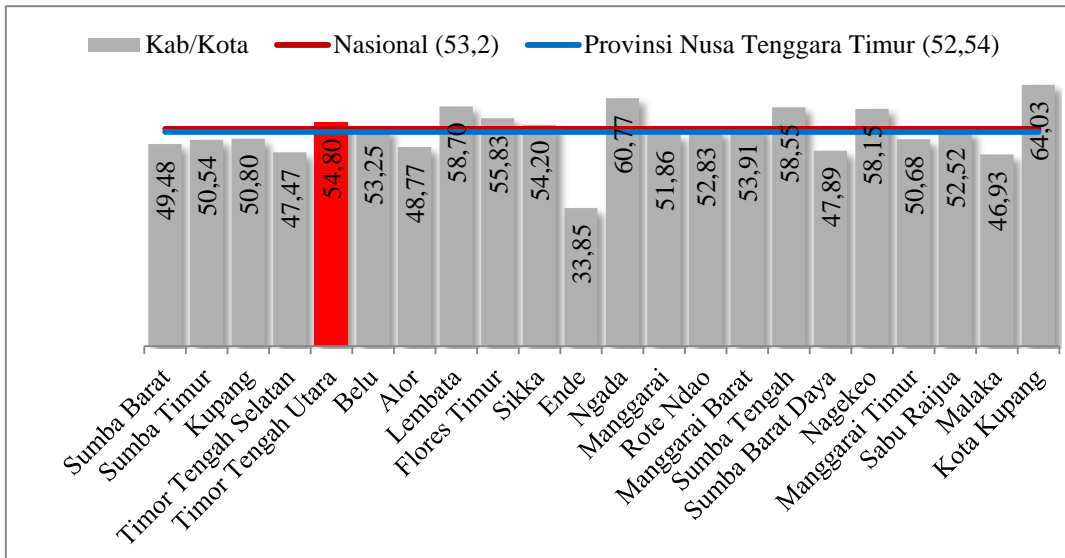
A. Posisi Relatif

Capaian Numerasi SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 sebesar 54,80% atau dengan kata lain capaian numerasi berada di bawah 60% untuk masuk dalam kategori tuntas muda. Capaian ini lebih baik dari capaian Nasional dengan capaian 53,2%, dan capaian Provinsi NTT dengan capaian



52,54%. Kabupaten dengan capaian numerasi SMP/MTs tertinggi dan masuk dalam kategori tuntas muda yakni Kota Kupang dengan capaian 64,03% dan Kabupaten Ngada dengan capaian 60,77%.

Grafik 3.60. Posisi Relatif Numerasi SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

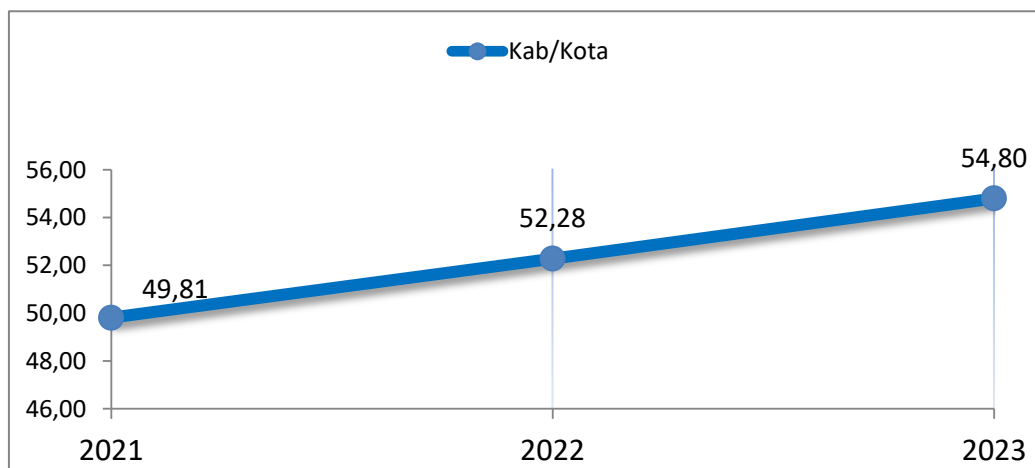


Sumber Data : Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2024

B. Perkembangan Antar Waktu

Pada periode tahun 2021-2023 capaian Numerasi menunjukkan Trend peningkatan dari 49,81% di tahun 2021 meningkat menjadi 54,80% di tahun 2023.

Grafik 3.61. Perkembangan Antar Waktu Numerasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023

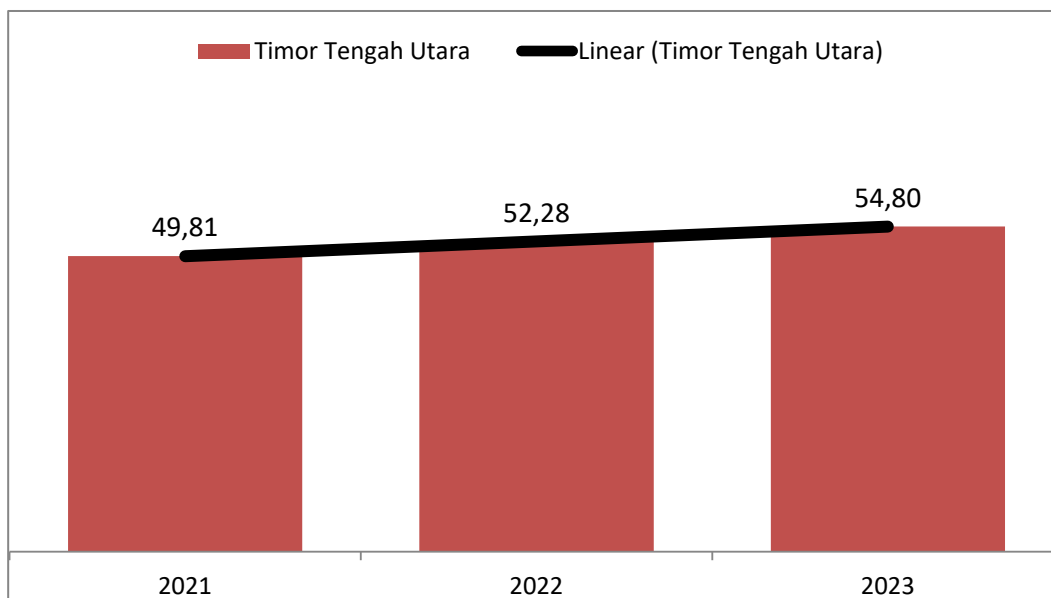


Sumber Data : Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2023



C. Efektivitas

Grafik 3.62. Posisi Relatif Numerasi SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023



Sumber Data : Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, 18 Februari 2023

Tabel 3.8. Masalah Bidang Pendidikan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
1	Angka Partisipasi Kasar SEKOLAH DASAR (SD)/MI	Lebih Tinggi dari Provinsi NTT dan Nasional	Fluktuatif	Efektif	Relevan
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	Lebih Tinggi dari Provinsi NTT dan Nasional	Fluktuatif	Efektif	Relevan
3	Angka Partisipasi Murni SEKOLAH DASAR (SD)/MI	Lebih Tinggi dari Provinsi NTT dan Nasional	Cenderung Menurun	Efektif	Relevan



No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	Lebih Rendah dari Provinsi NTT dan Nasional	Fluktuatif	Tidak Efektif	Relevan
5	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lebih Tinggi dari Provinsi NTT dan Nasional	Meningkat	Efektif	Relevan
6	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Lebih Tinggi dari Provinsi NTT dan Nasional	Meningkat	Efektif	Relevan
7	Literasi SEKOLAH DASAR (SD)	Belum Masuk dalam 6 Kategori Kemampuan Literasi	Meningkat	Tidak Efektif	Tidak Relevan
8	Numerasi SEKOLAH DASAR (SD)	Belum Masuk dalam 6 Kategori Kemampuan Literasi	Meningkat	Tidak Efektif	Tidak Relevan
9	Literasi SMP	Belum Masuk dalam 6 Kategori Kemampuan Literasi	Meningkat	Tidak Efektif	Tidak Relevan
10	Numerasi SMP	Belum Masuk dalam 6 Kategori Kemampuan Literasi	Meningkat	Tidak Efektif	Tidak Relevan



3.3.2. Bidang Kesehatan

3.3.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

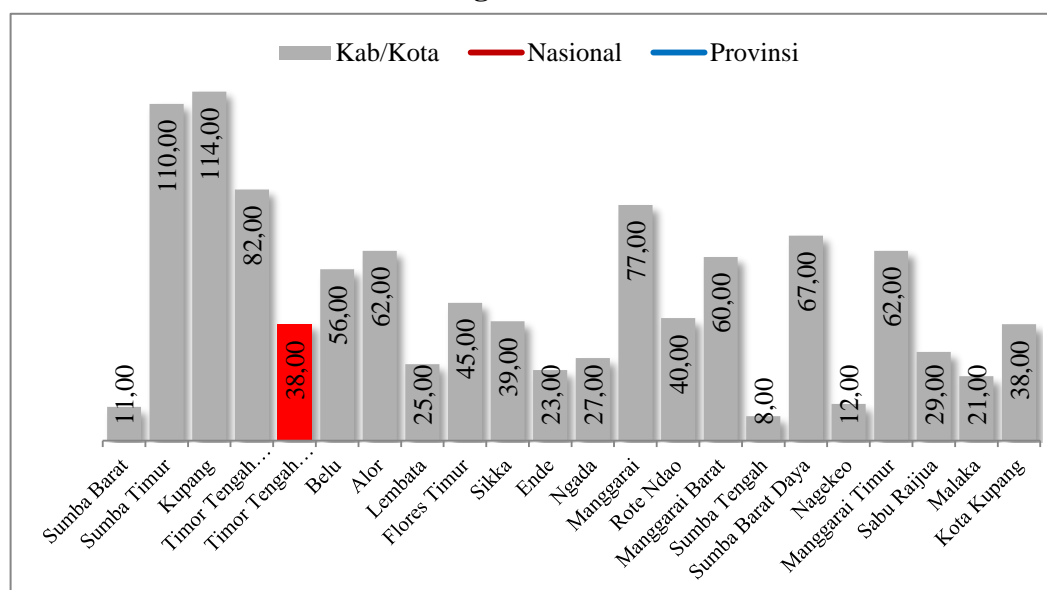
Angka kematian bayi adalah suatu indikator yang mengukur jumlah kematian bayi (anak yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun) dalam suatu populasi dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya diukur per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tersebut. Angka ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan dan kualitas perawatan kesehatan ibu dan bayi dalam suatu negara atau wilayah. Angka kematian bayi adalah salah satu indikator penting dalam bidang kesehatan dan pembangunan manusia. Tingkat yang rendah dari angka kematian bayi biasanya menunjukkan bahwa sistem perawatan kesehatan bayi dan ibu berfungsi baik, akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik tersedia, serta faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kematian bayi (seperti penyakit menular, malnutrisi, dan kondisi lingkungan yang buruk) dikelola dengan baik. Peningkatan angka kematian bayi dapat menjadi tanda adanya masalah serius dalam sistem perawatan kesehatan atau kondisi sosial-ekonomi suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, mengurangi angka kematian bayi merupakan tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dan ibu.

Jumlah kelahiran di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 4.925 jiwa dengan jumlah kematian bayi di tahun yang sama mencapai 38 jiwa atau dengan kata lain 7,72/1.000 kelahiran.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan grafik 3.63 dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 berada pada posisi ke 8 dari 22 kabupaten/kota dengan jumlah kematian bayi sebesar 38 jiwa. Jumlah kematian bayi tertinggi di tempati oleh Kabupaten Kupang dengan 114 Jiwa. Sedangkan kabupaten dengan jumlah kematian bayi terendah yakni Kabupaten Sumba Tengah.

Grafik 3.63 Posisi Relatif Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



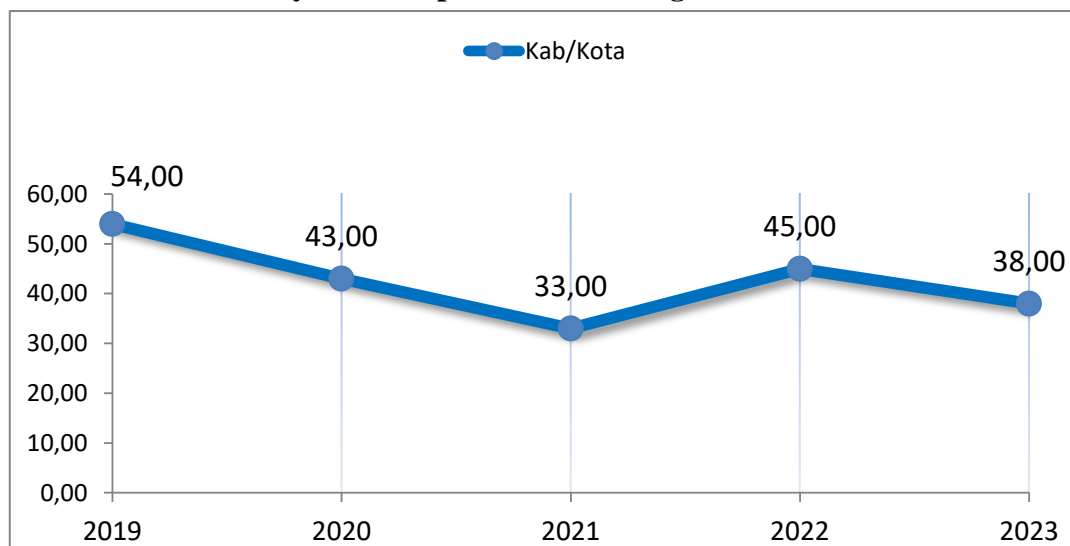
Sumber: Badan Pusat Statisti (BPS)



B. Perkembangan Antar Waktu

Dalam periode tahun 2019-2023 jumlah kematian bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019 kematian bayi berjumlah 54 Jiwa, menurun sebesar 7 Jiwa menjadi 43 Jiwa di tahun 2020, terus menurun sampai dengan 33 Jiwa di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 45 Jiwa dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 38 jiwa.

Grafik 3.64 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statisti (BPS)

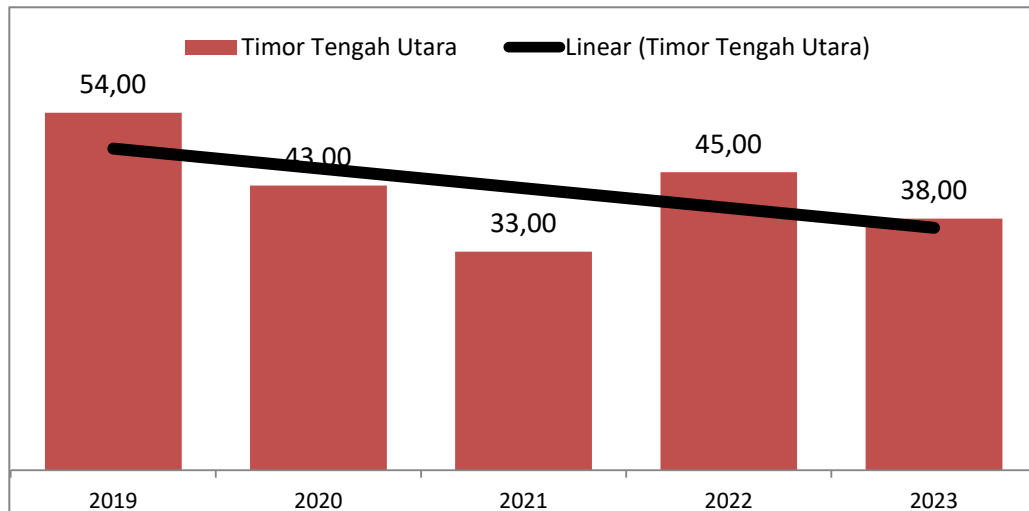
C. Efektivitas

Dalam periode tahun 2019-2023 jumlah kematian bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend yang fluktuatif, tapi cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dari 54 Jiwa di tahun 2019 menjadi 38 jiwa di tahun 2023.

Kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung kematian bayi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir dan berhubungan langsung dengan status kesehatan bayi. Penyebab langsung kematian bayi antara lain berat bayi lahir rendah (BBLR), infeksi pasca lahir (tetanus neonatorum, sepsis), hipotermia dan asfiksia. Sedangkan kematian bayi oleh penyebab tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan luar dan aktivitas ibu ketika hamil, seperti: faktor sosial ekonomi, pelayanan kesehatan, keadaan ibu selama kehamilan, dan pengaruh lingkungan.



Grafik 3.65 Analisis Efektivitas Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023

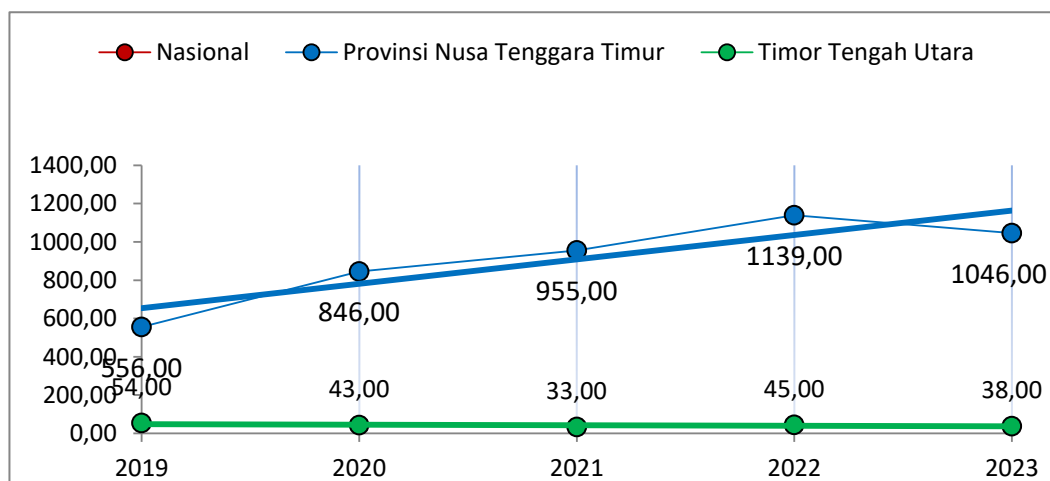


Sumber Data : Badan Pusat Statistik

D. Relevansi Perkembangan

Dalam dekade tahun 2019-2023 jumlah kematian bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend yang fluktuatif tapi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini tidak relevan dengan capaian kematian bayi di Provinsi NTT yang terus mengalami peningkatan.

Grafik 3. 66 Analisis Relevansi Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu



negara atau wilayah. Indikator bersifat negatif. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

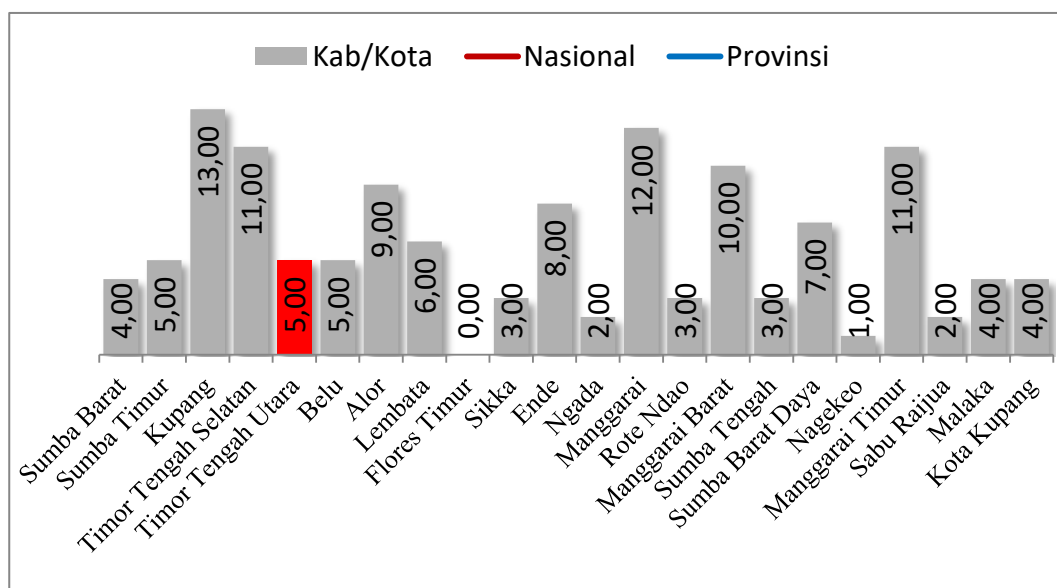
1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.
5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

Berdasarkan data badan pusat statistik menunjukan bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023 sebanyak 4.984 dengan jumlah kematian ibu di tahun yang sama sebanyak 5 jiwa atau dengan kata angka kematian ibu di tahun 2023 sebesar 100,32/100.000 kelahiran.

A. Posisi Relatif Angka

Pada tahun 2023 jumlah kematian ibu di Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 5 Jiwa dan menempati posisi ke 11 dari 22 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT, dan Kabupaten Flores Timur tidak ada jumlah kematian ibu di tahun 2023. Sedangkan Kabupaten Kupang menempati posisi pertama dengan jumlah 13 jiwa.

Grafik 3.67 Posisi Relatif Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



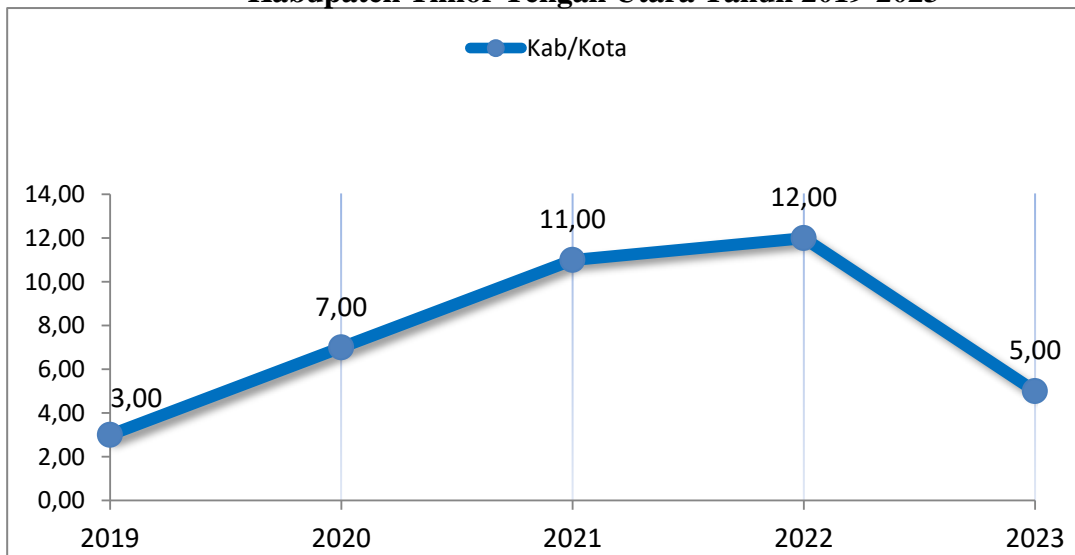
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan jumlah kematian ibu selama periode tahun 2019-2022 menunjukkan Trend peningkatan dari 3 Jiwa pada tahun 2019 menjadi 12 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kematian ibu mengalami penurunan sebanyak 7 jiwa menjadi 5 jiwa.

Grafik 3.68 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023

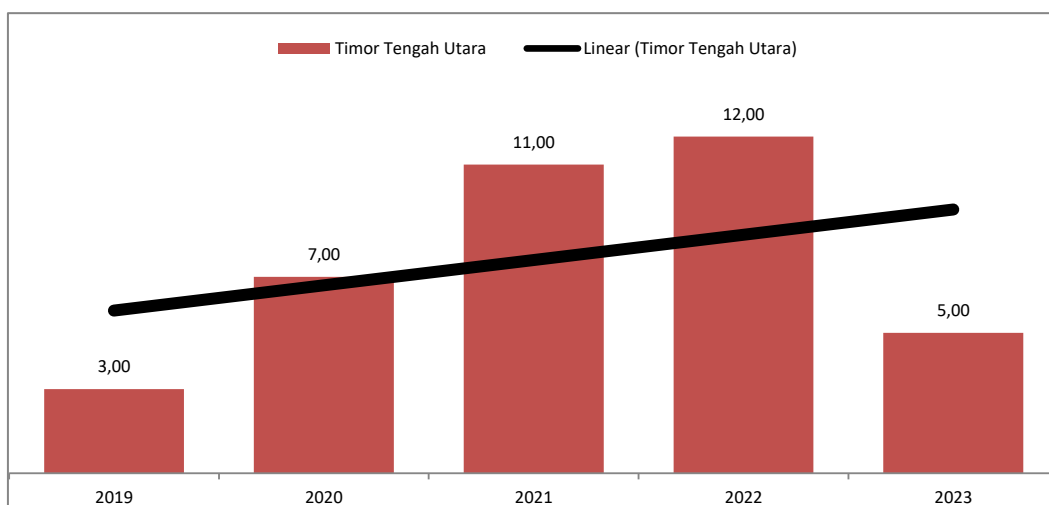


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas

Dalam periode tahun 2019-2023 jumlah kematian ibu menunjukkan Trend peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak faktor yang harus diperhatikan pemerintah dalam upaya mengatasi kematian ibu seperti terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, terlambat mendapat penanganan dan juga faktor sosial ekonomi.

Grafik 3.69 Analisis Efektivitas Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab.TTU



3.3.2.3. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore \geq -3,0 s/d Zscore < -2,0

Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:

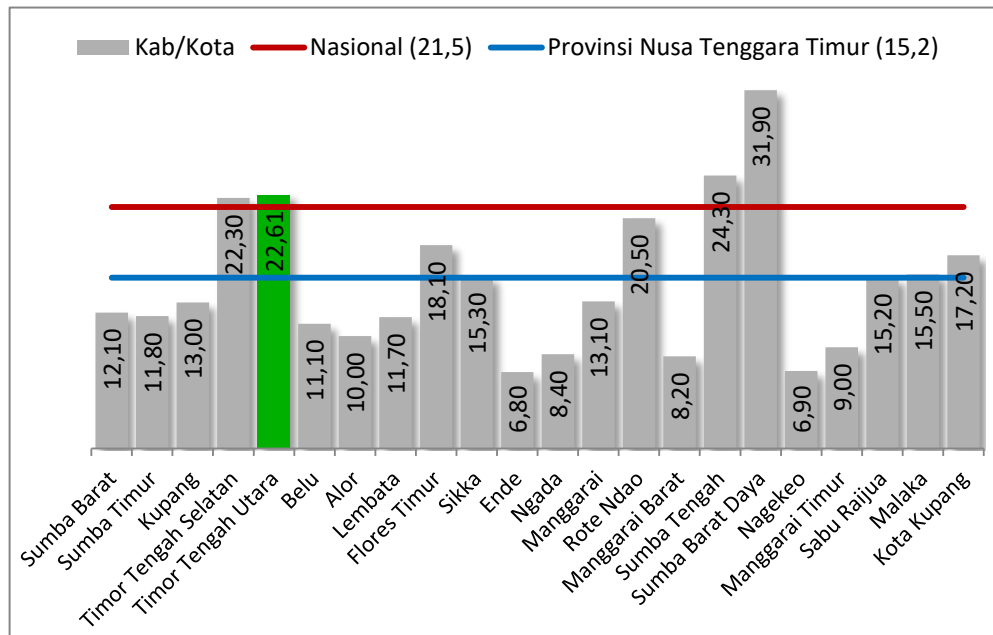
1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.
4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.

A. Posisi Relatif

Posisi relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 menempati posisi ke 19 dari 22 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT dengan capaian sebesar 22,61%. Capaian ini lebih besar dari capaian nasional dengan 21,5% dan provinsi dengan capaian 15,2%. Kabupaten dengan prevalensi stunting terendah yakni Kabupaten Nagakeo dengan persentase 6,90%, sedangkan Kabupaten Sumba Barat Daya menempati posisi tertinggi dengan capaian 31,90%



Grafik 3.70 Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

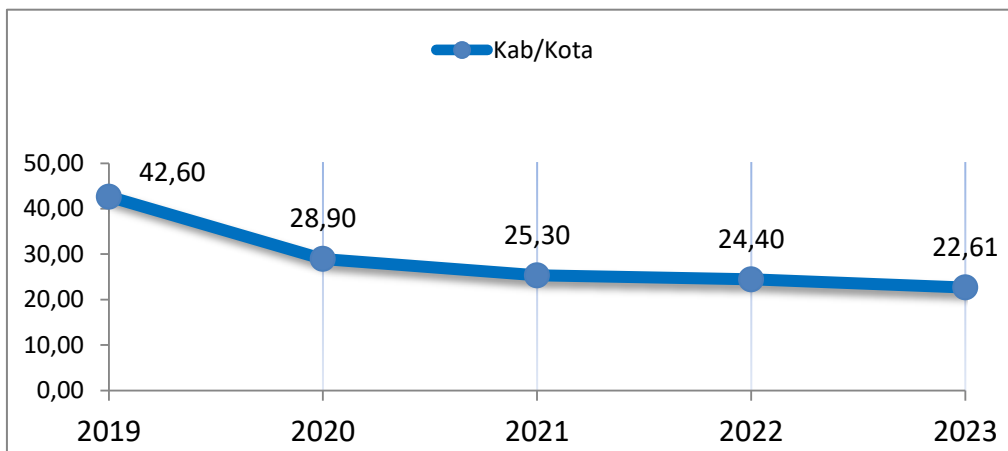


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.TTU (EPBGRM)

B. Perkembangan Antar Waktu

Pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami penurunan dari 42,60% di tahun 2019 turun sampai dengan 22,61% di tahun 2023.

Grafik 3.71 Analisis Perkembangan Prevalensi Balita Stunting (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



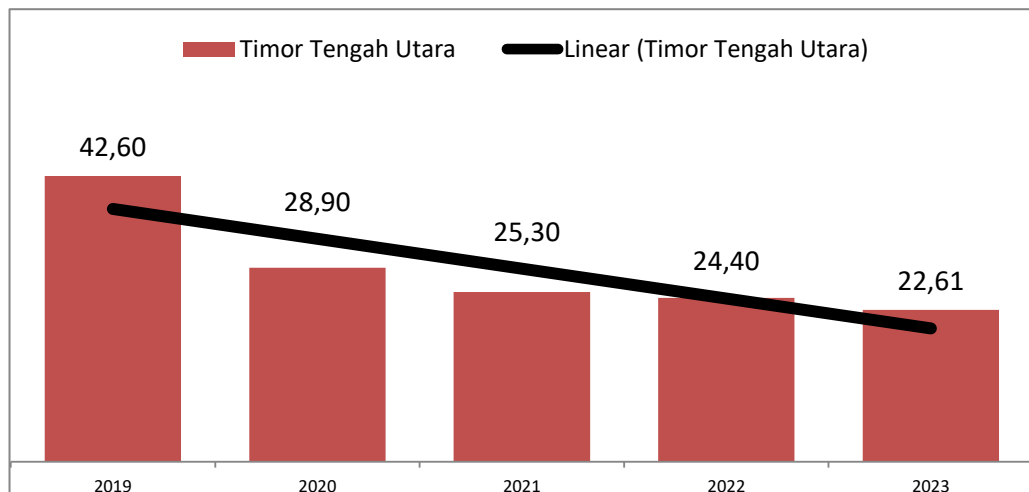
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.TTU

C. Efektivitas

Prevalensi Stunting periode tahun 2019-2023 menunjukkan Trend penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah efektif dalam menurunkan angka stunting. Dengan beberapa program prioritas seperti Program Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Program Bulan Timbang, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Kesejahteraan Keluarga (Dahsyat) dan Pemberian Makanan Tambahan oleh Pemerintah Desa.



Grafik 3.72 Analisis Efektivitas Balita Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

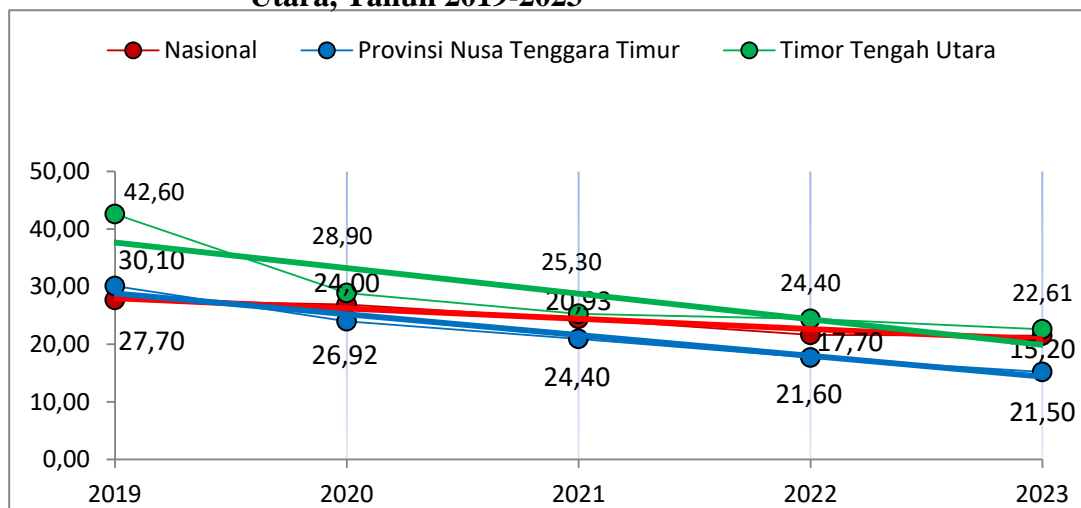


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.TTU (EPPBGM)

D. Relevansi Perkembangan

Relevansi perkembangan Prevalensi Stunting pada tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa capaian prevalensi Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara lebih tinggi dari pada capaian Nasional dan juga Provinsi NTT. Melihat capaian prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara masih lebih tinggi dari capaian Nasional dan Provinsi maka di perlukan upaya-upaya strategis untuk percepatan penurunan stunting baik itu intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Grafik 3.73 Analisis Relevansi Balita Stunting (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.TTU

3.3.2.4. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup (UHH) sangat diperlukan, mengingat Umur Harapan Hidup merupakan indikator penting pembangunan kesehatan dan ekonomi. Umur Harapan Hidup merupakan salah satu komponen

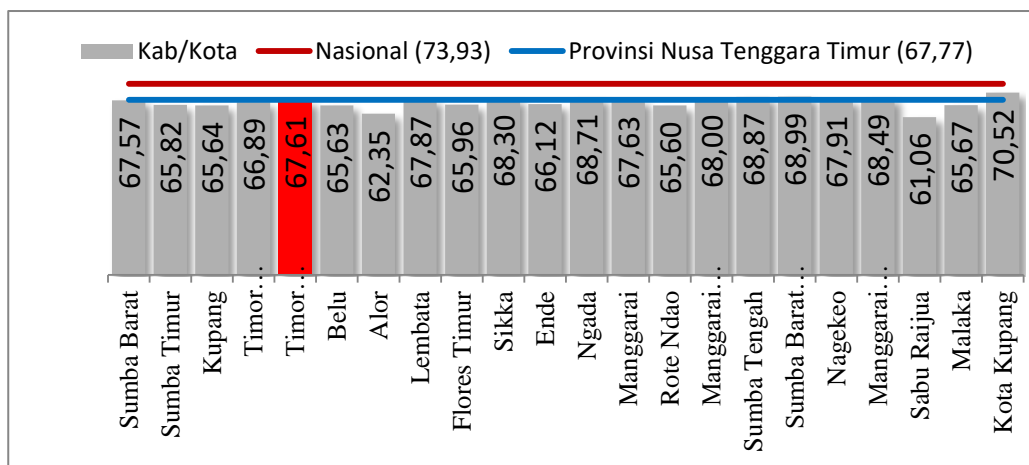


dari IPM, Umur Harapan Hidup masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan IPM suatu daerah akan naik, dan ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

A. Posisi Relatif

Dari grafik di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Timor Tengah Utara masih berada di bawah capaian Provinsi NTT dengan 67,77 tahun dan capaian Nasional dengan 73,93 tahun. Kabupaten TTU menempati posisi ke 10 dari 22 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT, sedangkan Kab/Kota yang capaian umur harapan hidupnya tertinggi yakni Kota Kupang dengan capaian 70,52 tahun.

Grafik 3.74 Analisis Posisi Relatif Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

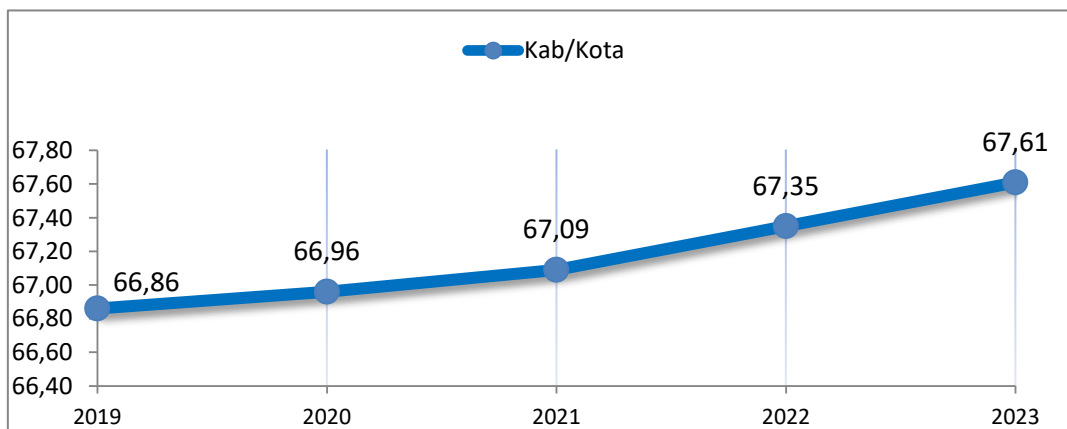


Sumber Data :Badan Pusat Statistik

B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan antar waktu UHH selama periode tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 UHH Kab.TTU sebesar 66,86 tahun terus meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 67,61 tahun. Trend positif dari meningkatnya rata-rata umur harapan hidup di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terlepas dari adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pendapatan perkapita masyarakat dan infrastruktur dasar.

Grafik 3.75 Analisis Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



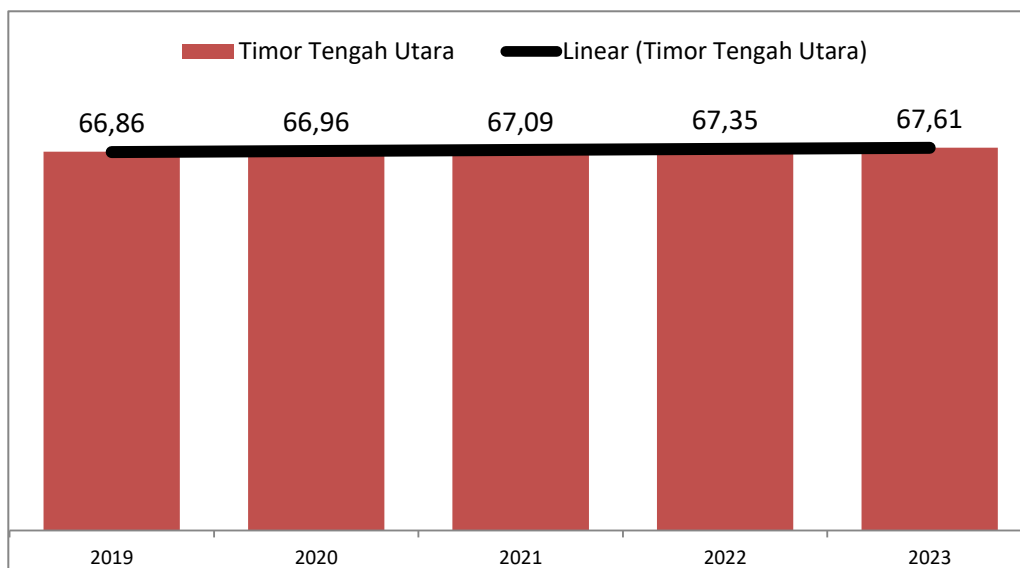
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



C. Efektivitas.

Dari Grafik di bawah ini dapat kita ketahui bahwa UHH di Kabupaten Timor Tengah Utara selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan UHH di Kabupaten Timor Tengah Utara baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek telah dilaksanakan, meskipun masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki.

Grafik 3.76 Analisis Efektivitas Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

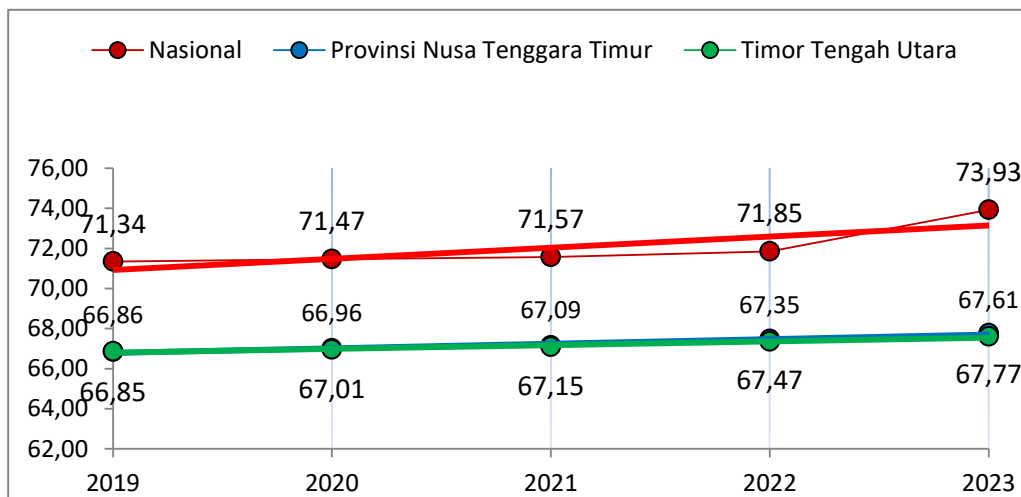


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Pada periode tahun 2019-2023 perkembangan UHH di Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun belum mencapai umur harapan hidup Nasional dan Provinsi. Tetapi dalam periode tahun yang sama capaian UHH berkontribusi positif terhadap peningkatan UHH Nasional dan Provinsi.

Grafik 3.77 Analisis Relevansi Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



Tabel 3.9. Masalah Bidang Kesehatan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Lebih baik dari Capaian Nasional dan Provinsi NTT	Fluktuatif	Efektif	Tidak Relevan
2	Angka Kematian Ibu (Aki)		Fluktuatif	Tidak Efektif	Tidak Relevan
3	Prevalensi Stunting	Lebih Tinggi dari Capaian Nasional dan Provinsi	Cenderung Menurun	Efektif	Tidak Relevan
4	Umur Harapan Hidup (UHH)	Lebih tinggi dari Provinsi dan lebih rendah dari Nasional	Cenderung Meningkatkan	Efektif	Tidak Relevan

3.3.2. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan

3.3.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengacu pada persentase orang dewasa yang berada dalam angkatan kerja, baik yang bekerja atau mencari pekerjaan, dari total jumlah populasi usia kerja. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)} = \left(\frac{\text{Populasi Usia Kerja}}{\text{Angkatan Kerja}} \right) \times 100$$

Angkatan kerja melibatkan orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan aktif. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Indikator TPAK menjadi penting karena beberapa alasan. *Pertama* : Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal. *Kedua*: Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, pendapatan pajak dari tenaga kerja dapat meningkat, mendukung pendanaan untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, anggota angkatan kerja yang aktif juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan



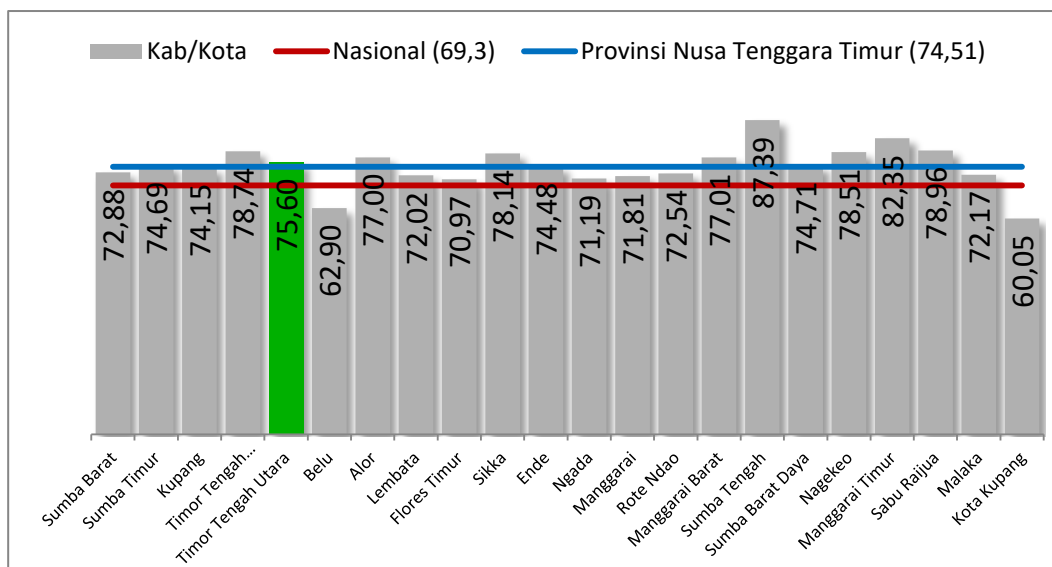
ekonomi melalui belanja konsumen dan partisipasi dalam kegiatan komunitas. *Ketiga:* Data tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia. Pemerintah dan perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk merancang kebijakan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan ekonomi. *Keempat :* Tingkat partisipasi angkatan kerja juga terkait dengan tingkat pengangguran. Perubahan dalam tingkat partisipasi dapat memberikan indikasi tentang dinamika pasar tenaga kerja dan keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan.

Berikut ini beberapa analisa terkait tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten Timor Tengah Utara.

A. Posisi Relatif

Jika melihat data tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara yang relatif tinggi pada tahun 2023 dengan melampaui capaian Provinsi NTT dan Nasional, sedangkan jika di bandingkan dengan 22 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT maka Kabupaten Timor Tengah Utara menempati posisi ke 13. Sementara itu kabupaten/kota dengan yang menempati posisi pertama dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Grafik 3.78 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



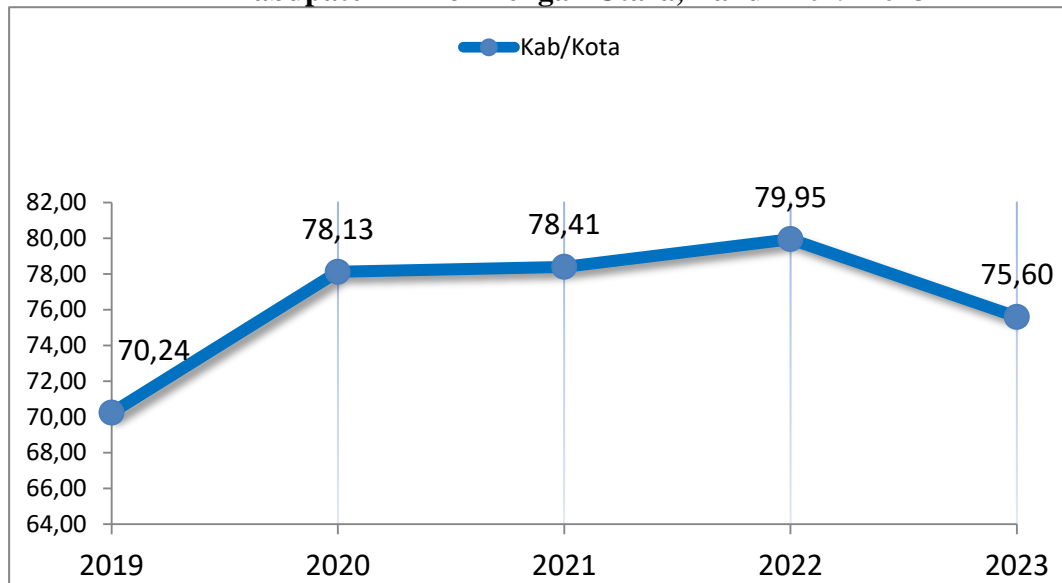
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar waktu

Pada periode tahun 2019-2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 70,24% terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 menjadi 79,95, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 75,60%.



Grafik 3.79 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

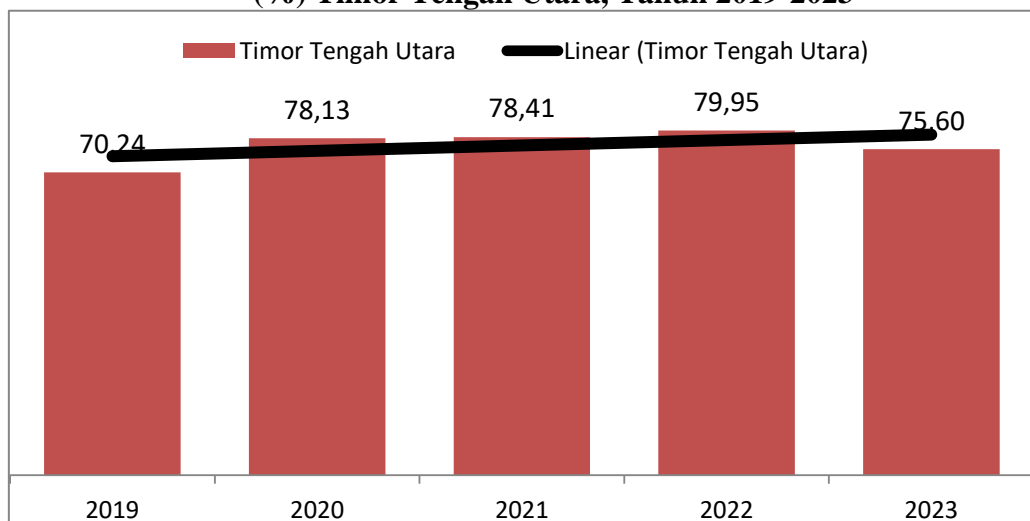


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas

Pada dekade Tahun 2019-2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Trend peningkatan. hal ini berarti kebijakan yang dilakukan dalam mendorong Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berjalan efektif.

Grafik 3.80 Analisis Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



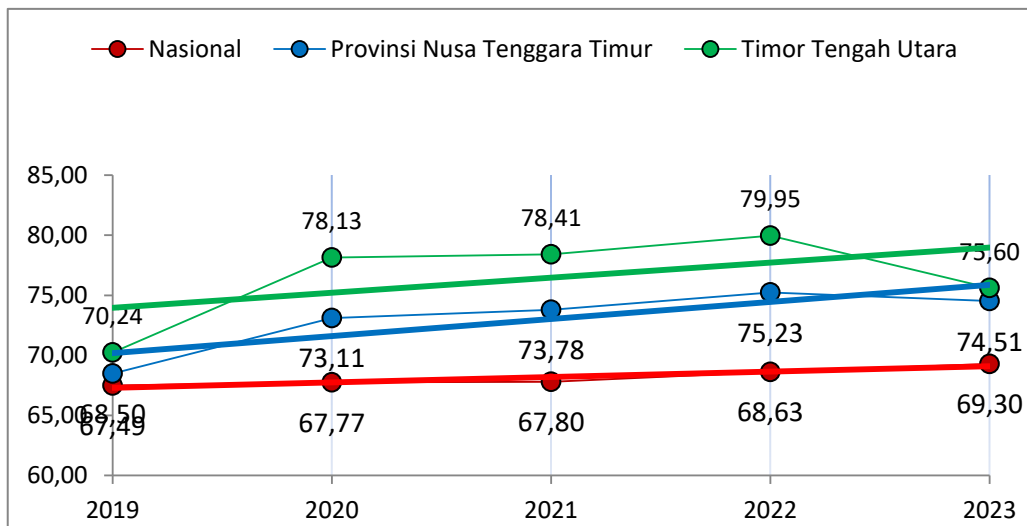
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Pada periode tahun 2019-2023 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan trend peningkatan kecuali pada tahun 2023, tetapi lebih tinggi dari pada capaian Provinsi NTT dan Nasional. Ini mengindikasikan bahwa Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara cukup tinggi dan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan.



Grafik 3.81 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja sama sekali. Pengangguran merupakan salah satu indikator dalam bidang ketenagakerjaan, terutama pengangguran terbuka. Pengangguran Terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Beberapa kategori yang termasuk dalam pengangguran terbuka adalah tidak punya pekerjaan dan yang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin rendah peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong timbulnya permasalahan sosial.

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

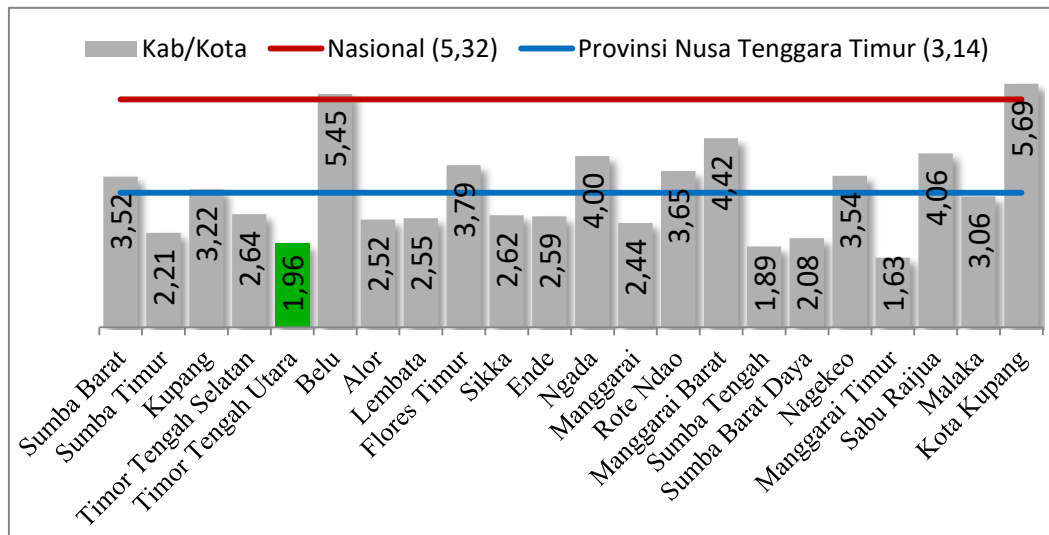
$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \left(\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

A. Posisi Relatif

Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 1,96% capaian ini menggambarkan bahwa TPT Kabupaten Timor Tengah Utara lebih rendah dari pada capaian capaian Nasional dan Provinsi NTT. Bila dibandingkan dengan Kab/kota lain yang ada di Provinsi NTT, TPT Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada posisi ke 3 terendah, sedangkan Kota Kupang menempati posisi pertama tertinggi dengan capaian 5,69%.



Grafik. 3.82 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

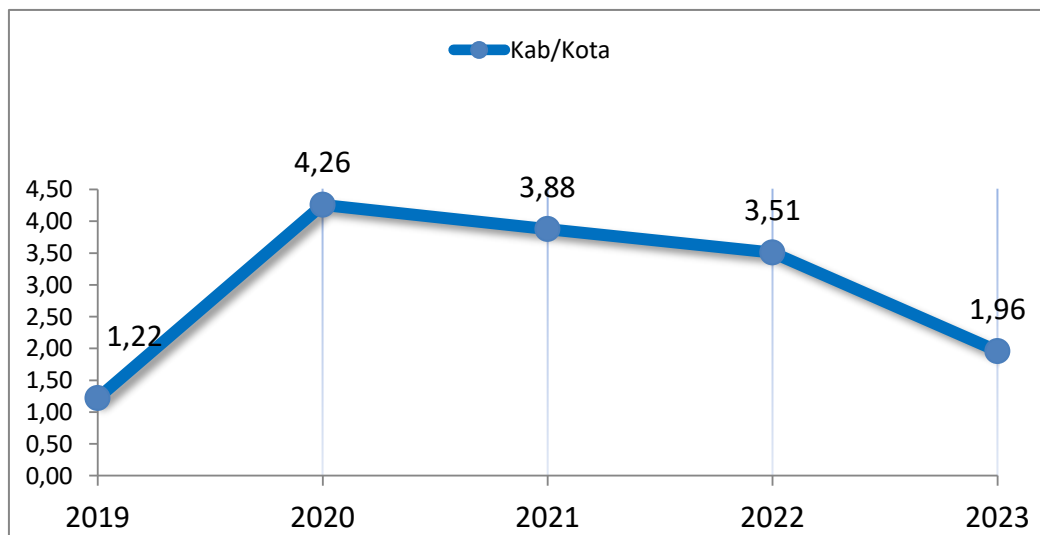


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Perkembangan Antar Waktu

Pada tahun 2019 TPT Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 1,22%, sedangkan pada tahun 2020 TPT mengalami peningkatan signifikan menjadi 4,26. Dan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 TPT mengalami penurunan terakhir pada tahun 2023 sebesar 1,92% menjadi 1,96%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.83 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



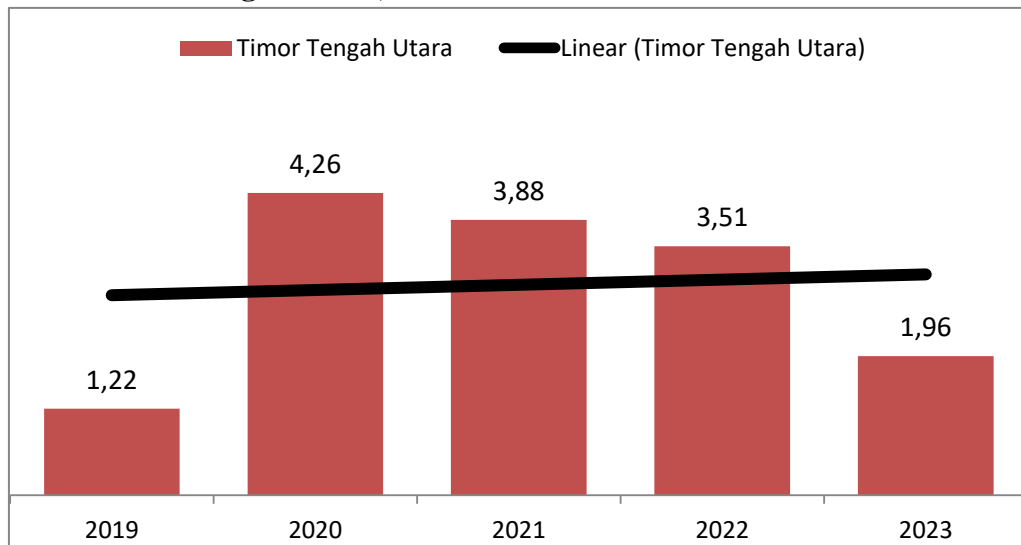
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas.

TPT Kabupaten Timor Tengah Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019-2020. Pada tahun 2021, ketika ekonomi mulai kembali berangsur pulih, pasca kelesuan akibat dampak covid-19, TPT Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditekan sampai dengan 1,96%.



Grafik 3.84 Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

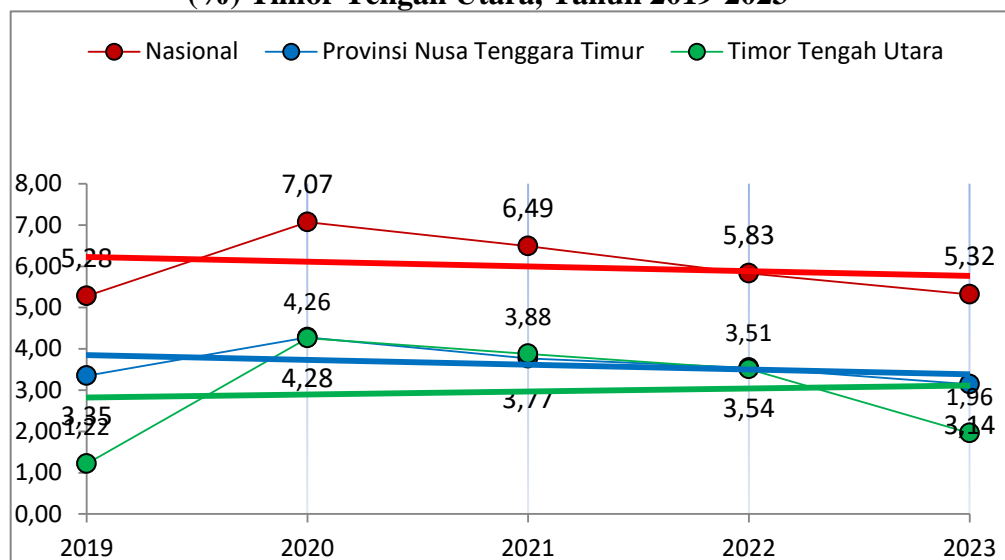


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Relevansi Perkembangan

Trend TPT Kabupaten Timor Tengah Utara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Nasional dan Provinsi NTT, selama tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi dan Nasional mengalami peningkatan sebagai akibat dari adanya Pandemi Covid-19, tetapi pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.85 Relevansi Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



Tabel 3.10. Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Ketenagakerjaan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Lebih Tinggi dari Nasional dan Provinsi	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Lebih Rendah dari Nasional dan Lebih Tinggi dari Provinsi	Cenderung Menurun	Belum Efektif	Relevan

3.3.3. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi ketika semua orang pada segala waktu menerima akses secara fisik, sosial ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dengan kondisi pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya setempat.

Untuk memenuhi ketahanan pangan maka, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan 4 (empat) komoditi pertanian unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Padi, Jagung, Kacang Tanah dan Bawang Putih Lokal yang dikembangkan. Keempat komoditi ini memiliki potensi untuk dikembangkan baik dilihat dari luas panen, produksi maupun produktivitas.

3.3.3.1. Indeks Ketahanan Pangan

Aspek Ketahanan pangan memiliki hubungan dengan kemiskinan dan saling mempengaruhi. Kemiskinan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pangan yang memadai. Orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan mungkin tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar dapat menyebabkan kurangnya ketahanan pangan, terutama jika masyarakat bergantung pada sumber daya pangan yang tidak stabil atau tidak mencukupi.

Ketidakpastian dan fluktuasi pendapatan juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Keluarga yang mengalami ketidakpastian ekonomi lebih rentan terhadap ketidakstabilan pasokan pangan karena mungkin sulit untuk memprediksi dan mengelola kebutuhan pangan dalam jangka panjang. Kemiskinan juga seringkali terkait dengan masalah gizi dan kesehatan. Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dapat menyebabkan defisiensi gizi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas individu, terutama anak-anak.

Kemiskinan juga dapat membatasi akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, air, dan modal. Ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memproduksi dan mempertahankan ketahanan pangan jangka panjang. Selain itu Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Ketika sumber daya yang diperlukan untuk produksi pangan terpengaruh, masyarakat miskin dapat lebih sulit untuk pulih dan memastikan ketersediaan pangan yang memadai.



Upaya untuk mengatasi kemiskinan seringkali juga melibatkan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Peningkatan akses terhadap pendapatan, pelatihan pertanian, infrastruktur pangan, dan sistem dukungan sosial dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, meningkatkan ketahanan pangan dapat membantu mengurangi kerentanannya masyarakat terhadap siklus kemiskinan dan krisis pangan.

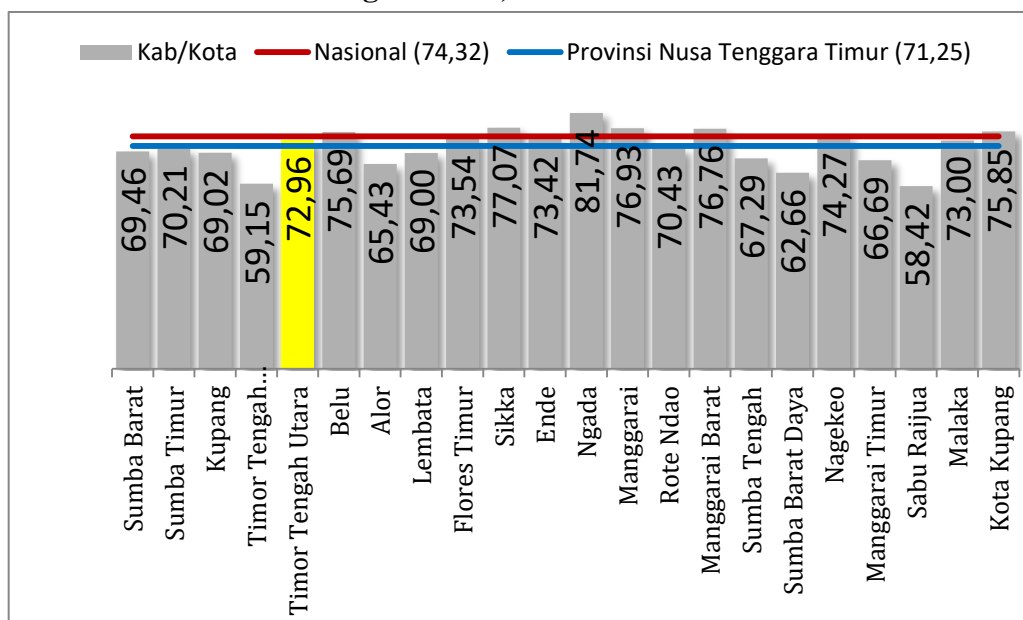
Untuk mengukur derajat ketahanan pangan, pemerintah menggunakan Indeks ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (rangking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan.

Berikut ini adalah Analisis terhadap indeks ketahanan pangan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023.

A. Posisi Relatif

Pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 72,96, capaian ini menempati posisi ke 11 dari 22 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Capain indeks Ketahanan pangan Kabupaten Timor Tengah Utara berada di atas capaian Provinsi NTT (71,25) tetapi lebih rendah dari capaian Nasional (74,32). Sementara Kabupaten Ngada menempati posisi pertama dengan capaian indeks ketahanan pangan tertinggi yakni 81,74.

Grafik 3.86 Posisi Relatif Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2023



Sumber Data : Laporan Indeks Ketahanan Pangan Nasional

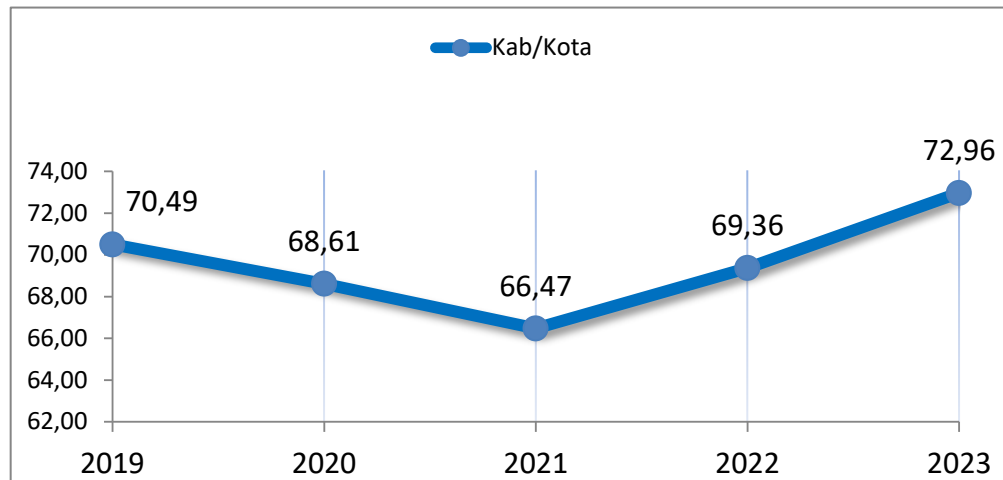
B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Indeks ketahanan pangan Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai angka 70,49, kemudian terus mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 hingga mencapai



angka 66,47. Indeks Ketahanan Pangan kembali membaik pada tahun 2022-2023 hingga berada pada angka 72,96.

Grafik 3.87 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023

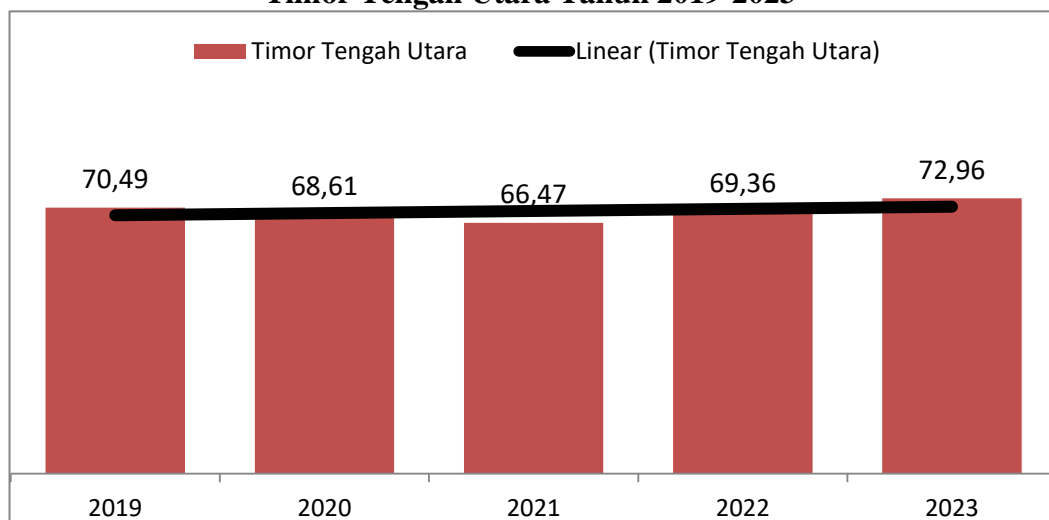


Sumber Data : Laporan Indeks Ketahanan Pangan Nasional

C. Efektivitas

Meskipun dalam periode lima tahun terakhir indeks ketahanan pangan mengalami peningkatan tapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019, hal ini terjadi sebagai akibat adanya perubahan iklim, seperti terjadinya badai tropis saroja yang melanda NTT khususnya kabupaten TTU di tahun 2021, yang menyebabkan petani gagal panen. Naiknya indeks ketahanan pangan pada tahun 2023 menggambarkan adanya perbaikan-perbaikan pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

Grafik 3.88 Efektivitas Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



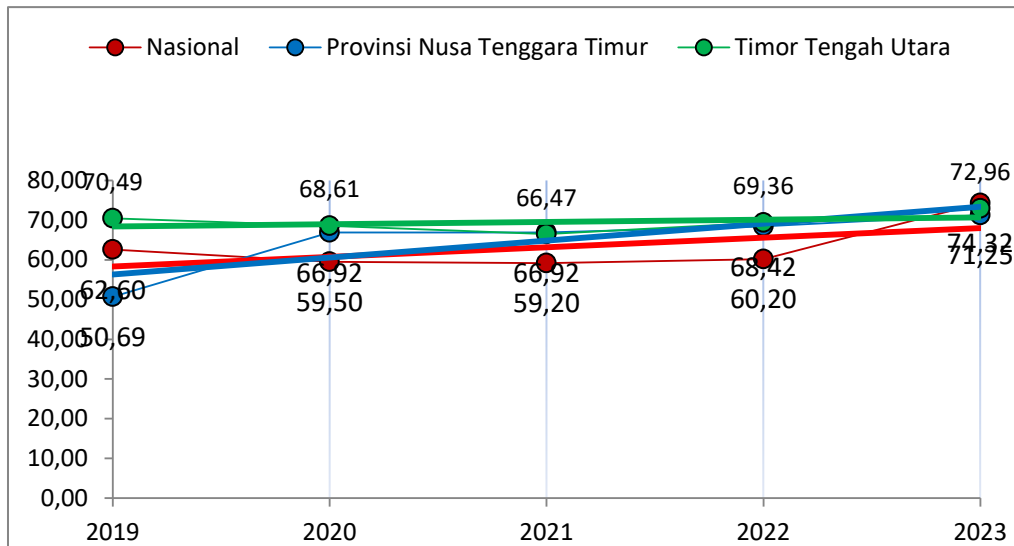
Sumber Data : Laporan Indeks Ketahanan Pangan Nasional

D. Relevansi Perkembangan



Pada periode tahun 2019-2023 indeks ketahanan pangan Kabupaten Timor Tengah Utara terlihat lebih tinggi dari capaian Provinsi NTT dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian Indeks Ketahanan pangan Kabupaten Timor Tengah Utara berkontribusi Positif terhadap capain indeks ketahanan pangan Provinsi dan Nasional.

Grafik 3.89 Analisis Relevansi Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



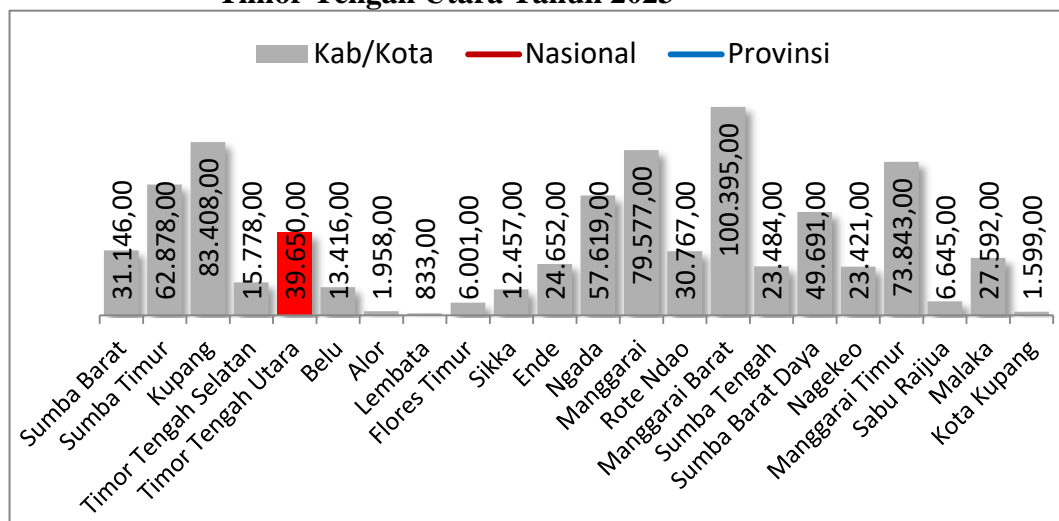
Sumber Data : Laporan Indeks Ketahanan Pangan Nasional

3.3.3.2. Produktivitas Produksi Padi (Ton)

A. Posisi Relatif

Produktivitas Produksi Padi Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 39.650,00 Ton, secara keseluruhan dari 22 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT, Timor Tengah Utara menempati posisi ke 8, Kabupaten Manggarai Barat menempati posisi pertama lalu diikuti oleh kabupaten Manggarai, sementara Kabupaten dengan Produktifitas terendah yakni Kabupaten Lembata.

Grafik 3.90 Posisi Relatif Produktivitas Produksi Padi (Ton) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



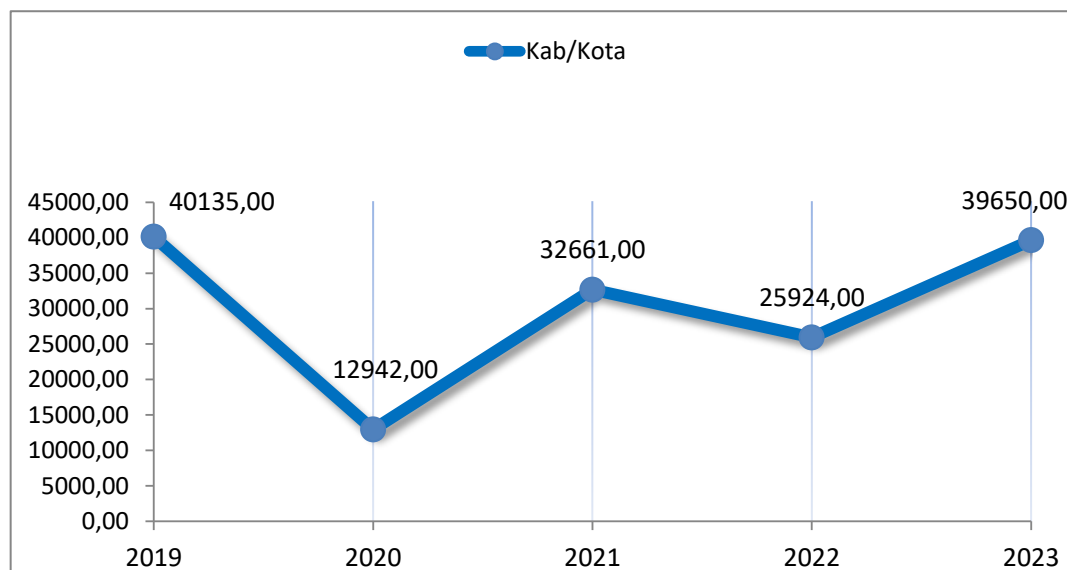
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)



B. Perkembangan Antar Waktu

Pada periode tahun 2019-2023 produktivitas padi di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019 produktivitas padi sebesar 40.135 ton, menurun sebesar 27.193 ton menjadi 12.942 ton di tahun 2020, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 32.661 ton, dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 25.924 ton, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 39.650 ton.

Grafik 3.91 Perkembangan Produktivitas Produksi Padi (Ton) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

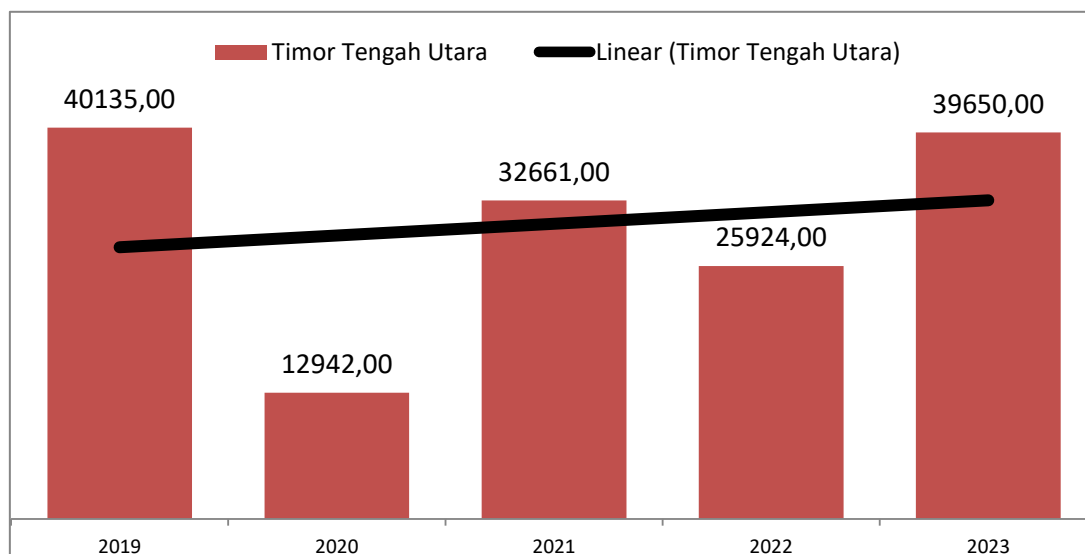


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Efektivitas

Jika dilihat dari analisis efektivitas dari grafik di bawah ini tentang Produktivitas produksi padi di Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Hal ini dapat di artikan bahwa program-program yang dijalankan guna meningkatkan produksi padi belum efektif dalam meningkatkan produktifitas produksi padi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Grafik 3.92 Eektivitas Produktivitas Produksi Padi (Ton) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

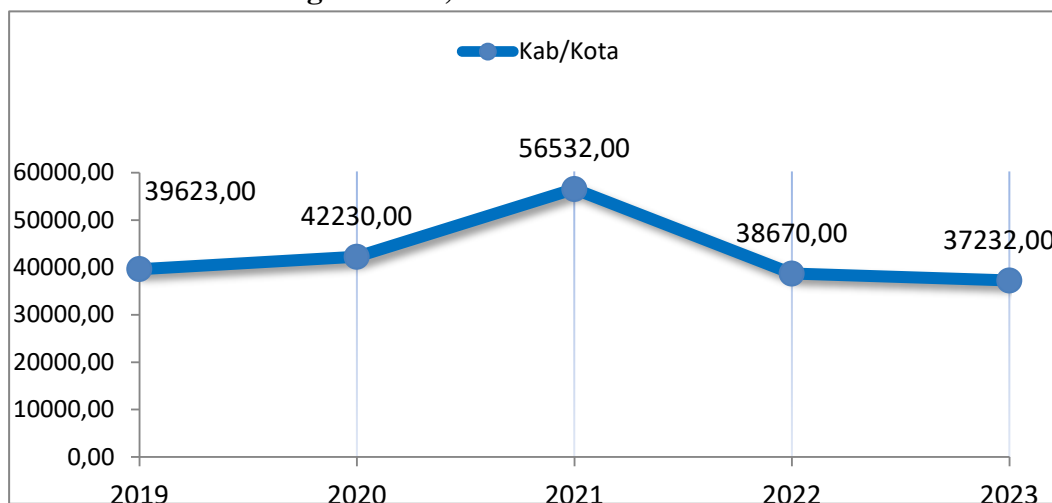


3.3.3.3. Produktifitas Produksi Jagung (Ton)

A. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan Produktivitas Produksi Jagung dalam periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang signifikan sampai dengan 56.532 Ton, sedangkan pada tahun 2021-2023 terjadi penurunan produksi jagung menjadi 37.232 Ton. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik. 3.93 Analisis Perkembangan Produksi Jagung (Ton) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

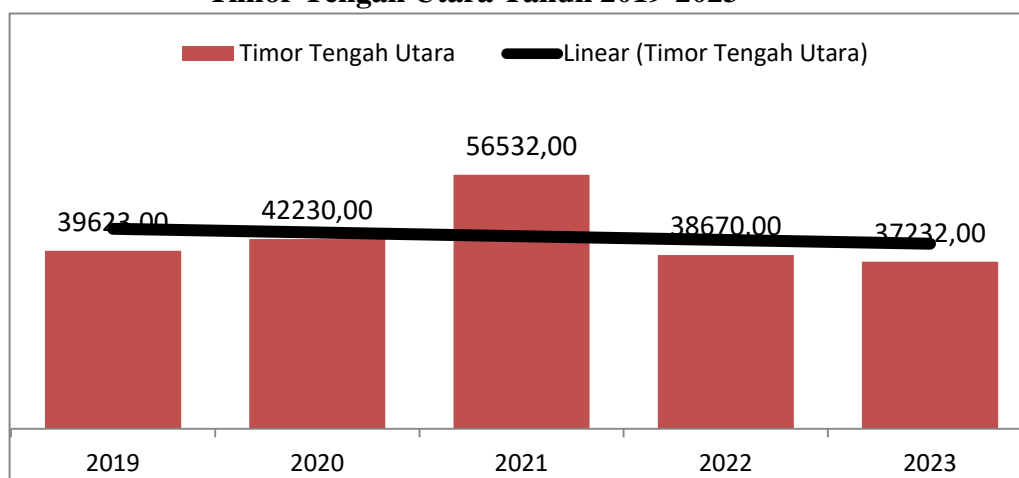


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Efektivitas

Secara data hasil produksi jagung di Kabupaten Timor Tengah Utara terjadi penurunan produksi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan program-program pertanian agar dapat terus meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Grafik. 3.94 Analisis Efektivitas Produksi Jagung (Ton) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3.4.4. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

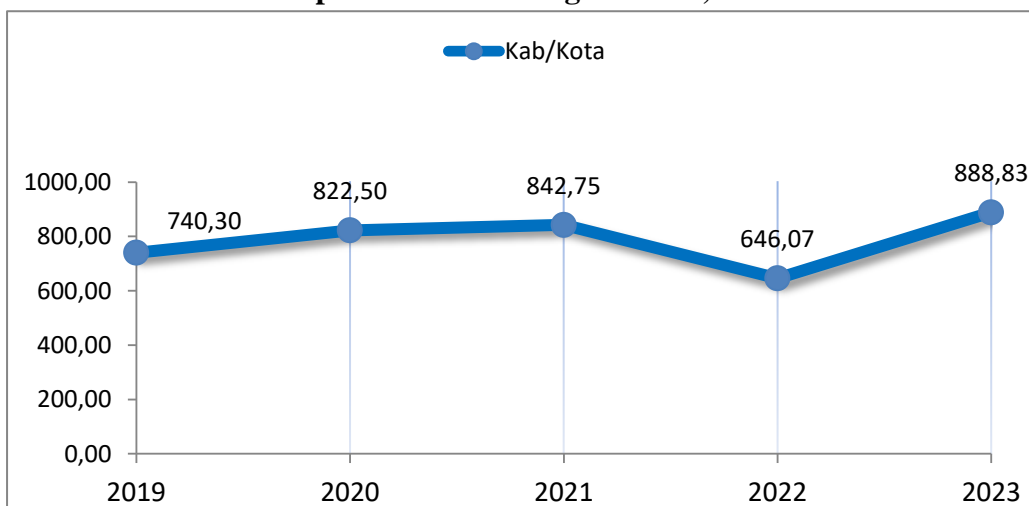
A. Perkembangan Antar Waktu

Pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 740,30 ton dan terus meningkat sampai dengan 842,75 ton di



tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 196,68 ton menjadi 646,07 ton, sebelum akhirnya kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 888,83 ton.

Grafik. 3.95 Perkembangan Antar Waktu Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

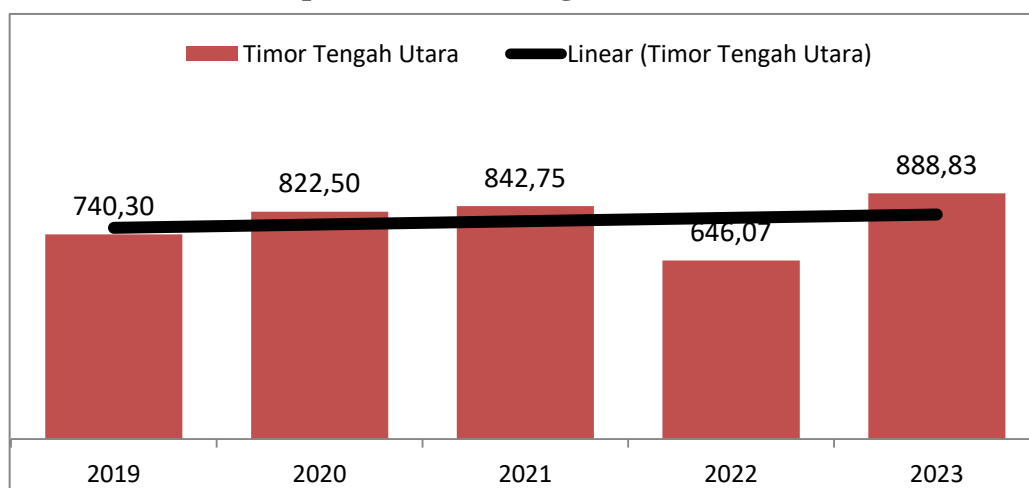


Sumber Data : Dinas Perikanan Kab.TTU

B. Efektifitas

Dalam periode tahun 2019-2023 Produksi Perikanan Tangkap mengalami trend cenderung positif. Hal ini didukung oleh upaya pemerintah dalam pengembangan program pengelolaan perikanan tangkap dengan meningkatkan kapasitas nelayan kecil.

Grafik. 3.96 Analisis Efektifitas Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Dinas Perikanan Kab.TTU

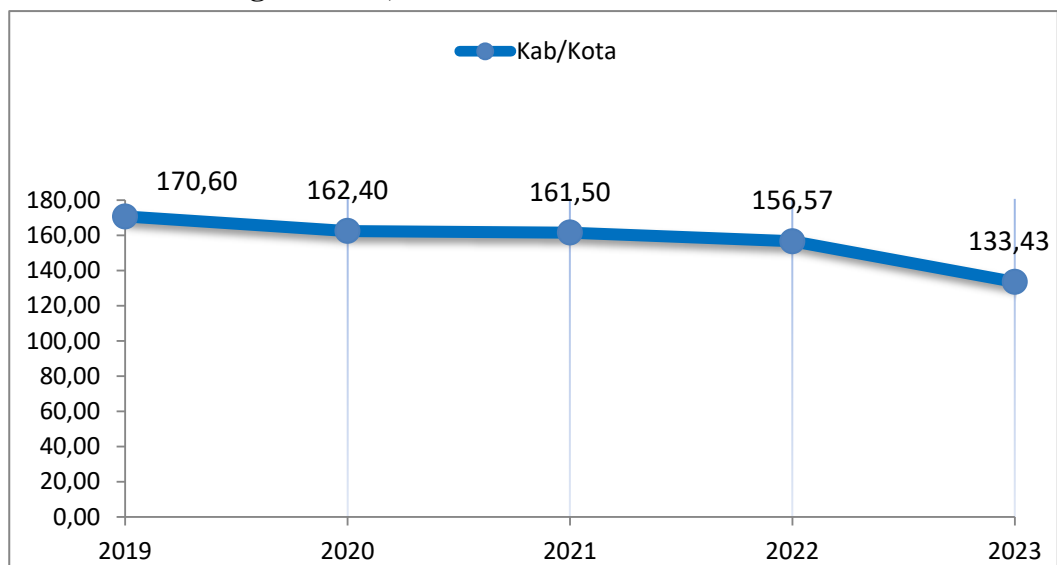


3.3.4.5. Produksi Perikanan Budidaya

A. Perkembangan Antar Waktu

Pada periode lima tahun terakhir Trend produksi perikanan budidaya menunjukkan Trend penurunan. Pada tahun 2019 jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 170,60 menurun sampai dengan 133,43 di tahun 2023.

Grafik. 3.97 Analisis Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

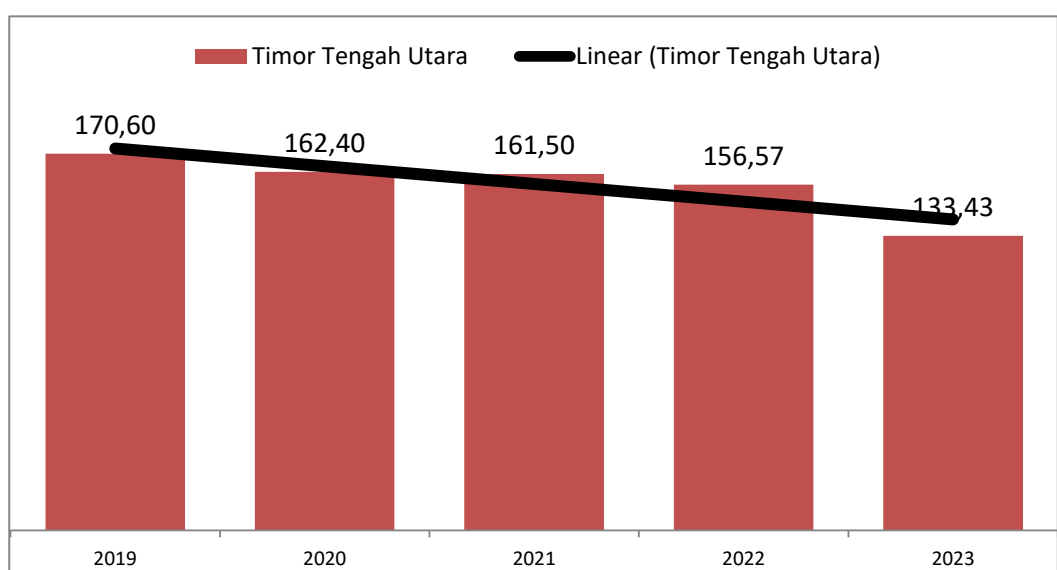


Sumber Data : Dinas Perikanan Kab.TTU

B. Efektifitas

Dalam periode tahun 2019-2023 Trend produksi perikanan budidaya menunjukkan trend penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa program-perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh pemerintah belum berjalan dengan optimal.

Grafik. 3.98 Analisis Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Dinas Perikanan Kab.TTU



Tabel 3.11. Masalah kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
1	Indeks Ketahanan Pangan	Lebih Tinggi dari Nasional dan Provinsi NTT	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan
2	Produksi padi (ton)	Lebih Rendah dari Provinsi NTT	Cenderung Menurun	Belum Efektif	Tidak Relevan
3	Produksi jagung (ton)	-	Cenderung Menurun	Belum Efektif	-
4	Produksi Perikanan Tangkap	-	Fluktuatif	Efektif	-
5	Produksi Perikanan Budidaya	-	Cenderung Menurun	Belum Efektif	-

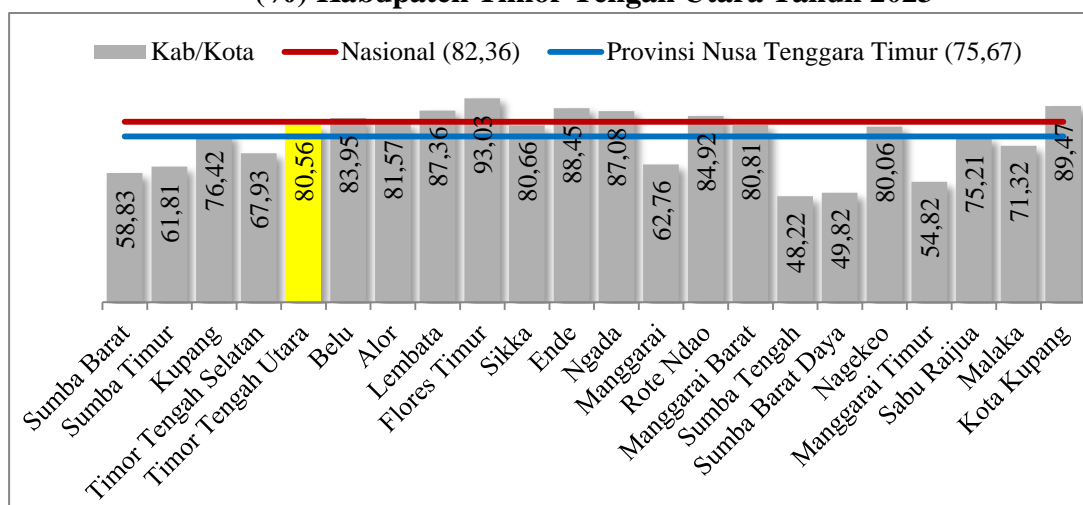
3.3.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

3.3.4.1. Presentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sanitasi Layak

A. Posisi Relatif

Pada tahun 2023 capaian Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 80,56% capaian ini lebih baik dari capaian Provinsi NTT dengan capaian 75,67% tetapi lebih rendah dari capaian Nasional dengan capaian 82,36%. Sedangkan jika di lihat dari 22 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT, capaian Kabupaten Timor Tengah Utara berada di posisi ke 11. Kabupaten dengan capaian tertinggi yakni Kabupaten Flores Timur dengan capaian 93,03%.

Grafik 3.99 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

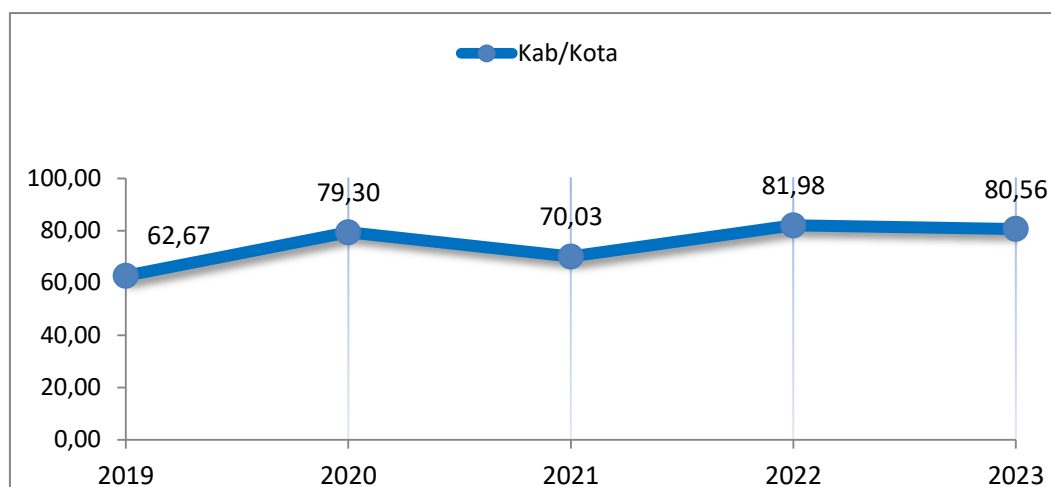
B. Perkembangan Antar Waktu

Pada periode tahun 2019-2023 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 Rumah



Tangga dengan Sanitasi Layak mencapai persentase 62,67%, mengalami peningkatan sebesar 16,63% menjadi 79,30%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 70,03%, pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 81,98% dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 80,56%.

Grafik 3.100 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023

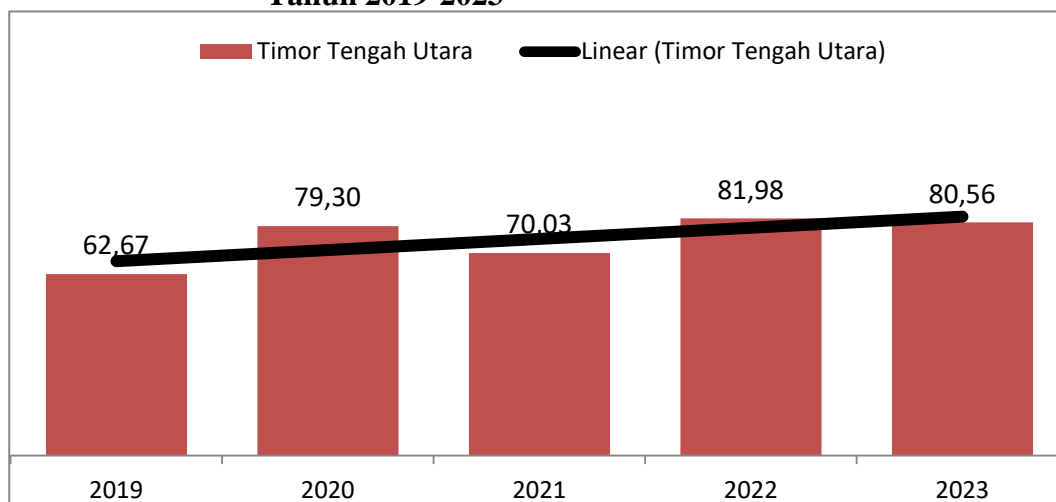


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

C. Efektifitas

Jika dilihat pada grafik dibawah ini maka Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak selama lima tahun terakhir mengalami trend yang cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berjalan dengan efektif dalam upaya peningkatan Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, di tandai dengan adanya pembangunan rumah layak huni, pembangunan WC sehat dan sarana sanitasi lainnya.

Grafik 3.101 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



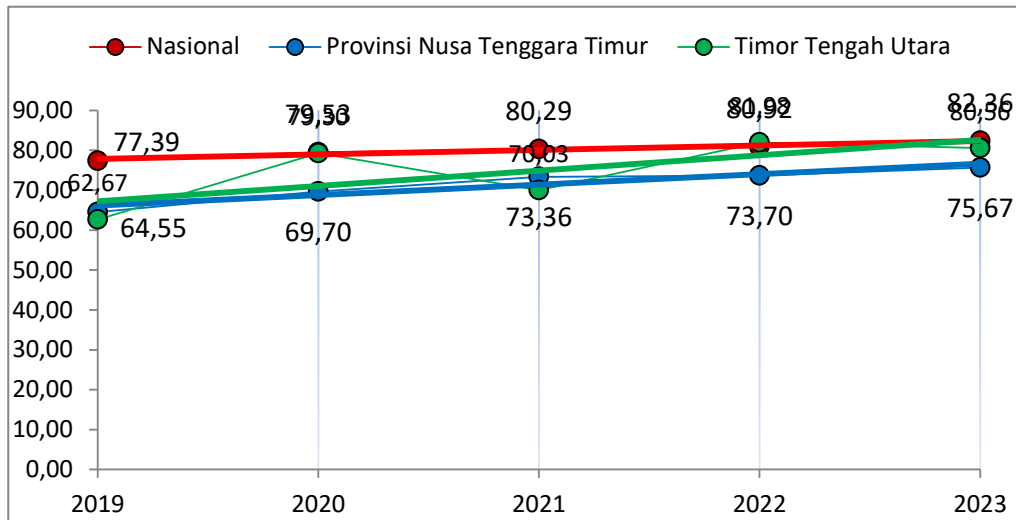
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



D. Relenvansi Perkembangan

Pada periode tahun 2019-2023 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak menunjukan Trend yang fluktuatif tapi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini relevan dalam upaya mendukung capaian provinsi NTT dan Nasional.

Grafik 3.102 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

3.3.4.2. Presentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak (%)

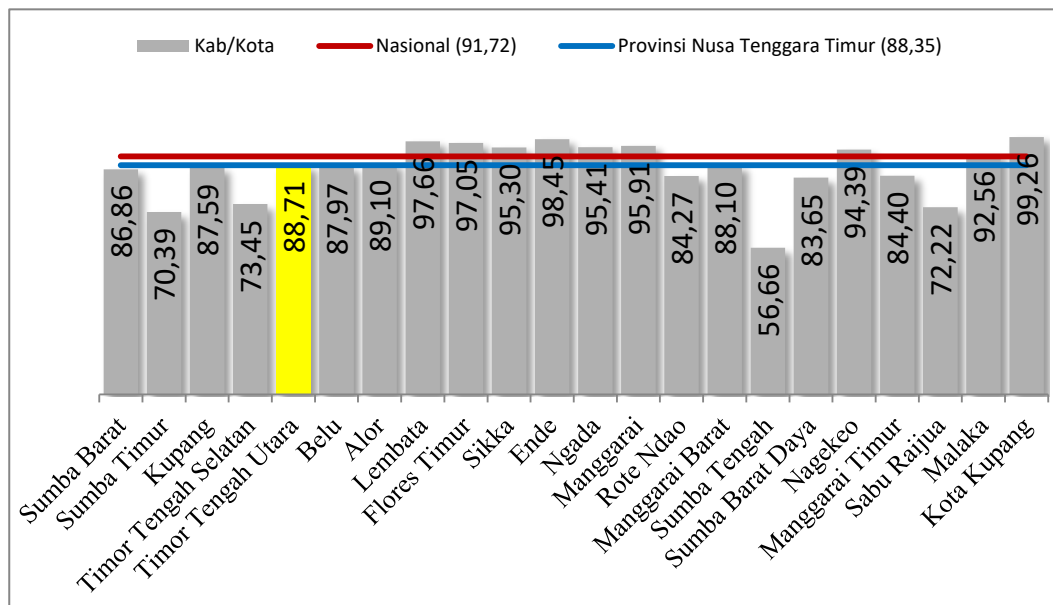
Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu konsep terbaru tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Merujuk pada konsep ini sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

A. Posisi Relatif

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 88,71, capaian ini lebih tinggi sebesar 0,36% dari Provinsi NTT dengan capaian 88,35% dan lebih rendah dari capaian nasional dengan capaian 91,72%. Sedangkan Kota Kupang menempati posisi peratama dengan capaian 99,26%.



Grafik 3.103 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

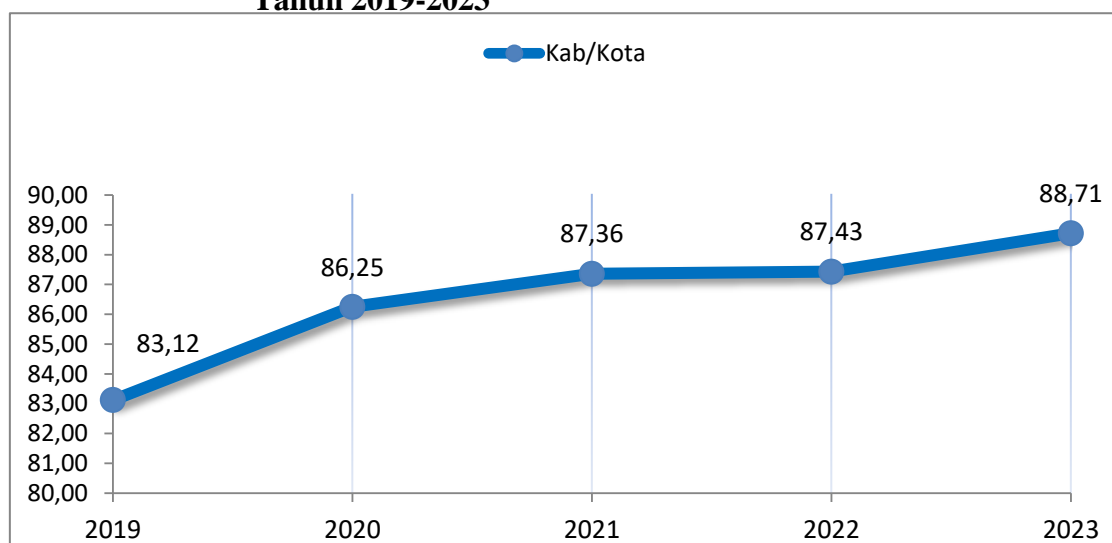


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

B. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami Trend peningkatan setiap tahunnya. Dari 83,12% di tahun 2019 sampai dengan 88,71 di tahun 2023.

Grafik 3.104 Analisis Perkembangan Antar Waktu Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

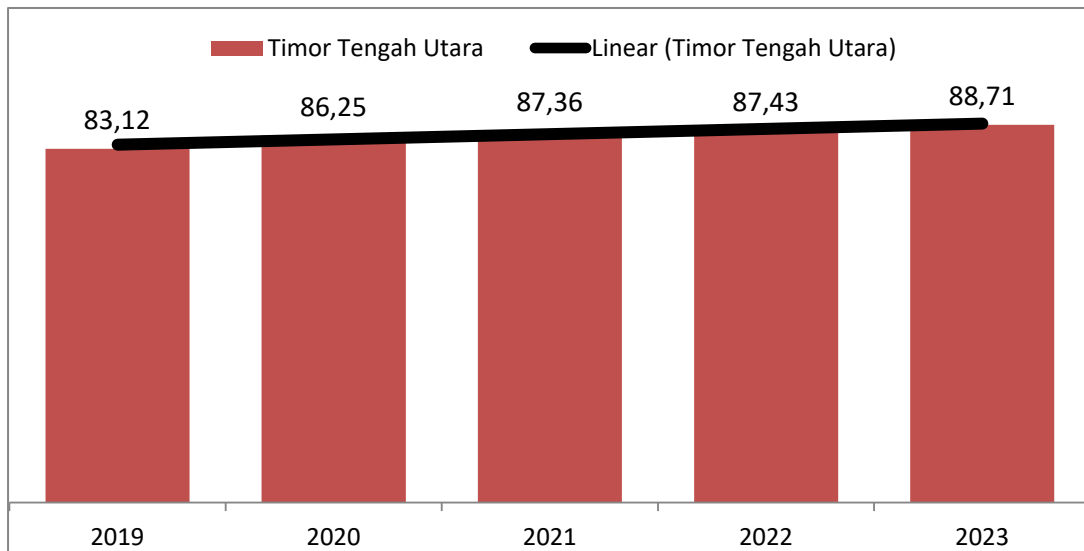
C. Efektifitas

Jika dilihat pada grafik dibawah ini maka Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan pembangunan sistem penyediaan air minum



(SPAM) jaringan perpipaan selain itu juga adanya bantuan penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Grafik 3.105 Analisis Efektivitas Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

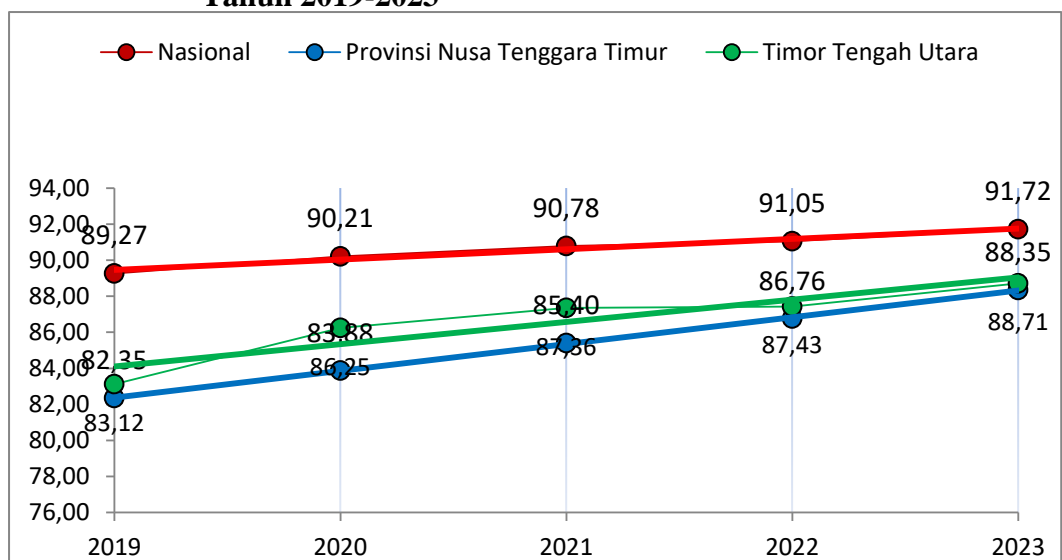


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

D. Relevansi Perkembangan

Pada periode tahun 2019-2023 capaian Rumah Tangga dengan Air Minum Layak menunjukkan Trend peningkatan setiap tahunnya. Semakin baiknya capaian air minum layak sangat relevan dalam mendukung capaian Provinsi NTT dan Nasional dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan air minum layak.

Grafik 3.106 Analisis Relevansi Perkembangan Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

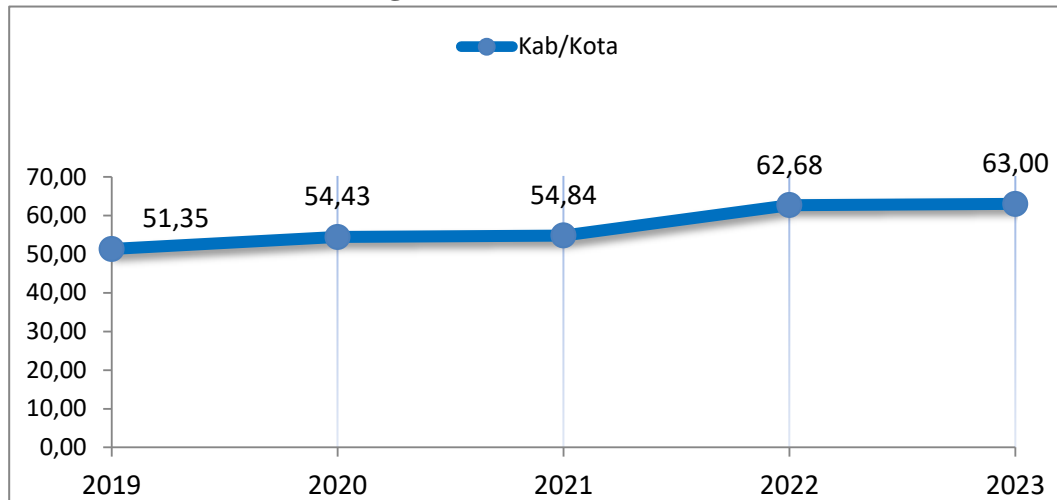


3.3.5.3. Cakupan Rumah Layak Huni

A. Perkembangan Antar Waktu

Pada periode tahun 2019-2023 realisasi cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 realisasi Cakupan Rumah Layak Huni sebesar 51,35% terus meningkat sampai dengan 63,00% di tahun tahun 2023.

Grafik 3.107 Perkembangan Antar Waktu Cakupan Rumah Layak Huni Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023

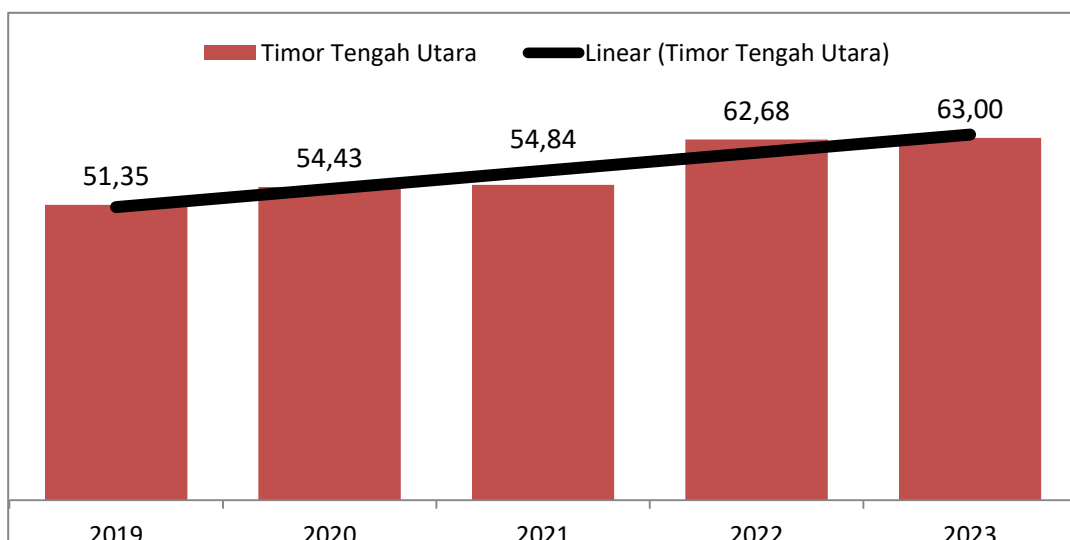


Sumber Data : Dinas PRKPP Kab. TTU

B. Efektivitas

Pada periode tahun 2019-2023 Trend Cakupan Rumah Layak Huni Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program pemerintah untuk meningkatkan rumah layak huni berjalan dengan cukup baik. Program-program tersebut adalah Program Peningkatan Rumah Layak Huni yang di laksanakan oleh pemerintah desa dan juga Program Tekun Melayani Plus yang menjadi program unggulan Bupati.

Grafik 3.108 Analisis Efektifitas Cakupan Rumah Layak Huni Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : Dinas PRKPP Kab. TTU



Tabel 3.12 Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan AntarWaktu	Efektifitas	Relevansi
1	Presentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sanitasi Layak	Lebih tinggi dari Nasional Provinsi	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan
2	Presentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak (%)	Lebih Rendah dari Nasional dan Lebih Tinggi dari Provinsi	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan
3	Cakupan Rumah Layak Huni	-	Cendrung Meningkat	Efektif	-



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1. ANALISIS AKAR MASALAH DETERMINAN KEMISKINAN

4.2. ANALISIS KONDISI FISKAL

**4.3. ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT
INTERVENSI**

**4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

4.5. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1. Analisis Akar Masalah Determinan Kemiskinan

4.1.1. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Konsumsi

Pada Bab III, telah dilakukan analisis atau identifikasi masalah kemiskinan berdasarkan 4 indikator kemiskinan konsumsi, yaitu : Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan. Hasil analisis terhadap 5 (lima) indikator tersebut menunjukkan bahwa bahwa posisi relatif Kabupaten Timor Tengah Utara menempati posisi ke 12 dengan persentase kemiskinan sebesar 21,50%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Timor Tengah Utara masih lebih rendah dari beberapa kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian, salah satu permasalahan kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan, yang dijadikan tujuan jangka panjang pada logika program beserta tiga tujuan jangka menengah lainnya yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Salah satu strategi yang dilaksanakan dalam upaya pengurangan kemiskinan dengan melaksanakan kegiatan pengurangan beban pendapatan yang diaplikasikan melalui kegiatan bantuan sosial, pemberian bantuan iuran dan bantuan berkebutuhan khusus. Pengurangan beban pendapatan masyarakat dapat dilaksanakan melalui beberapa program yakni program pengelolaan pendidikan, program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat, program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program kawasan permukiman, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program administrasi pemerintah desa dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan beberapa strategi seperti meningkatkan akses terhadap pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas UMKM dan peningkatan akses pembiayaan UMKM. Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dilakukan dengan mengaplikasikan beberapa program seperti program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program pengembangan kawasan transmigrasi, program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program pengembangan umkm, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program penyediaan dan pengembangan prasana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan

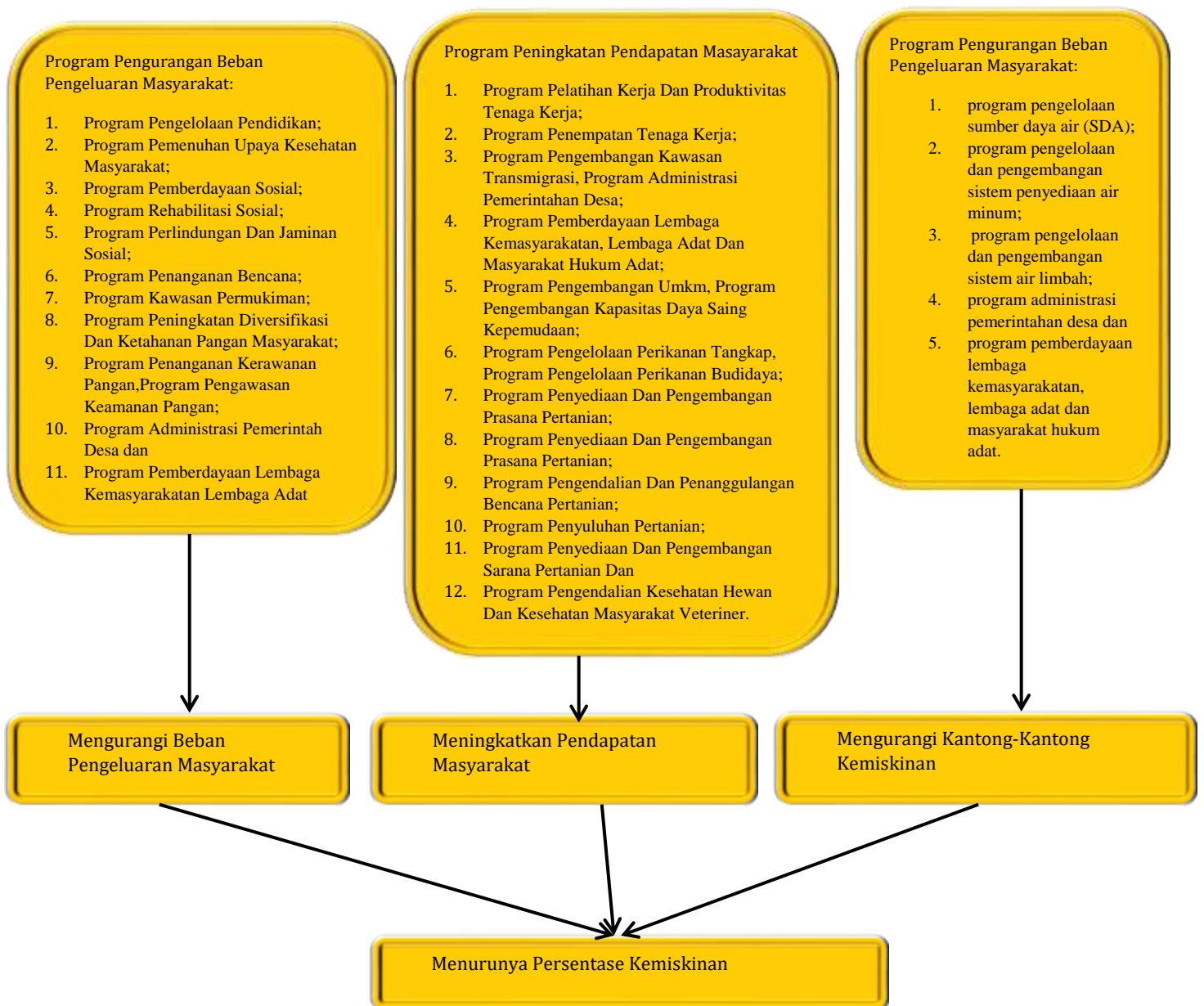


pertanian, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dapat dilaksanakan dengan beberapa strategi yakni meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Sebagai upaya untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dapat dilaksanakan beberapa program yakni program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program administrasi pemerintahan desa dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Alur berpikir yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka panjang melalui strategi/program penanganan kemiskinan dapat dilihat pada kerangka logika program berikut :

Gambar 4. 1 Teori Perubahan (ToC) Kemiskinan Konsumsi

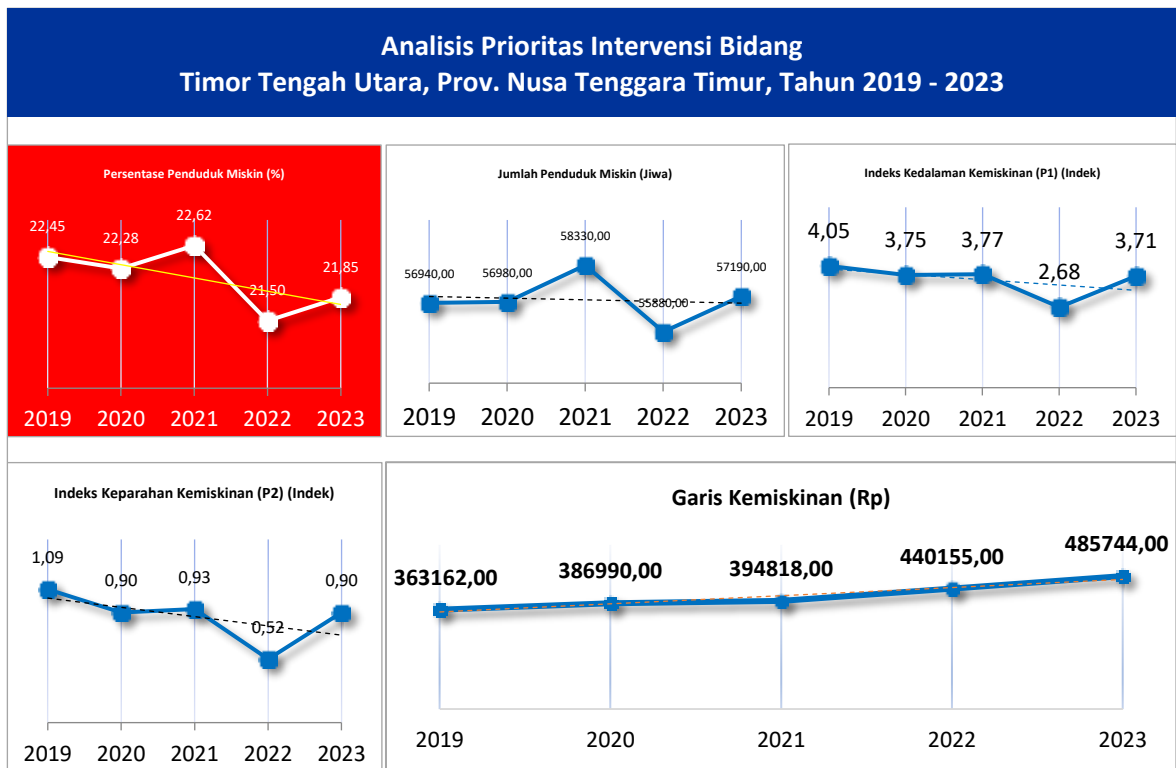




Untuk membuktikan validitas dari logika program di atas, maka dilakukan analisis keterkaitan dengan menguji indikator pada tujuan jangka panjang dan menengah. Hasil analisis keterkaitan akar masalah kemiskinan konsumsi di Timor Tengah Utara selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2. Analisis Prioritas Intervensi Kemiskinan Konsumsi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, diolah

4.1.2. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

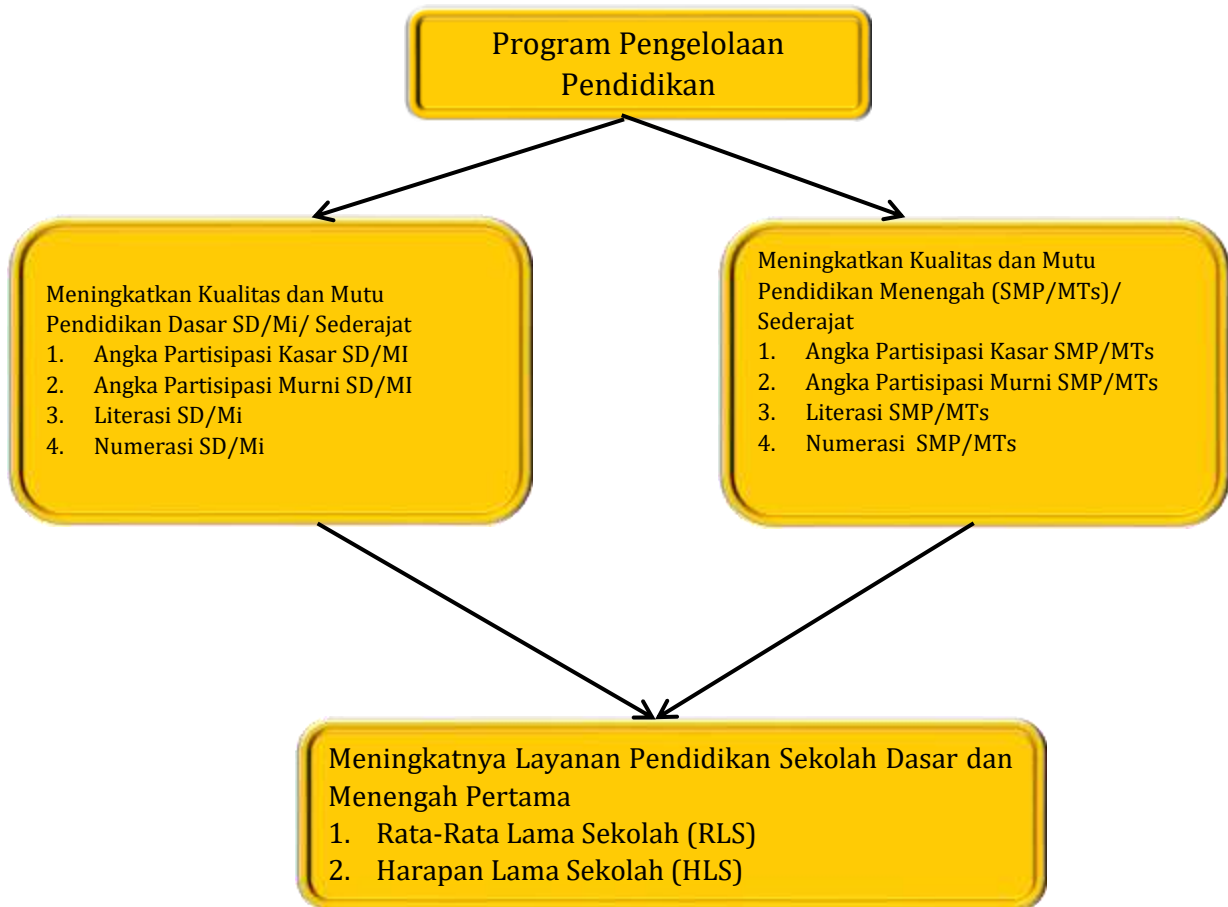
Beberapa indikator pendidikan telah dianalisis pada bab III, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), RataRata Lama Sekolah (RLS), Literasi SD/MI, Numerasi SD/MI, Literasi SMP/MTs dan Numerasi SMP/MTs . Hasil identifikasi terhadap 10 indikator tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan bidang pendidikan di Timor Tengah Utara yakni rendahnya layanan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan dengan capaian RLS sebesar 8,16 tahun, di atas capaian nasional dan berada dibawah capaian provinsi yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Timor Tengah Utara hanya setingkat kelas 2 (Dua) SMP/MTs.

Dengan demikian, peningkatan layanan ke pendidikan dasar dan menengah dijadikan tujuan jangka panjang bidang pendidikan untuk penanganan kemiskinan, dengan 2 indikator yakni Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun dua tujuan jangka pendek yang dingin dicapai yakni peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dasar dengan 4 indikator yakni APK SD/MI, APM SD/MI, Litarasi SD/MI dan Numerasi SD/MI dan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan menengah dengan 4 indikator tujuan yakni APK SMP/MTs, APM SMP/MTs, Literasi SMP/MTs dan Numerasi SMP/MTs. Untuk mencapai tujuan jangka pendek dan menengah dilakukan melalui implementasi program pengelolaan pendidikan yang terdiri dari berbagai kegiatan dan sub kegiatan untuk penyediaan layanan pendidikan dasar dan menengah. Adapun



keterhubungan program dan tujuan jangka pendek dan panjang dapat dilihat pada logika program berikut :

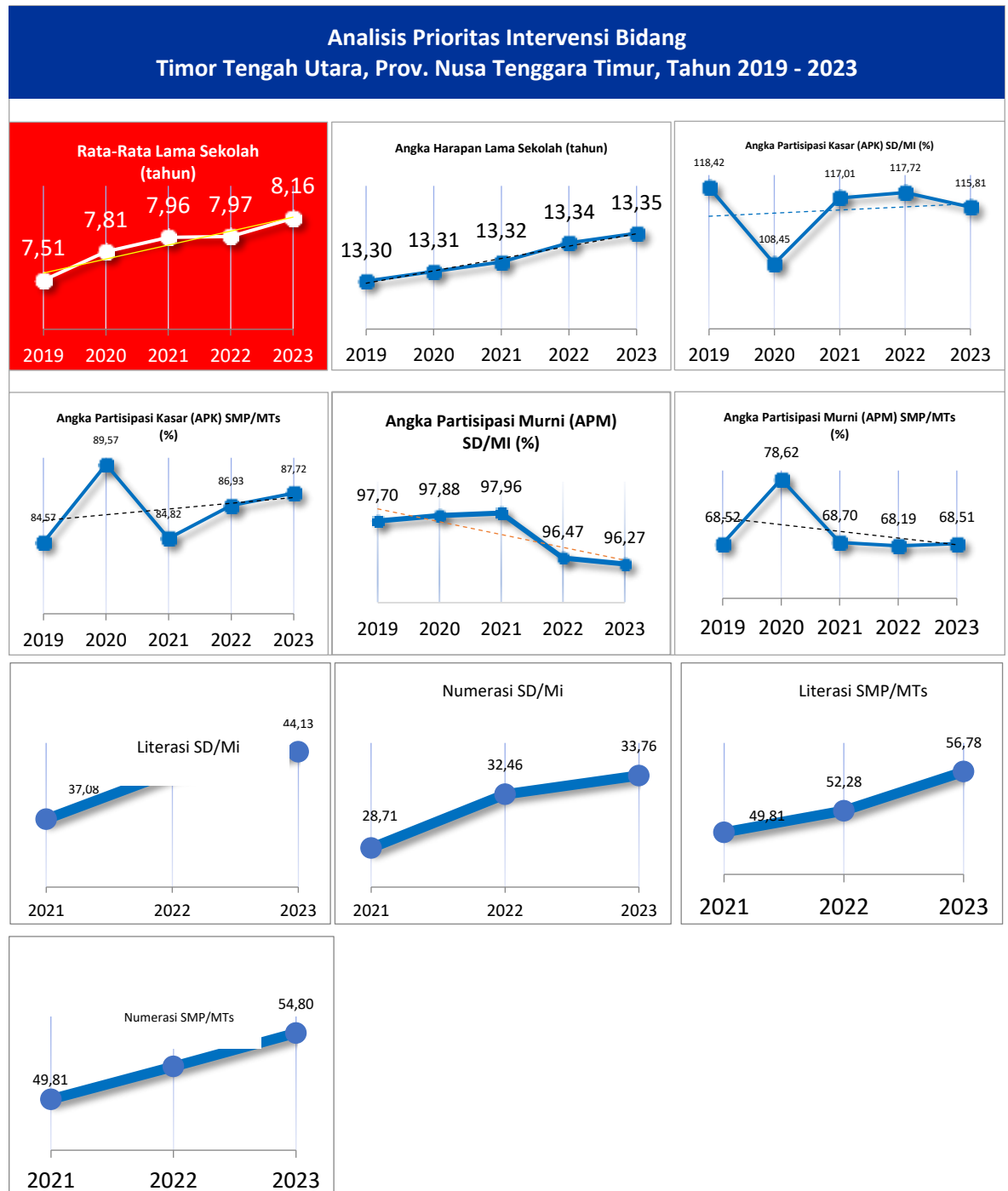
Gambar 4.3. Teori Perubahan (ToC) untuk Bidang Pendidikan



Selanjutnya, pengujian terhadap logika program di atas dilakukan melalui analisis keterkaitan, dengan menyandingkan indikator tujuan jangka panjang dan menengah dengan hasil berikut :



Gambar 4. 4 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, diolah

4.1.3. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

Pada bab III telah dilakukan analisis masalah kemiskinan sektor kesehatan melalui 5 indikator yakni Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi Stunting dan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Timor Tengah Utara mencapai 67,61 tahun, angka ini masih berada di bawah kabupaten/Kota lainnya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka tujuan jangka panjang sektor kesehatan yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indikatornya



berupa UHH, dengan tujuan jangka pendeknya yakni Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematia Ibu (AKI) dan Prevalensi Stunting. Selanjutnya berbagai strategi melalui program/kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penduduk dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PKS). Alur keterhubungan setiap strategi maupun indikator tujuan dapat dilihat pada kerangka ToC berikut :

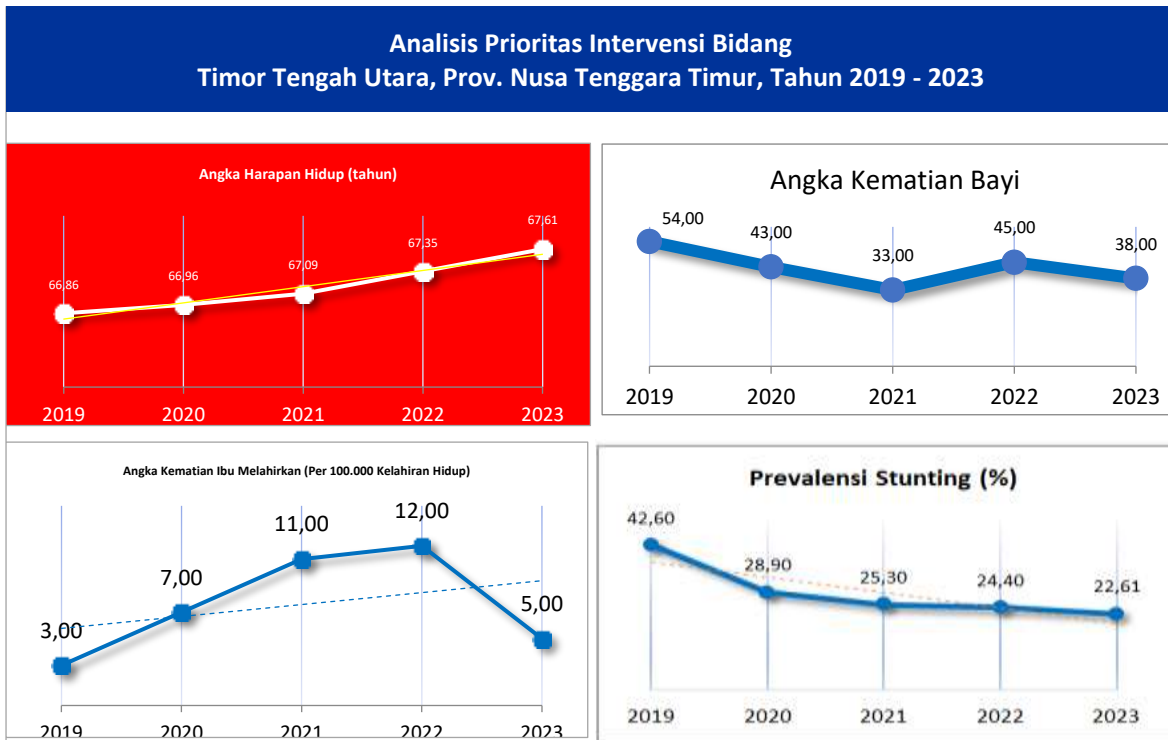
Gambar 4. 5 Teori Perubahan (ToC) untuk Bidang Kesehatan



Selanjutnya, pengujian terhadap logika program di atas dilakukan melalui analisis keterkaitan, dengan menyandingkan indikator tujuan jangka panjang dan menengah dengan hasil berikut :



Gambar 4.6 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, diolah

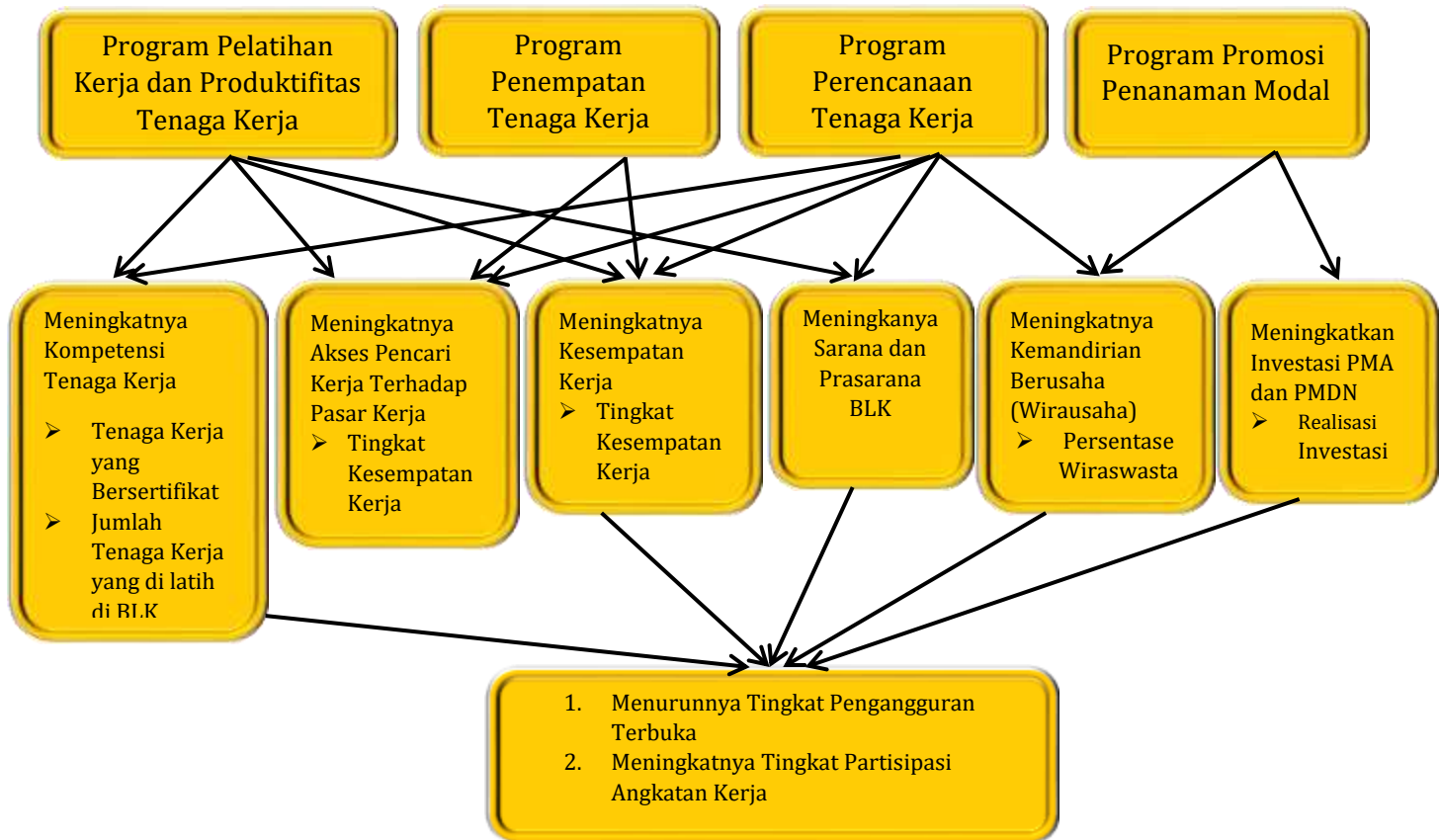
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan, dapat dilihat bahwa penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu dan prevalensi balita stunting, pada periode 2019-2023 berkorelasi positif dengan peningkatan umur harapan hidup penduduk Timor Tengah Utara. Sehingga intervensi pemerintah yang ditujukan untuk pencapaian tujuan jangka pendek ini perlu dimaksimalkan agar dapat mendongkrak derajat kesehatan masyarakat Timor Tengah Utara yang dilihat melalui peningkatan UHH.

4.1.4. Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan data analisis pada BAB III, telah dilakukan analisis atau identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Ketenagakerjaan. Terdapat 2 indikator Bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan analisis, yaitu : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hasil identifikasi masalah Bidang Ketenagakerjaan terhadap 2 indikator tersebut menunjukkan hal sebagai berikut : untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) capaiannya lebih rendah dari nasional tapi lebih tinggi dari provinsi, sedangkan untuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) capaiannya lebih baik dari provinsi dan nasional. Meskipun capaian TPT Timor Tengah Utara sudah lebih baik dari Nasional, namun karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kondisinya lebih tinggi dari capaian provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dianggap perlu sebagai salah satu masalah khususnya di bidang ketenagakerjaan dan juga adanya pertumbuhan usia produktif yang semakin tinggi. Oleh karena itu diperlukan pengadaan lapangan kerja oleh pemerintah maupun swasta sehingga mampu menyerap tenaga kerja.



Gambar 4. 7 Teori Perubahan (TOC) Bidang Ketenagkerjaan



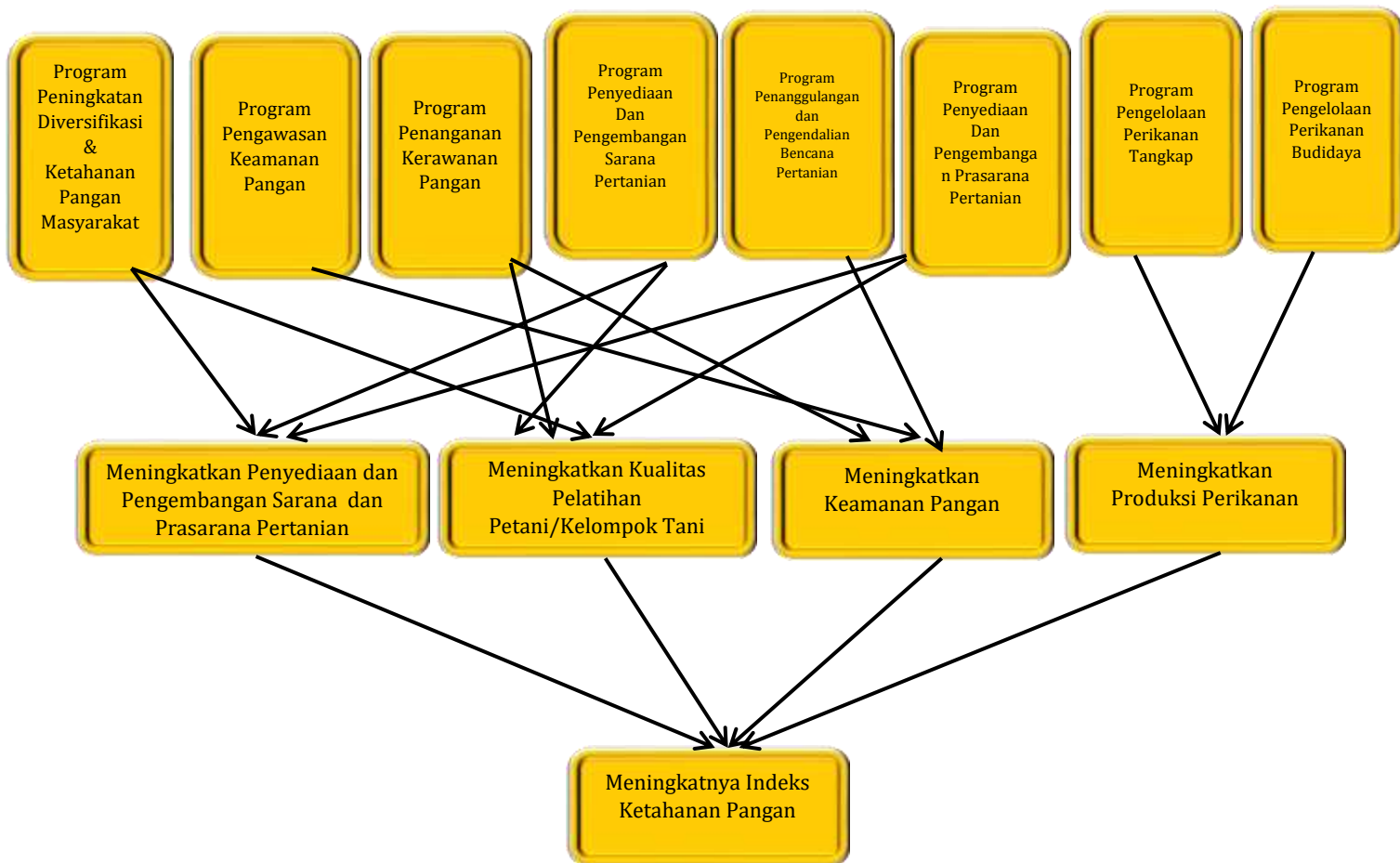
Hasil analisis keterkaitan juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan dan jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Demikian juga dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akan berdampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

4.1.5. Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan

Pada Bab sebelumnya yang telah memberikan penjelasan tentang analisis karakteristik kemiskinan bidang ketahanan pangan berdasarkan Indeks Ketahanan Produktivitas Produksi Padi (Ton), Produktivitas Produksi Jagung (Ton), Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan identifikasi masalah menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan berada pada posisi 72,96, dengan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan dalam dekade tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim yang tidak menentu yang menyebabkan petani gagal panen. Prioritas intervensi ini diharapkan mampu meningkatkan level ketahanan pangan menjadi ketahanan pangan yang aman.



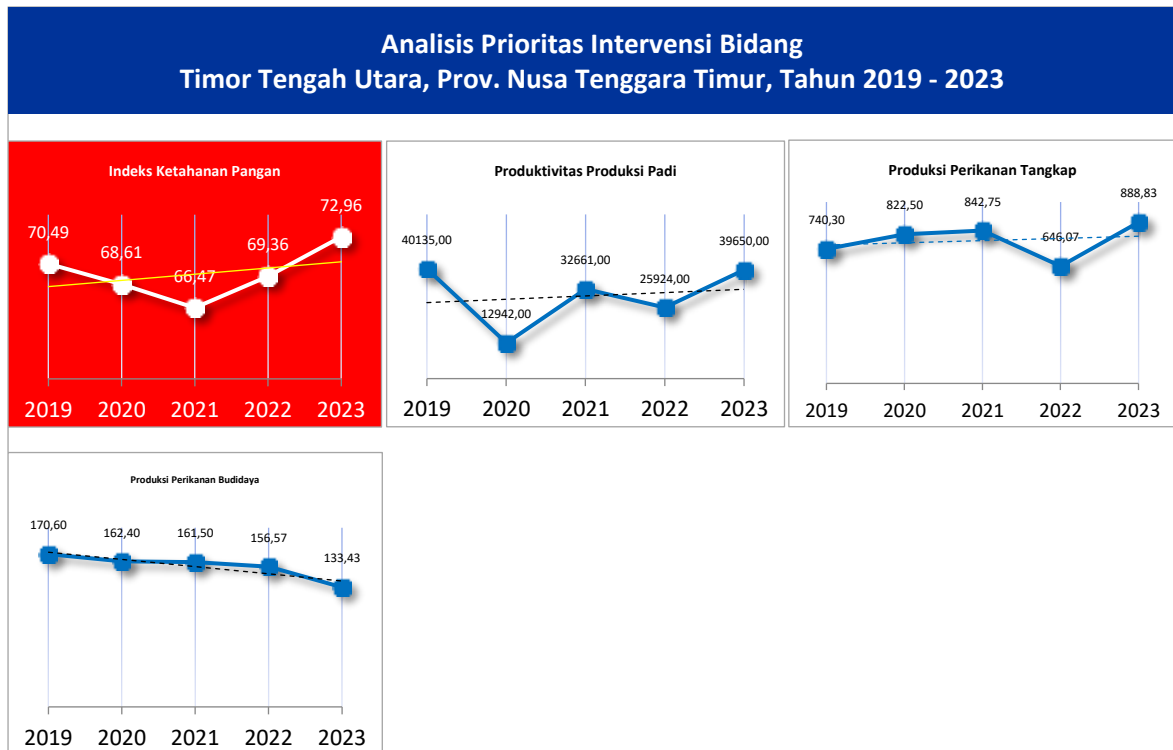
Gambar 4. 9 Teori Perubahan (TOC) Bidang Ketahanan Pangan



Hasil analisis keterkaitan menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan melalui Produktifitas produksi padi (Ton), Produksi Jagung (Ton), Produksi Kacang Tanah (Ton) dan Produksi Bawang Putih berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan di Timor Tengah Utara.



Gambar 4. 10 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara 2019-2023



Sumber: BPS, diolah

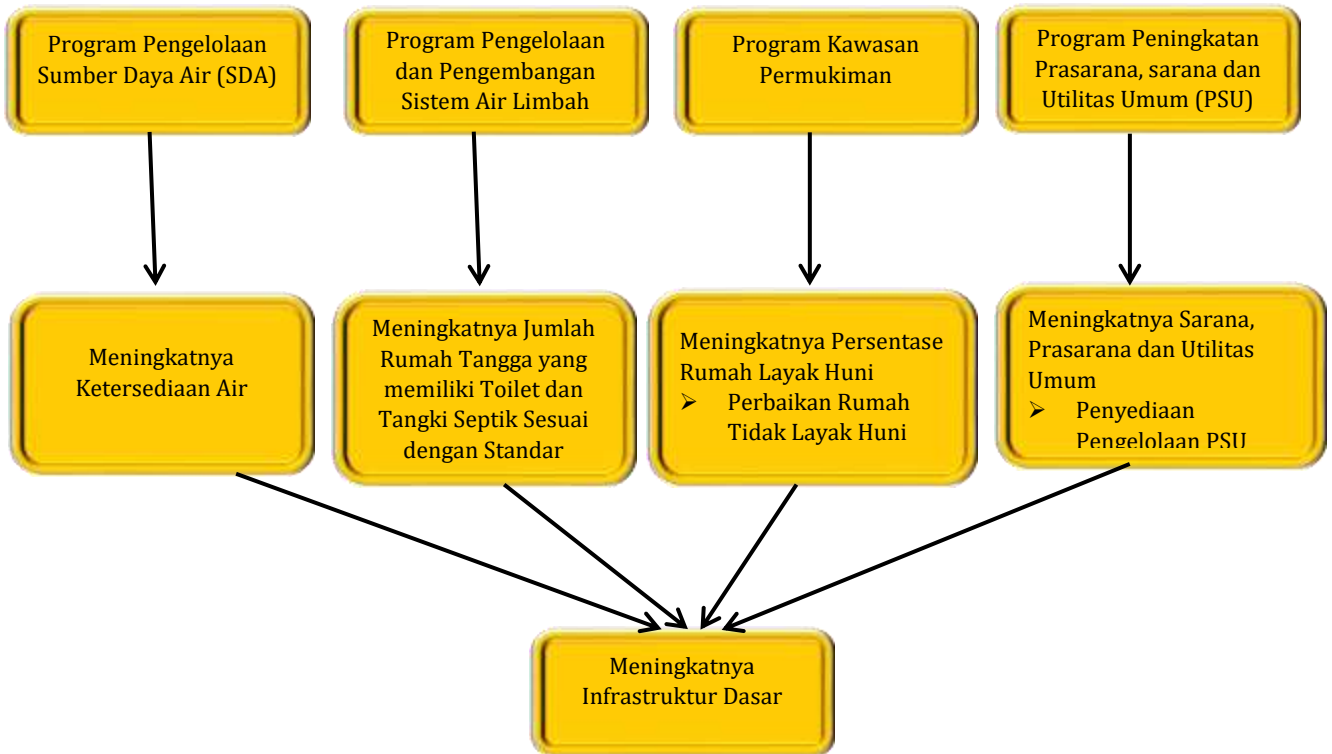
4.1.6. Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

Pada BAB III, telah dilakukan analisis atau identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Infrastruktur Dasar. Terdapat 3 indikator Bidang Infrastruktur Dasar yang dilakukan analisis, yaitu : Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi layak (%), Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%) dan Cakupan Rumah Layak Huni (%).

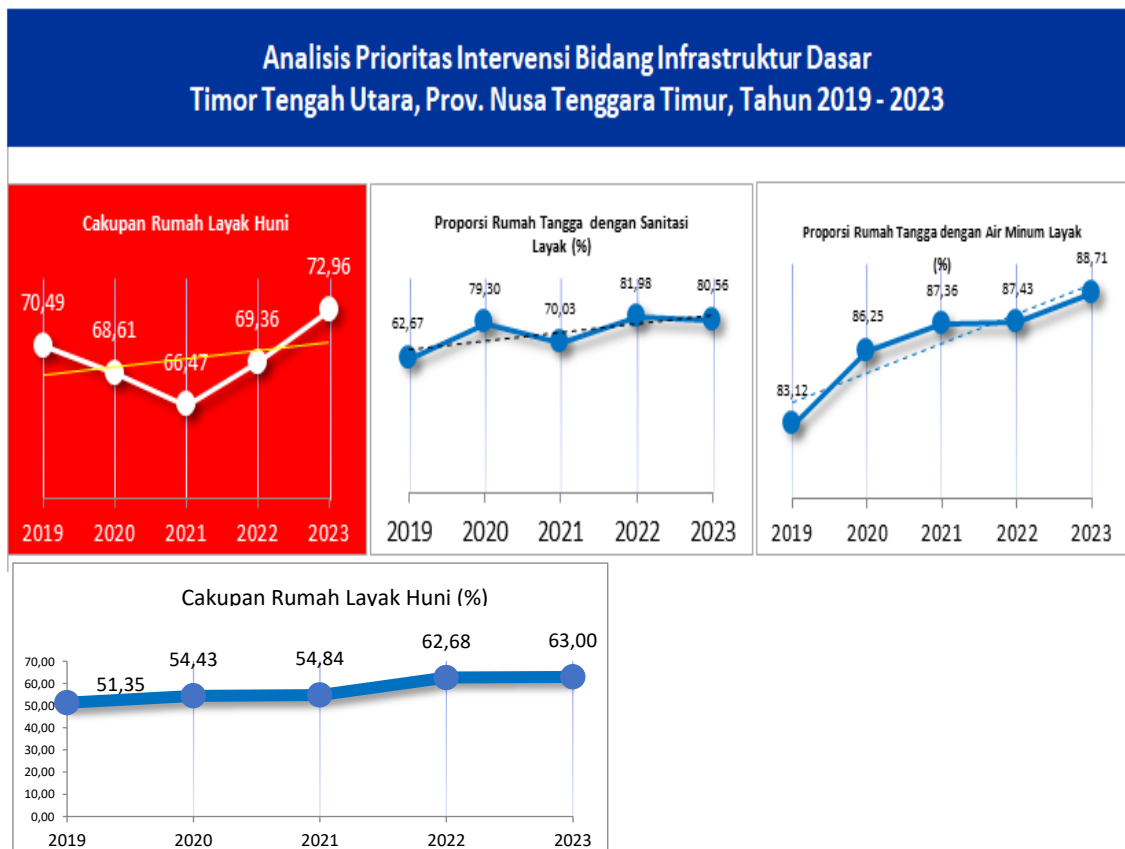
Dari hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan Sanitasi layak di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren yang positif karena terakhir pada tahun 2023 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Timor Tengah Utara mencapai 80,56% dengan menempati posisi ke 11 dari 22 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Selain sanitasi Layak intervensi Bidang Infrastruktur Dasar lainnya seperti Presentase Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak dan cakupan rumah layak huni mengalami perkembangan yang positif dengan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Meskipun 3 indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya tapi belum mencapai target maka perlu dimasukkan dalam analisis prioritas pengentasan kemiskinan karena 3 indikator ini merupakan urusan yang berkaitan dengan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat.



Gambar 4. 11 Teori Perubahan (TOC) Bidang Infrastruktur Dasar



Gambar 4. 12 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Timor Tengah Utara 2019-2023



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



4.2. Analisis Kondisi Fiskal

Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Bagian ini akan membahas situasi fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018 - 2022 meliputi realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, untuk kemudian menganalisis derajat kemandirian fiskal daerah agar dapat melihat aspek keleluasaan fiskal daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Analisis ini penting untuk dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana potensi sumberdaya keuangan daerah dapat mendukung eksekusi terhadap program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Timor Tengah Utara pada tahun-tahun selanjutnya.

4.2.1. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ((Pasal 3 Ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) dimaksud bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;
- Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan;
- Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;



- Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Fungsi alokasi APBD mengarahkan Belanja daerah supaya mendorong pertumbuhan eksklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya upaya strategis untuk meningkatkan efektifitas program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan antara lain : (1) ketetapan sasaran. (2) mekanisme program dan kualitas implementasi.

Tabel 4.1. APBD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018 – 2022

No	APBD	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Daerah	1.171.465.394.534,68	1.055.060.191.659,43	1.029.787.534.398,00	1.164.012.417.890,00	1.008.532.838.282,43
2	Belanja Daerah	1.309.848.423.234,15	1.239.591.635.333,52	1.100.959.641.250,63	1.214.365.023.362,00	955.946.744.977,81
3	Pembiayaan Daerah	138.383.028.699,47	184.531.443.674,09	86.172.106.852,63	55.352.605.472,00	23.955.374.092,35

Sumber Data : BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan tabel relaisasi APBD Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Daerah Timor Tengah Utara sebesar sebesar Rp 1.171.465.394.534,68, sedangkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan terakhir tahun 2021 sebesar Rp 1.029.787.534.398,00, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.164.012.417.890,00, sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 1.008.532.838.282,43.

Dalam hal belanja, terlihat mengalami hal yang sama dengan Pendapatan Daerah. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 1.309.848.423.234,15, sedangkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan terakhir tahun 2021 sebesar Rp 1.100.959.641.250,63 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp 1.214.365.023.362,00 sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang drastis menjadi Rp 955.946.744.977,81.

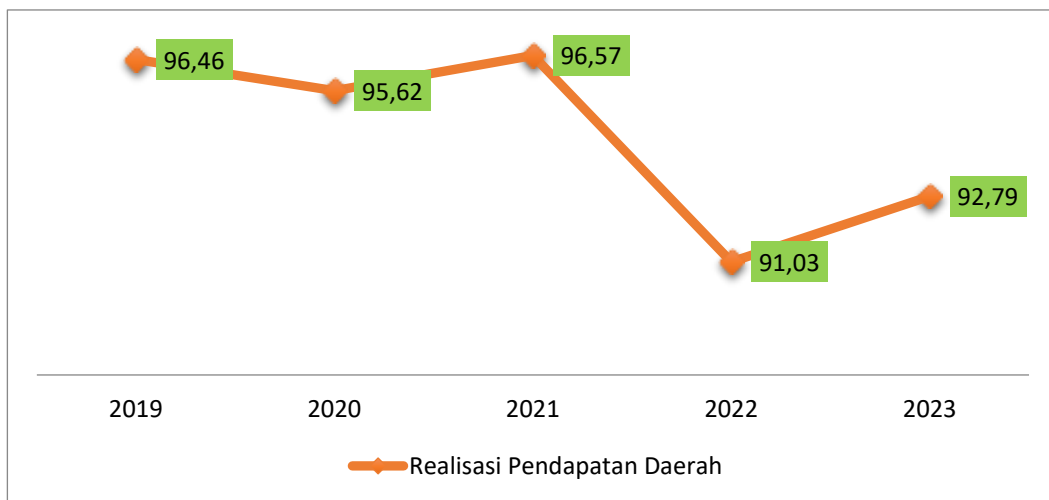
Dari segi pembiayaan daerah juga mengalami hal yang sama seperti Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pada tahun 2019-2020 Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan terakhir tahun 2020 sebesar Rp 184.531.443.674,09, sedangkan dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurun menjadi Rp 23.955.374.092,35 Milyard di tahun 2023.



4.2.2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Timor Tengah Utara sepanjang periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 96,46% menurun menjadi 95,62% di tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 96,57%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 91,03%, meningkat sebesar 1,76% menjadi 92,79%.

Grafik 4.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara

Tabel 4. 2 Tabel Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023

No	Pendapatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94,75	88,35	104,39	71,53	85,67
2	Pendapatan Transfer	95,65	96,65	96,43	94,49	94,15
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	87,44	86,36	74,44	71,83	54,01

Sumber Data : BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan tabel perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah sebesar 94,75%, menurun menjadi 88,35% di tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 104,39% tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 71,53%, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 85,67%.

Pendapatan Transfer Daerah juga mengalami hal yang sama dengan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2019 pendapatan transfer daerah sebesar 95,65%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 96,65% dan selanjutnya pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan terakhir tahun 2023 sebesar 94,15%.



Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami penurunan. Terakhir pada tahun 2023 sebesar 54,01%.

4.2.3. Belanja Daerah

Dalam UU no 33 tahun 2004, Belanja Daerah didefinisikan sebagai “semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, cakupan Belanja Daerah adalah “meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah”. Tabel 4.3 Menggambarkan secara umum belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018-2022.

Tabel 4. 3 Tabel Belanja APBD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019 – 2023

No	APBD	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belanja Operasi	753.038.187.037,65	850.723.424.461,43	733.092.141.791,63	781.480.276.373,00	652.138.743.760,72
2	Belanja Modal	333.179.575.896,50	128.694.931.352,67	119.070.045.860,00	211.878.366.970,00	94.277.903.832,00
3	Belanja Tidak Terduga	412.000.000,00	37.840.892.919,42	29.012.357.099,00	7.304.280.619,00	2.164.493.485,09
4	Belanja Transfer	223.218.660.300,00	222.332.386.600,00	219.785.096.500,00	213.702.099.400,00	207.365.603.900,00

Sumber Data : BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara

Belanja dalam APBD Kabupaten Timor Tengah Utara di bagi dalam empat (4) bagian yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 perkembangan realisasi belanja Kabupaten Timor Tengah Utara dari empat jenis belanja tersebut mengalami fluktuasi. Hal ini tergambar jelas dalam tabel 4.3 di atas.

4.2.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah dibagi menjadi dua jenis antara lain Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada



tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sepanjang periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023

NO	PEMBIAYAAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.396.758.919,47	184.538.061.337,09	87.099.890.432,53	55.353.655.135,00	23.955.374.092,35
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.383.028.699,47	184.531.443.674,09	86.172.106.852,63	55.352.605.472,00	23.955.374.092,35
b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	13.730.220,00	6.617.663,00	927.783.579,90	1.049.663,00	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
a	Penyertaan Modal Daerah	0	0	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	138.396.758.919,47	184.538.061.337,09	102.099.890.432,53	60.353.655.135,00	22.955.374.092,35

Sumber Data : BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara

Pembiayaan Netto Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 138.396.758.919,47 dan mengalami peningkatan menjadi Rp 184.538.061.337,09, sedangkan pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan terakhir tahun 2023 sebesar Rp 22.955.374.092,35.

4.2.5. Kemandirian Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya agar desentralisasi dapat diaplikasikan diseluruh daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sehingga kedepannya diharapkan daerah dapat mengelola, mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dalam menjalankan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, maka perlu sebuah indikator yang mengukur kemandirian tiap-tiap daerah. Fungsinya adalah melihat perkembangan, memetakan, dan sebagai potret akan kemandirian daerah disuatu wilayah. Semakin tinggi angka dari rasio yang diperoleh suatu daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut.



Dari grafik 4.3. di bawah ini dapat di ketahui bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain sumber Pendapatan Daerah berkontribusi sangat kecil terhadap Pendapatan Daerah, sementara sumber pendapatan daerah yang berkontribusi sangat besar terhadap Pendapatan Daerah yakni Pendapatan Transfer. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara masih bergantung pada Pemerintah Pusat.

Grafik 4.2. Perbandingan Komposisi Pendapatan Terhadap APBD Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2019-2023



Sumber Data : BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara

Tabel 4.5. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023

No	Pendapatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	58.749.871.979,96	56.159.987.579,48	67.039.419.767,10	40.176.336.745,17	51.400.680.767,43
2	Pendapatan Transfer	1.026.926.819.571,00	915.511.781.753,61	894.791.459.237,00	977.988.135.581,00	944.024.803.933,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	443.228.990,00	371.435.900,00	326.195.480,00	413.829.904,24	131.073.535,82
JUMLAH		1.129.999.590.550,96	1.008.815.359.333,09	994.450.427.004,10	1.059.547.462.750,17	1.008.532.838.282,43

Sumber Data : BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara

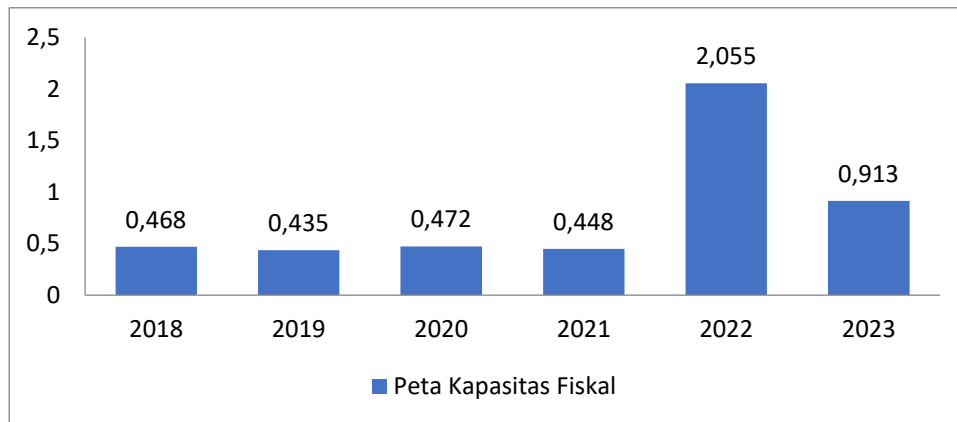
Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 126 Tahun 2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah diperoleh melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$KFD = \text{Pendapatan} - (\text{Pendapatan yang sudah Ditentukan} + \text{Belanja Tertentu})$$

- √ KFD = Kapasitas Fiskal Daerah
- √ Pendapatan = PAD + Dana Perimbangan + Lain – Lain Pendapatan yang Sah
- √ Pendapatan yang sudah Ditentukan = Pajak Rokok + DBH-CHT +DBH SDA Dana Reboisasi + DAK Fisik + DAK Non Fisik + Dana Otonomi Khusus + DBH SDA Mineral dan Gas dalam Rangka Otonomi Khusus
- √ Belanja Tertentu = Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil



Grafik 4.3. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara



Sumber :Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2018– 2023

Tabel 4.6. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2018-2022

No	Tahun	Peta Kapasitas Fiskal	Kategori Kapasitas Fiskal Kabupaten
1	2018	0,468	Sangat Rendah
2	2019	0,435	Sangat Rendah
3	2020	0,472	Sangat Rendah
4	2021	0,448	Sangat Rendah
5	2022	2,055	Tinggi
6	2023	0,913	Sangat Rendah

Sumber :Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2018 – 2023

4.3. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi

Setelah melakukan analisis yang meliputi Bidang Kemiskinan Konsumsi, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Infrastruktur Dasar dan Bidang Ketahanan Pangan, kita sudah mendapatkan permasalahan dari masing-masing bidang. Setelah itu dilakukan analisis keterkaitan sehingga ketemu akar permasalahan dari masing-masing atau prioritas intervensi. Namun untuk menyelesaikan berbagai akar permasalahan masing-masing bidang dan mengkonkritkan menjadi program dan kegiatan tentu tidaklah mudah, pasti ada hambatan, namun disisi lain pasti ada juga faktor pendorong. Berikut adalah beberapa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 4.7. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Bidang Urusan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Bidang Kemiskinan Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Salah Satu Indikator Kinerja Utama Adanya Komitmen Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Besarnya Jumlah Penduduk yang Masuk dalam Kategori Miskin Ekstrem Keterbatasan Anggaran Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan



No	Bidang Urusan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya Inclusion dan Exclusion Error pada DTKS dan P3KE sebagai sasaran Program
	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Komitmen dari pemerintah Daerah Merupakan Urusan Wajib 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sarana dan prasarana Masih rendahnya angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Literasi SD/Mi, Numerasi SD/Mi, Literasi SMP/MTs dan Numerasi SMP/MTs
	Bidang Kesehatan (Umur Harapan Hidup)	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi salah satu prioritas nasional bidang Kesehatan Dukungan dari Pemerintah Daerah melalui upaya mewujudkan (<i>Universal Health Coverage</i>) UHC 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran Masih tingginya Angka Stunting, AKI, AKB
	Bidang Ketenaga Kerjaan (Tingkat Pengangguran Terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi Salah Satu Indikator Kinerja Utama di Kabupaten Timor Tengah Utara 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran untuk BLK Kurangnya Lapangan Kerja
	Bidang Ketahanan Pangan (Indeks Ketahanan Pangan)	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian merupakan salah satu Misi dari Bupati Timor Tengah Utara yakni : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan Sektor Ekonomi Berwawasan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Produksi Pertanian Unggulan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara semakin menurun Perubahan Iklim yang tidak menentu
	Bidang Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan urusan wajib 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran Kondisi Kemiskinan Masyarakat

4.4. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Strategi dan Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026 tidak terlepas dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Bpk. Drs Juandi David dan Bpk. Drs. Eusabius Binsasi sebagaimana tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA**



MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka di jabarkan **kedalam 5 (Lima)**

Misi Pembangunan, yakni :

1. Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan hidup
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat
3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur
4. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif
5. Mengembangkan kawasan stretegis daerah

Dalam penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan pada misi 3, penanggulangan kemiskinan masuk dalam tujuan, yaitu: **Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan hidup**, dengan sasaran:

1. Meningkatnya produksi potensi pertanian unggulan, peternakan dan perikanan
2. Meningkatnya kompetensi Koperasi, UKM dan IKM
3. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata
4. Terwujudnya kedaulatan dan ketahanan pangan
5. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas angkatan kerja

Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan maka fokus penanggulangan kemiskinan di Timor Tengah Utara adalah pada penurunan kemiskinan melalui penerapan strategi sebagai berikut :

1. Sinkronisasi program penanggulanagan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu
2. Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa
3. Mendukung sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
4. Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja melalui pelatihan tenaga kerja

4.5. Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan. Adapun berdasarkan tujuannya, program penanggulangan kemiskinan Timor Tengah Utara 2023- 2026 di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan



- Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan
 - Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
- Berikut Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023- 2026 :



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Umum	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Pendidikan Dasar	2 Ruang	1.240.000.000,00	2 Ruang	1.240.000.000,00	2 Ruang	1.240.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Neotoko Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Kiusili	APBD	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Umum	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pendidikan Dasar	3 Unit	3.159.750.000,00	3 Unit	3.159.750.000,00	3 Unit	3.159.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Neotoko Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Kotafoun Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Umum	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendidikan Dasar	4 Ruang	830.000.000,00	4 Ruang	830.000.000,00	4 Ruang	830.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Spesifik Data P3KE	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		450 Paket (450 Siswa)	100.000.000,00	200 Paket (200 Siswa)	200.000.000,00	200 Paket (200 Siswa)	200.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Spesifik Data P3KE	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Anak Usia Pendidikan Dasar	80 Paket (80 Siswa)	50.000.000,00	300 Peserta Didik	300.000.000,00	200 Paket (200 Siswa)	200.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Umum	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Pendidikan Dasar	61 Unit	400.000.000,00	3 Paket	150.000.000,00	3 Paket	150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Neotoko Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Kotafoun Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Kiusili	APBD	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Umum	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendidikan Dasar	80 Paket	200.000.000,00	80 Paket	200.000.000,00	80 Paket	200.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Umum	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pendidikan Dasar	5 Ruang	5.402.750.000,00	5 Ruang	5.402.750.000,00	5 Ruang	5.402.750.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Umum	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendidikan Dasar	2 Ruang	2.584.750.000,00	2 Ruang	2.584.750.000,00	2 Ruang	2.584.750.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Umum	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah Menengah Pertama	4 Ruang	837.547.200,00	4 Ruang	837.547.200,00	4 Ruang	837.547.200,00	Kab.TTU	APBD	
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Umum	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah Menengah Pertama	4 Ruang	2.200.000.000,00	4 Ruang	2.200.000.000,00	4 Ruang	2.200.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pembangunan Laboratorium	Umum	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Sekolah Menengah Pertama	2 Ruang	3.287.684.207,00	2 Ruang	3.287.684.207,00	2 Ruang	3.287.684.207,00	Kab.TTU	APBD	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Umum	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	800.000.000,00	1 Unit	800.000.000,00	1 Unit	800.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Umum	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah Menengah Pertama	11Ruang	2.450.000.000,00	11Ruang	2.450.000.000,00	11Ruang	2.450.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Umum	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	2.150.000.000,00	1 Ruang	2.150.000.000,00	1 Ruang	2.150.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Umum	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	2.150.000.000,00	1 Ruang	2.150.000.000,00	1 Ruang	2.150.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Spesifik Data P3KE	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Sekolah Menengah Pertama	1 Paket	100.000.000,00	150 Peserta Didik	150.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Spesifik Data P3KE	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Anak Usia Sekolah Menengah Pertama			150 Peserta Didik	150.000.000,00	150 Peserta Didik	150.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Spesifik Data P3KE	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Sekolah Menengah Pertama	40 Paket	100.000.000,00	40 Paket	100.000.000,00	40 Paket	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Umum	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Sekolah Menengah Pertama	6 Paket	150.000.000,00	6 Paket	150.000.000,00	6 Paket	150.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Umum	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	2.200.000.000,00	1 Ruang	2.200.000.000,00	1 Ruang	2.200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Kotafoun Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Kiusili	APBD	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Umum	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	183 Peserta Didik	6 Unit	1.399.825.000,00	6 Unit	1.399.825.000,00	6 Unit	1.399.825.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Umum	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	183 Peserta Didik	3 Unit	570.000.000,00	3 Unit	570.000.000,00	3 Unit	570.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Umum	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	183 Peserta Didik	3 Unit	294.000.000,00	3 Unit	294.000.000,00	3 Unit	294.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengadaan Mebel PAUD	Umum	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	183 Peserta Didik	12 Paket	300.000.000,00	12 Paket	300.000.000,00	12 Paket	300.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	Umum	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	183 Peserta Didik	11 Paket	500.000.000,00	2 Paket	15.000.000,00	2 Paket	15.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Umum	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	183 Peserta Didik	120 Peserta Didik	120.000.000,00	60 Peserta Didik	60.000.000,00	60 Peserta Didik	60.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Umum	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	183 Peserta Didik	225 Orang	1.790.000.000,00	225 Orang	1.790.000.000,00	225 Orang	1.790.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Umum	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	5.589 Anak	254 Satuan Pendidikan	4.996.800.000,00	254 Satuan Pendidikan	4.996.800.000,00	254 Satuan Pendidikan	4.996.800.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Umum	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pendidikan Anak Usia Dini	9 Ruang	2.812.500.000,00	9 Ruang	2.812.500.000,00	9 Ruang	2.812.500.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Umum	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendidikan Anak Usia Dini	11Paket	156.000.000,00	11Paket	156.000.000,00	11Paket	156.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Umum	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendidikkan Anak Usia Dini	2Unit	90.000.000,00	2Unit	90.000.000,00	2Unit	90.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Umum		Pendidikan Nonformal	12 Orang	100.000.000,00	12 Orang	100.000.000,00	12 Orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Umum	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidikan Nonformal	40 Orang	111.367.808,00	40 Orang	111.367.808,00	40 Orang	111.367.808,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Umum	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Pendidikan Nonformal	4 Satuan Pendidikan	253.800.000,00	4 Satuan Pendidikan	253.800.000,00	4 Satuan Pendidikan	253.800.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	Umum	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Masyarakat	3 Unit	15.000.000.000,00	3 Unit	15.000.000.000,00	3 Unit	15.000.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Umum	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Masyarakat	7 Unit	4.400.000.000,00	7 Unit	4.400.000.000,00	7 Unit	4.400.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengembangan Puskesmas	Umum	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Masyarakat	1 Unit	2.000.000.000,00	1 Unit	2.000.000.000,00	1 Unit	2.000.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Umum	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Masyarakat	4 Unit	2.200.000.000,00	4 Unit	2.200.000.000,00	4 Unit	2.200.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Umum	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Masyarakat	5 Unit	750.000.000,00	5 Unit	750.000.000,00	5 Unit	750.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Umum	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Masyarakat	3 Unit	750.000.000,00	3 Unit	750.000.000,00	3 Unit	750.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Umum	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Masyarakat	4Unit	1.061.526.068,00	4Unit	1.061.526.068,00	4Unit	1.061.526.068,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Umum	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Masyarakat	3Unit	210.000.000,00	3Unit	210.000.000,00	3Unit	210.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengembangan Rumah Sakit	Umum	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Masyarakat	2 Unit	1.500.000.000,00	2 Unit	1.500.000.000,00	2 Unit	1.500.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Umum	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Masyarakat	2Paket	420.000.000,00	2Paket	420.000.000,00	2Paket	420.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Umum	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Masyarakat	26Paket	895.000.000,00	26Paket	895.000.000,00	26Paket	895.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tidak Spesifik	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	100Orang	100.000.000,00	1000orang	100.000.000,00	1000orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak Spesifik	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	100 Orang	200.000.000,00	100 Orang	200.000.000,00	100 Orang	200.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	1000Orang	75.000.000,00	1000orang	75.000.000,00	1000orang	75.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tidak Spesifik	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tidak Spesifik	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	200 Orang	200.000.000,00	200 Orang	200.000.000,00	200 Orang	200.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tidak Spesifik	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Masyarakat	50 Orang	50.000.000,00	50 Orang	50.000.000,00	50 Orang	50.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Tidak Spesifik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Masyarakat	200Orang	50.000.000,00	200Orang	50.000.000,00	200Orang	50.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tidak Spesifik	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Masyarakat	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tidak Spesifik	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Masyarakat	100 Orang	300.000.000,00	100 Orang	300.000.000,00	100 Orang	300.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Masyarakat	26 Dokumen	175.000.000,00	26 Dokumen	175.000.000,00	26 Dokumen	175.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Masyarakat	26 Dokumen	30.649.792,00	26 Dokumen	30.649.792,00	26 Dokumen	30.649.792,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Masyarakat	26 Dokumen	125.000.000,00	26 Dokumen	125.000.000,00	26 Dokumen	125.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Masyarakat	26 Dokumen	420.000.000,00	26 Dokumen	420.000.000,00	26 Dokumen	420.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	26 Dokumen	29.577.264.000,00	26 Dokumen	29.577.264.000,00	26 Dokumen	29.577.264.000,00	Kab.TTU	APBD	
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Umum		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Masyarakat	1 Paket	152.760.000,00	1 Paket	152.760.000,00	1 Paket	152.760.000,00	Kab.TTU	APBD	
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Masyarakat	26 Dokumen	27.292.202.000,00	26 Dokumen	27.292.202.000,00	26 Dokumen	27.292.202.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Umum	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Masyarakat	26 Dokumen	13.890.853.000,00	26 Dokumen	13.890.853.000,00	26 Dokumen	13.890.853.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Tidak Spesifik	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Masyarakat	50 Orang	100.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Tidak Spesifik	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Masyarakat	38 Orang	100.000.000,00	38 Orang	100.000.000,00	38 Orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Tidak Spesifik	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Masyarakat	27 Orang	100.000.000,00	27 Orang	100.000.000,00	27 Orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan perbaikan Jaringan Irigasi Persawahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Umum	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang di Rehabilitasi	Masyarakat	2,7 Km (150 org, 120 org, 54 org, 240 org)	9.446.000.000,00	5,85 Km (600 org, 90 org, 120 org, 75 org, 180 org, 90 org, 85 org, 105 org)	9.446.000.000,00	5,85 Km (600 org, 90 org, 120 org, 75 org, 180 org, 90 org, 85 org, 105 org)	9.446.000.000,00	D.I Jak Desa Jak, D.I Nesam (Tsilu Sap'an) Desa Fatoin, D.I Haulasi Desa Fatutasu, D.I Oepuah Desa Oepuah Utara(2024), D.I Naen Kec. Kota Kefa, D.I Enokono Desa Oenbit, D.I Oeluan Desa Nifuboke, D.I Sunkaen Desa Sunkaen, D.I Oerinbesi Desa Oerinbesi, D.I Satab Desa Noepesu, D.I Upunaek Desa Maurisu Selatan, D.I Balke Desa Maubesi(2025)	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan perbaikan Jaringan Irigasi Persawahan			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Umum	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Masyarakat	90 m (240 org, 135 org(2024) 120 org (2025))	576.040.000,00	0,65Km (240 org, 135 org(2024) 120 org (2025))	576.040.000,00	0,65Km (240 org, 135 org(2024) 120 org (2025))	576.040.000,00	D.I Bes'ana Desa Humusu Oekolo, DI Fatutupa Desa Lanaus(2024) D.I Tfoin Desa Popnam (2025)	APBD	
			Peningkatan Kapasitas Air Baku	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot a	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Umum-Spesifik Data P3KE	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Masyarakat (75% Masrakat Miskin di Preoritakan Untuk Sub Kegiatan ini.	10Liter/Detik/320 (223 KK Miskin)	6.055.000.000,00	10Liter/Detik/400 (300 KK Miskin)	6.055.000.000,00	10Liter/Detik/600 (450 KK Miskin)	6.055.000.000,00	DESA T'EBA, Haumeni Ana dan Desa Nunmafo (2025), Desa Kuluan, Letmafo dan Manunain A (2026)	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Umum-Spesifik Data P3KE	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Masyarakat	7 unit	400.000.000,00	6 unit	400.000.000,00	6 unit	400.000.000,00	Banuan, Oenbit, Humusu Oekolo, Pantae, Oenak, Nibaaf(2024), Subun Tualele, Maurisu Utara, Kiuols, Fatumuti, Oehalo, Kuanek, haulasi, oepuah (2025), Tubuhue, Bijaepasu, Tublopo, Banain C, Noenasi, tainsala, oelami, oerinbesi, teba timur, nian, akomi, makun. (2026)	APBN (PAMSIMAS)	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Spesifik Data P3KE	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Masyarakat Miskin 518 kk, 250 kk, 250 kk	518 Rumah Tangga	604.000.000,00	250 Rumah Tangga	604.000.000,00	250 RT	604.000.000,00	Desa, Subun Tualele (50 KK) Maurisu Utara (50 KK) Kiuloa (68 KK), Fatumuti (50 KK) Oehalo (50 KK) Nunmaffo (50 KK), Kuanek (50 KK), Haulasi (50 KK) Pantae (50 KK), dan Oepuah (50 KK) (2024). Banain C, Fatumtasa, Fatuneno, Humusu Oekolo, Kaubele, Letneo, Sunsesa, Tautpah, Teba Induk, Kelurahan Tubuhue (2025) Bijaepasu, Oelami, Maurisu, Makun, Oerinbesi, Fafinesu, Sainiuop, Manunain A, Oepuah Utara, Letmafo, Taunbaen dan Oesoko. (2026)	APBD & APBN	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Umum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Masyarakat	1Dokumen	250.000.000,00	1Dokumen	250.000.000,00	1Dokumen	250.000.000,00	Kabupaten TTU	APBD	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Melalui Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Spesifik Data P3KE	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Masyarakat Miskin	120 Unit Rumah	12.550.000.000,00	200 Unit Rumah	17.500.000.000,00	200 Unit Rumah	17.500.000.000,00	24 Kecamatan	APBD	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Umum	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Masyarakat Miskin	-	-	-	-	74 KK	888.000.000,00	Kelurahan Tubuhue	APBD	
5	Sosial	Dinas Sosial		Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Spesifik Data P3KE	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstrem (Data P3KE)	20 Keluarga	50.000.000,00	20 Keluarga	60.000.000,00	20 Keluarga	60.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Spesifik Data P3KE	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstrem (Data P3KE)	20 Keluarga	50.000.000,00	20 Keluarga	100.000.000,00	20 Keluarga	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Karang Taruna	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemuda	-	-	2 Lembaga	62.300.000,00	2 Lembaga	62.300.000,00	Kab.TTU	APBD	
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Spesifik Data P3KE (Lansia 65 Orang, Disabilitas 75 Orang),	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstrem (Data P3KE)	75 Orang	100.000.000,00	150 Orang	300.000.000,00	150 Orang	300.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Spesifik Data P3KE	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstern (Data P3KE)	75 Orang	100.000.000,00	150 Orang	50.000.000,00	150 Orang	50.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Spesifik Data P3KE	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstern (Data P3KE)	25 Orang	75.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Spesifik Data P3KE	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstrem (Data P3KE)	20 Orang	100.000.000,00	15 Orang	15.000.000,00	15 Orang	15.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Spesifik Data P3KE	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstrem (Data P3KE)	30	50.000.000,00	50 Orang	75.000.000,00	50 Orang	75.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Spesifik Data P3KE	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstrem (Data P3KE)	30 Orang	100.000.000,00	50 Orang	50.000.000,00	50 Orang	50.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Spesifik Data P3KE	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstern (Data P3KE)	25 Orang	75.000.000,00	20 Orang	65.000.000,00	20 Orang	65.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pemberian Layanan Rujukan	Spesifik Data P3KE	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstern (Data P3KE)	50 Orang	100.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Spesifik Data P3KE	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstern (Data P3KE)	-	-	20 Orang	60.000.000,00	20 Orang	60.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstrem (Data P3KE)	200 Orang	150.000.000,00	200 Orang	235.000.000,00	200 Orang	235.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Penyediaan Sandang	Umum	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Miskin Ekstrem (Data P3KE)	200 Orang	150.000.000,00	200 Orang	200.000.000,00	200 Orang	200.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
6	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Umum-Spesifik data P3KE		46 Orang	73 (48 APBN 25 dari APBD 2) Orang/46 Orang dari Data P3KE	450.000.000,00	104 (64 APBN 40 dari APBD 2) Orang/62 Orang dari Data P3KE	450.000.000,00	104 (64 APBN 40 dari APBD 2) Orang/62 Orang dari Data P3KE	450.000.000,00	Kecamatan	APBN dan APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Masyarakat	167 Orang Dalam Negeri 30 Orang Luar Negeri 118 dari Data P3KE (60%)	10.000.000,00	167 Orang Dalam Negeri 30 Orang Luar Negeri 118 dari Data P3KE (60%)	10.000.000,00	167 Orang Dalam Negeri 30 Orang Luar Negeri 118 dari Data P3KE (60%)	10.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Umum	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Masyarakat	150 Orang	10.000.000,00	150 Orang	10.000.000,00	150 Orang	10.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Job Fair/Bursa Kerja	Umum-Spesifik data P3KE	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Masyarakat	167 Orang Dalam Negri 30 Orang Luar Negri 118 dari Data P3KE (60%)	10.000.000,00	250 Orang	10.000.000,00	250 Orang	10.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Umum-Spesifik data P3KE	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Masyarakat	50 Orang (20% dari Data P3KE)			70.000.000,00	50 Orang	70.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Umum-Spesifik data P3KE	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Masyarakat	50 Orang (20% dari Data P3KE)			70.000.000,00	50 Orang (20% dari Data P3KE)	70.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Pengutan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Umum-Spesifik data P3KE					30 KK	250.000.000,00	30 KK	250.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Umum-Spesifik data P3KE					2 Satuan Permukiman	4.500.000,00	2 Satuan Permukiman	4.500.000,00	Kab.TTU	APBD	
7	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Umum	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Masyarakat	1 Unit	12.000.000,00	1 Unit	12.000.000,00	1 Unit	12.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Umum	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Masyarakat	1 Unit	11.500.000,00	1 Unit	11.500.000,00	1 Unit	11.500.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Umum	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Masyarakat	4 Laporan	19.791.300,00	4 Laporan	19.791.300,00	4 Laporan	19.791.300,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Umum	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Masyarakat	1 Laporan	11.500.000,00	1 Laporan	11.500.000,00	1 Laporan	11.500.000,00	Kab.TTU	APBD	
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Umum	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Umum	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Masyarakat	1 Dokumen	20.208.700,00	1 Dokumen	20.208.700,00	1 Dokumen	20.208.700,00	Kab.TTU	APBD	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Umum	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Masyarakat	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat 2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 3. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	183 Dokumen	200.977.418.400,00	183 Dokumen	200.977.418.400,00	183 Dokumen	200.977.418.400,00	Kab.TTU	APBD	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		182 Lembaga	2.325.000.000,00	182 Lembaga	2.325.000.000,00	182 Lembaga	2.325.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
9	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Umum	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1	1 Unit Usaha	25.000.000,00	1 Unit Usaha	25.000.000,00	1 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Umum	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2	2 Orang	5.000.000,00	2 Orang	5.000.000,00	2 Orang	5.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
				Program Pengembangan dengan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog	Umum	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		20,30,35 Unit	214.284.680,00		214.284.680,00	20,30,35 Unit	214.284.680,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Umum	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		30 Orang	40.000.000,00	30 Orang	40.000.000,00	30 Orang	40.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Umum	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
11	Perikanan	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Spesifik data P3KE	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		173 Orang	350.000.000,00	173 Orang	350.000.000,00	173 Orang	350.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Umum	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		25 Kelompok	300.000.000,00	25 Kelompok	300.000.000,00	25 Kelompok	300.000.000,00	Kab.TTU	APBD	
						Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Umum	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		25 Kelompok	300.000.000,00	25 Kelompok	300.000.000,00	25 Kelompok	300.000.000,00	Kab.TTU	APBD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Pertanian	Dinas Pertanian	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Pembagian Motor Air untuk 74 Kelompok Tani = 1480 penerima Manfaat 2. Hand Traktor 33 Kelompok Tani = 660 Penerima Manfaat 3. P2L 10 KWT + 200 Penerima Manfaat 4. Handsprayer = 20	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelompok Tani	1 Laporam	16.550.995,00	1 Laporam	16.550.995,00	1 Laporam	16.550.995,00	Kab.TTU	DAU	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian dilaksanakan secara swadaya kelompok tani. Kegiatan Usaha Tani : 5 Paket untuk 5 Kelompok Tani tersebar di 5 Desa. Kegiatan Irigasi Air Tanah Dalam : 10 paket untuk 10 Kelompok Tani yang tersebar di 10 Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Masyarakat	3 Laporan	4.018.482.342,00	3 Laporan	6.663.499.160,00	3 Laporan	6.663.499.160,00	Kab.TTU	DAU	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kegiatan Irigasi Perpompaaan Besar 5 Unit untuk Kelompok Tani yang tersebar di 3 Desa, kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) 4 Unit untuk 5 Kelompok Tani yang tersebar di 4 Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masyarakat	1 Laporan	30.452.927,00	1 Laporan	30.452.927,00	1 Laporan	30.452.927,00	Kab.TTU	DAK FISIK	
						Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang dikelola		Masyarakat (10 Kelompok)	2 Dokumen	460.000.510,00	2 Dokumen	460.000.510,00	2 Dokumen	460.000.510,00	Kab.TTU	DAK NON FISIK	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Dukungan sarana dan prasarana Usaha Tani Tembakau Dukungan DBH CHT	Pengembangan Tanaman Tembakau	Dukungan pengembangan tembakau untuk kelompok tiap kelompok 1 Ha. Dukungan berupa benih 100 gram/5 Ha, herbisida 10 liter, pupuk organik padat 1500 kg	5 Kelompok (Miomaffo Timur : 3 kelompok, Kota : 2 kelompok) anggota 20 orang/kelompok	5 Ha	13.067.652,00	5 Dokumen	13.067.652,00	5 Dokumen	13.067.652,00	Kab.TTU	DBH Cukai Hasil Tembakau CHT	
							Usaha pengembangan kacang hijau mengatasi dampak El Nino	Dukungan pengembangan kacang hijau berupa benih dan saprodi	Masyarakat (12 Kelompok)	4 Ha						Kab.TTU	APBD 1	
							Pengembangan Padi kaya gizi (Biofortifikasi)	Bantuan berupa benih, pupuk padat non subsidi, Pestisida	Masyarakat	500 Ha						Kab.TTU	APBN	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Melakukan Pengendalian di Titik2 yang mengalami serangan OPT. pembagian Obat2an pertanian untuk pengendalian OPT	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Masyarakat	50 Ha	16.841.958,00	50 Ha	16.841.958,00	50 Ha	16.841.958,00	Kab.TTU	APBN	
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Data Curah hujan dari 24 Kecamatan yang sangat membantu dalam menganalisa Usaha Tani yang akan mempengaruhi luas tanam dan hasil produksi	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Masyarakat	500 Ha	18.075.040,00	500 Ha	18.075.040,00	500 Ha	18.075.040,00	Kab.TTU	DAU, PAD	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang mendapatkan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok Tani	24 Kecamatan	73.000.000,00	24 Kecamatan	73.000.000,00	24 Kecamatan	73.000.000,00	Kab.TTU	APBN	
				Program Penyuluhan Pertanian		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang mendapatkan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok Tani	24 Kecamatan	24.000.000,00	24 Kecamatan	58.000.000,00	24 Kecamatan	58.000.000,00	Kab.TTU	APBN	
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1. SL Hortikultura Tomat 1 Poktan, 2. SL Perkebunan Kopi 1 Poktan, 3. SL Tanaman Pangan Padi 2 Poktan 4. SL Tanaman Pangan jagung 2 Poktan, 5. SL Perkebunan Jambu Mente 1 Poktan, 6. SL	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kelompok Tani			9 Unit	1.000.000.000,00	9 Unit	1.000.000.000,00	Kab.TTU	APBN	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Hortikultura cabe 1 Poktan.											
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Desa, kecamatan dan kabupaten	Lomba petani Berprestasi Tingkat Desa, kec dan Kab.	Jumlah Petani berprestasi tingkat Desa, kecamatan dan Kabupaten	Kelompok Tani					24 kecamatan	50.000.000,00	Kab.TTU	APBN	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Desa, kecamatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk Pestisida Alami, Eco Enzim 10 Poktan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk Pestisida Alami	Kelompok Tani					10 Unit	100.000.000,00	Kab.TTU	APBN	



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET		
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
13	Peternakan	Dinas peternakan	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Umum	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Masyarakat	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	Kab.TTU	APBN			
							Spesifik data P3KE	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Masyarakat	43,2 Laporan	2.040.000.000,00	43,2 Laporan	2.040.000.000,00	43,2 Laporan	2.040.000.000,00	Kab.TTU	APBN			
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Umum	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Masyarakat	1 Laporan	42.000.000,00	1 Laporan	42.000.000,00	1 Laporan	42.000.000,00	1 Laporan	42.000.000,00	Kab.TTU	APBN	
							Umum	Jumlah kader zoonosis	Masyarakat	5 Orang	150.575.000,00	5 Orang	150.575.000,00	5 Orang	150.575.000,00	Kab.TTU	APBN			



Matriks 4.1. Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2026

NO	SEKTOR / URUSAN	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DETAIL AKTIVITAS SUB KEGIATAN		SASARAN PENERIMA MANFAAT	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI PRIORITAS (Desa)	SUMBER PENDANAAN	KET
							8	9		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kotora	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Umum	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Masyarakat	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	Kab.TTU	APBN	
						Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Umum	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	Kab.TTU	APBN	



BAB V

PRIORITAS PROGRAM

5.1. PRIORITAS WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

5.2. PRIORITAS WILAYAH BIDANG KESEHATAN

5.3. PRIORITAS WILAYAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

5.4. PRIORITAS WILAYAH BIDANG KETAHANAN PANGAN

5.5. PRIORITAS WILAYAH BIDANG INFRASTRUKTUR



BAB V
LOKASI PROGRAM

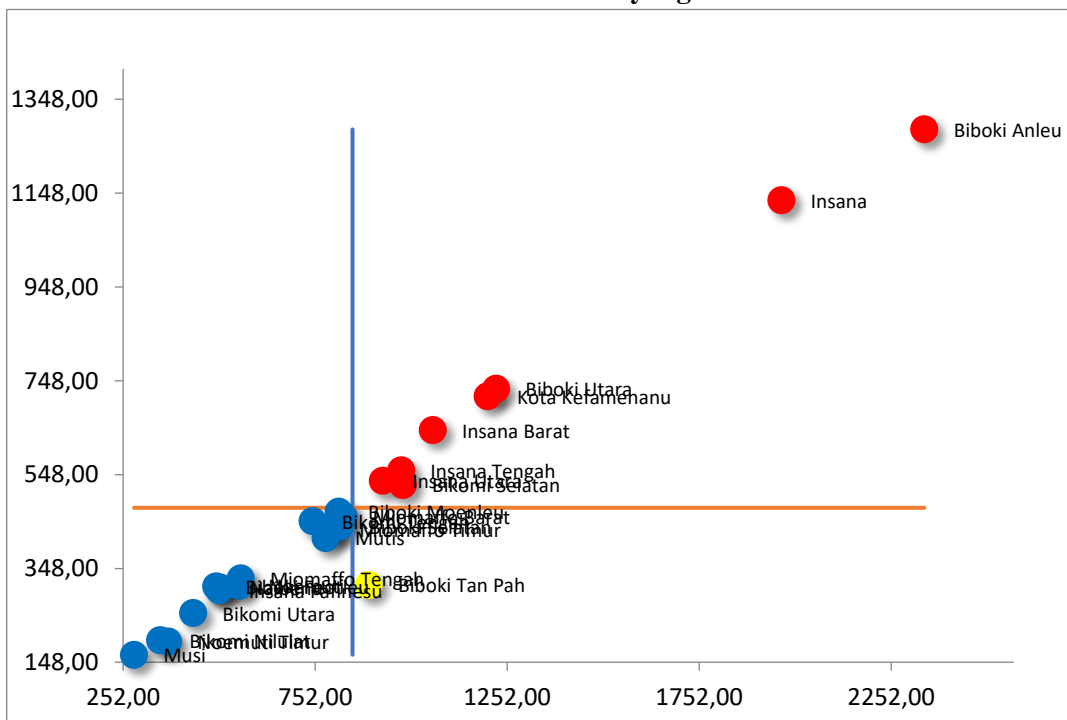
5.1. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan

A. Analisis Kuadran Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun Terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang bersekolah SD dan SMP

Prioritas wilayah bidang pendidikan diperoleh dengan membandingkan persentase penduduk usia 6-18 tahun Desil 1 dengan jumlah anak usia 6-18 tahun Desil 1 yang bersekolah di bangku SD dan SMP pada setiap kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini dilakukan sebagai acuan dalam penetapan lokus dalam pensasaran program, kegiatan, sub kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dengan analisis perbandingan ini maka dapat diketahui lokasi kecamatan dengan pengelompokan tingkatan prioritas. Dari kuadran akan terlihat lokus kecamatan yang akan menjadi prioritas utama bidang pendidikan untuk diintervensi dalam upaya memperbaiki Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Kecamatan dengan jumlah penduduk desil 1 usia 6-18 tahun yang bersekolah sangat tinggi akan mendapat prioritas 1 (merah). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk usia 6-18 tahun yang bersekolah, tinggi akan mendapat prioritas 2 (kuning). Selanjutnya, kecamatan dengan kategori penduduk usia 6-18 tahun desil 1 yang sedang akan mendapat prioritas 3 (Hijau). Dan kecamatan dengan kategori penduduk usia 6-18 desil 1 tahun yang berkategori rendah akan mendapat prioritas 4 (Biru).

Gambar 5.1. Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun Terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang bersekolah SD dan SMP



Data : P3KEKEMENKO.PMK



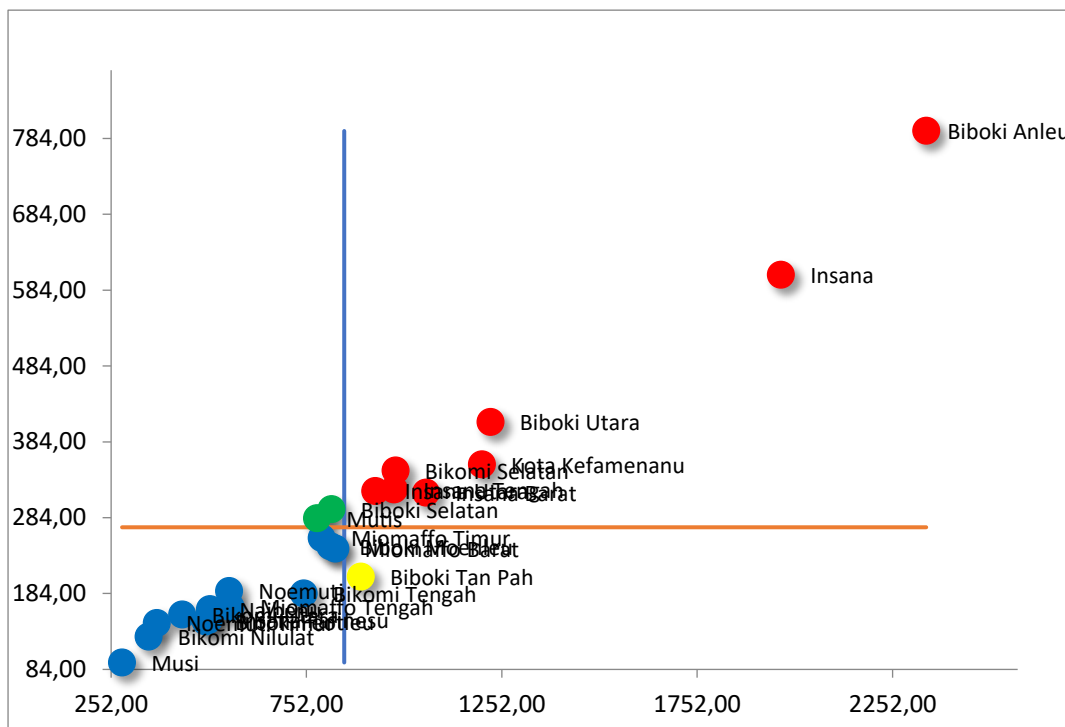
Tabel 5.1. Lokasi Prioritas Jumlah Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun Terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang bersekolah SD dan SMP

No	Kecamatan	Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun	Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang bersekolah SD dan SMP	Prioritas Intervensi
Prioritas I				
1	Biboki Anleu	2338	1284	1
2	Insana	1966	1133	1
3	Kota Kefamenanu	1201	715	1
4	Biboki Utara	1223	731	1
5	Insana Barat	1058	643	1
6	Insana Utara	928	535	1
7	Bikomi Selatan	980	526	1
8	Insana Tengah	976	557	1
Prioritas II				
1	Biboki Tan Pah	891	313	2
Prioritas III				
1	Miomaffo Timur	791	431	4
2	Miomaffo Barat	826	459	4
3	Biboki Selatan	816	437	4
4	Noemuti	554	311	4
5	Noemuti Timur	369	192	4
6	Miomaffo Tengah	558	327	4
7	Musi	280	164	4
8	Mutis	779	413	4
9	Bikomi Tengah	745	449	4
10	Bikomi Nilulat	348	195	4
11	Bikomi Utara	434	253	4
12	Naibenu	505	307	4
13	Insana Fafinesu	502	302	4
14	Biboki Moenleu	813	469	4
15	Biboki Feotleu	494	310	4



B. Analisis Kuadran Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang tidak/belum bersekolah SD dan SMP

Gambar 5.2. Analisis Kuadran Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang tidak/belum bersekolah SD dan SMP



Data : P3KEKEMENKO.PMK

Tabel 5.2. Lokasi Prioritas Jumlah Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun Terhadap Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang tidak/belum bersekolah SD dan SMP

No	Kecamatan	Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun	Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang tidak/belum bersekolah SD dan SMP	Prioritas Intervensi
Prioritas I				
1	Biboki Anleu	2338	794	1
2	Insana	1966	604	1
3	Biboki Utara	1223	410	1
4	Kota Kefamenanu	1201	354	1
5	Bikomi Selatan	980	346	1
6	Insana Utara	928	319	1
7	Insana Tengah	976	321	1
8	Insana Barat	1058	317	1
Prioritas II				
1	Biboki Tan Pah	891	206	2
Prioritas III				
1	Biboki Selatan	816	295	3
2	Mutis	779	283	3
Prioritas IV				
1	Miomaffo Timur	791	257	4
2	Miomaffo Barat	826	243	4
3	Noemuti	554	187	4

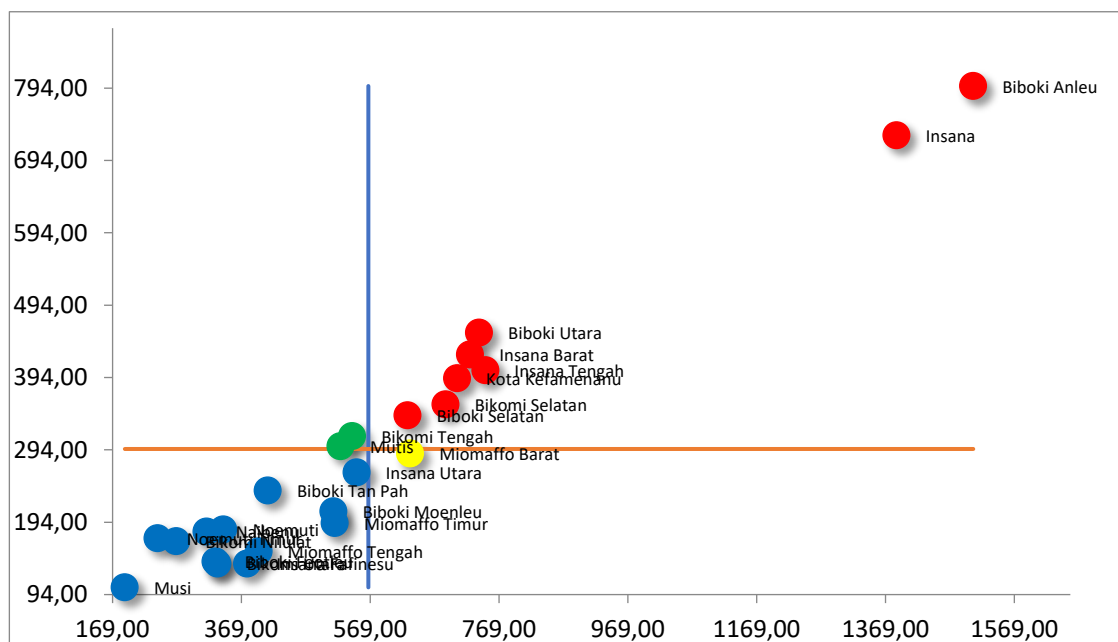


No	Kecamatan	Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun	Jumlah Individu Desil 1 Usia 6-18 Tahun yang tidak/belum bersekolah SD dan SMP	Prioritas Intervensi
4	Noemuti Timur	369	145	4
5	Miomaffo Tengah	558	166	4
6	Bikomi Tengah	745	184	4
7	Bikomi Nilulat	348	127	4
8	Bikomi Utara	434	156	4
9	Naibenu	505	163	4
10	Insana Fafinesu	502	149	4
11	Biboki Moenleu	813	246	4
12	Biboki Feotleu	494	147	4
13	Musi	280	93	4

5.2. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan

Pada data P3KE terdapat variabel resiko stunting sehingga variabel ini yang dipilih untuk dianalisis dalam penentuan lokasi prioritas bidang kesehatan yang berhubungan dengan prevalensi Stunting. Definisi Keluarga beresiko stunting pada Rencana Aksi Nasional adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/ calon pengantin/ Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/ anak usia 24 (dua puluh empat) – 59. Dari analisis kuadran di bawah ini dapat di ketahui lokus prioritas pertama untuk mengintervensi program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menurunkan angka stunting. Dari analisis diagram tersebut wilayah kecamatan yang mempunyai jumlah keluarga tinggi dan jumlah keluarga beresiko stunting tinggi akan mendapatkan prioritas 1 (merah).

Gambar 5.3. Analisis Kuadran Jumlah Keluarga Desil 1 terhadap Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting



Sumber Data : Olahan Tim Penyusun RPKD



Tabel 5.3. Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 terhadap Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting

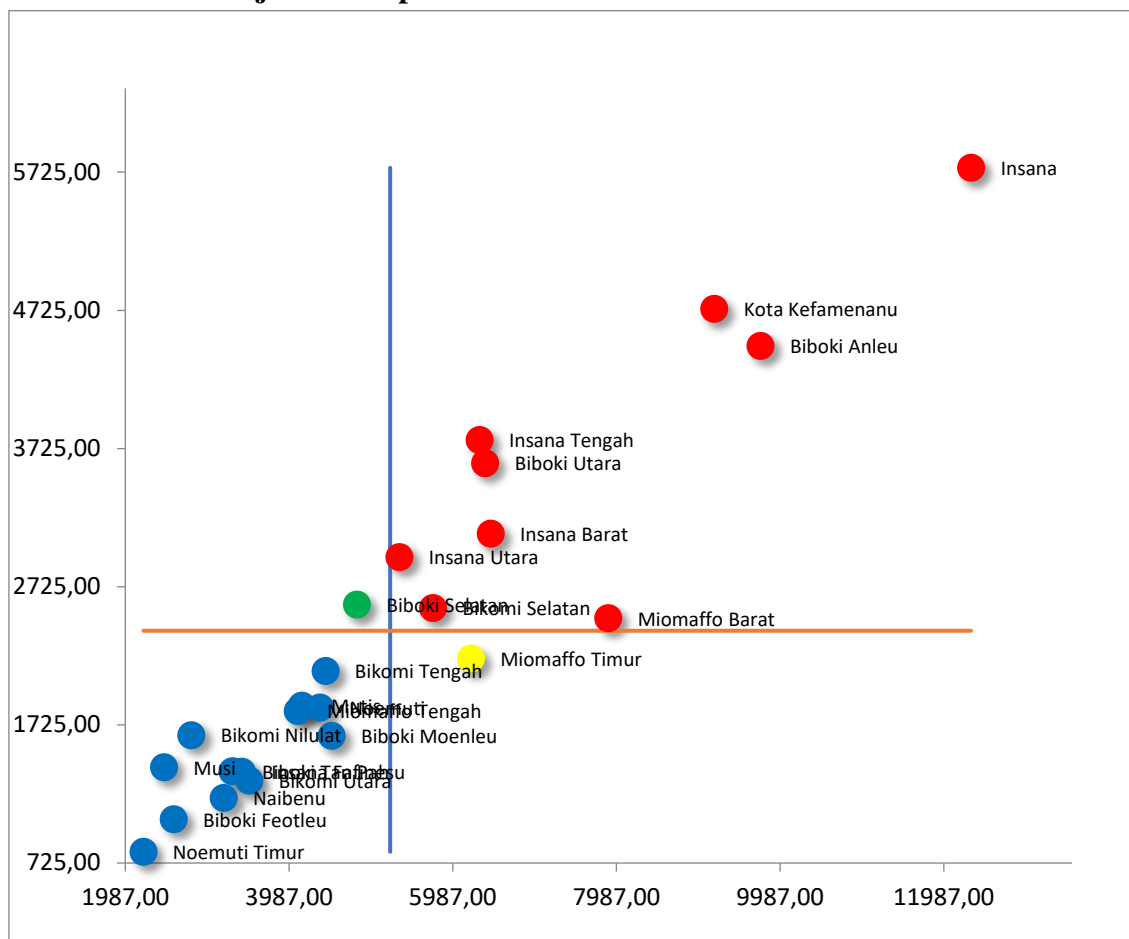
No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Desil 1	Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting	Prioritas Intervensi
Prioritas I				
1	Kota Kefamenanu	704	393	1
2	Biboki Utara	738	456	1
3	Biboki Anleu	1505	797	1
4	Insana	1386	729	1
5	Biboki Selatan	627	342	1
6	Bikomi Selatan	686	357	1
7	Insana Barat	724	426	1
8	Insana Tengah	748	404	1
Prioritas II				
1	Miomaffo Barat	631	289	2
Prioritas III				
1	Mutis	523	299	3
2	Bikomi Tengah	541	313	3
Prioritas III				
1	Miomaffo Timur	514	193	4
2	Noemuti	341	184	4
3	Insana Utara	548	263	4
4	Noemuti Timur	239	172	4
5	Miomaffo Tengah	396	154	4
6	Musi	188	104	4
7	Bikomi Nilulat	268	168	4
8	Bikomi Utara	332	137	4
9	Naibenu	315	181	4
10	Insana Fafinesu	378	137	4
11	Biboki Tan Pah	410	238	4
12	Biboki Moenleu	512	209	4
13	Biboki Feotleu	329	140	4

5.3. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

Penentuan prioritas wilayah bidang ketenagakerjaan dilakukan dengan membandingkan antara Jumlah penduduk usia 15-60 tahun yang tidak bekerja di bandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-60 tahun. Target yang ingin di capai dalam penanggulangan kemiskinan pada bidang ketenagakerjaan adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan membandingkan Jumlah penduduk usia kerja yang belum/tidak bekerja per Kecamatan akan kita peroleh Kecamatan yang menjadi Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3 dan Prioritas 4. Dengan membandingkan Jumlah penduduk pada usia kerja yang tidak/belum bekerja dengan jumlah penduduk akan kita peroleh kuadran prioritas wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk usia 15-60 tahun desil 1 dan semakin banyak yang tidak bekerja akan mendapatkan prioritas 1 (merah).



Gambar 5.4. Analisis Kuadran Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun yang tidak bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun



Data : P3KEKEMENKO.PMK

Tabel 5.4. Lokasi Prioritas Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun yang tidak bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Desil 1	Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting	Prioritas Intervensi
Prioritas I				
1	Biboki Anleu	1228	831	1
2	Insana	1184	807	1
3	Biboki Utara	676	493	1
4	Kota Kefamenanu	565	416	1
5	Insana Barat	549	406	1
6	Bikomi Selatan	560	375	1
7	Insana Tengah	535	370	1
8	Biboki Selatan	489	330	1
Prioritas II				
1	Miomaffo Barat	560	309	2
2	Biboki Moenleu	473	312	2
Prioritas III				



No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Desil 1	Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting	Prioritas Intervensi
1	Insana Utara	421	331	3
Prioritas IV				
1	Noemuti	282	197	4
2	Noemuti Timur	170	112	4
3	Miomaffo Tengah	333	226	4
4	Musi	168	130	4
5	Miomaffo Timur	389	266	4
6	Mutis	437	298	4
7	Bikomi Tengah	405	303	4
8	Bikomi Nilulat	226	154	4
9	Bikomi Utara	289	168	4
10	Naibenu	287	188	4
11	Insana Fafinesu	247	166	4
12	Biboki Tan Pah	341	215	4
13	Biboki Feotleu	309	180	4

5.4. Prioritas Wilayah Bidang Ketahanan Pangan

Target yang ingin di capai dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada bidang ketahanan pangan adalah meningkatnya ketersediaan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki keunggulan di bidang pertanian dan perikanan, tetapi dalam hal produksi Kabupaten Timor Tengah Utara masih berada di posisi ke 15 dari 22 Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam bidang pertanian memiliki jenis tanaman unggulan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat seperti Padi dan Jagung untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya pada jenis tanaman tersebut maka berikut ini adalah kecamatan-kecamatan yang bisa di jadikan sebagai lokus pengembangan program-program pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

1. Padi Sawah



Kecamatan-kecamatan yang dapat dijadikan sebagai lokus pengembangan padi sawah, sebagai upaya peningktan ketahanan pangan masyarakat yakni kecamatan :Kecamatan Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Utara, Biboki Tan Pah, Insana, Insana Barat, Bikomi Selatan, Noemuti Timur, Noemuti, Biboki Anleu, dan Biboki Moenleu.



2. Jagung



Kecamatan-kecamatan yang dapat dijadikan sebagai lokus pengembangan jagung, sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat yakni kecamatan : Kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Nilulat, Musi, Kota Kefamenanu, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Naibenu, Insana Fafinesu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Selatan, dan Biboki Tan Pah

3. Potensi Perikanan



Kawasan Pantai Utara di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki sumberdaya perikanan potensial. Kawasan Pantai Utara terdiri dari Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Monleu dan Kecamatan Biboki Anleu. Potensi perikanan dapat didukung dengan pengembangan transportasi yang terpadu dan rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri. Pada Kawasan pantai utara juga memiliki Kawasan Terpadu Mandiri (KTM)

Ponu di Kecamatan Biboki Anleu.

5.5. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur

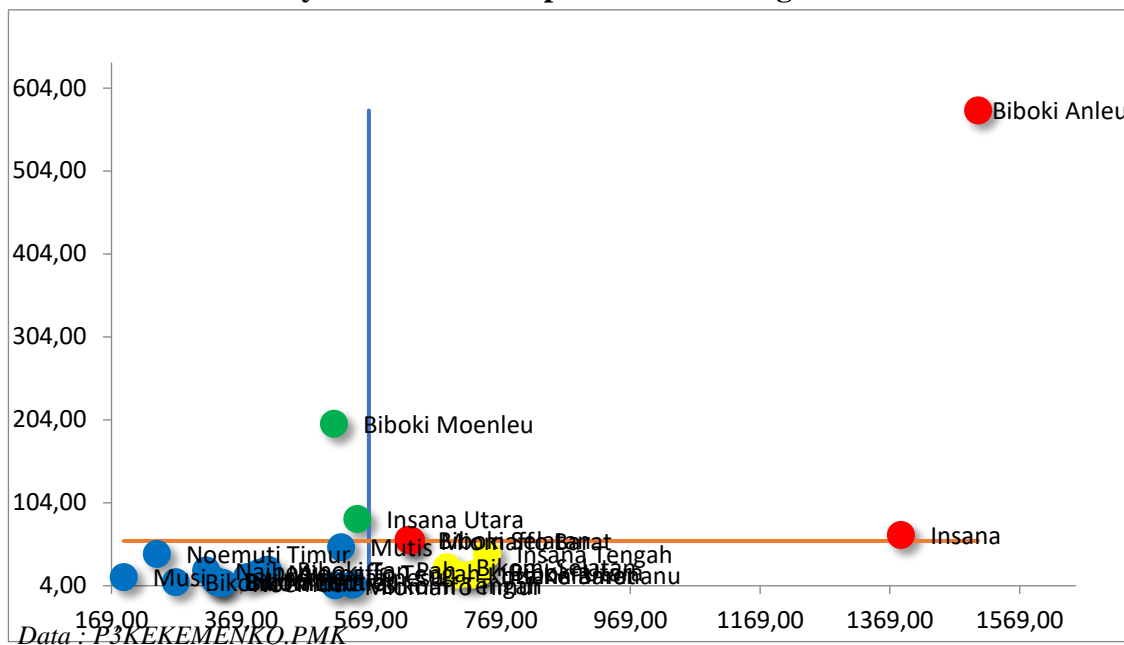
Lokasi Prioritas wilayah bidang infrastruktur dasar ditentukan dengan melakukan dua analisis kuadran yakni Jumlah Kelurga Desil satu terhadap Jumlah Keluarga Desil 1 yang tidak memiliki Rumah Layak Huni dan Jumlah Keluarga Desil 1 Terhadap Jumlah Kuluarga yang tidak memiliki tempat Buang Air Besar.

A. Kepemilikan Rumah tidak Layak Huni.

Dari hasil analisis kuadran dapat di ketahui bahwa yang menjadi lokasi prioritas pertama dalam upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk ketersediaan rumah layak huni.



Gambar 5.5. Analisis Kuadran Jumlah Keluarga Desil 1 yang tidak memiliki Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Keluarga Desil 1



Tabel 5.5. Lokasi Prioritas Jumlah Keluarga Desil 1 yang tidak memiliki Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Keluarga Desil 1

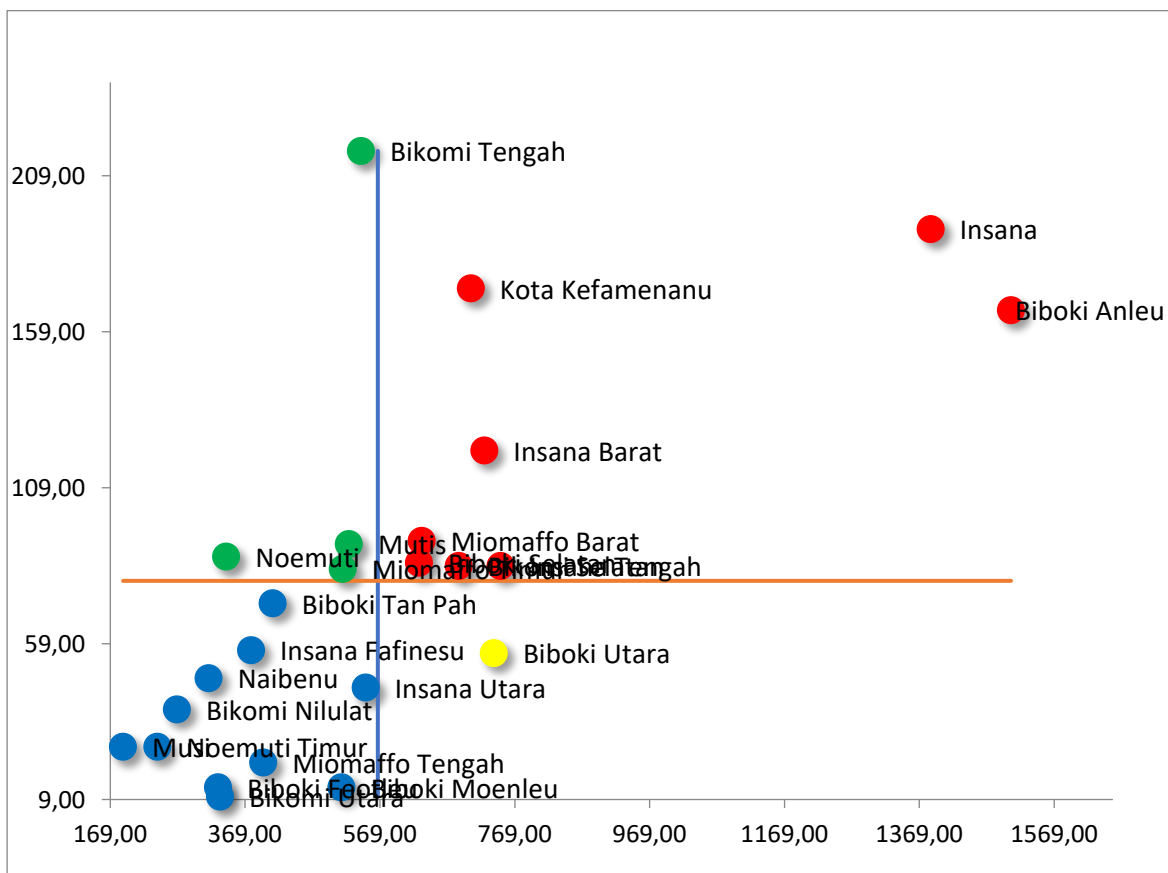
No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Desil 1	Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting	Prioritas Intervensi
Prioritas I				
1	Miomaffo Barat	631	58	1
2	Biboki Selatan	627	59	1
3	Biboki Anleu	1505	577	1
4	Insana	1386	65	1
Prioritas II				
1	Kota Kefamenanu	704	17	2
2	Biboki Utara	738	21	2
3	Insana Barat	724	17	2
4	Insana Tengah	748	42	2
5	Bikomi Selatan	686	26	2
Prioritas III				
1	Insana Utara	548	84	3
2	Biboki Moenleu	512	199	3
Prioritas III				
1	Noemuti Timur	239	42	4
2	Miomaffo Tengah	396	19	4
3	Musi	188	14	4
4	Mutis	523	50	4
5	Bikomi Tengah	541	5	4
6	Bikomi Nilulat	268	8	4
7	Bikomi Utara	332	8	4



No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Desil 1	Jumlah Keluarga Desil 1 Beresiko Stunting	Prioritas Intervensi
8	Naibenu	315	22	4
9	Miomaffo Timur	514	4	4
10	Noemuti	341	7	4
11	Insana Fafinesu	378	14	4
12	Biboki Tan Pah	410	23	4
13	Biboki Feotleu	329	10	4

B. Kepemilikan Tempat Buang Air Besar (BAB)

Gambar 5.6. Analisis Kuadran Jumlah Keluarga Desil 1 Terhadap Jumlah Keluarga Desil yang tidak memiliki tempat Buang Air Besar.



Data : P3KEKEMENKO.PMK

Tabel 5.6. Lokasi Prioritas Jumlah Keluarga Desil 1 yang tidak memiliki Tempat Buang Air Besar terhadap Jumlah Keluarga Desil 1

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Desil 1	Jumlah Keluarga Desil yang tidak memiliki tempat Buang Air Besar	Prioritas Intervensi
Prioritas I				
	Biboki Anleu	1505	166	1
	Insana	1386	192	1
	Miomaffo Barat	631	92	1



No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Desil 1	Jumlah Keluarga Desil yang tidak memiliki tempat Buang Air Besar	Prioritas Intervensi
	Biboki Selatan	627	85	1
	Kota Kefamenanu	704	173	1
	Insana Barat	724	121	1
	Insana Tengah	748	84	1
	Bikomi Selatan	686	84	1
Prioritas II				
	Biboki Utara	738	56	2
Prioritas III				
	Miomaffo Timur	514	83	3
	Noemuti	341	87	3
	Mutis	523	91	3
	Bikomi Tengah	541	217	3
Prioritas III				
	Insana Utara	548	45	4
	Noemuti Timur	239	26	4
	Miomaffo Tengah	396	21	4
	Musi	188	26	4
	Bikomi Nilulat	268	38	4
	Bikomi Utara	332	10	4
	Naibenu	315	48	4
	Insana Fafinesu	378	57	4
	Biboki Tan Pah	410	72	4
	Biboki Moenleu	512	13	4
	Biboki Feotleu	329	13	4